



BUPATI KUDUS
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2016

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 175);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
5. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Kudus.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2016 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025.
- (2) RKPD Tahun 2016 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2016.

Pasal 3

RKPD Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 28 Mei 2015

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 29 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2015 NOMOR 20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

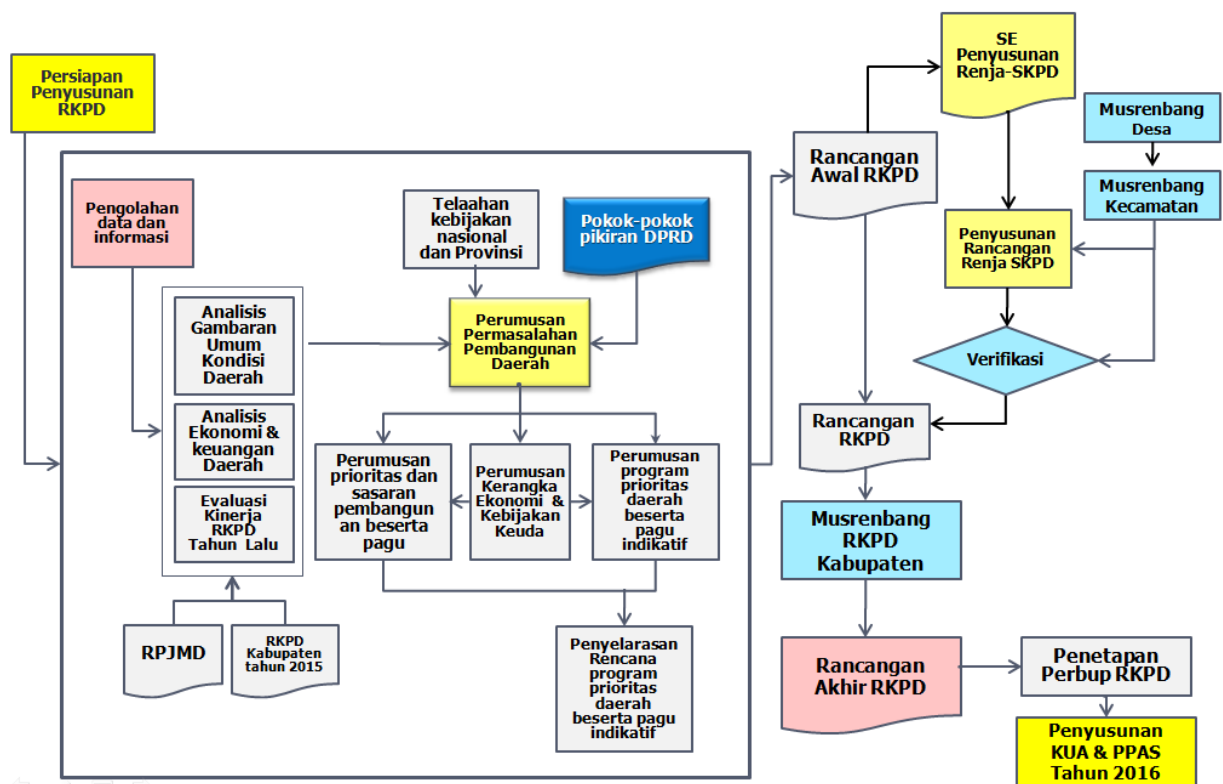
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2016 merupakan pelaksanaan tahun ke-3 RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018. Penyusunan RKPD Tahun 2016 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Penyusunan RKPD Kabupaten Kudus mengacu pada RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016, dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016.

Sebagaimana tercantum dalam RPJMD, cita-cita pembangunan Kabupaten Kudus yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2013-2018 yaitu “Terwujudnya Kudus Yang Semakin Sejahtera”. Pembangunan pada tahun 2016 RPJMD diarahkan untuk melanjutkan tahapan pembangunan tahun sebelumnya yang belum selesai. Tema pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2016 yaitu : “Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan publik serta perekonomian daerah dengan didukung infrastruktur yang memadai.” Arah kebijakan pembangunan difokuskan untuk pengembangan fasilitasi permodalan UMKM dan perluasan pemasaran produk UMKM, peningkatan mutu pendidikan, perluasan pelayanan kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kerja, pengembangan infrastruktur dan sarpras penunjang, penguatan birokrasi pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik serta pelestarian budaya daerah. Di samping itu dalam peningkatan infrastruktur diupayakan pendekatan kewilayahan dengan prioritas tahun 2016 di Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Mejobo dan Kecamatan Bae. Fokus pembangunan diarahkan untuk percepatan pencapaian target dan prioritas sasaran pembangunan pada 4 (empat) pilar pembangunan, meliputi : (1) pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; (2) mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang terjangkau dan berkualitas; (3) tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau; dan (4) perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh.

Proses penyusunan RKPD Tahun 2016 diawali dengan Persiapan penyusunan RKPD, dilanjutkan dengan penyusunan rancangan awal RKPD, kemudian penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan terakhir adalah penetapan RKPD tahun 2016. Rancangan awal RKPD yang disusun dengan pendekatan teknokratis selanjutnya memperoleh masukan dari rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD menjadi Rancangan RKPD sebagai bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Musrenbang merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang efektif dan partisipatif. Penyelenggaraan Musrenbang dilaksanakan secara bertahap dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten. Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Kudus Tahun 2015 berpedoman pada Surat Edaran Bupati Kudus tanggal 7 Januari 2015 Nomor 050/0029.A/16/2015 perihal Pedoman Umum Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2015. Hasil Musrenbang menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD Tahun 2016 untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Secara rinci proses penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2016 disajikan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Diagram Alir Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2016

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2016 menjadi dasar dalam perumusan rancangan akhir Renja SKPD Tahun 2016, dan menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016. KUA dan PPAS tersebut selanjutnya dibahas oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD untuk disepakati menjadi Nota Kesepakatan KUA-PPAS yang selanjutnya sebagai dasar pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2016.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2016 disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018.

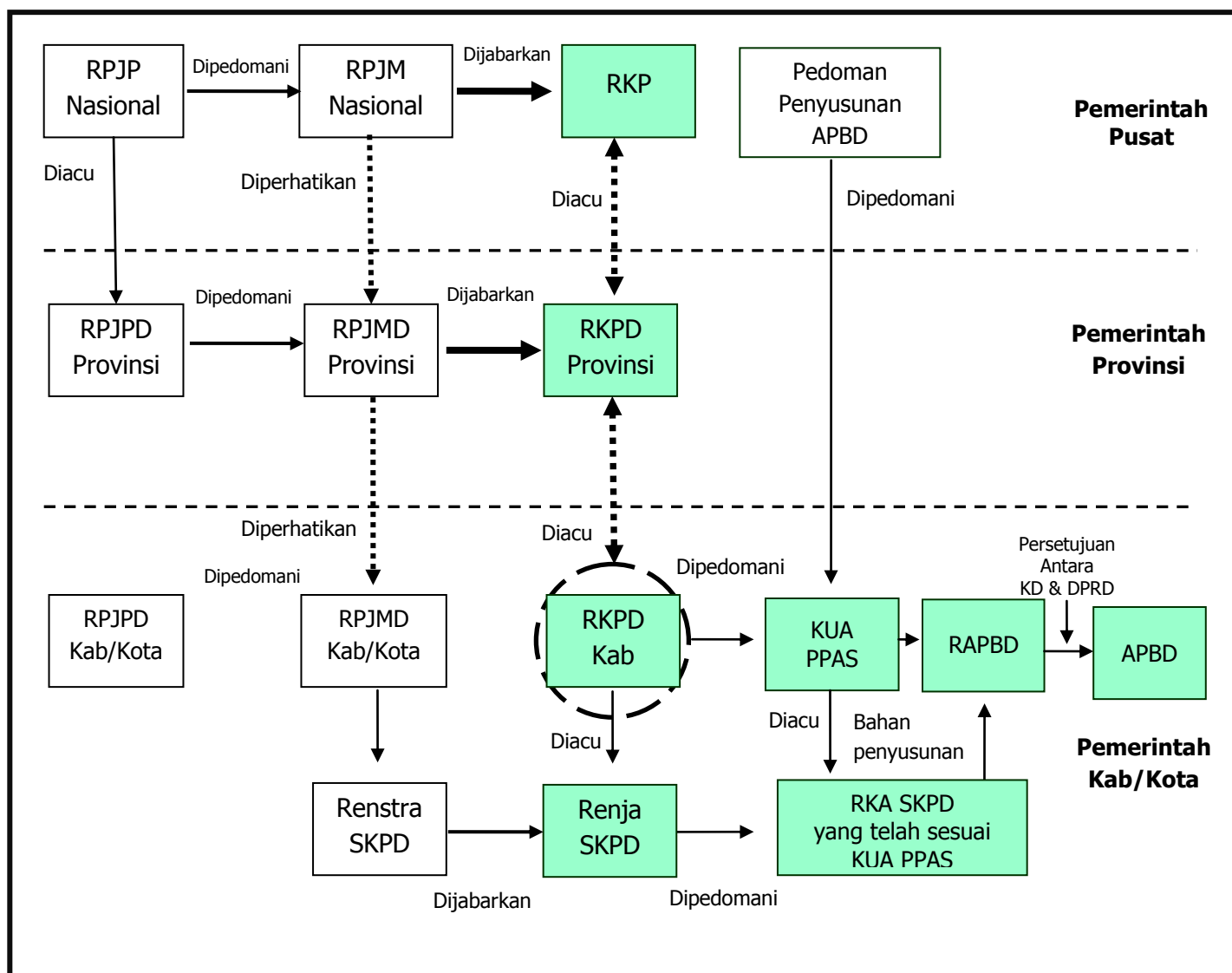
1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Kudus merupakan perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018. RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 merupakan pelaksanaan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2016 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif, penyusunannya mengacu pada RKP Tahun 2016 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016. RKPD tahun 2016 dijadikan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD Tahun 2016.

Pada tingkat SKPD, dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dijadikan sebagai pedoman dalam penyempurnaan rancangan akhir Renja SKPD dengan berpedoman pada Renstra SKPD Tahun 2013-2018. Renja SKPD setelah disahkan melalui Keputusan Bupati dan ditetapkan Kepala SKPD menjadi Renja SKPD akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dengan mengacu pada KUA dan PPAS yang telah disepakati oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD. RKA SKPD yang telah sesuai dengan KUA dan PPAS selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. RAPBD yang telah disetujui Kepala Daerah dan pimpinan DPRD kemudian dievaluasi oleh Gubernur, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi APBD.

Hubungan RKPD Kabupaten Kudus dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah lainnya secara sistematis didiskripsikan dalam bentuk diagram alir seperti pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Hubungan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2016 dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Kabupaten Kudus tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 ke dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2016 dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD tahun-tahun sebelumnya.
2. Menciptakan sinergi program kegiatan pembangunan antar wilayah (kecamatan), antar kewenangan urusan pembangunan, antar SKPD dan antar struktur pemerintahan.
3. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya yang ada dalam rangka pembangunan daerah.
4. Menyelaraskan pencapaian sasaran, dan prioritas program pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha di Kabupaten Kudus.
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika RKPD ini disusun terdiri dari enam bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD yang memuat ketentuan secara langsung dengan penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun daerah.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan keterkaitan RKPD sebagai penjabaran RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD sampai dengan penganggaran di dalam RAPBD dalam suatu alur mekanisme perencanaan.

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan sistematika RKPD terkait dengan pengaturan serta penjelasan ringkas isi dari setiap bab.

1.5 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RKPD tahun rencana.

Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan potensi dan kecenderungan daerah dari aspek geografi, demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Mencakup telaahan hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dengan RPJMD.

2.3 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Memuat rumusan usulan program dan kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum dibahas dalam musrenbang agenda kerja DPRD tahun 2016.

2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah

Memuat penjelasan terhadap permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi daerah tahun 2014 dan tahun 2015, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2016.

3.2 Arah dan Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Mengemukakan Visi dan Misi serta sasaran pembangunan daerah yang merupakan sasaran pembangunan lima tahunan.

4.2 Prioritas Pembangunan

Mengemukakan prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dikaitkan dengan program yang merupakan jawaban permasalahan pada tahun rencana.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
Mengemukakan perencanaan program dan kegiatan prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD.

Bab VI Penutup
Mengemukakan tentang kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2016.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah bagian Utara dengan total seluas 42.516 Ha atau sekitar 1,31% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Adapun wilayah administratifnya berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati
- Sebelah Timur : Kabupaten Pati
- Sebelah Selatan : Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan
- Sebelah Barat : Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak

Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 Kecamatan yang terdiri dari 123 desa dan 9 kelurahan. Adapun penjabaran mengenai luas wilayah, banyaknya desa, kelurahan, dukuh, RT dan RW dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
 Pembagian dan Luas Wilayah Administrasi
 Kabupaten Kudus Tahun 2014

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Desa	Kelurahan	Dukuh	RW	RT
1	Kaliwungu	3.271	15	0	48	67	442
2	Kota	1.047	16	9	60	110	495
3	Jati	2.630	14	0	51	79	381
4	Undaan	7.177	16	0	31	63	357
5	Mejobo	3.677	11	0	32	69	341
6	Jekulo	8.292	12	0	45	85	443
7	Bae	2.332	10	0	38	51	285
8	Gebog	5.506	11	0	44	82	435
9	Dawe	8.584	18	0	85	109	581
Jumlah		42.516	123	9	434	715	3.760

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2014

2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Kudus terletak antara 06°48'37" - 06°51'55" Lintang Selatan dan 110°47'42" - 110°53'05" Bujur Timur. Posisi Kabupaten Kudus juga terletak pada jalur perekonomian nasional yaitu dilewati jalan nasional pantura sehingga sangat strategis. Kondisi wilayah Kabupaten Kudus merupakan daerah yang berdekatan dengan pesisir Kabupaten Demak, Jepara dan

Kabupaten Pati serta sebagian di bagian utara merupakan pegunungan Muria dan Pati Ayam.

3. Topografi

Wilayah Kabupaten Kudus memiliki topografi yang beragam yaitu ketinggian wilayah yang berkisar antara 5-1.600 m di atas permukaan air laut. Wilayah yang memiliki ketinggian terendah, yaitu 5 meter di atas permukaan air laut berada di Kecamatan Undaan. Sedangkan wilayah dengan ketinggian tertinggi berada di Kecamatan Dawe, yang berupa dataran tinggi dengan ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Kudus memiliki kelerengan yang bervariasi, yaitu :

1. Kelerengan 0 – 8%

Kelerengan ini memiliki bentuk lahan berupa dataran koluvial dengan relief datar. Kelerengan ini terdapat di Kecamatan Undaan, Kecamatan Kota, Kecamatan Jati, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Mejobo, sebagian Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Bae.

2. Kelerengan 8 – 15%

Kelerengan ini memiliki bentuk lahan berupa dataran koluvial dengan relief landai. Kelerengan ini terdapat di sebagian Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe sebelah selatan, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Mejobo.

3. Kelerengan 15 – 25%

Kelerengan ini memiliki bentuk lahan berupa perbukitan struktural dengan relief bergelombang dan agak curam. Kelerengan ini terdapat di Kecamatan Dawe dan Gunung Pati Ayam bagian Timur.

4. Kelerengan 25 – 45%

Kelerengan ini memiliki bentuk lahan perbukitan struktural dengan relief berbukit kecil dan curam. Kelerengan ini terdapat di daerah Gunung Pati Ayam bagian utara, Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe, Kecamatan Jekulo.

5. Kelerengan > 45%

Kelerengan ini memiliki bentuk lahan perbukitan struktural dengan relief bergelombang dan sangat curam. Kelerengan ini terdapat di sebagian Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe dan Kecamatan Gebog.

4. Geologi

Kabupaten Kudus memiliki struktur tanah yang bervariasi mulai dataran rendah, perbukitan sampai

pegunungan. Berikut ini adalah jenis tanah yang terdapat di daerah Kabupaten Kudus dan penyebarannya :

- a. Jenis tanah andosol, tersebar di Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe.
- b. Jenis tanah grumosol mediteran, tersebar di Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe.
- c. Jenis tanah latosol merah, penyebarannya meliputi Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe.
- d. Jenis tanah planosol coklat, penyebarannya di Kecamatan Jati, Kecamatan Undaan, Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Jekulo.
- e. Jenis tanah latosol coklat, penyebarannya di Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe.
- f. Jenis tanah litosol grumosol, penyebarannya di Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe.
- g. Jenis tanah mediteran, penyebarannya di Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe, Kecamatan Bae, Kecamatan Kota, Kecamatan Mejobo, Kecamatan Jati dan Kecamatan Kaliwungu.
- h. Jenis tanah aluvial coklat, tersebar di Kecamatan Jati, Kecamatan Undaan, Kecamatan Jekulo dan dan Kecamatan Kaliwungu.

5. Hidrologi

a. Air Permukaan

Air permukaan yang dimaksud disini adalah sungai yang berair sepanjang musim dan sungai yang bersifat musiman (*intermittent*). Sungai yang mengalir sepanjang tahun diantaranya adalah Kali Serang, dimana sungai tersebut sejak tahun 1968 ditangani oleh proyek Jratunseluna, Departemen Pekerjaan Umum, untuk dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi, air bersih dan tenaga listrik. Di daerah perbukitan khususnya pada musim kemarau, sungai-sungai menjadi kering, setempat dijumpai sungai yang berair dengan debit sangat kecil.

Secara keseluruhan sistem jaringan drainase di Kabupaten Kudus terbagi menjadi 4 (empat) sub sistem yaitu :

- 1) Subsistem Kali Wulan, menampung aliran dari drainase sekunder Kali Gelis, Kali Kondang dan Kali Kencing;
- 2) Subsistem SWD-1 menampung aliran dari drainase sekunder Kali Sumber, Kali Jaranan, Kali Sat/ Kali Beku dan Kali Serut;

- 3) Subsistem SWD-2 menampung aliran drainase sekunder Kali Tali, Kali Jember, dan Kali Srabi;
- 4) Subsistem Kali Juana-1 yang aliran dari semua drainase sekunder disebelah timur Kali Gelis dan Kali Kencing, seperti Kali Tumpang, Kali Dawe, Kali Jumirah, dan Kali Ngeseng.

b. Air Bawah Tanah

Berdasarkan atas jumlah, mutu dan kemudahan untuk mendapatkan air tanahnya, di Kabupaten Kudus dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) wilayah potensi air tanah yaitu :

- 1) Potensi air tanah sedang pada Akuifer Dangkal dan tinggi pada Akuifer Dalam.
- 2) Potensi air tanah sedang pada Akuifer Dangkal dan Akuifer Dalam.
- 3) Potensi air tanah rendah pada Akuifer Dangkal dan sedang pada Akuifer Dalam.
- 4) Potensi air tanah rendah pada Akuifer Dangkal dan Akuifer Dalam.
- 5) Potensi air tanah nihil pada Akuifer Dangkal dan rendah pada Akuifer Dalam.
- 6) Potensi air tanah nihil pada Akuifer Dangkal dan Akuifer Dalam.

6. Klimatologi

Kabupaten Kudus secara umum dipengaruhi oleh zona iklim tropis basah. Bulan basah jatuh antara bulan Oktober – Mei dan bulan kering terjadi antara Juni – September, sedang bulan paling kering jatuh sekitar bulan September. Curah hujan yang jatuh di Kabupaten Kudus berkisar antara 2.000 – 3.000 mm/tahun, curah hujan tertinggi terjadi di daerah puncak Gunung Muria, yaitu antara 3.500 – 5.000 mm/tahun.

Temperatur tertinggi di wilayah Kabupaten Kudus berkisar pada 30,5⁰C dan terendah berkisar pada 19,6⁰C dengan temperatur rata-rata 28⁰C. Angin yang bertiup adalah angin barat dan angin timur yang bersifat basah dengan kelembaban sekitar 74%. Kelembaban rata-rata bulanan berkisar antara 69%-78,5%, angin umumnya bertiup dari arah barat dengan kecepatan minimum 5 km/jam, kecepatan maksimum mencapai 50 km/jam.

Tabel 2.2
Banyaknya Hari Hujan dirinci per Bulan
Di Kabupaten Kudus Tahun 2011 - 2014 (Hari)

Bulan	2011	2012	2013	2014
Januari	21	18	20	24
Februari	16	11	14	10
Maret	21	13	14	8
April	15	7	13	11
Mei	6	5	12	5
Juni	3	3	10	5
Juli	6	1	8	9
Agustus	0	0	1	3
September	3	0	1	1
Oktober	9	6	5	2
November	15	7	8	7
Desember	13	13	17	14
Jumlah	128	84	123	99

Lokasi : Colo Dawe, Ketinggian : 700 m/DPL

Sumber : Stasiun Meteorologi Pertanian Kudus Tahun 2015

Tabel 2.3
Banyaknya Curah Hujan dirinci Per Bulan
Di Kabupaten Kudus Tahun 2011 - 2014 (mm)

Bulan	2011	2012	2013	2014
Januari	362	572	747	1426
Februari	282	233	381	192
Maret	432	243	405	156
April	158	145	366	186
Mei	83	69	234	83
Juni	19	73	146	129
Juli	130	5	264	151
Agustus	0	0	7	104
September	61	0	5	34
Oktober	64	30	44	16
November	106	125	195	184
Desember	273	183	631	274
Jumlah	1.970	1.678	3425	2935

Lokasi : Colo Dawe, Ketinggian : 700 m/DPL

Sumber : Stasiun Meteorologi Pertanian Kudus Tahun 2015

7. Penggunaan Lahan

Luas wilayah Kabupaten Kudus tercatat seluas 42.516 ha. Wilayah tersebut terdiri dari lahan pertanian seluas 28.266 ha (66,48%) dan lahan bukan pertanian seluas 14.250 ha (33,52%). Lahan pertanian terbagi atas lahan sawah seluas 20.629 ha (48,52%) dan bukan lahan sawah seluas 7.637 ha (17,96%), sedangkan lahan bukan pertanian terbagi atas rumah/halaman seluas 9.355 ha (22%), hutan negara seluas 1.882 ha (4,43%), rawa-rawa seluas 60 ha (0,14%) dan lainnya seluas 2.953 ha (6,95%). (d disesuaikan dengan perubahan lahan yang terjadi).

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus, rencana pola ruang wilayah Kabupaten Kudus terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Adapun Kawasan lindung di Kabupaten Kudus meliputi :

- a. Kawasan Hutan Lindung seluas kurang lebih 1.473 Ha berada di Kecamatan Dawe dan Kecamatan Gebog.
- b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya yang merupakan kawasan resapan air. Kawasan ini sama dengan kawasan hutan lindung.
- c. Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi kawasan seluas kurang lebih 1.069 Ha berupa kawasan sempadan sungai, kurang lebih 211 Ha berupa kawasan sekitar danau atau waduk, kurang lebih 84 Ha kawasan sekitar mata air, kurang lebih 1 Ha kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya serta kawasan ruang terbuka hijau.
- d. Kawasan Cagar Budaya seluas kurang lebih 195 Ha.
- e. Kawasan Rawan Bencana Alam, meliputi :
 - 1) Kawasan rawan tanah longsor, meliputi : Desa Rahtawu, Desa Menawan Kecamatan Gebog, Desa Terban Kecamatan Jekulo, Desa Ternadi, Desa Soco, Desa Colo, Desa Japan, Desa Cranggang, Desa Glagah Kulon dan Desa Kuwukan Kecamatan Dawe;
 - 2) Kawasan rawan banjir, meliputi: Kecamatan Undaan, Kecamatan Jekulo bagian selatan, Kecamatan Mejobo bagian selatan, Kecamatan Jati bagian selatan dan Kecamatan Kaliwungu bagian selatan;
 - 3) Kawasan rawan bencana kekeringan, meliputi Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe dan Kecamatan Undaan
 - 4) Kawasan rawan bencana angin topan, meliputi seluruh wilayah kecamatan
- f. Kawasan Lindung Geologi, meliputi kawasan rawan bencana alam geologi berupa kawasan rawan bencana gerakan tanah di Kecamatan Gebog, Kecamatan Jekulo dan Kecamatan Dawe serta kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa cekungan air tanah dan kawasan sempadan mata air.
- g. Kawasan Lindung Lainnya.

Adapun kawasan budidaya di Kabupaten Kudus meliputi:

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi
 - 1) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas dengan luas keseluruhan kurang lebih 1.008 Ha meliputi Desa Ternadi, Desa Kajar Desa Colo Kecamatan Dawe, Desa Japan Kecamatan Dawe, Desa Menawan, Desa Rahtawu Kecamatan Gebog,

Desa Gondoharum, Desa Terban, Desa Klaling dan Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo.

- 2) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap dengan luas keseluruhan kurang lebih 1.121 Ha meliputi Desa Kandangmas Kecamatan Dawe, Desa Gondoharum, Desa Terban, Desa Klaling, Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo, dan Desa Wonosoco Kecamatan Undaan.

b. Kawasan peruntukan hutan rakyat

Kawasan peruntukan hutan rakyat dengan luas kurang lebih 2.285 Ha meliputi Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe, Kecamatan Undaan dan Kecamatan Jekulo.

Dari luas hutan rakyat, kurang lebih 106 Ha merupakan hutan rakyat murni, sedangkan sisanya seluas kurang lebih 2.179 Ha terintegrasi dengan kawasan peruntukan tanaman pangan.

c. Kawasan peruntukan pertanian

1) Kawasan peruntukan tanaman pangan

a) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, seluas kurang lebih 25.334 Ha.

b) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, seluas kurang lebih 531 Ha.

c) Kawasan peruntukan agropolitan berada di Kecamatan Undaan berupa kawasan yang diperuntukkan untuk produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam.

2) Kawasan peruntukan hortikultura

Kawasan peruntukan hortikultura berupa kawasan yang diperuntukan untuk tanaman sayur-sayuran berada di seluruh wilayah kecamatan.

3) Kawasan peruntukan perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas keseluruhan kurang lebih 8.387 Ha tersebar di seluruh wilayah kecamatan dan terintegrasi dengan kawasan peruntukan tanaman pangan.

4) Kawasan peruntukan peternakan

a) Kawasan peruntukan peternakan besar terdiri atas jenis hewan :

- (1) sapi perah meliputi Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Jati, Kecamatan Mejobo, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Bae, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe.

- (2) sapi tersebar di seluruh wilayah kecamatan;
 - (3) kerbau tersebar di seluruh wilayah kecamatan;
 - (4) kuda meliputi: Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Jati, Kecamatan Undaan, Kecamatan Mejobo, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Bae, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe.
- b) Kawasan peruntukan peternakan kecil tersebar di seluruh wilayah kecamatan terdiri atas jenis hewan kambing dan domba.
 - c) Kawasan peruntukan peternakan unggas terdiri atas jenis hewan :
 - (1) itik tersebar di seluruh wilayah kecamatan;
 - (2) ayam ras pedaging meliputi: Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Jati, Kecamatan Undaan, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Bae, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe.
 - (3) ayam ras petelur meliputi: Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe.
 - (4) ayam kampung tersebar di seluruh wilayah kecamatan.
 - d. Kawasan peruntukan perikanan
Kawasan peruntukan perikanan berupa perikanan darat diarahkan tersebar di seluruh wilayah Kecamatan.
 - e. Kawasan peruntukan pertambangan
Kawasan peruntukan pertambangan berupa kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batuan dengan luas keseluruhan kurang lebih 34 Ha.
 - f. Kawasan peruntukan industri
Kawasan peruntukan industri dengan luas keseluruhan sebesar kurang lebih 1.132 Ha.
 - g. Kawasan peruntukan pariwisata
Kawasan peruntukan pariwisata luas keseluruhan kurang lebih 35 Ha.
 - 1) Kawasan peruntukan pariwisata.
 - 2) Kawasan peruntukan pariwisata alam.
 - 3) Kawasan Peruntukan Pariwisata Buatan.
 - h. Kawasan peruntukan permukiman
 - 1) Permukiman perkotaan dengan luas keseluruhan kurang lebih 9.884 Ha meliputi kawasan perkotaan (seluruh wilayah Kecamatan Kota, seluruh Kecamatan Bae, seluruh Kecamatan Jati, sebagian Kecamatan Kaliwungu, sebagian Kecamatan Gebog dan sebagian Kecamatan Mejobo) dan ibu kota

kecamatan meliputi Ibu kota Kecamatan Undaan, Ibu kota Kecamatan Dawe, Ibu kota Kecamatan Jekulo, Ibu kota Kecamatan Gebog dan Ibu kota Kecamatan Mejobo.

2) Permukiman perdesaan dengan luas keseluruhan kurang lebih 2.653 Ha meliputi permukiman di luar Kawasan Perkotaan Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan.

i. Kawasan peruntukan pertahanan

Kawasan peruntukan pertahanan berupa pemanfaatan ruang untuk pemerintah terkait bidang pertahanan dan keamanan yang meliputi :

- 1) kantor Komando Distrik Militer (Kodim) berada di Kecamatan Kota;
- 2) kantor Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh kecamatan;
- 3) kantor Kepolisian Resor (Polres) berada di Kecamatan Kota; dan
- 4) kantor Kepolisian Sektor (Polsek) berada di seluruh kecamatan.

8. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Kudus atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kecamatan Gebog

Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Gebog diarahkan pada pengembangan industri serta pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.

b. Kecamatan Dawe

Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Dawe diarahkan pada pengembangan pariwisata pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan pertambangan.

c. Kecamatan Jekulo

Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Jekulo diarahkan pada pengembangan industri, pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

d. Kecamatan Mejobo

Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Mejobo diarahkan pada pengembangan industri pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

- e. Kecamatan Undaan
Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Undaan diarahkan pada pengembangan agropolitan untuk produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam.
- f. Kecamatan Jati
Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Jati diarahkan pada pengembangan industri, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.
- g. Kecamatan Kaliwungu
Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Kaliwungu diarahkan pada pengembangan industri, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.
- h. Kecamatan Kota
Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Kota diarahkan pada pengembangan pusat pelayanan permukiman.
- i. Kecamatan Bae
Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Bae diarahkan pada pengembangan industri, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

2.1.1.2 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Kudus pada Tahun 2014 tercatat sebesar 821.136 jiwa, terdiri dari 406.326 jiwa laki-laki (49,48%) dan 414.810 jiwa perempuan (50,52%). Apabila dilihat perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, diperoleh rasio jenis kelamin pada tahun 2014 sebesar 97,95% atau 98% yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Dengan kata lain bahwa penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki, hal ini bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Per Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2014

Kecamatan	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)	Sex Ratio (persen)
01. Kaliwungu	47.823	48.819	96.642	97,96
02. Kota	46.160	48.666	94.826	94,85
03. Jati	52.181	53.846	106.027	96,91
04. Undaan	36.526	36.698	73.224	99,53
05. Mejobo	36.995	37.434	74.429	98,83
06. Jekulo	51.999	52.940	104.939	98,22
07. Bae	34.813	35.421	70.234	98,28
08. Gebog	49.609	50.164	99.773	98,89
09. Dawe	50.220	50.821	101.041	98,82
JUMLAH	406.326	414.810	821.136	97,95

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2014

Kepadatan penduduk dalam kurun waktu 4 tahun (2011 - 2014) sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.5. menunjukkan kecenderungan peningkatan seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Pada tahun 2014 tercatat sebesar 1.875 jiwa per Km2.

Tabel 2.5
Kepadatan Penduduk Kabupaten Kudus Tahun 2011 – 2014

Tahun	Luas daerah	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa per km2)
2011	425,16	785.585	1.848
2012	425,16	791.891	1.863
2013	425,16	797.003	1.875
2014	425,16	821.136	1.931

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2014
(Mulai tahun 2010 menggunakan data dasar hasil SP 2010)

Kualitas sumber daya manusia dipengaruhi beberapa faktor, antara lain: tingkat pendidikan yang telah ditamatkan. Semakin tinggi proporsi penduduk yang berpendidikan, akan mendukung partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabel 2.6 menggambarkan komposisi dan peningkatan kapasitas penduduk Kabupaten Kudus dilihat dari tingkat pendidikan yang telah ditamatkan.

Tabel 2.6
Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Kabupaten Kudus Tahun 2011-2014
Dilihat dari Tingkat Pendidikan

Penduduk menurut Tingkat Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014
Tidak Sekolah	6,75	6,25	5,52	5,11	4,5
Tidak / Belum Tamat SD	14,53	15,95	13,89	15,71	15,39
Tamat SD	30,65	29,55	26,46	28,01	25,92
Tamat SLTP	21,16	21,95	23,65	22,24	23,49
Tamat SLTA	20,98	20,55	24,33	24,09	25,77
Akademi / Sarjana	5,92	5,72	6,14	4,84	4,94

Sumber : Survey Sosial Ekonomi Nasional dan BPS Kabupaten Kudus Tahun 2014

Persentase penduduk 10 tahun ke atas berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan potensi dan komposisi penduduk yang akan mempengaruhi kapasitas penduduk dalam pengembangan sumber daya yang dimilikinya. Kecenderungan dalam lima tahun terakhir 2010-2014 dapat diketahui bahwa penduduk yang Tidak Sekolah cenderung menurun, Tidak/Belum Tamat SD masih fluktuatif, sedangkan Tamat SD, tamat SLTP, dan SLTA dan Akademi/Sarjana kecenderungannya meningkat.

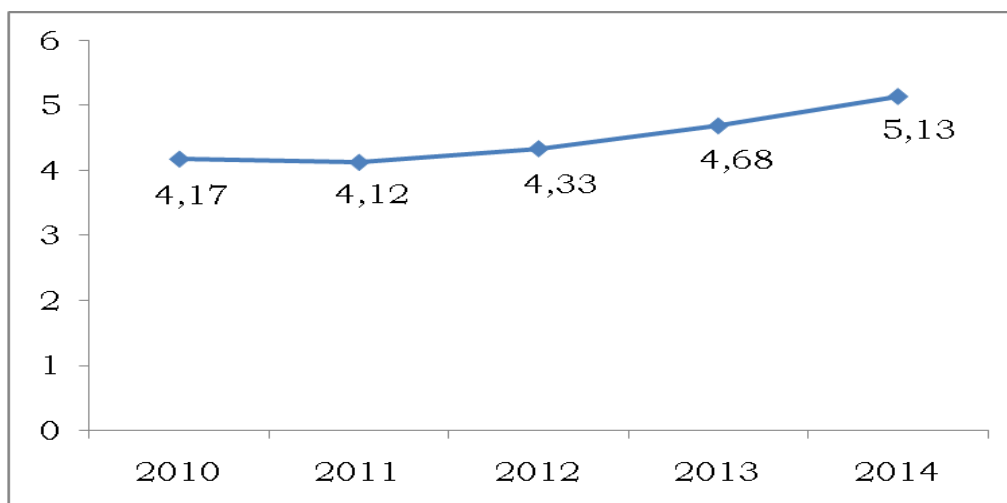
Guna mendukung informasi diatas, perlu dijelaskan bahwa penduduk yang dikategorikan Tidak Sekolah adalah penduduk usia 10 tahun yang tidak mengenyam pendidikan, penduduk yang Tidak/Belum Tamat SD adalah penduduk usia 10 tahun ke atas yang tidak tamat SD dan masih sekolah SD, Penduduk yang Tamat SD adalah Penduduk telah tamat SD/ sederajat baik yang melanjutkan pendidikan maupun tidak, penduduk yang Tamat SLTP adalah Penduduk yang telah tamat SLTP/ sederajat baik yang melanjutkan sekolah maupun tidak, penduduk tamat SLTA adalah penduduk yang telah tamat SLTA/ sederajat baik yang melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi maupun tidak. Jumlah penduduk tamat SD merupakan jumlah terbanyak, yang diikuti jumlah penduduk tamat SMP dan SMA. Kondisi ini menggambarkan bahwa dalam tiga tahun terakhir banyak penduduk yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMP cenderung meningkat, sedangkan penduduk yang Tamat SD menunjukkan kecenderungan menurun.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Perkembangan Ekonomi

Kondisi perekonomian Kabupaten Kudus semakin membaik seiring dengan meningkatnya konsumsi masyarakat dan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus tahun 2013 tercatat sebesar 4,68%, kemudian meningkat pada tahun 2014 sebesar 5,13%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus tahun 2014 lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,4%, dan nasional sebesar 5,02%. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus terlihat pada gambar berikut :



Gambar 2.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus Tahun 2010-2014

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kudus menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu tahun 2011-2014 sebagaimana tercantum pada Tabel 2.7. PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2011 sebesar Rp.13.184.051 juta, tahun 2012 mencapai Rp.13.754.585 juta, tahun 2013 sebesar Rp. 14.398.651 juta, dan tahun 2014 sebesar Rp.15.137.302 juta. Rata-rata pertumbuhan PDRB selama tahun 2011-2014 sebesar 4,59%.

PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 sebesar Rp33.848.973 juta, tahun 2012 mencapai Rp. 36.959.414 juta, tahun 2013 sebesar Rp.41.192.663 juta, dan pada tahun 2014 sebesar Rp.44.906.550 juta. Dilihat dari strukturnya, perekonomian Kabupaten Kudus masih didominasi sektor industri, yang merupakan sektor berdaya ungkit tertinggi, dan sektor perdagangan yang berkembang hampir merata di berbagai wilayah baik yang modern maupun tradisional. Kontribusi sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan hotel dan restoran, masing-masing memiliki kontribusi terhadap PDRB sebesar 61,47% dan 26,92% pada tahun 2014. Perkembangan kedua sektor tersebut mendorong peningkatan kontribusi sektor keuangan Persewaan & jasa perusahaan, dan jasa-jasa, dan bangunan. Sementara itu kontribusi sektor pertanian hanya sebesar 2,69%.

Tabel 2.7
 Nilai dan Pertumbuhan Sektor dalam PDRB Tahun 2011-2014 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000
 Kabupaten Kudus (dalam jutaan)

Lapangan Usaha	2011	Pertum (%)	2012	Pertum (%)	2013*	Pertum (%)	2014**	Pertum (%)	Rata-rata
1. Pertanian	437.630	2,57	461.633	5,48	453.213	-1,82	495.681	9,37	3,90
2. Pertambangan dan Penggalian	4.294	6,56	4.760	10,87	5.022	5,49	4.913	-2,17	5,19
3. Industri Pengolahan	7.938.351	3,75	8.168.626	2,90	8.536.458	4,50	8.969.675	5,07	4,06
4. Listrik, Gas & Air Bersih	52.597	5,55	56.398	7,23	60.105	6,57	64.232	6,87	6,55
5. Bangunan	223.681	8,52	245.636	9,82	265.166	7,95	265.798	0,24	6,63
6. Perdagangan, Hotel & Restaurant	3.652.622	4,26	3.878.330	6,18	4.070.006	4,94	4.327.776	6,33	5,43
7. Pengangkutan & Komunikasi	279.799	11,17	298.910	6,83	319.515	6,89	324.165	1,64	6,64
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	300.049	5,86	324.439	8,13	351.466	8,33	345.451	-1,71	5,20
9. Jasa-jasa	295.030	7,34	315.852	7,06	337.702	6,92	339.011	0,39	5,42
Total PDRB	13.184.051	4,21	13.754.585	4,33	14.398.651	4,68	15.137.302	5,13	4,59

Keterangan : * Angka Sementara

** Angka sangat sementara

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2014

Tabel 2.8
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011-2014 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kudus
 (dalam jutaan)

Lapangan Usaha	2011	Kontri busi (%)	2012*	Kontri busi (%)	2013**	Kontri busi (%)	2014	Kontri busi (%)	Rata-rata
1. Pertanian	950.856	2,81	1.079.747	2,92	1.108.866	2,69	1.208.840	2,69	2,78
2. Pertambangan dan Penggalian	9.527	0,03	10.893	0,03	12.368	0,03	13.483	0,03	0,03
3. Industri Pengolahan	21.114.289	62,38	22.707.038	61,44	25.320.526	61,47	27.603.398	61,47	61,69
4. Listrik, Gas & Air Bersih	150.123	0,44	164.122	0,44	186.521	0,45	203.338	0,45	0,44
5. Bangunan	525.244	1,55	602.878	1,63	681.263	1,65	742.685	1,65	1,62
6. Perdagangan, Hotel & Restaurant	8.916.516	26,34	9.931.325	26,87	11.088.820	26,92	12.088.576	26,92	26,76
7. Pengangkutan & Komunikasi	464.544	1,37	507.120	1,37	580.580	1,41	632.925	1,41	1,39
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	795.029	2,35	899.967	2,44	1.021.820	2,48	1.113.946	2,48	2,44
9. Jasa-jasa	922.845	2,73	1.056.323	2,86	1.191.899	2,89	1.299.358	2,89	2,84
Total PDRB	33.848.973	100,00	36.959.414	100,00	41.192.664	100,00	44.906.550	100,00	100,00

Keterangan : * Angka Sementara

** Angka sangat sementara

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2014

2. Laju Inflasi

Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Kudus selama tahun 2011-2014 sangat fluktuatif. Laju inflasi Kabupaten Kudus tahun 2014 (*year on year*) sebesar 8,59%, sedikit lebih tinggi dari tahun 2013 sebesar 8,31%. Kelompok komoditas yang memberikan andil/sumbangan inflasi yaitu kelompok Bahan Makanan, kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan, dan Kelompok Kesehatan. Peningkatan harga terutama pada komoditas *volatile foods* antara lain beras, daging, bawang merah, bawang putih, telur, dan cabe.

Nilai inflasi Kabupaten Kudus tercatat lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional. Penyebab utama inflasi tahun 2014 lebih tinggi daripada tahun 2013 yaitu terjadinya banjir pada awal 2014, lebaran pada bulan juli, dan kenaikan harga BBM pada bulan 17 Nopember 2014. Begitu pula inflasi pada tahun 2013 yang lebih dipicu oleh peningkatan harga BBM dan lebaran.

Perbandingan Tingkat inflasi Kabupaten Kudus dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 2.9 berikut.

Tabel 2.9
Nilai Inflasi Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional

Uraian	2011	2012	2013	2014
Kudus	3,34	4,77	8,31	8,59
Jawa Tengah	2,68	4,24	7,99	8,22
Nasional	3,79	4,30	8,38	4,93

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2014

3. Indeks Gini dan Indeks Williamson

Disparitas pendapatan penduduk yang dianalisis dengan penghitungan Indeks Gini menunjukkan besarnya ketimpangan pendapatan yang diperoleh penduduk suatu wilayah yang diproksi dengan pengeluaran / konsumsi penduduk untuk kebutuhan barang dan jasa. Indeks Gini melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini di Kabupaten Kudus pada tahun 2012 sebesar 0,34 dan pada 2013 sebesar 0,34. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Kudus relatif rendah.

Meskipun tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Kudus tergolong rendah, namun ada kecenderungan disparitas pendapatan penduduk melebar. Hal ini menunjukkan telah terjadi peningkatan

pendapatan yang nyata pada kelompok masyarakat tertentu, dimana kelompok pendapatan tinggi semakin tinggi pendapatannya sedangkan kelompok pendapatan rendah semakin rendah pendapatannya. Kondisi ini mengakibatkan kelompok pendapatan rendah semakin sulit dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Indeks Williamson Kabupaten Kudus ditinjau dari harga konstan pada tahun 2012 sebesar 0,7872 dan tahun 2013 sebesar 0,7912. Kondisi ini menggambarkan bahwa ketimpangan antar wilayah kecamatan di Kabupaten Kudus. Hal ini ditunjukkan dengan nilai indeks williamson yang jauh dari nol. Indeks Williamson tahun 2012 sebesar 0,7872 dan semakin melebar pada tahun 2013 yang ditunjukkan dengan angka sebesar 0,7912. Indeks williamson Kabupaten Kudus masih menunjukkan angka yang cukup tinggi karena mendekati 1, mengindikasikan bahwa nilai tambah produksi daerah antar kecamatan di Kabupaten Kudus masih terjadi kesenjangan yang cukup besar. Hal ini disebabkan karena kondisi perekonomian di tingkat kecamatan di Kabupaten Kudus sangat berbeda dan relatif heterogen. Ada kecamatan yang merupakan daerah dengan lapangan usaha industri dan perdagangan yang cukup maju seperti Kecamatan Kaliwungu, Kota dan Jati, sedangkan untuk kecamatan Bae, Jekulo dan Gebog merupakan daerah kombinasi antara aktivitas ekonomi lapangan usaha pertanian dan lapangan usaha industri. Kecamatan Undaan, Mejobo dan Dawe yang didominasi oleh lapangan usaha pertanian dengan pendapatan yang relatif rendah. Dengan demikian akibat dari keberagaman sumberdaya ekonomi menjadikan kesenjangan pendapatan antar wilayah yang terjadi cukup besar.

4. Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus dari Tahun 2011 ke 2012 mengalami penurunan dari 73.591 orang menjadi 68.100 orang. Untuk Tahun 2013, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 72.100 atau 8,62%, sedangkan untuk tahun 2014 diprediksi mengalami penurunan menjadi sebesar 65.690 orang atau 8%. Penurunan ini terjadi karena adanya dampak positif pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Tabel 2.10
Penduduk Miskin Kabupaten Kudus Tahun 2011 – 2014

Uraian	2011	2012	2013	2014*
Jumlah Penduduk Miskin	73.591	68.100	72.100	65.690
Jumlah Penduduk	785.585	791.891	797.003	821.136
Persentase Penduduk Miskin	9,57	8,63	8,62	8

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2014

Keterangan : * Angka prediksi sementara, Data diolah Bappeda

Data jumlah penduduk menggunakan data dasar hasil Sensus Penduduk 2010

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Beberapa indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan sosial antara lain: angka melek huruf, usia harapan hidup, dan pendapatan perkapita. Berdasarkan data statistik dapat disimpulkan bahwa dalam waktu empat tahun terakhir tingkat kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Kudus semakin membaik. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel 2.11.

Tabel 2.11
Perkembangan Angka Melek Huruf, Angka Harapan Hidup, dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Kudus Tahun 2011 – 2014

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1	Angka melek huruf (%)	93,73	93,74	94,16	100
2	Usia harapan hidup (tahun)	69,68	69,73	69,83	69,83
3	Pendapatan Per Kapita (000)	22.259	23.939	24.710	26.656
4	Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan (000)	639,98	642,02	645,15	648,05
5	Rata-rata Lama Sekolah	8,12	8,49	8,49	8,49
6	IPM	73,24	73,69	74,02	74,09

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2014

Angka Melek Huruf (AMH) menggambarkan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf di Kabupaten Kudus pada tahun 2014 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak terdapat penduduk yang buta huruf di Kabupaten Kudus.

Usia Harapan Hidup (*Life expectancy at birth*) adalah rata-rata jumlah tahun harapan hidup sekelompok orang yang lahir pada tahun yang sama, dengan asumsi kematian pada usia masing-masing tersebut tetap konstan di masa mendatang. Usia Harapan Hidup di Kabupaten Kudus cenderung meningkat menjadi sebesar 69,83 tahun pada tahun 2014. Tingginya angka harapan hidup, dapat dicapai berkat fasilitas kesehatan yang semakin lengkap dan canggih, tersedianya layanan kesehatan untuk manula, kebiasaan masyarakat hidup bersih dan disiplin, serta pola makan sehat. Di samping itu indikator kesejahteraan masyarakat juga tercermin

pada indikator pendapatan perkapita dan pengeluaran perkapita yang menggambarkan daya beli masyarakat yang terus meningkat.

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kudus juga menunjukkan peningkatan seiring kesadaran orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya, serta kemudahan akses dalam memperoleh pendidikan yang diberikan oleh pemerintah.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu :

a. Urusan Pendidikan

Layanan umum urusan pendidikan dapat dilihat dari indikator Angka Partisipasi Sekolah, rasio ketersediaan sekolah, dan rasio jumlah guru dan siswa sebagaimana tertera pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dengan Isian Versi APK
Kabupaten Kudus Tahun 2011 – 2014

No	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014
1	SD/MI				
1.1	Jumlah Murid Usia 7-12 Th (siswa)	82.672	76.244	83.903	79.348
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Th (orang)	85.856	79.272	83.707	80.677
1.3	APK SD/MI/Paket A (%)	101,32	106,31	100,24	104,09
2	SMP/MTs				
2.1	Jumlah Murid Usia 13-15 Th (siswa)	40.155	38.880	43.852	41.015
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Th (orang)	45.309	40.787	43.612	42.992
2.3	APK SMP/MTs/Paket B (%)	96,00	104,42	100,55	102,75
3	SMA/SMK/MA				
3.1	Jumlah Murid Usia 16-18 Th (siswa)	36.550	33.411	38.346	33.514
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 Th (orang)	48.571	41.567	43.963	41.579
3.3	APK SMA/SMK/MA/Paket C (%)	75,25	86,79	87,22	88,98

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus (Profil Pendidikan Tahun 2013/2014)

Berdasarkan Tabel 2.12 diatas, dapat diketahui bahwa Angka Partisipasi Kasar pada jenjang pendidikan dasar sudah mencapai angka diatas 100%, artinya bahwa semua penduduk usia sekolah 7-12 tahun telah bersekolah pada jenjang SD/MI/Paket A, dan penduduk usia 13-15 tahun telah bersekolah pada jenjang SMP/MTs/Paket B. Sementara itu APK jenjang SMA/SMK/MA/Paket C (%) baru mencapai 88,98%, artinya masih terdapat penduduk usia 16-18 tahun yang tidak sekolah pada jenjang pendidikan menengah.

Tabel 2.13
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Kudus Tahun 2011- 2014

No	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014
1	Usia 7-12 Th				
1.1	Jumlah Murid Usia 7-12 Th (siswa)	86.792	78.797	83.724	81.712
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Th	86.856	81.896	83.707	80.677
1.3	APS 7-12 Th (%)	99,93	96,44	100,03	101,28
2	Usia 13-15 Th				
2.1	Jumlah Murid Usia 13-15 Th (siswa)	44.914	40.902	44.111	43.571
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Th	45.000	42.733	43.612	42.992
2.3	APS Usia 13-15 Th (%)	99,81	95,72	101,15	101,35
3	Usia 16-18 Th				
3.1	Jumlah Murid Usia 16-18 Th (siswa)	31.500	33.848	36.290	34.119
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 Th (orang)	48.571	42.215	43.963	41.579
3.3	APS Usia 16-18 Th (%)	64,86	80,19	82,55	82,06

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun 2014

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dan juga sebagai ukuran daya serap, pemerataan dan akses terhadap pendidikan khususnya penduduk usia sekolah. APS SD/MI pada Tahun 2011 tercapai 101,32% cenderung fluktuatif, dimana Tahun 2012 naik menjadi 106,31% namun menurun kembali di Tahun 2013 menjadi 100,24%, tetapi kembali naik menjadi 104,09% di Tahun 2014. Kondisi ini menggambarkan penduduk usia sekolah SD/MI telah terlayani secara keseluruhan, bahkan terdapat siswa dari kabupaten lain yang bersekolah di Kabupaten Kudus.

Adapun APS SMP/MTs di Kabupaten Kudus juga cenderung fluktuatif, karena pada Tahun 2011 mencapai 96% naik menjadi 104,42% di Tahun 2012 dan pada Tahun 2013 menurun menjadi 100,55%, namun di Tahun 2014 kembali menaik hingga mencapai 102,75%.

Terjadinya angka partisipasi sekolah yang fluktuatif disebabkan adanya perubahan data penduduk yang berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010. Untuk APS SMA/MA/SMK Tahun 2011 mencapai 75,25% cenderung meningkat hingga Tahun 2014 tercapai sebesar 88,98%. Dengan demikian penduduk usia 16-18 yang bersekolah di Kabupaten Kudus baru mencapai 88,98%, sedangkan 11,02% lainnya tidak sekolah. Hal ini disebabkan keterbatasan pembiayaan dari orang tua, pilihan sekolah di kabupaten/kota lain, dan keinginan siswa melanjutkan ke Pondok pesantren. Pemberian beasiswa dan dana untuk sekolah oleh Pemerintah yang dimaksudkan untuk menjamin setiap anak bisa bersekolah, masih diperlukan untuk meningkatkan APS di Kabupaten Kudus, terutama pada tingkat SMA/MA/SMK demi mewujudkan program Pemerintah Wajib Belajar 12 tahun, namun dibutuhkan kecermatan sehingga dapat tepat sasaran.

Tabel 2.14
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Kudus Tahun 2011- 2014

NO	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014
1	SD/MI				
1.1	Jumlah Gedung Sekolah (unit)	606	606	607	602
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Th (orang)	86.856	81.896	83.707	80.677
1.3	Rasio	69,78	73,99	72,52	74,61
2	SMP/MTs				
2.1	Jumlah Gedung Sekolah (unit)	113	113	115	111
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Th (orang)	45.000	40.787	43.612	42.992
2.3	Rasio	25,11	27,70	26,37	25,82
3	SMA/SMK/MA				
3.1	Jumlah Gedung Sekolah (unit)	71	76	78	78
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 Th (orang)	48.571	41.567	43.963	41,579
3.3	Rasio	14,62	18,28	17,74	18,75

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun 2014

Pelayanan pendidikan dapat dilihat dari rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah. Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI dari Tahun 2011 sampai

dengan 2012 cenderung mengalami peningkatan dari 69,78 menjadi 73,99. Namun di Tahun 2014 kenaikan menjadi 74,61. Untuk jumlah gedung sekolah cenderung mengalami kenaikan dari 113 di Tahun 2011 menjadi 115 di Tahun 2013. Namun mengalami penurunan di Tahun 2014 yaitu sebesar 111.

Adapun jenjang SMP/MTs rasio ketersediaan sekolah cenderung fluktuatif, dimana Tahun 2011 (25,11) mengalami kenaikan dibanding Tahun 2012 (menjadi 27,70), tetapi mengalami penurunan di Tahun 2013 (menjadi 26,37) dan kembali mengalami penurunan di Tahun 2014 menjadi 25,82. Dengan melihat rasio ketersediaan sekolah per penduduk SMP/MTs menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan berupa penyediaan sekolah relatif memadai, namun yang perlu mendapat perhatian adalah kesenjangan kualitas sarpras yang cukup lebar rasio sekolah di desa dibandingkan di kota.

Untuk jenjang SMA/MA pada Tahun 2013 rasio gedung sekolah dibandingkan jumlah penduduk usia 16-18 tahun mencapai 18,75 dimana besaran rasio juga mengalami naik-turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Besaran rasio ketersediaan sekolah tingkat SMA/MA sebesar 18,75 menunjukkan masih kurang memadai penyediaan sekolah tingkat SMA/MA, apalagi untuk menunjang wajib belajar 12 tahun.

Tabel 2.15
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Kudus Tahun 2011 - 2014

No	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014
1	SD/MI				
1.1	Jumlah Guru (orang)	6.798	6.943	6.915	6.890
1.2	Jumlah Murid (siswa)	87.483	83.764	83.813	83.944
1.3	Rasio	777,07	828,88	825,06	831,5
2	SMP/MTs				
2.1	Jumlah Guru (orang)	3.085	3.149	3.110	3055
2.2	Jumlah Murid (siswa)	42.239	41.483	43.545	43.928
2.3	Rasio	730,37	759,11	714,21	695,45
3	SMA/MA				
3.1	Jumlah Guru (orang)	2.574	2.596	2.659	2.623
3.2	Jumlah Murid (siswa)	33.050	32.783	34.041	32.016
3.3	Rasio	778,82	791,88	781,12	819,27

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun 2014

Pelayanan pendidikan dapat dilihat dari rasio jumlah guru terhadap murid sebagaimana tertuang pada Tabel 2.15. Dari tabel di atas, dapat dilihat perkembangan rasio guru terhadap murid tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. Rasio jumlah guru terhadap murid jenjang pendidikan SD/MI Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 menunjukkan trend yang berkebalikan dimana jumlah guru cenderung turun namun jumlah murid cenderung naik. Namun untuk SMP/MTs perkembangan lebih fluktuatif, pada Tahun 2011 sebesar 730,37, tahun berikutnya naik menjadi 759,11, namun di Tahun 2013 turun menjadi 695,45. Untuk SMA/MA perkembangannya juga fluktuatif dimana pada Tahun 2011 menurun, tetapi di Tahun 2012 kembali naik dan di Tahun 2014 kembali menurun menjadi 819,27. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan berupa penyediaan guru cenderung mengalami peningkatan, namun masih perlu memperhatikan dalam rangka peningkatan kualitas guru. Adapun untuk pendidikan gratis di sekolah negeri, mulai SD sampai dengan SMP telah dibiayai oleh Pemerintah Daerah, namun untuk SMA baru teranggarkan untuk biaya operasionalnya di tahun 2015. Sedangkan untuk sekolah-sekolah swasta juga mendapatkan dana BOS dengan besaran yang lebih kecil, sehingga masih diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya dari iuran siswa.

b. Urusan Kesehatan

Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat merupakan salah satu sasaran pembangunan dalam bidang kesehatan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kudus Tahun 2013–2018 yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dilaksanakan dengan pelayanan kesehatan dasar gratis, peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Upaya meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan telah didukung melalui pemenuhan sarana prasarana dan tenaga medis serta paramedis yang masih perlu ditingkatkan. Tabel 2.16 menunjukkan jumlah puskesmas dan Pustu sebagai sarana pendidikan dasar di Kabupaten Kudus.

Tabel 2.16
Jumlah Puskesmas dan Pustu Kabupaten Kudus Tahun 2011 – 2014

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Puskesmas	19	19	19	19
2.	Jumlah Pustu	43	43	43	43
3.	Jumlah Penduduk	769.904	780.051	791.891	821.136
4.	Rasio Puskesmas per 1000 penduduk	0,025	0,024	0,024	0,024
5.	Rasio Pustu per 1000 penduduk	0,0559	0,0551	0,0543	0,0524

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2014

Sampai dengan Tahun 2014 di Kabupaten Kudus terdapat 10 sarana kesehatan (rumah sakit) milik pemerintah dan swasta yang dapat diakses oleh masyarakat (Tabel 2.17). Sedangkan rasio jumlah rumah sakit dibanding jumlah penduduk pada Tahun 2013 ada peningkatan karena ada penambahan satu rumah sakit swasta. Tahun 2012 dan 2014 ada sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya, karena tidak ada penambahan jumlah rumah sakit sedangkan jumlah penduduk mengalami peningkatan.

Tabel 2.17
Jumlah Rasio Rumah Sakit per Jumlah Penduduk
Kabupaten Kudus Tahun 2011 – 2014

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	1	1	1	1
2.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	1	1	1	1
3.	Jumlah Rumah Sakit Swasta:	7	7	8	8
	a. Rumah Sakit Umum Swasta	4	4	5	5
	b. Rumah Sakit Bersalin	3	3	3	3
4.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	9	9	10	10
5.	Jumlah Penduduk	769.904	780.051	791.891	821.136
6.	Rasio (per 1000 penduduk)	0,01169	0,01154	0,01263	0,01218

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2014

Menurut standart WHO, target Indonesia Sehat 2010, perlu disediakan 40 dokter umum untuk melayani 100.000 penduduk. Berdasarkan data Tabel 2.18, rasio jumlah dokter per jumlah penduduk pada Tahun 2012 mengalami penurunan bila dibandingkan Tahun 2011, karena ada dokter yang melanjutkan pendidikan spesialis. Pada Tahun 2013 dan 2014 rasio jumlah dokter mengalami peningkatan, dan telah mencapai rasio ideal tiap dokter terhadap 100.000 penduduk. berdasarkan

Indonesia Sehat 2010 yaitu 40 per 100.000 jumlah penduduk (satu orang dokter melayani 2.500 penduduk).

Tabel 2.18
Jumlah Dokter Kabupaten Kudus Tahun 2011 – 2014

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Dokter	288	282	339	463
2.	Jumlah Penduduk	769.904	780.051	791.891	821.136
3.	Rasio (per 1000 penduduk)	0.37407	0,36151	0,42809	0,56385

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2014

Untuk rasio jumlah tenaga perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 ada kecenderungan mengalami peningkatan, akan tetapi pada Tahun 2013 terjadi sedikit penurunan (Tabel 2.19). Berdasarkan data yang ada jumlah tersebut tidak mengalami penambahan yang signifikan, karena para tenaga kesehatan tidak memperpanjang ijin praktek di wilayah Kabupaten Kudus yang disebabkan kemungkinan pindah domisili atau diterima bekerja di luar kota.

Tabel 2.19
Jumlah Tenaga Perawat, Bidan dan Tenaga Kesehatan Lainnya Kabupaten Kudus Tahun 2011 – 2014

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Perawat	1.099	1.082	1.083	1.091
2.	Jumlah Bidan	378	442	479	482
3.	Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya	433	635	487	606
4.	Jumlah Penduduk	769.904	780.051	791.891	821.136
5.	Rasio (per 1000 penduduk)	2,48083	2,76777	2,58748	2,65364

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2014

Untuk mengukur peningkatan derajat kesehatan masyarakat antara lain dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup, yang cenderung mengalami peningkatan dari Tahun 2011 sampai Tahun 2014 (Tabel 2.20). Kasus kematian ibu pada Tahun 2014 mengalami peningkatan yang signifikan sebanyak 26 kasus (164,87 per 100.000 kelahiran hidup), angka ini lebih tinggi dibanding target nasional maupun target Provinsi Jawa Tengah yaitu 102 per 100.000 kelahiran

hidup. Penyebab kematian terbanyak adalah penyebab langsung diantaranya karena penyakit penyerta atau penyakit kronis seperti jantung, TB Paru, hepatitis dan hipertensi. Faktor penyebab kematian yang lain adalah faktor usia dan jumlah anak (paritas) serta faktor penyebab langsung lainnya seperti eklampsia, perdarahan dan emboli.

Angka Kematian Bayi cenderung mengalami peningkatan dari Tahun 2011 sampai Tahun 2013, dan menurun pada Tahun 2014. Pencapaian Angka Kematian Bayi AKB Kabupaten Kudus masih lebih rendah dibandingkan target MDGs nasional yaitu 23 per 1000 kelahiran hidup. Penyebab AKB cenderung mengalami peningkatan dikarenakan permasalahan kematian bayi sangat kompleks, yaitu dari lingkungan, pelayanan kesehatan, faktor keturunan dan perilaku. Hal ini sebetulnya dapat dicegah sejak dari mulainya konsepsi yaitu mulai WUS (Wanita Usia Subur), PUS (Pasangan Usia Subur), hamil, bersalin dan bayi baru lahir. Adanya screening awal sebelum hamil agar tidak melahirkan bayi yang beresiko tinggi yang dapat menyebabkan kesakitan dan kematian bayi, serta adanya upaya yang konkret dari semua pihak terkait tidak hanya pada SKPD Kesehatan saja, sangat diperlukan agar dapat tercapai dari target yang ditetapkan.

Untuk pencapaian target Angka Kematian Balita (AKBa) juga lebih rendah dari target MDGs nasional yaitu 32 per 1000 kelahiran hidup, akan tetapi dari Tahun 2011 sampai dengan 2013 ada kecenderungan peningkatan kasus kematian balita, dan menurun pada Tahun 2014 menjadi 5,58 per 1000 kelahiran hidup. Kematian balita 2/3 didukung oleh kematian bayi sehingga sulit rasanya untuk dapat turun bila tidak terjadi penurunan pada angka kematian bayinya. Penurunan kasus kematian pada balita dapat tercapai apabila dilaksanakan upaya preventif yang dilakukan sejak WUS, PUS, hamil, bersalin dan bayi baru lahir serta peran serta dari seluruh SKPD terkait.

Tabel 2.20
 Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan
 Angka Kematian Balita Tahun 2011 – 2014

No	Variabel Indikator	2011	2012	2013	2014
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	69,68	69,73	69,83	69,83
2	Angka Kematian Ibu Melahirkan	103,7 (16 kasus)	95,4 (15 kasus)	132,68 (21 kasus)	164,87 (26 kasus)
3	Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	5,6 (86 kasus)	6,9 (109 kasus)	7,1 (112 kasus)	5,58 (88 kasus)
4	Angka Kematian Balita (per 1000 KH)	7,1 (110 kasus)	7,4 (117 kasus)	8,4 (132 kasus)	9,07 (143 kasus)

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2014

Perkembangan persentase balita gizi kurang mengalami penurunan dari Tahun 2011 sampai dengan 2014. Sedangkan persentase balita gizi buruk pada Tahun 2012 dan 2013 mengalami kenaikan dan menurun pada Tahun 2014. Capaian tersebut lebih rendah dibanding target Provinsi dan Nasional. Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan sebesar 100%.

Tabel 2.21
 Status Gizi Balita Tahun 2011 – 2014

No	Indikator	2011	2012	2013	2014
1	Balita Gizi Kurang	5,96%	5,82%	3,74%	3,86%
2	Balita Gizi Buruk	0,60%	0,75%	0,78%	0,57%
3	Cakupan Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2014

c. Urusan Pekerjaan Umum

Status jalan di Kabupaten Kudus terbagi menjadi tiga golongan dimana masing-masing dikelola secara terpisah. Ketiga golongan tersebut adalah jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten dengan panjang 697.299 km. Jalan nasional yang melewati wilayah Kabupaten Kudus adalah jalur Pantura atau disebut juga jalan Daendels, sepanjang 21.180 km atau 3,04% dari total panjang jalan, sedangkan jalan provinsi sepanjang 54.939 km atau 7,88% dan jalan kabupaten sepanjang 621.180 km atau 89,08%.

Perkembangan jalan kabupaten, mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 tidak terjadi penambahan panjang jalan. Dilihat dari kondisinya, pada tahun 2014 panjang jalan kondisi baik sepanjang 264.630 meter, panjang jalan kondisi sedang 239.260 meter, panjang jalan kondisi rusak ringan sebesar 46.320 meter, dan panjang jalan kondisi rusak berat sepanjang 70.970

meter. Terjadi peningkatan kondisi jalan baik menjadi sebesar 42,60% pada tahun 2014 dan kondisi jalan sedang menjadi sebesar 38,52%, seperti terlihat pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22
Kondisi Jalan Kabupaten Kudus Tahun 2011 – 2014

No	Kondisi Jalan	Satuan	2011	2012	2013	2014
1	Baik	Meter	164.742	216.692	251.165	264.630
		%	26,55	34,88	40,43	42,60
2	Sedang	Meter	165.886	219.990	206.350	239.260
		%	26,62	35,41	33,22	38,52
3	Rusak Ringan	Meter	156.939	82.869	56.825	46.320
		%	25,29	13,34	9,15	7,46
4	Rusak Berat	Meter	133.613	101.629	106.840	70.970
		%	21,53	16,37	17,20	11,43
Jumlah			621.180	621.180	621.180	621.180

Sumber : Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kabupaten Kudus Tahun 2014

Pembangunan jembatan di Kabupaten Kudus dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan baik dari aspek peningkatan kondisi jembatan maupun peningkatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi jembatan. Jumlah dan kondisi jembatan di Kabupaten Kudus tahun 2011 – 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23
Jumlah dan Kondisi Jembatan di Kabupaten Kudus Tahun 2011 – 2014

No	Kondisi Jembatan	Satuan	Tahun			
			2011	2012	2013	2014
1	Baik	unit	167	169	170	174
		%	76,96	77,17	77,27	77,68
2	Sedang	unit	33	38	38	36
		%	15,21	17,35	17,27	16,07
3	Rusak	unit	17	12	12	14
		%	7,83	5,48	5,45	6,25
Jumlah			217	219	220	224

Sumber : Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kabupaten Kudus Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 2.23 di atas diketahui bahwa jumlah jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 77,68% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sedangkan jembatan dalam kondisi sedang diupayakan pemeliharaan sehingga kondisinya tetap terjaga. Adapun jembatan dalam kondisi rusak diupayakan rehabilitasi sehingga jumlahnya tidak bertambah.

Daerah Irigasi secara keseluruhan di Kabupaten Kudus sebesar 15.068 Ha. Dari jumlah total tersebut yang

menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus sebesar 10.274,65 Ha. Adapun sisanya sebesar 2.805 Ha merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan 1.988,35 Ha merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Daerah irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Kudus pada tahun 2014 telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebagaimana diperlihatkan pada tabel 2.24 berikut ini.

Tabel 2.24
Kondisi Daerah Irigasi Kabupaten Kudus Tahun 2011 – 2014 (Ha)

Kondisi Daerah Irigasi	Satuan	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
Baik	Ha	8.980,00	9.807,00	7.024,98	7.686
	%	58%	65%	68%	74,66%
Rusak Ringan	Ha	1.102,00	944,25	698,72	602
	%	7%	6%	7%	5,85%
Rusak Berat	Ha	5.421,00	4.316,75	2.550,95	2.007
	%	35%	29%	25%	19,49%
Total	Ha	15.503,00	15.068,00	10.274,65	10.295

Sumber : Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kabupaten Kudus Tahun 2014

Kondisi Daerah Irigasi (DI) menunjukkan peningkatan pada kondisi baik menjadi sebesar 74,66% pada tahun 2014, sedangkan kondisi rusak ringan dan rusak berat mengalami penurunan. Kondisi Daerah Irigasi (DI) dengan kondisi baik perlu dipertahankan kualitasnya melalui pemeliharaan, sehingga mampu mengairi lahan pertanian secara optimal, sedangkan DI dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat perlu dilakukan rehabilitasi sehingga kondisinya menjadi baik untuk meningkatkan ketersediaan air irigasi. Pada tahun 2014 luas lahan pertanian di Kabupaten Kudus adalah 10.295 Ha sehingga rasio jaringan irigasi yang kondisinya baik dengan luas lahan pertanian di Kabupaten Kudus adalah sebesar 74,66%. Pada tahun 2014 panjang drainase terbangun adalah 44.563,99 meter, trotoar sepanjang 1.145,95 meter dan talud sepanjang 8.751,76 meter.

d. Urusan Perumahan

Urusan perumahan telah dilaksanakan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang layak huni dan sehat, pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran, pemberdayaan komunitas perumahan dan pemeliharaan areal pemakaman. Adapun indikator

keberhasilan yang telah dicapai antara lain terwujudnya fasilitas permukiman yang layak huni dengan persentase sebesar 87,36% pada tahun 2013, meningkat dibandingkan tahun 2012 sebesar 86,85%. Capaian persentase rumah tangga bersanitasi pada tahun 2013 sebesar 93,17%, juga meningkat dari tahun 2012 sebesar 92,71%. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk 1,655 menurun dari tahun 2012 yang sebesar 1,667%, hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang semakin meningkat, sementara areal pemakaman umum tidak bertambah. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten 100%, Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi sebesar 33,33%. Fasilitasi dan replikasi PLPBK (Penataan Lingkungan Komunitas Berbasis Komunitas) untuk 1 desa yaitu desa Padurenan.

e. Urusan Penataan Ruang

Urusan Penataan Ruang yang dilaksanakan meliputi tiga hal yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum yang disusun berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten yang sudah ditetapkan melalui Perda Nomor 16 Tahun 2012. Sedangkan rencana rinci disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang, yang terdiri atas 6 (enam) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan dan 2 (dua) Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Kabupaten. Dokumen tata ruang yang telah disusun tahun 2010 – 2013 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25
Perencanaan Penataan Ruang Kabupaten Kudus
Tahun 2011-2014

2011	2012	2013	2014
1. RTBL Kaw. Perkotaan (difokuskan di Jl. Tembus Kencing-Tanjung dan Tugu Identitas-Simpang Tujuh) 2. Penyempurnaan Ranperda RTRW (persetujuan substansi dari Kementerian PU)	1. RDTRK 4 IKK dan Raperda RDTRK 2 Kawasan 2. Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus 3. Penyusunan Kajian	1. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032 2. Sebanyak 6 (enam) raperda RDTR Kawasan Perkotaan (Persetujuan	1. Penyempurnaan 6 (enam) raperda RDTR Kawasan Perkotaan (Persetujuan substansi dari Gubernur) 2. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR 3. Kajian Review Rencana Tata Ruang

2011	2012	2013	2014
	Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	substansi dari Gubernur)	Wilayah 4. Penyusunan 2 (dua) raperda Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis 5. Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Kudus

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014

Adapun pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang lebih diarahkan untuk monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang melalui mekanisme perizinan serta sosialisasi regulasi penataan ruang dan pelatihan pengendalian pemanfaatan ruang untuk aparat Pemerintah daerah. Permasalahan dalam pemanfaatan ruang salah satunya adanya alih fungsi lahan karena peningkatan pembangunan ekonomi pada sektor perdagangan, industri, dan perumahan.

f. Urusan Perencanaan Pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangatlah diperlukan dalam suatu kebijakan pembangunan. Pada kondisi sekarang ini, masyarakat berperan sebagai obyek pembangunan dan subyek dalam pembangunan sehingga diharapkan pelaksanaan pembangunan lebih berpihak kepada masyarakat secara transparan akuntabel, dan berkelanjutan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, bahwa pemerintah harus memfasilitasi terlaksananya proses partisipatif dalam perencanaan pembangunan. Mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, maka pada tahun 2016 di *break down* program dan kegiatannya menjadi Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kudus. Rancangan awal RKPD ini, dijadikan pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan mulai dari musrenbang secara berjenjang untuk menghasilkan RKPD, yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan KUA PPAS sampai dengan penyusunan APBD. Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani, dan masalah-masalah serta tantangan yang dihadapi.

Tabel 2.26
Kinerja Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2012-2014

No	Uraian	2012	2013	2014
1	Persentase keterisian data/informasi	60 %	60 %	65 %
2	Persentase peningkatan obyek sasaran yang ditangani	80 %	80 %	80 %
3	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan wilayah perkotaan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
4	Jumlah aparat perencana yang meningkat kapasitasnya	-	165 orang	145 orang
5	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	7 dokumen	6 dokumen	10 dokumen
6	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	-	1 dokumen	1 dokumen
7	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	85 %	90 %	99,64 %
8	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
9	Jumlah klaster yang difasilitasi FEDEP	5 klaster	6 klaster	7 klaster
10	Jumlah dokumen perencanaan sosbud	3 dokumen	3 dokumen	5 dokumen
11	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
12	Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola sumber daya air	100%	100%	100%
13	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	-	-	1 dokumen
14	Jumlah buku laporan pelaksanaan kerjasama	30 buku	30 buku	30 buku
15	Jumlah dokumen kinerja daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
16	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014

g. Urusan Perhubungan

Pelayanan urusan perhubungan dapat dilihat dari keberadaan terminal dan jumlah kendaraan yang transit sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.27
Tipe Terminal dan Jumlah Kendaraan yang Transit Tahun 2011-2014

No	Nama Terminal	Tipe	Kendaraan Transit (buah)			
			2011	2012	2013	2014
1	Terminal Jati Kudus	A	125.656	106.608	94.960	72.641
2	Terminal Jetak	B	65.162	48.165	37542	59.125
3	Terminal Kalirejo	B	13.724	11.421	8.820	11.411
4	Terminal Getas	C	19.743	15.293	15.224	27.683
5	Terminal Singocandi	C	-	-	-	-
6	Terminal Padurenan	C	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 2.27 dapat diketahui bahwa jumlah kendaraan yang transit di berbagai terminal mengalami penurunan, padahal kualitas sarana terminal telah ditingkatkan dengan berbagai pembangunan. Hal ini disebabkan adanya pergeseran pemanfaatan kendaraan umum ke kendaraan pribadi baik roda empat maupun roda dua. Penggunaan kendaraan pribadi juga mengakibatkan rendahnya rasio panjang jalan per jumlah kendaraan yaitu sebesar 1,65. Angka ini didapatkan dari panjang jalan sepanjang 621.180 yang dibagi dengan jumlah kendaraan bermotor per 31 Desember 2014 sebanyak 375.855 unit berdasarkan data dari UP3AD Kabupaten Kudus.

Terkait dengan hal tersebut, perlu diadakan pengendalian lalu lintas dalam bentuk penyediaan perlengkapan lalu lintas guna ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas di jalan raya. Rasio pemasangan rambu-rambu lalu lintas adalah sebesar 3,42. Berikut adalah jumlah Prasarana keselamatan perhubungan tahun 2011-2014 :

Tabel 2.28
Sarana dan Prasarana Perhubungan Tahun 2011-2014

No	Sarana Prasarana	Satuan	Kendaraan Transit (buah)			
			2011	2012	2013	2014
1	Alat Uji Kendaraan	Unit	9	9	9	9
2	Traffic Light	Simpang	21	25	25	25
3	Rambu-rambu lalu lintas	Buah	1.898	2.088	2.163	2.338
4	Marka	M2	3.808	6.462	7.342	39.726
5	Guardrail	M'	298	446	570	1.598

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2014

Dalam upaya mendukung pelayanan prima kepada pengguna jasa perhubungan serta kebijakan preventif dan represif guna mewujudkan ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan lalu lintas, maka penyediaan sarana dan prasarana menjadi prioritas untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif, efisien, ramah lingkungan, dan dapat menjangkau ke seluruh wilayah serta menghubungkan antar dan inter moda angkutan.

h. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup diupayakan untuk pengelolaan persampahan di perkotaan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam, peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan pengelolaan

Ruang Terbuka Hijau. Data upaya pelayanan sarana dan prasarana urusan lingkungan hidup dari tahun 2011 - 2014 tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.29
Kinerja Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus Tahun 2011-2014

No.	Jenis Informasi	Satuan	Tahun			
			2011	2012	2013	2014
1	Sarana IPAL :					
	- Jumlah	Buah	0	2	3	6
	- Volume	M3	0	96	10.800	510
2	Luas Lahan Kritis		5.484,69	5.445,95	5.358,77	5.358,77
	- Kritis	Ha	386,18	374,93	337,79	337,79
	- Agak Kritis	Ha	5.098,51	5.071,01	5021,01	5021,01
3	Limbah Pabrik					
	- Volume	M3/ bln	185.428	185.428	6.111,89	31,500
4	RTH (Ruang Terbuka Hijau)					
	- Pohon Turus Jalan	Batang	40.050	40.050	40.050	40.050
	- Pemeliharaan Hutan Kota	lokasi	0	0	4	8
5	Pelayanan Persampahan Perkotaan					
	- Volume timbulan sampah	M3/Hr	640,2	609,4	615,6	585,6
	- Volume sampah yang terangkut ke TPA	M3/Hr	514,9	501,4	521,1	510,5
	- Persentase	%	80	82	84,65	87,18
6	Sarana dan Prasarana Persampahan					
	- Dumptruck	Unit	16	16	17	28
	- Truck arm roll	Unit	6	6	4	8
	- Truck engkel	Unit	3	3	2	2
	- Container	Unit	27	25	18	27
	- Bulldozer	Unit	1	1	1	2
	- Excavator	Unit	1	1	1	2
	- Becak sampah	Unit	144	144	112	104
	- Becak motor sampah	Unit	26	26	21	33
	- Depo sampah tipe B	Lokasi	8	8	9	9
	- Incenerator	Unit	1	1	-	-
	- TPA	Lokasi	1	1	1	1
7	Jumlah tenaga outsourcing kebersihan	Orang	26	26	24	73

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus Tahun 2014

Kinerja urusan lingkungan hidup dapat dilihat dari indikator presentase penanganan sampah, Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk dan Penegakan Hukum Lingkungan sebagaimana dalam Tabel 2.30, Tabel 2.31 dan Tabel 2.32 berikut.

Tabel 2.30
 Persentase Penanganan Sampah Tahun 2011 - 2014
 Kabupaten Kudus

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Volume sampah yang ditangani (m3/hari)	514,9	501,5	521,1	510,5
2.	Volume produksi sampah (m3/hari)	640,2	609,4	615,6	585,6
3.	Persentase	80,43	82,29	84,65	87,18

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kudus Tahun 2014

Tabel 2.31
 Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Tahun 2011 - 2014
 Kabupaten Kudus

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah daya tampung TPS (m3)	206,152	213	213	215
2.	Jumlah penduduk	785.585	791.891	797.003	821.136
3.	Rasio	0,262	0,269	0,267	0,262

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kudus Tahun 2014

Tabel 2.32
 Penegakan Hukum Lingkungan Tahun 2011 - 2014
 Kabupaten Kudus

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda	2	4	5	5
2.	Jumlah kasus lingkungan yang ada	2	4	5	5
3.	Persentase	100	100	100	100

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus Tahun 2014

Penanganan sampah dalam kurun waktu 4 tahun (2011-2014) mengalami kecenderungan naik dari tahun 2011 sebesar 80,43 %, menjadi 87,18 % pada tahun 2014. Sedangkan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk sebesar 0,262 pada tahun 2014. Adapun untuk indikator jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemerintah daerah pada tahun 2011 sebanyak 2 kasus dan tahun 2014 sebanyak 5 kasus dengan penyelesaian keseluruhannya 100 %.

Pelayanan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan SPM bidang lingkungan hidup terdiri atas : a) pelayanan pencegahan pencemaran air; b) pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak; c) pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa; dan d) pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus baru dilaksanakan pada

tahun 2010. Persentase pencapaian SPM di bidang lingkungan dapat dilihat pada Tabel 2.33.

Tabel 2.33
Persentase Pencapaian SPM di Bidang Lingkungan Hidup
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Pencegahan Pencemaran Air	100	37,14	100	100
2.	Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak	100	100	100	100
3.	Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau tanah untuk produksi Biomassa	0	80	100	100
4.	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	100	100	100	100

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus Tahun 2014

Pencapaian indikator pencegahan pencemaran air pada tahun 2014 telah mencapai 100%, sedangkan pada tahun 2012 belum mencapai 100% disebabkan terdapat 22 usaha/kegiatan yang diawasi belum mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air karena usaha/kegiatan tersebut baru berdiri dan beroperasi sehingga belum memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air.

i. Urusan Pertanahan

Pelayanan urusan pertanahan dilaksanakan dalam rangka pengadaan tanah untuk waduk Logung, fasilitasi manajemen pertanahan berbasis masyarakat khususnya di kelurahan sehingga tersedia database tanah secara akurat. Pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Logung pada tahun 2014 sebanyak 29 bidang dengan luas 73.828 m² dengan anggaran yang terserap sebesar Rp. 2.542.547.000,-. Sedangkan sampai dengan tahun 2014 ganti rugi pembayaran tanah untuk pembangunan Waduk Logung sebanyak 631 bidang dengan luas 1.005.231 m², anggaran yang terserap sebesar Rp. 34.319.716.000,- terdiri dari 2 desa yaitu desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo sebanyak 187 bidang dengan luas tanah 293.337 m² dan desa Kandangmas sebanyak 444 bidang dengan luas tanah 711.894 m². Pada tahun 2013 juga telah dilakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kudus Nomor 05/SPRIN/Ad/X/2013, Nomor 611.1/3342/2013 dan Nomor 112 Tahun 2013 tentang

Pembangunan Waduk Logung di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan PKS tersebut, sisa lahan yang perlu dibebaskan membutuhkan biaya sebesar Rp. 67.883.000.000,- yang merupakan sharing antara Kabupaten Kudus dengan Provinsi Jawa Tengah sebesar 50% : 50%. Luas tanah warga yang belum terbayarkan sampai dengan tahun 2014 sebesar 112.141 m² pembayaran uang ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan dititipkan di Pengadilan Negeri Kudus.

j. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dalam rangka pelaksanaan e-KTP adalah menjamin ketersediaan sarana pendukung di setiap tempat pelayanan KTP elektronik, mempersiapkan tenaga teknis, serta menjaga akurasi database kependudukan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Jumlah penduduk Kabupaten Kudus yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai Tahun 2014 sebesar 888.465 jiwa. Dari jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 644.581 jiwa (98%), jumlah KTP yang telah jadi sebanyak 536.002 jiwa dari hasil perekaman sejumlah 543.671 jiwa.

Jumlah penduduk ber KK mengalami kenaikan dari tahun 2012 sebesar 246.682 menjadi 264.003 pada tahun 2013 atau meningkat sebesar 7,02%. Jumlah penduduk memiliki akte kelahiran mengalami penurunan dari 544.256 pada tahun 2013 atau sebesar 5,52% menjadi 534.837 penduduk pada tahun 2014 dengan rasio akte kelahiran sebesar 60%.

k. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada Tahun 2010 jumlah Organisasi Perempuan Kabupaten Kudus mencapai 40 organisasi. Apabila dilihat pada 5 organisasi massa perempuan terbesar di Kabupaten Kudus dengan jumlah anggota terbesar pada Tahun 2014 sebanyak 47.661 orang, sebagaimana tertera pada Tabel 2.34.

Tabel 2.34
Organisasi Perempuan dengan Jumlah Anggota Terbesar Tahun 2014

No	Nama Organisasi Perempuan	Jumlah Anggota (orang)
1.	Muslimat NU	36.000
2.	DPD II Pengajian Al Hidayah	3.797
3.	Dharma Wanita Persatuan	6.394
4.	Aisyiyah	1.050
5.	Bhayangkari	420
	Jumlah	47.661

Sumber : BPMPKB Kabupaten Kudus Tahun 2014

Pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari partisipasi peran aktif perempuan di semua bidang kehidupan yang dapat diukur diantaranya dari jumlah keanggotaan perempuan di DPRD, sebagaimana Tabel 2.35 berikut.

Tabel 2.35
Jumlah Keanggotaan Perempuan di DPRD Tahun 2011 – 2014

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah DPRD Perempuan	6	6	6	3
2.	Jumlah Anggota DPRD	45	45	45	45
3.	Rasio	13,33%	13,33%	13,33%	6,66%

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2014

Salah satu upaya yang dilaksanakan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak diantaranya melalui penyelesaian pengaduan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dari Tahun 2011 sampai Tahun 2014 semua pengaduan dapat diselesaikan seluruhnya. Untuk jumlah kasus KDRT maupun kekerasan terhadap anak yang dilaporkan pada BPMPKB pada Tahun 2014 relatif meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2013. Untuk kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga berjumlah 12 kasus sedangkan jumlah kekerasan pada anak tercatat ada 19 kasus. Dengan persentase penyelesaian kasus sebesar 100 persen.

Tabel 2.36
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan Kabupaten Kudus Tahun 2011 – 2014

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah KDRT	69	61	3	12
2.	Jumlah penyelesaian KDRT	69	61	3	12
3.	Persentase penyelesaian KDRT	100	100	100	100
4.	Jumlah kekerasan terhadap anak	33	31	4	19
5.	Jumlah penyelesaian kekerasan terhadap anak	33	31	4	19
6.	Persentase penyelesaian kekerasan terhadap anak	100	100	100	100

Sumber : BPMPKB Kabupaten Kudus Tahun 2014

1. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai peran penting untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, melalui kegiatan antara lain : penyiapan dukungan kelembagaan yang efektif, optimalisasi pendayagunaan tenaga program KB, penyediaan sarana prasarana, serta manajemen dan pembiayaan. Dalam pelaksanaan program KB, Pasangan Usia Subur (PUS) sebagian besar telah menjadi akseptor KB. Hal ini ditunjukkan dari rasio akseptor KB dari Tahun 2011 sampai Tahun 2014 yang cenderung menunjukkan kenaikan, tetapi pada Tahun 2013 lalu mengalami sedikit penurunan.

Tabel 2.37
Rasio Akseptor KB Kabupaten Kudus Tahun 2011 – 2014

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah akseptor KB	112.669	118.707	112.927	117.277
2.	Jumlah Pasangan Usia Subur	136.981	144.149	142.575	145.207
3.	Rasio akseptor KB	82,25	82,35	79,21	80,77
4.	Jumlah PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun	3.175	2.336	2.308	3.113
5.	Cakupan PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun	2,31	1,62	1,62	2,14

Sumber : BPMPKB Kabupaten Kudus Tahun 2014

Dari data Tabel 2.37 diketahui bahwa rasio akseptor Keluarga Berencana (KB) Tahun 2011-2012 cenderung mengalami kenaikan, dari 82,25% pada Tahun 2011 naik menjadi 82,35% di Tahun 2012 mengalami penurunan pada Tahun 2013 menjadi sebesar 79,21%. Lalu pada tahun 2014 ini mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar 80,77%. Sedangkan cakupan PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun cukup dinamis dimana pada tahun 2011 tercatat 2,31 persen mengalami penurunan pada tahun 2012 dan tahun 2013 menjadi 1,62 persen dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2014 ini menjadi 2,14 persen. Hal ini disebabkan semakin terbatasnya tenaga PLKB/PKB di lapangan yang menyebabkan berkurangnya intensitas pembinaan KB kepada para akseptor sehingga menyebabkan sebagian akseptor melakukan *Drop Out* (DO).

Tabel 2.38
Metode Kontrasepsi KB Kabupaten Kudus Tahun 2011 – 2014

No	Metode KB	2011	2012	2013	2014
1.	Suntik	15.211	16.561	14.886	14.654
2.	Pil	6.304	6.584	5.271	5.081
3.	Kondom	1.118	1.280	1.067	1.140
4.	AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim)	618	1.288	1.250	736
5.	Implan/Susuk	599	1.859	2.087	978
6.	MOW (Medis Operasi Wanita)	366	413	511	388
7.	MOP (Medis Operasi Pria)	19	5	6	8

Sumber : BPMPKB Kabupaten Kudus Tahun 2014

Pada Tabel 2.38 terlihat metode kontrasepsi yang banyak digunakan oleh peserta KB Baru adalah Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Non MKJP), yaitu metode suntik dan pil, sedangkan untuk metode MKJP yang banyak dipakai adalah Alat Implan/Susuk dan AKDR/Spiral.

Adapun perkembangan keluarga pra sejahtera ke keluarga sejahtera I dari Tahun 2011 – 2014 cenderung dinamis, hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.39 berikut ini.

Tabel 2.39
Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
Kabupaten Kudus Tahun 2011 – 2014

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah keluarga prasejahtera	25.887	24.866	23.757	23.231
2.	Jumlah keluarga sejahtera I	38.990	40.858	39.586	40.904
3.	Jumlah KK	208.505	209.866	217.721	229.168
4.	Persentase keluarga prasejahtera	12,41	11,84	10,91	10,13
5.	Persentase keluarga sejahtera I	19	19,46	18,18	17,84

Sumber : BPMPKB Kabupaten Kudus Tahun 2014

Jumlah keluarga pra sejahtera pada Tahun 2011 sebesar 25.887 KK atau 12,41% menurun menjadi 23.231 KK atau 10,13% pada Tahun 2014. Adapun jumlah Keluarga Sejahtera I cenderung fluktuatif, dimana dari Tahun 2011 sebesar 38.990 KK mengalami kenaikan di Tahun 2012, tetapi turun kembali di Tahun 2013 dan kembali mengalami kenaikan pada Tahun 2014 menjadi 40.904 KK.

m. Urusan Sosial

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam perlindungan sosial dilaksanakan antara lain melalui

program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, program pembinaan anak terlantar dan program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Pelaksanaan Urusan Sosial Kudus didominasi dengan belanja tidak langsung antara lain berbagai pemberian fasilitasi bantuan sosial dan hibah berupa uang kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang sosial, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pemberian bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat bersifat tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Kinerja pelayanan sosial dapat dilihat pada indikator jumlah sarana sosial, dan jumlah PMKS jumlah anak terlantar dan lansia yang tertampung. Berdasarkan Tabel 2.34 menunjukkan bahwa sarana sosial pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 berjumlah 18 unit dengan jumlah PMKS yang cenderung menurun dari tahun 2011 sebanyak 58.286 orang menjadi sebanyak 15.607 orang pada tahun 2014.

Tabel 2.40
Kinerja Pelayanan Sosial Tahun 2011 – 2014
Kabupaten Kudus

NO	INDIKATOR	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah sarana sosial	18	18	18	18
2	Jumlah PMKS	58.286	57.542	24.494	15.607
3	Jumlah PMKS terlayani	11.519	9.470	6.474	8.629
4	Jumlah PSKS	406	406	597	728

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus Tahun 2014

n. Urusan Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja atau 15 tahun ke atas yang tergolong angkatan kerja pada tahun 2014 (berdasarkan data sementara) berjumlah 411.780 orang. Jumlah pencari kerja pada tahun 2014 sebanyak 26.769 orang (4,43%). Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat pengangguran yang memerlukan pekerjaan untuk dapat menghasilkan pendapatan.

Upaya pembangunan daerah melalui urusan ini, diarahkan bagi perluasan kesempatan kerja/berusaha khususnya bagi penganggur dan mengurus rumah tangga

sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi dan daya saing dalam mencari ataupun menciptakan lapangan kerja mandiri. Namun demikian kendala yang dihadapi pemerintah yaitu peningkatan penyerapan tenaga kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan calon tenaga kerja. Gambaran Penduduk berumur 15 tahun keatas di Kabupaten Kudus Tahun 2011 – 2014 dapat dilihat dalam Tabel 2.41 berikut.

Tabel 2.41
Penduduk Berumur 15 tahun ke atas Menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu

No	Uraian	2011	2012	2013	2014*
1	Penduduk bekerja >15	383.399	410.519	402.091	411.780
2	Pengangguran	25.391	25.522	35.019	26.769
3	Mengurus Rumah Tangga	103.241	85.892	94.683	103.489
4	Sekolah	44.126	39.275	35.745	33.489
5	Lainnya	29.227	19.326	26.532	28.546

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2013 Hasil Sakernas

Keterangan : *) Angka sementara

o. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi. Koperasi berfungsi sebagai wadah gerakan ekonomi rakyat dan agen dalam intermediasi permodalan yang dekat dengan masyarakat. Koperasi dapat dikelompokkan menjadi aktif dan tidak aktif. Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan Rapat Anggota Tahunan. Perkembangan koperasi aktif dapat dilihat pada Tabel 2.42.

Tabel 2.42
Jumlah Koperasi di Kabupaten Kudus Tahun 2011-2014

No	Keterangan	Jumlah Koperasi			
		2011	2012	2013	2014
1.	Koperasi Aktif	378	432	448	457
2.	Koperasi tidak aktif	67	65	65	65
3.	Jumlah Koperasi	445	497	513	522
4.	Prosentase koperasi aktif	84,94	86,92	87,33	87,55
5.	Anggota Koperasi	245.875	248.435	248.963	257.426

Sumber : Dinas Perinkop dan UMKM Kabupaten Kudus Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 2.42 dapat dilihat perkembangan jumlah koperasi dari tahun 2011-2014 yaitu jumlah koperasi aktif bertambah 79 unit, sedangkan jumlah koperasi tidak aktif jumlahnya menurun 2 unit dari 67 unit menjadi 65 unit. Seiring dengan meningkatnya jumlah koperasi, maka jumlah anggota koperasi juga meningkat sebanyak 11.551 orang.

Persentase koperasi aktif meningkat dari 84,94% menjadi 87,55%. Hal ini menunjukkan pelayanan penunjang di daerah melalui koperasi semakin besar dan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya meningkat. Peningkatan kemampuan koperasi dilakukan melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan-pelatihan manajemen dan pemasaran serta fasilitasi dalam hal permodalan, peningkatan teknologi, serta pembinaan dan pengawasan perkoperasian.

Usaha kecil merupakan peluang usaha unit-unit ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Perkembangan jumlah usaha kecil, menengah dan besar serta penyerapan tenaga kerjanya dapat dilihat pada tabel 2.43 dan 2.44 berikut ini.

Tabel 2.43
Jumlah UMKM di Kabupaten Kudus Tahun 2011-2014

No	Kategori Usaha	Jumlah UMKM (unit)			
		2011	2012	2013	2014
1.	Usaha Mikro dan Kecil	10.232	10.315	11.159	11.183
2.	Usaha Menengah	3.123	3.270	2.434	2.441
3.	Usaha Besar	86	86	124	124

Sumber : Dinas Perinkop dan UMKM Kabupaten Kudus Tahun 2014

Tabel 2.44
Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Sektor UMKM di Kabupaten Kudus
Tahun 2011-2014

No	Kategori Usaha	Jumlah (orang)			
		2011	2012	2013	2014
1.	Usaha Mikro dan Kecil	43.040	43.172	44.102	44.198
2.	Usaha Menengah	121.435	121.557	114.461	114.790
3.	Usaha Besar	3.848	3.871	3.847	3.847

Sumber : Dinas Perinkop dan UMKM Kabupaten Kudus Tahun 2014

Dalam kurun waktu 2011-2014, terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja pada usaha mikro dan kecil dari 43.040 orang menjadi 44.198 orang, begitu pula dengan jumlah usaha menengah dari 121.435 orang menjadi 114.790 orang, namun terjadi sedikit penurunan jumlah penyerapan tenaga kerja pada usaha besar dari sebesar 3.848 menjadi sebanyak 3.847 orang.

p. Urusan Penanaman Modal

Kabupaten Kudus telah berinisiatif memberikan kemudahan bagi investor melalui penerbitan peraturan yang pro investasi. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, sampai tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Kudus telah mendorong Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu (One Stop Service). Perkembangan investasi di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Tabel 2.45 berikut.

Tabel 2.45
Perkembangan Investasi Kabupaten Kudus Tahun 2011 – 2014 (juta rupiah)

Tahun	PMA	PMDN Fasilitas	PMDN Non Fasilitas	Jumlah	Jml Tenaga Kerja
2011	22.815,5	0	6.580.571,6	6.603.387,1	98.425
2012	0	0	12.163.499,07	12.163.499,07	32.214
2013	11.374,8	0	11.568.452,70	11.579.827,50	12.982
2014	0	0	8.825.277,79	8.825.277,79	17.604

Sumber : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kudus Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 2.45 di atas, terlihat perkembangan total investasi di Kabupaten Kudus merupakan kegiatan perekonomian yang nilai perkembangannya sangat fluktuaktif dari tahun 2011 sampai dengan 2014.

Meskipun tahun 2014 mengalami penurunan realisasi dari tahun 2013, tetapi realisasi investasi di tahun 2014 mengalami kenaikan realisasi dari target tahun 2014 sebesar 117,22%, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.46.

Tabel 2.46
Target dan Realisasi Investasi 2011 - 2014

Tahun	Target	Realisasi	Ket (%)
2011	5.690.594.042.986	6.603.387.157.053	116.04
2012	6.828.712.851.583	12.163.499.070.003	178.12
2013	7.170.148.494.162	11.579.827.503.311	161.50
2014	7.528.655.918.870	8.825.277.798.062	117.22

Sumber : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kudus Tahun 2014

Untuk investasi PMA yang terealisasi ada 2 perusahaan pada tahun 2011, dan hanya 1 perusahaan pada tahun 2013, dengan perincian pada Tabel 2.47.

Tabel 2.47
Investor PMA di Kabupaten Kudus 2011-2013

No	Tahun	Nama Perusahaan
1.	2011	<ul style="list-style-type: none"> • PT. Yakult Indonesia Persada • PT. Ajinomoto Sales Indonesia
2.	2013	<ul style="list-style-type: none"> • Lohongka Indonesia

Sumber : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kudus Tahun 2014

q. Urusan Kebudayaan

Dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat untuk pengembangan dan pelestarian seni budaya tradisi dan bahasa, pemerintah daerah telah memberi bantuan berupa: Stimulan langsung bagi kelompok-kelompok seni budaya tradisional, maupun modern sebanyak 112 kelompok, dengan harapan kelompok-kelompok kesenian dan pelestari budaya di Kabupaten Kudus semakin berkembang. Ini dibuktikan dengan data kelompok-kelompok Seni dan Budaya yang masih eksis di Kabupaten Kudus antara lain: Seni Tari Tradisional (5 kelompok), Seni Tari modern (6 kelompok), Wayang purwo (15 kelompok), seni barongan (57 kelompok), seni musik tradisional (10 kelompok), Seni musik modern (10 kelompok), orkes melayu (79 kelompok), terbang jidur (22 kelompok), kethoprak (10 kelompok).

Selain hal tersebut di atas, kesejarahan dan kepurbakalaan juga mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, antara lain dengan: pemberian honor bagi Juru pelihara situs dan BCB (Bangunan Cagar Budaya), pembangunan sarana prasarana Rumah Fosil di Desa Terban Kecamatan Jekulo, pemeliharaan bangunan peninggalan Sejarah dan Purbakala, utamanya yang merupakan asset Pemerintah Daerah diantaranya: rehab gedung/aula, dan pembangunan pagar keliling bangunan cagar budaya eks-Kawedanan Cendono dan eks-Kawedanan Tenggeles.

Dengan kegiatan tersebut di atas, diharapkan dapat memberikan tempat dan fasilitas yang nyaman bagi masyarakat untuk beraktifitas dalam kebudayaan dan kesenian serta rekreasi dan edukasi. Sehingga tercipta masyarakat Kudus yang Berbudaya dan Sejahtera. Sedangkan di Museum Kretek pada tahun 2014 ada penambahan wahana Permainan Outbond, Terapi Ikan, Permainan Trampolin, Penataan Display, Gantangan Sangkar Burung dan Pengadaan Permainan Papan edukasi serta Pembuatan Gapuro Museum Kretek.

r. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga diprioritaskan pada peningkatan pengembangan prestasi pemuda dan olahraga serta peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan non formal.

Prestasi yang diraih baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional cukup menggembirakan. Namun demikian pembibitan dan pembinaan perlu terus dilakukan guna mendukung capaian prestasi olahraga di Kabupaten Kudus.

Tabel 2.48
Jumlah Organisasi Pemuda, Organisasi Olahraga, dan Gelanggang Olahraga
Kabupaten Kudus Tahun 2011 – 2014

NO	U r a i a n	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah organisasi pemuda	23	23	26	26
2.	Jumlah organisasi olahraga	32	32	36	36
3.	Jumlah gelanggang olahraga	5	5	5	5

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun 2014

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa kegiatan pemuda pada Tahun 2014 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2011, demikian pula untuk kegiatan olah raga, juga mengalami peningkatan dibanding Tahun 2011. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan jumlah sarana olah raga diantaranya sarana olah raga futsal sehingga mendorong masyarakat untuk giat berolahraga. Untuk pelaksanaan pembangunan sarpras olahraga (GOR), telah dilaksanakan bertahap mulai Tahun 2014 sampai dengan 2016 dan telah memenuhi standar event pelaksanaan olahraga tingkat nasional. Jumlah organisasi pemuda di Tahun 2014 naik menjadi 26 organisasi dan di Tahun 2014 jumlah organisasi olahraga juga mengalami kenaikan menjadi 36 organisasi, sedangkan untuk jumlah gelanggang olahraga cenderung stabil dari Tahun 2011 sampai Tahun 2014 yaitu 5 gelanggang.

s. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Salah satu upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif adalah melalui kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan tindak kejahatan, pengembangan wawasan kebangsaan, pemberantasan penyakit masyarakat dan pembinaan kepada anggota linmas. Partisipasi personil Linmas juga sangat

diperlukan dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat guna membentuk personil Linmas yang handal dan berkualitas. Perkembangan rasio jumlah linmas menunjukkan kepedulian masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sebagaimana tertera pada Tabel 2.49. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk sebesar 63,91 per 10.000 penduduk.

Tabel 2.49
Rasio Jumlah Linmas Kabupaten Kudus Tahun 2011 – 2014

No	U r a i a n	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Linmas	5.111	5.117	5117	5111
2.	Jumlah Penduduk	769.904	780.051	800.670	821.136
3.	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	66,38	65,59	63,91	62,24

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus Tahun 2014

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam upaya pengabdian dan kontrol kegiatan di bidang tertentu. Semakin besar jumlah LSM menunjukkan kontrol masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meningkat. Berdasarkan Tabel 2.50, jumlah LSM tahun 2014 bertambah 6 dibandingkan dengan tahun 2013. Diharapkan peran serta LSM sebagai sarana penyalur aspirasi anggota dan atau masyarakat dan sarana komunikasi sosial timbal balik antara anggota dan atau antara organisasi kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, dapat membantu Pemerintah Daerah ikut menciptakan suasana yang kondusif untuk mensukseskan pembangunan.

Tabel 2.50
Jumlah LSM Kabupaten Kudus Tahun 2010 – 2014

No	U r a i a n	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah LSM lokal	74	70	78	84
2.	Jumlah LSM nasional	-	-	-	-
3.	Jumlah LSM asing/internasional	-	-	-	-
4.	Jumlah LSM	74	70	78	84

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus Tahun 2014

Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, dapat diketahui dari besarnya rasio jumlah Polisi Pamong Praja. Jumlah Polisi Pamong Praja yang ada di Kabupaten Kudus mengalami

penurunan dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan adanya anggota Polisi Pamong Praja yang pensiun dan mutasi. Untuk itu diharapkan dengan segala keterbatasan mampu memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan secara optimal.

Tabel 2.51
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus
Tahun 2011 – 2014

NO	U r a i a n	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Polisi Pamong Praja	72	62	58	79
2.	Jumlah Penduduk	785.585	791.891	797.003	821.136
3.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	0,9165	0,7829	0,7277	0,9621

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Tahun 2014

Salah satu kegiatan dalam pelaksanaan penataan lingkungan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus adalah penertiban terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah. Pelaksanaan penertiban ini dilaksanakan secara terpadu antara Instansi Pemerintah, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja serta instansi vertikal lainnya. Dalam rangka peningkatan ketertiban di Kabupaten Kudus, beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu penertiban PKL, pengamanan demo dan penanganan konflik di daerah bekerjasama dengan instansi terkait. Selain itu dilakukan mitigasi bencana melalui pembentukan desa tangguh bencana, penanganan bencana daerah, dan perbaikan fasilitas publik akibat bencana.

Kinerja penegakan Perda pada tahun 2014 sebanyak 70 kasus, hal ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2013, sebagaimana pada Tabel 2.52.

Tabel 2.52
Jumlah Penegakan PERDA dan Penyelesaian Penegakan PERDA Kabupaten Kudus
Tahun 2011 – 2014

NO	U r a i a n	2011	2012	2013	2014
1.	Penegakan PERDA	117	137	66	70
2.	Penyelesaian penegakan PERDA	117	137	66	70

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Tahun 2014

- t. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian dapat dilihat melalui berbagai sektor, antara lain : Kinerja DPRD, Jumlah/Data PNS Guru dan Non Guru, Jumlah Desa, RW, RT masing-masing Kecamatan se-Kabupaten Kudus serta Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Desa dan pelaksanaan Pilkades.

Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus salah satunya dapat diukur melalui jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus yang dihasilkan untuk periode Tahun 2011-2014, sebagaimana tertera pada Tabel 2.53

Tabel 2.53
Jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011-2014

Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
Perda Kab. Kudus No. 1 Tahun 2011 tentang APBD Kab. Kudus TA. 2011	Perda Kab. Kudus No. 1 Tahun 2012 tentang APBD Kab. Kudus Tahun Anggaran 2012	Perda Kab. Kudus No. 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Perda Kab. Kudus No. 1 Tahun 2014 tentang APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014
Perda Kab. Kudus No. 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Kudus kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Kudus Tahun 2011	Perda Kab. Kudus No. 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Kudus Nomor 12 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Perda Kab. Kudus No. 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak	Perda Kab. Kudus No. 2 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018
Perda Kab. Kudus No. 3 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Kudus TA. 2010	Perda Kab. Kudus No. 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus	Perda Kab. Kudus No. 3 Tahun 2013 tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah	Perda Kab. Kudus No. 3 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2013
Perda Kab. Kudus No. 4 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perda Kab. Kudus No. 4 Tahun 2012 tentang Garam Konsumsi Beryodium	Perda Kab. Kudus No. 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengendalian dan Pengawasan Warung Internet	Perda Kab. Kudus No. 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung
Perda Kab. Kudus No. 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan	Perda Kab. Kudus No. 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Perda Kab. Kudus No. 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi	Perda Kab. Kudus No. 5 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus
Perda Kab. Kudus No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal	Perda Kab. Kudus No. 6 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011	Perda Kab. Kudus No. 6 Tahun 2013 tentang Perpasaran Swasta	Perda Kab. Kudus No. 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lemtekda, Satpol PP dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus.

Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
Perda Kab. Kudus No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir	Perda Kab. Kudus No. 7 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet	Perda Kab. Kudus No. 7 Tahun 2013 tentang Penyertaan Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Usaha Mikro dan Koperasi di Kabupaten Kudus	Perda Kab. Kudus No. 7 Tahun 2014 tentang Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014
Perda Kab. Kudus No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Perda Kab. Kudus No. 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil		Perda Kab. Kudus No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Perda Kab. Kudus No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Perda Kab. Kudus No. 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa		Perda Kab. Kudus No. 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
Perda Kab. Kudus No. 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek	Perda Kab. Kudus No. 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus		
Perda Kab. Kudus No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Perda Kab. Kudus No. 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus		
Perda Kab. Kudus No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Perda Kab. Kudus No. 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus		
Perda Kab. Kudus No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan	Perda Kab. Kudus No. 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat		
Perda Kab. Kudus No. 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Perda Kab. Kudus No. 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar		

Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
Perda Kab. Kudus No. 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan	Perda Kab. Kudus No. 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012		
Perda Kab. Kudus No. 16 Tahun 2011 tentang Perubahan APBD Kab. Kudus TA. 2011	Perda Kab. Kudus No. 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032		

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 2.53, terlihat bahwa penetapan Perda pada tahun 2011 dan tahun 2012 sebanyak 16 Perda, tahun 2013 sebanyak 7 Perda dan tahun 2014 sebanyak 9 Perda. Minimnya Perda yang dihasilkan pada Tahun 2013 disebabkan antara lain tidak tercapainya kuorum anggota DPRD Kabupaten Kudus dalam rapat pembahasan Rancangan Perda Kabupaten Kudus tentang APBD Tahun Anggaran 2013 dan tidak terbahasnya Rancangan Perda Kabupaten Kudus tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012. Pada Tahun 2014 Perda yang dihasilkan relatif lebih banyak dibandingkan Tahun 2013 akan tetapi masih lebih sedikit dibandingkan tahun 2011 dan Tahun 2012, hal ini disebabkan Tahun 2014 merupakan masa transisi/peralihan DPRD lama (periode 2009-2014) dengan DPRD baru (periode 2014-2019) sehingga pembahasan beberapa Ranperda tidak efektif. Namun demikian pada Tahun 2014 telah terjadi perubahan yang cukup baik dalam penyusunan Perda, dimana Perda APBD Tahun Anggaran 2015 telah tersusun dan ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini yang selama ini jarang terjadi di Kabupaten Kudus.

Pengelolaan pendapatan daerah terutama yang bersumber dari hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini dapat terlihat dari Tabel 2.54. Tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami kenaikan PAD. Bahkan pada tahun 2014 mengalami kenaikan 61,44% dibandingkan tahun 2013. Peningkatan ini merupakan akibat dari adanya dana kapitasi jaminan kesehatan Nasional.

Tabel 2.54
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kudus
Tahun 2011-2014

No.	Tahun	Realisasi (Rp)	Kenaikan (%)
1.	2011	108.458.832.665	15,34
2.	2012	121.017.026.873	11,58
3.	2013	144.995.092.035	19,81
4.	2014	234.073.380.352	61,44

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014

Pada Penyampaian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012 dan 2013, Pemerintah Kabupaten Kudus memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, dengan catatan pada tahun 2012 Pengelolaan Aset masih diperlukan penyempurnaannya, antara lain pemasangan label, sertifikasi, kerjasama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga, identifikasi nilai aset, dan penataan serta validasi neraca aset.

Pengelolaan keuangan desa perlu mendapatkan perhatian bersama. Terutama dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dari Pemerintah Pusat melalui APBD, pengelolaan keuangan harus dapat dilaksanakan dengan transparans, akuntabel, partisipatif serta

tertib dan disiplin. Peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya di tingkat Pemerintah Desa sebagai pengelola keuangan desa perlu mendapat perhatian yang serius, sehingga nantinya tidak ada permasalahan hukum yang terjadi serta diharapkan program-program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan dapat dilaksanakan secara efektif, untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terjadi perubahan konsep manajemen dan pengaturan kepegawaian. PNS dituntut untuk lebih profesional, berdayaguna, memiliki integritas dan memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang dimiliki dan juga harus mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara optimal. Hal ini diperlukan suatu metode atau teknik merumuskan informasi jabatan yang akurat yang dapat mendiskripsikan pekerjaan pada masing-masing jabatan yang disebut dengan analisis jabatan. Analisis Jabatan telah dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Kudus secara bertahap mulai tahun 2012 dengan jumlah 4 SKPD, Tahun 2013 dengan jumlah 4 SKPD dan Tahun 2014 dengan jumlah 21 SKPD.

Di samping itu, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga berdampak munculnya beberapa implikasi, salah satunya adalah perubahan manajemen penggajian. PNS mendapatkan gaji dan tunjangan sesuai beban kerja, tanggungjawab, pencapaian kinerja dan kompetensi masing-masing jabatan. Untuk mengukur beban kerja dan tanggungjawab tersebut, dilakukan pemeringkatan jabatan/pekerjaan pada PNS dalam nilai dan kelas jabatan yang disebut dengan Evaluasi Jabatan. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dilakukan pada Tahun 2014 pada 15 SKPD.

Hal-hal yang terkait dengan analisa jabatan, evaluasi jabatan dan tambahan penghasilan/tunjangan kinerja pegawai adalah sebagai berikut:

1. Analisis Jabatan yang memuat informasi jabatan yang lengkap dan akurat akan digunakan sebagai dasar melaksanakan evaluasi jabatan.
2. Evaluasi Jabatan lebih difokuskan untuk menentukan bobot jabatan dan tingkat jabatan.
3. Hasil Evaluasi Jabatan yang berupa klasifikasi dan peringkat jabatan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan kebijakan tambahan penghasilan dan tunjangan kinerja pegawai.

Langkah-langkah konkrit untuk perbaikan kinerja aparatur pemerintah daerah sebagai penyedia layanan terhadap masyarakat dilaksanakan melalui peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah secara professional dan terencana. Peningkatan kualitas SDM aparatur antara lain melalui penyelenggaraan diklat aparatur baik teknis, kepemimpinan maupun fungsional, pengiriman tugas belajar dan fasilitasi ijin belajar, pelaksanaan bintek dan kursus keahlian. Perkembangan komposisi aparatur pada Pemerintahan Kabupaten Kudus tahun 2011-2014 sebagaimana tertera pada Tabel 2.55 berikut.

Tabel 2.55
Rekap Jumlah Pegawai Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2011-2014

No	Tahun	Struktural	Fungsional			PNS	CPNS	Jumlah
			Guru	Non Guru	Staf			
1	2011	538	5.310	868	3.194	9.642	268	9.910
2	2012	562	5.258	996	2.831	9.647	0	9.647
3	2013	562	5.196	1.042	2.461	9.261	0	9.261
4	2014	556	4.976	1.035	2.484	8.992	59	9.051

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014

Jumlah PNS dan CPNS Tahun 2011-2014 yang terbagi dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional sebagaimana dalam tabel di atas. Untuk Jabatan Fungsional terbagi dalam Guru, Non Guru (misal : Penyuluh KB, Penyuluh Pertanian, dan lain-lain) dan Staf. Jumlah keseluruhan pegawai (PNS dan CPNS) tahun 2012 sampai dengan 2014 mengalami penurunan dibanding jumlah pada tahun 2011 dikarenakan banyaknya pegawai yang pensiun serta tidak adanya penerimaan CPNS di Kabupaten Kudus, kecuali pada tahun 2013 baru dilaksanakan penerimaan CPNS sebanyak 50 formasi untuk tenaga pendidik (guru). Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Kudus mendapat tambahan CPNS baru hasil dari penerimaan CPNS tahun 2013 sebanyak 50 orang untuk formasi tenaga pendidik (guru) serta 9 orang CPNS dari tenaga kesehatan (dokter).

Jumlah Desa/Kelurahan, RT/RW per Kecamatan, ADD Desa dan Bagi Hasil ke Desa merupakan variabel yang mempengaruhi tingkat kepuasan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Perkembangan jumlah penduduk mendorong peningkatan aktivitas masyarakat sehingga membutuhkan layanan yang meningkat. Hal ini tercermin dari jumlah RT dan RW yang bertambah, jumlah ADD Desa dan bagi hasil desa yang meningkat pula.

Tabel 2.56
Jumlah Desa/Kelurahan, RW dan RT se-Kabupaten Kudus Tahun 2011-2014

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan				RW				RT			
		2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
1	Kaliwungu	15	15	15	15	67	67	67	67	441	442	442	442
2	Kota	25	25	25	25	110	110	111	110	495	495	496	495
3	Jati	14	14	14	14	78	78	79	79	375	377	381	381
4	Undaan	16	16	16	16	63	63	63	63	357	357	357	357
5	Mejobo	11	11	11	11	69	69	69	69	341	341	341	341
6	Jekulo	12	12	12	12	85	85	85	85	443	443	443	443
7	Bae	10	10	10	10	51	51	51	51	281	285	285	285
8	Gebog	11	11	11	11	81	82	82	82	432	435	435	435
9	Dawe	18	18	18	18	109	109	109	109	577	581	581	581
	Jumlah	132	132	132	132	713	714	716	715	3743	3756	3761	3760

Sumber : Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014

Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 Kecamatan yang terdiri dari 123 Desa dan 9 Kelurahan, yang masing-masing pembagian Desa/Kelurahan, jumlah RW dan RT per Kecamatan sebagaimana tersebut tabel di atas. Untuk jumlah Desa/Kelurahan sampai tahun 2014 tidak mengalami perubahan, tetapi untuk jumlah RW dan RT setiap tahun mengalami perubahan. Pada Tahun 2011 jumlah RW sebanyak 713 dan RT sebanyak 3.743 naik menjadi 716 RW dan 3.761 RT pada

Tahun 2013. Namun pada Tahun 2014 jumlah RW maupun RT mengalami penurunan yaitu jumlah RW 715 dan RT 3760. Hal ini disebabkan adanya penggabungan RW dan RT di salah satu kelurahan di Kabupaten Kudus.

Tabel 2.57
Jumlah ADD Desa dan Bagi Hasil ke Desa Kabupaten Kudus Tahun 2011-2014

No	Tahun	ADD	Bagi Hasil		Bagi Hasil Pasar Desa	Jumlah
			Bagi Hasil Pajak Daerah	Bagi Hasil Retribusi Daerah		
1	2011	14.042.300.000	2.119.474.000	257.215.000	355.380.950	16.774.369.950
2	2012	19.042.300.000	3.668.775.000	282.937.000	369.567.650	23.363.579.650
3	2013	19.042.300.000	3.668.775.000	311.231.000	438.190.000	23.460.496.000
4	2014	25.208.705.000	5.387.787.000	345.636.000	547.303.000	31.489.431.000

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014

Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 cenderung meningkat dari Rp. 14.042.300.000,-, menjadi Rp. 25.208.705.000,-. Demikian pula Bagi Hasil Desa (baik berupa Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Pasar Desa) tiap tahunnya cenderung meningkat, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang antara lain mengatur pengalokasian dana kepada Desa yang bersumber dari APBD memberikan implikasi terhadap perubahan struktur APBD Kabupaten Kudus. Hal ini dapat terlihat pada Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD setelah dikurangi DAK. Selain itu pengalokasian bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah juga akan memberikan kenaikan yang cukup besar pada Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, sehingga pada akhirnya akan terdapat belanja lain yang akan berkurang alokasinya karena kenaikan alokasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa tersebut.

Adapun tujuan dari ADD antara lain :

- a) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e) Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat;

- f) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kudus periode tahun 2011-2014 dapat dilihat di tabel 2.51. Tahun 2011 pilkades dilaksanakan di 1 desa yaitu Desa Golantepus Kecamatan Mejobo. Pada Tahun 2013 Kabupaten Kudus telah melaksanakan pemilihan Kepala Desa di 116 desa. Namun demikian, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 mengalami penundaan beberapa bulan, sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Tengah yang berbarengan/bersamaan dengan masa berakhirnya Kepala Desa. Hal ini sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Juli 2012 perihal Penyelenggaraan Pilkades di Daerah dan surat Mendagri tanggal 8 Oktober 2012 perihal Penjelasan Pejabat Kepala Desa. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 di Kabupaten Kudus dilaksanakan pada tanggal 24 Nopember 2013. Tahun 2014 di Kabupaten Kudus, sesuai rencana akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa sebanyak 5 desa yakni Desa Langgardalem dan Kaliputu Kecamatan Kota, Desa Hadiwarno dan Mejobo Kecamatan Mejobo serta Desa Loram Kulon Kecamatan Jati. Namun sehubungan dengan adanya surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 140/7635/PMD tanggal 8 November 2013 perihal Pemilihan Kepala Desa Tahun 2014, bahwa dengan adanya Pemilu Anggota Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka pemilihan Kepala Desa Tahun 2014 ditiadakan dan sesuai rencana akan dilaksanakan pada Tahun 2015 sambil menunggu pengesahan Perda baru tentang Pemilihan Kepala Desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kudus pada tahun 2013 yang dilaksanakan oleh 116 desa, mengandung konsekwensi dan kewajiban bagi Kepala Desa baru untuk segera membuat dokumen perencanaan pembangunan desa selama masa jabatannya sebagai Kepala Desa dengan menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dalam kurun waktu 6 tahun dan membuat rencana pembangunan tahunan sebagai penjabaran pelaksanaan RPJM Desa, dengan menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dengan mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. RPJM Desa maupun RKP Desa perlu disusun dengan cermat dan baik oleh Pemerintah Desa beserta seluruh komponen masyarakat desa dengan fasilitasi Pemerintah Kecamatan, sehingga diharapkan dokumen yang disusun benar-benar dapat menjamin terciptanya pemerintahan yang baik, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan

penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan lancar, tertib dan sesuai aturan.

Pada tahun 2014 dari 116 Kepala Desa baru hasil Pemilihan Kepala Desa pada tahun 2013 telah tersusun dokumen perencanaan RPJM Desa periode Tahun 2013-2019.

Tabel 2.58
Data Pelaksanaan Pilkades Kabupaten Kudus Tahun 2011-2014

No	Kecamatan	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	Kaliwungu	0	0	15	0
2	Kota Kudus	0	0	14	0
3	Jati	0	0	13	0
4	Undaan	0	0	16	0
5	Mejobo	1	0	8	0
6	Jekulo	0	0	12	0
7	Bae	0	0	10	0
8	Gebog	0	0	10	0
9	Dawe	0	0	18	0
Jumlah		1	0	116	0

Sumber : Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Kudus Tahun 2014

Dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, maka pemerintah daerah selalu mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu kebijakan, meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur, meningkatkan serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, yang dukung kondisi yang aman, tentram, tertib dan kondusif.

u. Urusan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Empat aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganeekaragaman dan keamanan pangan serta penanganan kerawanan pangan.

Ketersediaan pangan pokok di Kabupaten Kudus pada tahun 2014 sebesar 124.500 ton, yang terdiri dari cadangan pangan pemerintah sebesar 6.500 ton dan cadangan pangan masyarakat sebesar 118.000 ton. Kebutuhan konsumsi sebesar 73.702 ton dengan asumsi 92,78 kg/kap/th. Dengan demikian terjadi surplus beras sebesar 50.798 ton. Sebagai acuan konsumsi pangan adalah Angka Kecukupan Gizi (AKG), menurut Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2004, untuk konsumsi energi sebesar 2000 kkal/kapita/hr dan protein 52 gram.

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data pola konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Kudus, dapat diperoleh gambaran kualitas konsumsi masyarakat sebagaimana Tabel 2.59 berikut.

Tabel 2.59
Angka Kecukupan Energi, Keragaman Konsumsi Pangan Penduduk
Tahun 2012 – 2014 Kabupaten Kudus

No	Kelompok Pangan	Angka Kecukupan Energi / Standar Nasional (Kkal/kap/hr)	Angka Kecukupan Energi Kab. Kudus (Kkal/Kpt/hr)			Skor PPH maksimum (%)	Skor PPH Kabupaten Kudus (%)		
			2012	2013	2014		2012	2013	2014
1	Padi-padian	1.000,0	995,9	862,1	820,4	25,0	25,0	21,6	20,5
2	Umbi-umbian	120,0	119,5	37,5	99,4	2,5	1,1	0,9	2,5
3	Pangan Hewani	240,0	239,0	225,3	260,7	24,0	21,3	22,5	24,0
4	Minyak & Lemak	200,0	199,2	184,8	168,9	5,0	2,8	4,6	5,0
5	Buah/Biji berminyak	60,0	59,8	11,3	0,1	1,0	0,4	0,3	0,0
6	Kacang-kacangan	100,0	99,6	245,2	118,1	10,0	10,0	10,0	10,0
7	Gula	100,0	99,6	34,8	90,4	2,5	1,8	0,9	2,3
8	Sayur dan buah	120,0	119,5	110,7	103,7	30,0	24,1	27,7	25,9
9	Lain-lain	60,0	59,8	0,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	TOTAL	2.000,0	1.991,8	1.712,2	1.692,6	100,0	86,5	88,5	90,2

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus Tahun 2014

Skor PPH Kabupaten Kudus pada tahun 2014 mencapai 90,2% yang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan skor PPH pada tahun-tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2012 sebesar 86,5% dan 2013 sebesar 88,5%. Peningkatan skor PPH tahun 2014 didongkrak oleh meningkatnya konsumsi pangan hewani, minyak dan lemak, dan peningkatan konsumsi sayur dan buah-buahan. Target skor PPH tahun 2015 bagi Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian adalah 90,0%.

v. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial dan budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintah desa dan kelurahan, lembaga pemberdayaan masyarakat dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dan desa dilakukan dengan melibatkan kader pemberdayaan masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa. Perkembangan jumlah lembaga dan kader pemberdayaan masyarakat sebagaimana pada Tabel 2.60

Tabel 2.60
Perkembangan Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus
Tahun 2011-2014

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Unit Pengelola Kegiatan (PNPM Perdesaan)	3	3	3	3
2	Jumlah Posyandu Aktif	713	786	786	786
3	Jumlah PKK Aktif	14.404	14.404	14.404	14.404
4	Jumlah Pasar Desa	16	16	16	16
5	Jumlah BKM (PNPM Perkotaan)	86	86	86	86

Sumber : BPMPKB Kabupaten Kudus Tahun 2014

Dari tabel di atas, jumlah Unit Pengelola Kegiatan, Jumlah PKK Aktif, Jumlah Pasar Desa dan Jumlah BKM cenderung stagnan/tetap dari Tahun 2011-2014, sedangkan untuk Jumlah Posyandu aktif mengalami kenaikan dari Tahun 2011 berjumlah 713 menjadi 786 dari Tahun 2012 hingga pada Tahun 2014. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mempunyai tujuan untuk meningkatnya keberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintah desa/ kelurahan dalam memfasilitasi proses pengelolaan pembangunan yang partisipatif dan demokratis. Sedangkan PNPM memiliki manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, memperkuat institusi lokal, dan memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Sedangkan dampak yang diharapkan adalah meningkatnya tingkat keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desa serta berkurangnya angka kemiskinan daerah. Kendati demikian terdapat sejumlah persoalan menghadang yakni ketidakpastian kelanjutan program PNPM membuat para pelaku PNPM tidak maksimal dalam melaksanakan program di tahun 2014. Selain itu ketidakpastian aturan atau petunjuk teknis terkait nasib PNPM di tahun 2015 membuat SKPD dan pelaku PNPM di lapangan kebingungan untuk melangkah setelah berakhirnya PNPM Tahun 2014. Di sisi lain pemutusan kontrak fasilitator pendamping PNPM per 31 Desember 2014 membuat program PNPM di kecamatan rawan konflik dan penyimpangan. Hal ini disebabkan selama ini hal-hal teknis di lapangan terkait PNPM selalu didampingi fasilitator.

w. Urusan Statistik

Urusan Statistik dilaksanakan guna menyediakan publikasi data dan informasi statistik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah sebagai wujud peningkatan pelayanan statistik daerah. Kebutuhan akan data statistik senantiasa di-update setiap tahunnya, guna memenuhi informasi statistik yang lebih transparan dan murah, data-data ini telah dipublikasikan melalui web Kabupaten Kudus (www.kuduskab.go.id). Adapun penyusunan data statistik Kabupaten Kudus meliputi Kudus Dalam Angka, Sekilas Statistik Kabupaten Kudus, PDRB serta buku Analisis Situasi Pembangunan Manusia.

x. Urusan Kearsipan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, tertib pengarsipan menjadi suatu keharusan, bermanfaat sebagai bukti kegiatan dan merupakan wujud dilaksanakannya akuntabilitas instansi/lembaga. Pengelolaan arsip menjadi tanggungjawab dari seluruh instansi penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaan arsip secara baku telah dilaksanakan oleh 52 SKPD di Kabupaten Kudus, sebagaimana pada Tabel 2.61.

Tabel 2.61
Pengelolaan Arsip secara Baku di Kabupaten Kudus Tahun 2011 – 2014

No	Indikator	2011	2012	2013	2014
1.	Pengelolaan arsip secara baku (%)	100	100	100	100
2.	Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku	43	44	44	52
3.	Jumlah SKPD	43	44	44	52

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014

y. Urusan Komunikasi dan Informatika

Kinerja urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat dalam indikator rasio wartel/warnet terhadap penduduk, jumlah surat kabar nasional/lokal, jumlah penyiaran radio/TV lokal, website milik pemerintah daerah dan pameran/expo. Rasio wartel/warnet sebanyak 0,234, surat kabar baik terbitan nasional maupun lokal sebanyak 10 jenis. Adapun *website* milik pemerintah daerah telah ada sejak tahun 2008. Sedangkan persentase Satuan Kerja dan Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus yang memiliki *website* Tahun 2011 – 2014 dijelaskan pada Tabel 2.62 sampai dengan Tabel 2.65 berikut ini.

Tabel 2.62
Rasio Wartel/Warnet per 1000 Penduduk Tahun 2011 - 2014
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah wartel/warnet	180	187	187	129
2	Jumlah penduduk	769.904	780.051	800.670	821.136
3	Rasio wartel/warnet	0,234	0,240	0,234	0,157

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2014

Tabel 2.63
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2011 - 2014
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional	4	4	4	4
2	Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal	4	4	6	6
3	Total jenis surat kabar (1+2)	8	8	10	10

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2014

Tabel 2.64
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tahun 2011 - 2014
Kabupaten Kudus

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah penyiaran radio lokal	6	6	6	6
2	Jumlah penyiaran radio nasional	2	2	2	2
3	Jumlah penyiaran TV lokal	5	5	5	5
4	Jumlah penyiaran TV nasional	11	11	11	11
5	Total penyiaran radio/TV lokal (1+2+3+4)	24	24	24	24

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2014

Tabel 2.65
Persentase Satuan Kerja dan Perangkat Daerah yang Memiliki Website
Tahun 2011-2014 Kabupaten Kudus

Tahun	Jumlah SKPD	Jumlah SKPD Memiliki Website	Persentase
2011	43	15	34,88
2012	44	16	36,36
2013	44	17	38,63
2014	44	19	43,18

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2014

Penyebaran informasi Kabupaten Kudus telah dilaksanakan melalui website dan telah dilakukan update tiap tahunnya sehingga tersedia informasi profil terkini. Pembangunan sarana telekomunikasi dan informasi ditujukan untuk mengoptimalkan akses layanan komunikasi data dan suara bagi seluruh rakyat. Aspek komunikasi dan informasi menjadi sebuah modal yang penting dalam pembangunan. Sarana komunikasi dan informasi di Kabupaten Kudus berkembang cukup pesat. Salah satunya dapat dilihat dari jumlah tower yang meningkat setiap tahunnya sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Ketersediaan sarana komunikasi dan informasi dengan biaya yang makin terjangkau akhirnya menciptakan makin terjangkaunya biaya komunikasi dan informasi memudahkan masyarakat untuk cepat dalam menerima segala informasi yang dibutuhkan.

Tabel 2.66
Perkembangan jumlah Menara Telekomunikasi Bersama
Di Kabupaten Kudus Tahun 2011- 2014

Tahun	Jumlah
2011	79
2012	87
2013	90
2014	126

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2014

z. Urusan Perpustakaan

Dalam upaya meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dan sebagai penunjang kelangsungan pendidikan serta untuk meningkatkan budaya baca masyarakat, peran perpustakaan umum sangat diperlukan

dalam memberikan pelayanan dan penyediaan bahan bacaan bagi masyarakat. Perkembangan kinerja urusan perpustakaan dapat dilihat pada Tabel 2.67 sampai dengan 2.69 berikut ini.

Tabel 2.67
Jumlah Perpustakaan Kabupaten Kudus
Tahun 2011 – 2014

No	U r a i a n	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah perpustakaan milik pemerintah daerah (Pemda)	2	2	2	2
2.	Jumlah Perpustakaan milik non Pemda	120	120	161	161
3.	Total Perpustakaan (1+2)	122	122	163	163

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014

Tabel 2.68
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Kudus
Tahun 2011 – 2014

No	U r a i a n	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan milik pemerintah daerah (Pemda)	37.800	26.156	26.827	23.454
2.	Jumlah pengunjung Perpustakaan milik non Pemda	36.000	24.000	25.369	23.151
3.	Total Pengunjung Perpustakaan (1+2)	73.800	50.156	52.196	46.605

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014

Tabel 2.69
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Tahun 2011 – 2014
Kabupaten Kudus

No	U r a i a n	2011	2012	2013	2014
1.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,80	0,82	0,94	0,81
2.	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	12.954	16.904	20.839	21.440
3.	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	16.127	20.611	25.208	26.396

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 2.67 dan 2.68 maka terlihat pada tahun 2014 jumlah perpustakaan non pemerintah masih sama jumlahnya dibanding tahun sebelumnya. Terlihat juga jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2014 cenderung menurun dibandingkan tahun 2013, serta ada kecenderungan pengunjung yang datang ke perpustakaan milik pemerintah daerah lebih banyak dibandingkan pengunjung yang datang ke perpustakaan non pemerintah. Untuk meningkatkan referensi telah diupayakan penganekecaragan koleksi buku.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diamanatkan bahwa salah satu kewenangan pada urusan

perpustakaan yang selama ini menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, dialihkan menjadi kewenangan lokal berskala desa yaitu pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan. Sehingga Pemerintah Desa diharapkan sudah mulai mempersiapkan dengan baik terkait perencanaan penganggaran, penyiapan sarana prasarana maupun sumber daya manusia sehubungan pengalihan kewenangan pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan.

2.1.3.2 Fokus Layanan Pilihan

a. Urusan Pertanian

Layanan pilihan urusan pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan dan peternakan. Layanan urusan pertanian dilaksanakan melalui pengelolaan lahan dan air yang diarahkan untuk mendukung peningkatan dan pengembangan tanaman, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Pada Tahun 2014 komoditas padi untuk angka capaian luas tanam, panen dan produksi mengalami penurunan jika dibandingkan angka capaian di Tahun 2013. Hal tersebut dikarenakan pada *subround* I Tahun 2014 yaitu pada bulan januari, february dan maret terjadi bencana banjir di Kabupaten Kudus yang merendam areal persawahan di beberapa kecamatan dan menyebabkan puso (gagal panen) seluas 5.787 Ha di Kecamatan Jati 257 Ha, Undaan 3.201 Ha, Kaliwungu 175 Ha, Jekulo 1.287 Ha, serta Mejobo 867 Ha. Areal sawah yang mengalami gagal panen (puso) cukup luas sehingga menyebabkan angka capaian tanam, panen dan produksi padi belum dapat mencapai angka target kabupaten. Perkembangan luas tanam dan produksi padi tercantum pada Tabel 2.70.

Tabel 2.70

Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Padi Kabupaten Kudus Tahun 2011 – 2014

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Luas tanam padi (Ha)	24.673	27.156	29.402	26.152
2.	Luas panen padi (Ha)	23.149	25.905	27.011	21.682
3.	Produksi padi (Ton GKG)	124.803	148.055	140.201	129.281

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus Tahun 2014

Komoditas jagung tahun 2014 angka capaian luas tanam, panen dan produksi mengalami peningkatan jika dibandingkan angka capaian di Tahun 2013. Hal tersebut dikarenakan bencana banjir yang terjadi pada *Subround* I Tahun 2014 yaitu pada bulan Januari, Februari dan Maret mendorong petani untuk memanfaatkan lahan yang tidak tergenang banjir dengan memanfaatkan daerah tanggul lahan perhutani yang diperluas di daerah kecamatan jekulo untuk ditanami jagung karena ketersediaan air yang mencukupi karena tingginya curah hujan. Sehingga untuk target produksi Kabupaten Kudus untuk tahun 2014 dapat tercapai. Perkembangan luas tanam dan produksi jagung tercantum pada Tabel 2.71.

Tabel 2.71
Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Jagung Kabupaten Kudus Tahun 2011 – 2014

No	U r a i a n	2011	2012	2013	2014
1.	Luas tanam jagung (Ha)	4.768	3.388	2.558	2.959
2.	Luas panen jagung (Ha)	5.112	3.947	2.415	2.792
3.	Produksi jagung (Ton)	25.594	20.888	14.448	17.082

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus Tahun 2014

Untuk komoditas kedelai tahun 2014 angka capaian luas tanam, panen dan produksi mengalami peningkatan jika dibandingkan angka capaian di Tahun 2013. Hal tersebut dikarenakan adanya bantuan benih dari Provinsi untuk mendorong minat petani untuk membudidayakan kedelai di Kabupaten Kudus. Harga jual kedelai yang tinggi dan stabil juga merupakan salah satu faktor pendorong minat petani untuk membudidayakan kedelai, Sehingga untuk target produksi kedelai Kabupaten Kudus untuk tahun 2014 dapat tercapai. Perkembangan luas tanam dan produksi kedelai tercantum pada Tabel 2.72.

Tabel 2.72
Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Kedelai Kabupaten Kudus Tahun 2011 – 2014

No	U r a i a n	2011	2012	2013	2014
1.	Luas tanam kedelai (Ha)	169	71	67	143
2.	Luas panen kedelai (Ha)	169	69	67	104
3.	Produksi kedelai (Ton)	166	80	143	261

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus Tahun 2014

Tanaman perkebunan yang ada di Kabupaten Kudus adalah jenis tanaman perkebunan rakyat seperti tebu, kapuk, kelapa, kopi dan kapas. Luas tanam pada tahun 2014 merupakan penanaman dengan masa panen tahun 2014 dan 2015. Pada tahun 2014 luas tanam gula putih sebesar 2.536,43 Ha dan luas tanam gula merah sebesar 3.094,00 Ha. Produksi gula putih tahun 2014 sebesar 11.040,40 ton dan 21.349,16 ton untuk produksi gula merah. Produksi gula merah pada tahun 2014 mengalami kenaikan yang cukup drastis, hal ini disebabkan kenaikan harga gula tumbu sehingga banyak petani yang sebelumnya menanam ketela, beralih kembali menanam tebu.

Perkembangan luas tanam dan produksi tebu tercantum pada Tabel 2.73.

Tabel 2.73
Luas Tanam dan Produksi Tebu Kabupaten Kudus Tahun 2011 – 2014

No	U r a i a n	2011	2012	2013	2014
1.	Luas tanam gula putih (Ha)	3.727,60	3.797,80	3.186,49	2.536,43
2.	Luas tanam gula merah (Ha)	2.874,00	3.404,63	2.756,07	3.094,00
3.	Produksi gula putih (Ton)	14.090,33	17.214,12	15.233,93	11.040,40
4.	Produksi gula merah (Ton)	14.545,72	19,207,21	17.699,50	21.349,16

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus Tahun 2014

Peternakan yang berkembang di Kabupaten Kudus adalah ternak besar (sapi dan kerbau) dan ternak kecil (kambing) dan unggas. Produksi ternak mengalami peningkatan terutama ternak unggas sebagaimana tercantum pada Tabel 2.74.

Tabel 2.74
Jumlah Ternak Kabupaten Kudus Tahun 2011 – 2014

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Sapi (ekor)	11.339	11.053	9.758	10.213
2.	Kerbau (ekor)	2.692	2.173	1.896	2.214
3.	Kambing (ekor)	22.876	29.881	30.077	30.174
4.	Ayam buras (ekor)	412.841	341.812	386.237	351.809

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus Tahun 2014

b. Urusan Kehutanan

Layanan urusan kehutanan dilaksanakan melalui pemanfaatan potensi sumber daya hutan, rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan dan konservasi sumber daya hutan. Berdasarkan surat Menteri Kehutanan Nomor 753 Tahun 2012, hutan di Kabupaten Kudus terdiri dari hutan negara 3.602,841 Ha dan hutan rakyat 3.698,25 Ha. Hutan negara meliputi hutan lindung 1.475,10 Ha, hutan produksi tetap 1.121,38 Ha dan hutan produksi terbatas 1.008,36 Ha. Kawasan hutan banyak terdapat di Kecamatan Dawe, Gebog dan Jekulo. Luas kawasan hutan sebesar 7.301,09 Ha dan luas lahan kritis sebesar 2.452,13 Ha. Pada tahun 2014 telah dilaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 384,92 Ha. Jenis tanaman hutan yang banyak dibudidayakan adalah jati dan sengon. Penanganan lahan kritis telah dilakukan melalui pembuatan kebun bibit rakyat (KBR), rehabilitasi hutan lahan dan konservasi tanah.

c. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan energi dan sumberdaya mineral dibedakan menjadi dua bidang. Bidang energi diarahkan untuk pembinaan dan pengembangan energi yang dilaksanakan melalui rehabilitasi/pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan/KWh meter serta pembayaran langganan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), sedangkan sumber daya mineral dilaksanakan melalui pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan.

Tabel 2.75
Perkembangan LPJU di Kabupaten Kudus

No	Uraian	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah LPJU	17.498	17.818	17.906	18.224
2	Biaya Rekening LPJU	16.076.703.581	15.950.454.975	15.852.899.434	26.439.492.075
3	Pendapatan PPJU	21.201.208.264	23.496.101.705	27.617.404.940	32.500.914.046

Sumber : Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kabupaten Kudus Tahun 2015

Pencapaian pembangunan terkait dengan energi, terlihat dari pencapaian indikator Rasio Elektrifikasi (RE) yang menunjukkan ketersediaan listrik pada semua desa di Kabupaten Kudus. Pembangunan

jaringan listrik pedesaan telah dimulai pada Tahun 2011, sedangkan upaya pengembangan energi terbarukan telah dirintis mulai Tahun 2009. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.76.

Tabel 2.76
Rasio Elektrifikasi Tingkat Desa, Jaringan Listrik Pedesaan, serta Pengembangan Energi Terbarukan (Biogas) Tahun 2011-2014

No	U r a i a n	2011	2012	2013	2014
1	Rasio Elektrifikasi Tingkat Desa (%)	100	100	100	100
2	Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan (desa)	2	-	-	2
3	Pengembangan Demplot Biogas (lokasi)	1	-	-	-

Sumber : Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kabupaten Kudus Tahun 2015

Sedangkan sumber daya mineral dilaksanakan melalui pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan, serta program mitigasi bencana alam tanah longsor melalui pemantauan daerah rawan tanah longsor. Jumlah pertambangan tanpa ijin serta jumlah daerah rawan bencana alam tanah longsor yang dipantau dijelaskan pada Tabel 2.77.

Tabel 2.77
Jumlah Pertambangan Tanpa Ijin dan Jumlah Daerah Rawan Bencana Alam Tanah Longsor Yang Dipantau Tahun 2011-2014

No	U r a i a n	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Pertambangan Tanpa Ijin (lokasi)	2	1	-	-
2	Jumlah Daerah Rawan Bencana Alam Tanah Longsor Yang Dipantau (Lokasi)	5	5	5	5

Sumber : Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kabupaten Kudus Tahun 2013

d. Urusan Pariwisata

Pariwisata mempunyai peran penting dalam Pembangunan Daerah, karena sektor Pariwisata berperan penting dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, bahwa Pariwisata bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Kudus yang memiliki visi “*Terwujudnya Kudus yang semakin Sejahtera*”. Untuk itu pariwisata melaksanakan pemberdayaan masyarakat/rakyat untuk menggerakkan potensi desa dengan program pengembangan destinasi pariwisata.

Kegiatan pariwisata yang dapat dinikmati oleh masyarakat di obyek daerah tujuan wisata, yang dikunjungi wisatawan antara lain: jasa transportasi, jasa atraksi wisata, jasa penginapan, kuliner, dan souvenir. hal ini menunjukkan bahwa manfaat pariwisata menimbulkan efek pemberdayaan masyarakat melalui transaksi ekonomi. Kabupaten Kudus memiliki potensi obyek wisata cukup besar yang mempunyai daya tarik wisata untuk dikunjungi oleh wisatawan. Di Kabupaten Kudus terdapat wisata alam, wisata buatan dan wisata religi. Wisata religi dengan tujuan

makam Sunan Kudus dan Sunan Muria. Wisata alam Gunung Muria, air terjun Monthel Colo dan hutan pinus Kajar. Di samping itu terdapat beberapa obyek tujuan wisata buatan yang dikelola pemerintah maupun swasta antara lain Taman Ria Colo, Taman Krida Wisata, Museum Kretek, *Mountain View Residence*, *Waterboom* Lau, dan beberapa wisata budaya di daerah tertentu dan pada waktu tertentu. Tabel berikut ini menginformasikan perkembangan jumlah wisatawan pada berbagai obyek wisata.

Tabel 2.78
Perkembangan Kunjungan Wisata di Kabupaten Kudus Tahun 2011-2014

No	Obyek Wisata	2011	2012	2013	2014
		Pengunjung (Orang)	Pengunjung (Orang)	Pengunjung (Orang)	Pengunjung (Orang)
1.	Menara Kudus dan Makam Sunan Kudus	49.242	142.676	259.139	491.782
2.	Colo dan Makam Sunan	682.205	522.899	719.486	756.588
3.	Muria	1.717	-	45	905.
4.	Tugu Identitas	54.527	40.967	87.848	35.530
5.	Taman Krida Wisata	79.057	74.181	112.317	57.828
6.	Museum Kretek dan Rumah Adat Situs Patiayam	-	-	-	1.413
Jumlah		866.748	7.788.723	1.178.835	1.344.046

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2014

Dari Tabel 2.78 dapat dilihat, bahwa obyek wisata Colo dan makam Sunan Muria menempati posisi teratas berdasarkan jumlah pengunjung dari tahun 2010 sampai dengan 2014, berarti bisa dikatakan obyek wisata Colo dan Makam Sunan Muria merupakan salah satu unggulan obyek wisata Kabupaten Kudus.

Selain itu ada penambahan obyek wisata baru yaitu obyek wisata situs Patiayam yang berada di Desa Terban Kecamatan Jekulo Kudus, yang cukup diminati oleh wisatawan mancanegara dan domestik. Pada tahun 2014 pengunjung Situs Patiayam berjumlah 9 wisatawan mancanegara dan 1.404 wisatawan nusantara (berdasarkan data buku tamu di situs Patiayam). Diharapkan obyek wisata Museum Kretek ada peningkatan jumlah kunjungan wisata karena bertambahnya sarana prasarana pendukung wisata di tempat Museum Kretek (Wahana baru). Selain itu adanya penunjang lain di sektor Pariwisata berupa rumah makan sebanyak 18 buah dan hotel berjumlah 24 buah.

e. Urusan Kelautan dan Perikanan

Layanan Urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kudus dilaksanakan dengan pembinaan dan pengembangan perikanan, melalui peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana perikanan, baik budidaya, tangkap maupun Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP). Pengembangan budidaya perikanan darat (air tawar) diarahkan pada pengembangan komoditas lele, nila, gurami, karper, bandeng polikultur dan udang vaname. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk meningkatkan

produksi ikan, antara lain dengan optimalisasi lahan yang kurang produktif, memberdayakan Balai Benih Ikan (BBI) Hadipolo dan Unit Perbenihan Rakyat (UPR) melalui pembangunan kolam/bak UPR, peralatan dan induk unggul yang bersertifikat untuk mencukupi kebutuhan benih ikan di Kabupaten Kudus. Selain itu juga dikembangkan budidaya ikan (pembesaran) melalui kolam terpal, kolam permanen, tambak, dan mina padi. Secara keseluruhan, dalam periode 2012-2014 produksi usaha perikanan di Kabupaten Kudus mengalami perkembangan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.79.

Tabel 2.79
Produksi Perikanan Tahun 2011 – 2014 Kabupaten Kudus

No.	Jenis Usaha	Produksi (ton)			
		2011	2012	2013	2014
1.	Budidaya air tawar	1.413,82	1.364,99	1.495,53	2.069,35
2.	Perairan Umum	379,24	405,33	409,94	458,10
3.	Pengolahan Ikan	613,86	655,00	1.459,50	4.346,40

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 2.79 diatas, produksi perikanan budidaya mencapai 2.069,35 ton pada tahun 2014, meningkat dari tahun 2013 sebanyak 1.495,53 ton. Jenis ikan budidaya air tawar meliputi ikan lele dan jenis ikan bersisik (nila, gurami, karper dan bandeng) yang banyak diusahakan oleh Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), baik di kolam tanah, kolam terpal, kolam permanen, maupun tambak. Produksi perikanan perairan umum relatif kecil, hanya sebesar 458,10 ton. Sementara itu produksi ikan olahan pada tahun 2014sebanyak 4.346,40 ton, meningkat dari tahun 2013 sebanyak 1.459,50 ton.

Selain usaha budidaya, juga ada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dengan produk olahan seperti pengasapan ikan di Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan, pemindangan di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo dan Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, olahan bandeng (presto, otak-otak, bakso, sosis, nugget, kaki naga) di Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Desa Keramat dan Rendeng, Kecamatan Kota, Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Desa Cendono, Kecamatan Dawe, Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo, serta Desa Gulang dan Payaman, Kecamatan Mejobo. Usaha pengolahan ikan yang ada saat ini sebagian besar masih bersifat tradisional dengan skala produksi yang masih kecil. Berbagai upaya sudah dilakukan guna persiapan MEA 2015, dimana produk olahan ikan harus memenuhi Sertifikasi Kelayakan Produk (SKP) untuk dapat bersaing di pasar bebas. SKP menitikberatkan pada cara pengolahan yang baik (*Good Manufacturing Procces/GMP*), sehingga dihasilkan produk yang aman, layak dikonsumsi, higienis, tanpa meninggalkan limbah (*zero waste*). Saat ini juga sudah dibentuk Asosiasi Pengolah dan Pemasar Ikan Kabupaten Kudus (APPI) yang diberi nama Mina Muria Sejahtera dengan tujuan untuk menjembatani Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan (Poklahsar) dengan *stake holders* terkait, baik

di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat, serta mendukung Program Gemar Makan Ikan (Gemarikan) dan Ketahanan Pangan Nasional.

f. Urusan Perdagangan

Urusan Perdagangan diprioritaskan pada peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri melalui pengembangan pasar dan distribusi barang/produk serta meningkatkan promosi dan kerjasama pemasaran. Layanan urusan perdagangan dapat diketahui dari banyaknya pasar yang ada. Di Kabupaten Kudus terdapat 23 pasar yang terdiri dari 5 unit pasar daerah, 17 unit pasar desa, dan 1 unit pasar hewan.

Adapun beberapa pasar tradisional yang tidak dikelola Pemerintah Kabupaten Kudus sehingga dikelola desa sendiri berjumlah 6 buah pasar tradisional antara lain, adalah Pasar Menawan, Pasar Sidorekso, Pasar Sudimoro, Pasar Djarum Desa Megawon, Pasar Jepang Desa Jepang dan Pasar Depan Pabrik Nojorono Desa Kaliwungu.

Adapun mengenai daya tampung pasar tradisional/ jumlah pedagang pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dapat dirinci pada Tabel 2.80.

Tabel 2.80
Jumlah Pedagang di Pasar Tradisional Di Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2014

No	Nama Pasar	Jumlah Pedagang			
		Kios	Los	Lesehan	Total
1	Kliwon	863	1.319	-	9.279
2	Bitingan	345	-	149	494
3	Jember	98	611	19	728
4	Wergu	337	426	80	843
5	Barongan	13	42	-	55
6	Tosera Bojana	92	-	-	92
7	Jekulo	170	346	-	516
8	Ngablak	112	14	-	126
9	Karangbener	31	77	-	108
10	Piji	163	640	-	803
11	Brayung	66	481	56	603
12	Prapat	11	119	-	130
13	Doro	28	111	19	158
14	Besito	-	150	25	175
15	Jurang	-	-	72	72
16	Mijen	90	632	-	722
17	Kedungdowo	-	-	14	14
18	Undaan Kidul	22	273	-	295
19	Kalirejo	145	620	17	782
20	Wates	31	173	-	204
21	Ngemplak	44	26	-	70
22	Ploso	20	60	-	80
23	Langgardalem	-	27	-	27
T O T A L					9.279

Sumber : Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus Tahun 2014

Kegiatan rehabilitasi dan pembangunan tentunya membawa dampak positif terhadap peningkatan perekonomian daerah hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah pedagang dan jumlah konsumen di pasar-pasar tersebut.

Pedagang Kaki Lima yang merupakan golongan pedagang kelas bawah adalah bagian penting dalam menggerakkan roda ekonomi daerah. Namun di wilayah Kabupaten Kudus ini, pertumbuhan PKL dan asongan semakin meningkat di setiap tahunnya, yang tumbuh di pinggir jalan raya dan semakin lama semakin banyak jumlahnya, yang pada akhirnya mempengaruhi kelancaran lalu lintas kendaraan roda 4 (empat) maupun kendaraan roda 2 (dua) yang melewati jalur tersebut. Dalam perkembangannya, Pemerintah Kabupaten Kudus telah berupaya untuk melakukan penataan dan pembinaan PKL di Kabupaten Kudus, antara lain melalui pembinaan, pendataan, dan pengaturan terhadap PKL dan pedagang asongan. Berdasarkan hasil pendataan di lokasi PKL-PKL, jumlah Pedagang Kaki Lima sebanyak 2.246 PKL yang tersebar di wilayah Kabupaten Kudus, dengan perincian pada Tabel 2.81.

Tabel 2.81
Data Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2014

NO	Desa / Kelurahan	Lokasi PKL	Jumlah
1	Demaan	PKL Simpang Tujuh	65
2	Demaan	PKL Jl. Pangeran Puger	6
3	Rendeng	PKL Pasar Kliwon (Siang Hari)	43
4	Rendeng	PKL Pasar Kliwon (Malam Hari)	18
5	Kramat	PKL Gentong Jl. Pemuda	62
6	Kramat	PKL Jl. Tanjung	10
7	Kramat	PKL Jl. Diponegoro	6
8	Panjunan	PKL Ruko Panjunan	21
9	Panjunan	PKL Jl. Lukmono Hadi	19
10	Panjunan	PKL Jl. Mangga	30
11	Panjunan	PKL Jl. Wahid Hasyim	43
12	Demangan	PKL Jl. Wadureksan	38
13	Demangan	PKL Jl. Sunan Kudus	41
14	Demangan	PKL Kaligelis Selatan	55
15	Demangan	PKL Kaligelis Utara	70
16	Wergu Wetan	PKL Gor Wergu Wetan	53
17	Wergu Wetan	PKL Jl. Cut Nyak Dien(Samping KONI)	14
18	Wergu Wetan	PKL Taman Johar (Sekitar Perempatan)	16
19	Wergu Kulon	PKL Gang I	3
20	Wergu Kulon	PKL Gang II	10
21	Wergu Kulon	PKL Gang III	24
22	Wergu Kulon	PKL Gang IV	4
23	Wergu Kulon	PKL Jl. Tit Sudono	7
24	Wergu Kulon	PKL Jl. Agus Salim	17
25	Mlati Kidul	PKL Jl. Mejobo (Sekitar Samsat)	41
26	Nganguk	PKL JL. Menur	13
27	Kaliputu	PKL Depan Djarum Jl. Kaliputu	40
28	Kaliputu	PKL Jl. RM.Sosrokartono	20

NO	Desa / Kelurahan	Lokasi PKL	Jumlah
29	Kerjasan	PKL Menara Kudus	41
30	Sunggingan	PKL Jl. Kyai Telingsing	15
31	Janggalan	PKL Jl. H. M Subechan	42
32	Damaran	PKL K.H. Asnawi (Jember ke Utara)	12
33	Ploso	PKL depan RSUD	70
34	Ploso	PKL Depan Matahari	16
35	Ploso	PKL Depan Pasar Bitingan	109
36	Ploso	PKL Jl.Mayor Busono	42
37	Getas Pejaten	PKL Jl.R.A. Kusumadya	25
38	Getas Pejaten	PKL Jl. Mulya (Gedung DPR ke Timur)	14
39	Getas Pejaten	PKL Depan Museum Kretek	8
40	Jati Kulon	PKL Jl. Kudus - Purwodadi	14
41	Tanjung	PKL Depan PT.Colombo	26
42	Undaan Kidul	PKL Depan Pasar Undaan	12
43	Mejobo	PKL Depan Pasar Brayung (Malam Hari)	70
44	Bakalan Krapyak	PKL Depan Polytron	7
45	Bakalan Krapyak	PKL Terminal Wisata	88
46	Jekulo	PKL Jl. Kudus-Pati (Jekulo)	17
47	Besito	PKL Jl. Besito Raya	12
48	Sekolah-sekolah	PKL Sekolahan	817
		TOTAL	2.246

Sumber : Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus Tahun 2014

Keberadaan pasar modern di Kabupaten Kudus terdapat 53 unit yang terdiri dari 3 unit mall yaitu Kudus Extension Mall, Ramayana Mall dan Ada Swalayan, dan 50 unit usaha minimarket waralaba yang tercatat yaitu Alfamart 17 unit, Indomaret 30 unit dan mini market lainnya 3 unit yang tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Kudus, yang lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.82.

Tabel 2.82
Data Pasar Modern Di Wilayah Kabupaten Kudus

No	Kecamatan	Alfamart	Indomart	Mini Market lain	Mall
1	Kota	4	12	-	3
2	Jati	2	3	1	-
3	Bae	3	2	-	-
4	Mejobo	1	2	-	-
5	Dawe	1	1	-	-
6	Kaliwungu	5	3	2	-
7	Undaan	1	2	-	-
8	Gebog	-	1	-	-
9	Jekulo	-	4	-	-
Jumlah		17	30	3	3

Sumber : Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus Tahun 2014

Tabel 2.83
Perkembangan Realisasi Ekspor Non Migas Kabupaten Kudus
Tahun 2011 – 2014 (US \$)

No	Komoditi	2011	2012	2013	2014
1	Rokok	49.262.344,00	61.253.561,00	64.229.257,00	29.044.919,00
2	Garmen	-	-	-	-
3	Kertas	15.751.118,32	16.467.982,20	13.401.715,57	13.092.922,80
4	Elektronik	3.692.709,59	5.019.917,88	7.943.835,07	30.127.830,05
5	Furniture	5.045.452,22	3.871.951,51	440.251,06 ..	9.573.569,80
6	Rotan Furniture	11.345.342,00	14.701.378,53	755.126,30	1.384.601,70
7	Sigaret Roller	3.779.150,52	2.807.029,38	2.246.559,72	2.032.578,44
8	Handycraft	40.048,70	33.509,20	41.405,70	-
9	Jenang	25.362,00	15.000,00	2.585,00	-
10	Playwood/barecore	37.448,53	592.113,20	1.309.334,72	8.618.713,65
11	Furniture stainless	-	452.902,27	13.601.073,45	1.087.537,83
	Total	88.941.527,35	105.215.345,17	103.971.143,59	96.544.568,32
	Jumlah Negara Tujuan	75	89	89	90

Sumber : Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus Tahun 2014

Untuk perkembangan nilai ekspor tercatat US \$ 103,97 juta (2013) mengalami penurunan menjadi US\$ 96,54 juta (2014), Tiga komoditas ekspor dengan kontribusi yang besar di tahun 2014 berturut-turut adalah Elektronik (31,2%), Rokok (30,08%) dan Kertas (13,56%). Ada peningkatan jumlah negara yang menjadi tujuan ekspor dari 75 negara di tahun 2011, meningkat menjadi 90 negara tujuan di tahun 2014.

g. Urusan Industri

Sektor industri merupakan tiang penyangga utama dari perekonomian Kabupaten Kudus, pada tahun 2014 kontribusinya sebesar 61,47% terhadap PDRB Kabupaten Kudus. Sektor ini dibedakan dalam kelompok industri besar, industri sedang, industri kecil dan industri rumah tangga. Pada tahun 2014, di Kabupaten Kudus terdapat 12.938 buah perusahaan industri/unit usaha baik industri besar/ sedang maupun industri kecil/rumah tangga. Bila dibandingkan tahun 2013 (12.810 buah) terjadi peningkatan jumlah unit usaha industri sebesar 1%. Adapun penyerapan tenaga kerja terbesar di daerah kecamatan Kota sebanyak 137.213 orang, dan terkecil penyerapan tenaga kerja di kecamatan Undaan. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan perusahaan-perusahaan yang mana lebih banyak di Kecamatan Kota daripada di kecamatan-kecamatan yang lain. Namun dari segi nilai produksi tercatat Kecamatan Jati sebesar 78.934.740,14 juta rupiah merupakan nilai produksi terbesar diantara kecamatan yang lain, karena ada pusat perusahaan kertas besar yaitu PT. Pura. Berturut-turut dari kecamatan yang terbesar kontribusinya dilihat dari nilai produksi adalah Kecamatan

Jati (59,6%), Kota (23,9%) dan Bae (5,9%). Kondisi jumlah industri selengkapnya di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Tabel 2.84 dan Tabel 2.85 sebagai berikut.

Tabel 2.84
Jumlah Perusahaan Industri dan Jumlah Tenaga Kerja
Kabupaten Kudus Tahun 2011 - 2014

No	Kecamatan	2011		2012		2013		2014	
		Perus./ Unit Usaha	Tenaga Kerja	Perus./ Unit Usaha	Tenaga Kerja	Perus./ Unit Usaha	Tenaga Kerja	Perus./ Unit Usaha	Tenaga Kerja
1	Kaliwungu	1.560	12.860	1.591	13.117	1.830	13.314	1.848	13.447
2	Kota	1.847	134.045	1.902	135.385	2.159	137.213	2.180	138.585
3	Jati	1.346	26.887	1.400	27.425	1.575	27.768	1.591	28.046
4	Undaan	461	1.985	466	2.025	472	2.028	477	2.049
5	Mejobo	1.684	4.493	1.718	4.583	1.804	4.606	1.822	4.652
6	Jekulo	975	5.373	995	5.480	1.065	5.518	1.076	5.574
7	Bae	1.097	29.557	1.119	30.148	1.270	30.555	1.283	30.861
8	Gebog	1.055	19.534	1.076	19.925	1.237	20.224	1.249	20.426
9	Dawe	1.192	6.120	1.216	6.242	1.398	6.336	1.412	6.399
	Jumlah	11.217	240.854	11.483	244.331	12.810	247.562	12.938	250.039

Sumber : Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus Tahun 2014

Tabel 2.85
Jumlah Perusahaan Industri dan Nilai Produksi Kabupaten Kudus
Tahun 2011 - 2014

No	Kecamatan	2011		2012		2013		2014	
		Perus. (unit)	Nilai Produksi (Juta Rp.)	Perus. (unit)	Nilai Produksi (Juta Rp.)	Perus. (unit)	Nilai Produksi (Juta Rp.)	Perus. (unit)	Nilai Produksi (Juta Rp.)
1	Kaliwungu	1.560	5.094.680,39	1.591	5.756.988,84	1.830	6.620.537,17	1.848	6.686.742,54
2	Kota	1.847	24.652.113,77	1.902	27.856.88,56	2.159	31.617.568,52	2.180	31.933.744,21
3	Jati	1.346	62.092.224,30	1.400	70.164.213,46	1.575	78.934.740,14	1.591	79.724.087,54
4	Undaan	461	514.085,38	466	580.916,48	472	588.177,94	477	594.059,72
5	Mejobo	1.684	570.617,25	1.718	644.797,50	1.804	677.037,38	1.822	683.807,75
6	Jekulo	975	843.278,95	995	952.905,21	1.065	1.019.608,57	1.076	1.029.804,66
7	Bae	1.097	6.107.380,95	1.119	6.901.340,47	1.270	7.833.021,43	1.283	7.911.351,64
8	Gebog	1.055	2.565.664,30	1.076	2.899.200,66	1.237	3.334.080,76	1.249	3.367.421,57
9	Dawe	1.192	1.253.542,96	1.216	1.416.503,54	1.398	1.628.979,07	1.412	1.645.268,86
	Jumlah	11.217	103.693.588,25	11.483	117.173.754,7	12.810	132.253.750,97	12.938	133.576.288,49

Sumber : Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus Tahun 2014

h. Urusan Ketrasmigrasian

Pengiriman calon transmigran sejak tahun 2011-2014 mencapai 28 KK. Hal ini terkait dengan kuota yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi sangat terbatas dan tidak sebanding dengan animo masyarakat yang mendaftar sebagai calon transmigran, serta belum adanya kepastian lokasi daerah calon penerima transmigran karena penentuan lokasi dilaksanakan oleh Pemerintah dalam hal ini oleh Kementerian Tenaga

Kerja dan Transmigrasi. Capaian pengiriman transmigran Kabupaten Kudus tahun 2011-2014 dapat dilihat pada Tabel 2.86.

Tabel 2.86
Capaian Pengiriman Transmigran Kabupaten Kudus Tahun 2011-2014

Tahun	Jumlah (KK)	Tujuan
2011	10	UPT Tanjung Aur 2 Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan Prop. Bengkulu
2012	10	UPT Teluk Pekedai Kecamatan Teluk Pekedai Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat
2013	5	UPT Siong SP.1 Desa Siong Kecamatan Paju Epat Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah
2014	3	UPT Majuria Desa Sungai Bulan Kabupaten Banyuasin Sumsel

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2014

Dari hasil evaluasi dinas terkait, transmigran asal Kabupaten Kudus banyak yang sukses ditempat tinggalnya yang baru, dan permasalahan tanah di Kabupaten Kuburaya sudah terselesaikan dan menjadi hak milik transmigran.

2.1.4. Aspek Daya Saing

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan kabupaten lainnya yang berdekatan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Kemampuan ekonomi daerah tercermin dari kemampuan daerah untuk mengelola potensi yang ada dan memasarkan hasil produksinya tersebut sehingga meningkatkan pendapatan. Berdasarkan data BPS, tercatat jumlah perusahaan industri besar dan sedang untuk tahun 2014 sebanyak 168 perusahaan yang menyerap sekitar 83.660 orang. Untuk itu perhatian pemerintah dalam pelayanan kepada sektor industri selalu ditingkatkan sebagai upaya pengurangan pengangguran. Pasar sebagai sarana yang mendorong peningkatan pemasaran di Kabupaten Kudus tersedia sebanyak 23 unit yang terdiri dari 5 pasar daerah, 17 pasar desa, dan 1 pasar hewan, dan 6 unit pasar yang dikelola oleh desa, 3 unit mall, 50 unit minimarket. Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan pengukur kemampuan tukar barang-barang pertanian yang dihasilkan petani dengan barang dan jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi hasil pertanian. Kecenderungan NTP di Kabupaten Kudus tahun 2011-2014 menunjukkan peningkatan, hal ini disebabkan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Perkembangan NTP Kabupaten Kudus tahun 2011-2014 sebagaimana tercantum pada Tabel 2.87.

Tabel 2.87
 Nilai Tukar Petani Kabupaten Kudus Tahun 2011-2014

Tahun	Nilai Tukar Petani
2011	103,95
2012	104,71
2013	105,61
2014	105,61

Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus Tahun 2014

Infrastruktur jalan merupakan unsur yang menjadi pendorong dan penarik pengembangan suatu wilayah. Kabupaten Kudus dengan luas wilayah 42.516 ha terdapat jalan nasional 21.180 Km, jalan propinsi 54.939 Km dan jalan kabupaten 621.180 Km. Bencana banjir yang melanda Kabupaten Kudus pada awal tahun 2014 telah mengakibatkan kerusakan beberapa ruas jalan. Jalan Nasional yang menghubungkan Kudus – Demak macet total akibat tergenang banjir. Langkah yang ditempuh untuk mengatasi hal tersebut adalah meninggikan jalan depan terminal induk Kabupaten Kudus dengan konstruksi beton sepanjang 1 km. Pada awal tahun 2015, kondisi jalan kabupaten yaitu kondisi baik 31,92%, sedang 28,32%, rusak ringan 16,36%, rusak berat 23,41%.

Iklim investasi merupakan pertimbangan bagi investor dalam rangka penanaman modal. Iklim investasi dapat dilihat dari angka kriminalitas, pelayanan perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, banyaknya demonstrasi, perda yang mendukung usaha. Kabupaten Kudus relatif kondusif sebagai daerah tujuan investasi terlihat dari jumlah demo (politik, ekonomi dan mogok kerja) rata-rata 30 kasus, namun dampaknya terhadap investasi kurang signifikan mengingat investasi tetap meningkat. Adapun angka kriminalitas di Kudus cenderung menurun. Berbagai perda diharapkan pro investasi, namun tetap berpedoman pada undang-undang yang ada. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang menjadi daya saing adalah struktur penduduk yang mengarah pada rasio ketergantungan sebagaimana tertera pada tabel 2.88.

Tabel 2.88
 Rasio Ketergantungan Kabupaten Kudus Tahun 2011 – 2014

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	203.329	207.911	202.810	207.774
2.	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	39.651	39.222	38.234	52.521
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) & (2)	242.980	247.133	241.044	260.295
4.	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	542.605	544.758	555.959	628.170
	Rasio Ketergantungan	44,78	45,37	43.35	41,44

Sumber : BPS Kabupaten Kudus dan Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2014 (data diolah)
 Keterangan : jumlah penduduk diperbaiki dengan data dasar SP 2010

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah rasio perbandingan antara kelompok penduduk usia tidak produktif (usia 0 - 14

tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap kelompok penduduk usia produktif (usia 15 - 64 tahun). Rasio ini menyatakan seberapa berat beban tanggungan yang harus dipikul oleh jumlah penduduk usia produktif, dimana rumus *Dependency Ratio* adalah jumlah penduduk usia (0 - 14 tahun) dan usia (65 tahun ke atas) dibagi dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun.

Sejalan dengan komposisi penduduk, angka *Dependency Ratio* Kabupaten Kudus dari tahun 2011 hingga 2014 cenderung mengalami penurunan dari sebesar 44,78% pada tahun 2011 menjadi 41,44% pada tahun 2014. Hal ini berarti bahwa jumlah beban tanggungan yang harus dipikul per penduduk usia produktif lebih sedikit.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD sampai dengan Tahun 2014

Evaluasi ini mencakup uraian evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah meliputi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2014 dengan realisasi RPJMD sampai dengan tahun 2014. Evaluasi pelaksanaan program RKPD tahun 2014 dan realisasi RPJMD tahun 2014 meliputi seluruh program yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan dan SKPD, menyangkut realisasi capaian target kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD baik urusan wajib maupun pilihan.

Selanjutnya evaluasi pelaksanaan urusan dan program RKPD tahun 2014 dan realisasi RPJMD sampai dengan tahun 2014 dijabarkan sebagai berikut.



































2.2.1. Urusan Wajib





































1. Pendidikan





























Kinerja penyelenggaran urusan Pendidikan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 50 target indikator kinerja dalam RKPD Kudus 2014 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel 2.89.

Tabel 2.89
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Terhadap Target RKPD 2014 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)								
1.	APK PAUD	49,75%	50%	52%	54%	60%	52%		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	PROGRAM PENDIDIKAN DASAR								
2.	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	106,31 %	95%	100%	100%	100%	100%		
3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	97,92%	95%	> 95%	> 95%	> 95%	>95%		
4.	Bangunan SD/MI dalam kondisi baik	87,55%	91,80%	93,80%	95,80%	100%	93,80%		
	a. Bangunan SD dalam kondisi baik	85.17%	91,89%	93,89%	95,89%	100%			
	b. Bangunan MI dalam kondisi baik	94.73%	91,53%	93,53%	95,53%	100%			
5.	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,03%		
6.	Rata-rata Kelulusan SD/MI	100%	99%	99%	99%	99%	99%		
7.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	102,6%	100%	100%	100%	100%	100%		
8.	Persentase SD/MI yang mempunyai Perpustakaan	84,98	85,81	86,81	87,81	90,81	86,81%		
	a. Persentase SD yang mempunyai perpustakaan	88,03	89,10	90,10	91,10	94,10			
	b. Persentase MI yang mempunyai perpustakaan	74,64	74,64	75,64	76,64	79,64			
9.	Rata-rata nilai UN SD/M	7,2	7,2	7,21	7,22	7,25	7,21		
10.	Persentase SD/MI yang terakreditasi	99,78	99,78	99,78	100	100	99,78		
11.	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	104,42 %	95%	100%	100%	100%	100%		
12.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	95,32%	95%	> 95%	> 95%	> 95%	>95%		
13.	Bangunan SMP kondisi baik	91,06%	91,22%	91,22%	91,54%	92,02%	91,22%		
14.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,10%	0,11%		
15.	Rata-rata Kelulusan SMP/MTs	99,77%	99%	99%	99%	99%	99%		
16.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	93,56%	90,00%	90,10%	90,20%	95%	90,10%		
17.	Rasio ketersediaan sekolah (SMP/MTs) terhadap penduduk usia sekolah	27,71%	27,76%	27,81%	27,86%	28,01%	27,81%		
18.	Persentase SMP/MTs yang mempunyai perpustakaan	59,29	60,00	61,80	63,65	90,00	61,80		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Rata-rata nilai UN SMP/MTs	7,85	7,01	7,1	7,2	7,5	7,1		
20.	Persentase SMP/MTs yang terakreditasi	100	100	100	100	100	100		
III	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH								
21.	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	86,79%	86,79%	86,79%	87,00%	90,00%	86,79%		
22.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	80,38%	75%	76%	77%	80%	76 %		
23.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,11%	0,12 %		
24.	Rata-rata Kelulusan SMA/SMK/MA	99,98%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99 %		
25.	Bangunan SMA/SMK kondisi baik	95,62%	95,68%	95,68%	95,80%	95,98%	95,68%		
26.	Persentase SMA/MA/SMK yang mempunyai perpustakaan	55,26	55,84	57,52	59,24	64,73	57,52		
27.	Rata-rata nilai UN SMA/MA/SMK	8,14	7,56	7,57	7,58	7,6	7,57		
28.	Persentase SMA/MA/SMK yang terakreditasi	95,42	96,69	96,69	100	100	96,69		
IV	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL								
29.	Angka Melek Huruf	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
30.	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)								
	- SD + MI	6,21	6	6	6	6	6		
	- SMP + MTs	3,01	3	3	3	3	3		
	- SMA+MA	3	3	3	3	3	3		
	- SMK	3	3	3	3	3	3		
	- SM+MA	3	3	3	3	3	3		
	- SD+MI+SMP+MTS+ SMA+SAMK+MA	12,22	12	12	12	12	12		
31.	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun	100,29 %	> 95%	> 95%	> 95%	> 95%	>95%		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun	81,43%	80%	81%	82%	85%	>95%		
33.	Angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun	81,43%	80%	81%	82%	85%	81 %		
34.	Jumlah kegiatan penunjang program pendidikan dan dokumen perencanaan pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
V	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN								
35.	Rasio Guru/Murid SD/MI	828,88	829,08	829,28	829,48	830,08	829,28		
36.	Rasio Guru/Murid SMP/MTs	759,11	759,31	759,51	759,71	760,31	759,51		
37.	Rasio Guru/Murid SMA	791,95	792,15	792,35	795,55	793,15	792,35		
38.	Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	59,50%	59,60%	59,80%	60,10%	61,60%	59,80%		
39.	Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	92,95%	93,05%	93,25%	93,55%	95,05%	93,25%		
40.	Guru SMA yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	93,81%	93,91%	94,11%	94,41%	95,91%	94,11%		
41.	Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	94,24%	94,34%	94,54%	94,84%	96,34%	94,54%		
42.	Jumlah guru TK tersertifikasi	156	412	419	426	447	419		
43.	Jumlah guru SD tersertifikasi	2.343	2.807	2.821	2.835	2.877	2.821		
44.	Jumlah guru SMP tersertifikasi	751	975	982	989	1.010	982		
45.	Jumlah guru SMA/SMK tersertifikasi	778	955	961	967	985	961		

Keterangan:















<ul style="list-style-type: none"> Status thdp Target RKPD 2014: 		Target 2014 tercapai
		Target 2014 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status thdp Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2014 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 perlu upaya keras



































Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Pendidikan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RKPD Kudus 2014, dari sejumlah 50 target indikator, semuanya berstatus telah tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 50 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 23 target indikator berstatus telah tercapai dan sejumlah 27 target indikator berstatus akan tercapai.

































2. Kesehatan

















Kinerja penyelenggaraan urusan Kesehatan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 52 target indikator kinerja dalam RKPD Kudus 2014 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel 2.90

Tabel 2.90
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Terhadap Target RKPD 2014
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT								
1.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA (+)	60%	69%	70%	> 70%	> 70%	80%		
2.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit :								
3.	1) Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun	≥ 2	≥ 2	≥ 2	≥ 2	≥ 2	≥ 2		
4.	2) Penemuan penderita pneumonia balita	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5.	3) Penemuan penderita diare	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
6.	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7.	Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk	21,2	58	< 20	< 20	< 20	53,34		
8.	Persentase penderita HIV AIDS yang	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	tertangani								
9.	Prevalensi HIV	2/100. 000	2,3/10 0.000	< 9/100. 000	< 9/100. 000	< 9/100. 000	0,076%		
10.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit tidak menular	-	-	-	50%	56%	100%		
11.	Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
II	PROGRAM FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN								
12.	Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	103%		
13.	Cakupan ketersediaan alat-alat kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
14.	Terpenuhinya kebutuhan sarpras puskesmas/pustu dan jaringannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
15.	Persentase industri pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	4,84%	7,69%	7,77%	7,84%	8,07%	85%		
16.	Cakupan tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	69%	71%	73%	75%	82%	78%		
III	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN								
17.	Angka usia harapan hidup	69,68	69,68	69,69	69,69	69,7	69,83		
18.	Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	6,93	6,9	6,9	6,8	6,5	7,55		
19.	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidu	95,42	133,68	102	96	96	164,87		
20.	Persentase balita gizi buruk (BB/TB)	0,75%	0,76%	0,74%	0,73%	0,70%	0,016%		
21.	Cakupan puskesmas	211,1%	211,1%	211,1%	211,1%	211,1%	211,1%		
22.	Cakupan puskesmas pembantu (pustu)	30,30%	28,79%	28,79%	28,79%	28,79%	32,58%		
23.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
24.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	3,23%	100%	100%	100%	100%	100%		
25.	Rasio puskesmas per 100.000 penduduk	2,43	2,40	2,40	2,40	2,40	2,31		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	Rasio pustu per 100.000 penduduk	5,12	5,05	5,05	5,05	5,05	5,24		
27.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100.000 jumlah penduduk)	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,22		
28.	Rasio BP/RB (klinik) per 100.000 penduduk	3,41	3,42	3,43	3,44	3,47	3,65		
29.	Rasio posyandu per satuan balita	85,9	87	50	50	44	1,16		
30.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
31.	Cakupan pemberian MP-ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
32.	Prevalensi balita gizi buruk	0,75%	0,76%	0,74%	0,73%	0,70%	0,016%		
33.	Prevalensi balita gizi kurang	5,82%	5,82%	5,80%	5,75%	5,60%	0,35%		
34.	Cakupan kunjungan bayi	95,84%	90%	95%	100%	100%	97,85%		
35.	Cakupan pelayanan anak balita	90,27%	83%	84%	85%	85%	93,57%		
36.	Cakupan kunjungan neonatal pertama	99,07	100%	100%	100%	100%	97,85%		
37.	Cakupan pelayanan kesehatan pra usila dan usia lanjut	75%	78%	80%	80%	80%	80%		
38.	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	95,87%	95%	95,25%	95,50%	96,20%	95,04%		
39.	Cakupan pelayanan nifas	94,62%	90%	90%	95%	96,5%	95,54%		
40.	Cakupan peserta KB aktif	81,69%	79,0%	80%	80%	82%	80,71%		
41.	Cakupan komplikasi kebidanan yang Ditangani	94,73%	100%	100%	100%	100%	92,96%		
42.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	91,00%	90,0%	95%	100%	100%	92,33%		
43.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	94,76%	90,0%	90%	95%	96,0%	95,94%		
IV	PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN								
44.	Cakupan penduduk menggunakan air bersih	76%	79%	82%	85%	90%	82%		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45.	Cakupan penduduk yang menggunakan jamban sehat	66%	69%	72%	75%	83%	70%		
46.	Cakupan rumah sehat	70%	72%	75%	77%	82%	80,8%		
47.	Cakupan tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	67%	70%	73%	75%	82%	78,5%		
VI	PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN								
48.	Cakupan desa siaga aktif	25%	30%	35%	45%	60%	100%		
49.	Cakupan Penjarangan kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
VII	PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PELAYANAN								
50.	Cakupan Pelayanan BLUD	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	66,55%		
VII	PROGRAM MANAJEMEN, INFORMASI DAN REGULASI								
51.	Pelayanan perijinan bidang kesehatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		
52.	Cakupan puskesmas yang telah terakreditasi	-	-	3 Pusk	4 Pusk	19 Pusk	0%		

Keterangan:





























<ul style="list-style-type: none"> Status thdp Target RKPD 2014: 		Target 2014 tercapai
		Target 2014 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status thdp Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2014 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 perlu upaya keras





























Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Kesehatan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RKPD Kudus 2014, dari sejumlah 52 target indikator, sebanyak 41 indikator berstatus telah tercapai, 11 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 52 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 34 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 7 target indikator berstatus akan tercapai, dan 11 indikator perlu upaya keras.



3. Pekerjaan Umum

Kinerja penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 31 target indikator kinerja dalam RKPD Kudus 2014 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel 2.91.






Tabel 2.91
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Terhadap Target RKPD 2014
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan								
1	Panjang jalan kabupaten yang dibangun	-	-	-	2.050 m	9.490 m	-		
2	Jumlah jembatan kabupaten yang dibangun	-	-	-	2 unit	4 unit	6 unit		
3	Peningkatan jalan kabupaten	-	-	18.500 m	-	-	13.675 m		
4	Penggantian jembatan kabupaten	-	-	11 unit	-	-	5 unit		
5	Panjang saluran drainase yang dibangun	3 km	4,44 km	14,23 km	4,25 km	80,23 km	15,22 km		
6	Panjang talud jalan kabupaten yang dibangun	100 m	-	100 m	50 m	750 m	400 m		
7	Panjang talud yang dibangun	-	-	3,1 km	1,2 km	19,8 km	9,15 km		
8	Panjang jalan perdesaan yang dibangun	16,7 km	32,25 km	52 km	85 km	664 km	79,19 km		
9	Jumlah jembatan perdesaan yang dibangun	4 unit	7 unit	19 unit	12 unit	66 unit	19 unit		
10	Cakupan perbaikan jalan dan jembatan akibat bencana	-	100%	100%	-	100%	100%		
II	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan								
11	Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik/ sedang	70,30%	73,65%	63,21%	67,37%	80,15%	81,12%		
12	Proporsi jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik	77,17%	78,54%	80,36%	82,19%	87,67%	77,68%		
13	Panjang talud/bronjong yang dipelihara	350 m	419 m	500 m	1400 m	7200 m	943,6 m		
14	Persentase alat-alat berat dalam kondisi	64 %	64 %	65 %	67 %	74%	67%		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	baik								
15	Persentase Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik	58,50%	59,50%	60,50%	61,50%	65,00%	62%		
16	Proporsi talud dalam kondisi baik	-	44,40%	44,40%	45,44%	48,13%	45%		
III	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya								
17	Sistem informasi/database jaringan irigasi	-	20%	80%	100%	100%	100%		
18	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	65,68%	65,70%	65,72%	65,74%	65,80%	72,88%		
19	Berfungsinya embung dan bangunan penampung air lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
20	Embung dan bangunan penampung air lainnya dalam kondisi baik	40%	40%	80%	100%	100%	50%		
21	Drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	58,13%	60,07%	60,84%	61,01%	65,47%	77,34%		
22	Sistem informasi drainase	-	-	100%	100%	100%	100%		
23	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air	15 km	16 km	16 km	17 km	21 km	16,5 km		
24	Berfungsinya reservoir pengendali banjir	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
IV	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku								
25	Cakupan pelayanan jaringan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	81%	83%	83%	84%	87%	83%		
26	Cakupan pelayanan perpipaan air minum	81,20%	82,01%	82,83%	83,66%	86,31%	82,01%		
V	Program Pembangunan Dan Pengelolaan Bangunan Gedung Serta Pengembangan Jasa Konstruksi								
27	Penyediaan Gedung kantor terpadu	-	-	5%	30%	100%	5%		
28	Persentase rumah tinggal bersanitasi	92,71%	93,17%	93,64%	94,11%	95,53%	94,13%		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan	-	100%	100%	100%	100%	100%		
30	Sistem Informasi database Jalan lingkungan	-	-	100%	100%	100%	100%		
31	Sistem Informasi Database Jembatan desa	-	-	-	100%	100%	100%		

Keterangan:



<ul style="list-style-type: none"> Status thdp Target RKPD 2014: 		Target 2014 tercapai
		Target 2014 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status thdp Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2014 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 perlu upaya keras












Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RKPD Kudus 2014, dari sejumlah 31 target indikator, 26 sebanyak indikator berstatus tercapai, 5 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 31 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 12 target indikator berstatus telah tercapai, 11 sejumlah target indikator berstatus akan tercapai, dan 8 indikator perlu upaya keras.

4. Perumahan





Kinerja penyelenggaraan urusan Perumahan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 target indikator kinerja dalam RKPD Kudus 2014 dan 8 target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel 2.92.

Tabel 2.92
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Terhadap Target RKPD 2014 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase rumah layak huni	86,85%	87,36%	87,97%	88,58%	90,41%	87,97 %		

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Persentase rumah tangga bersanitasi	92,71%	93,17%	93,17%	94,11%	95,53%	93,17%		
3	Fasilitasi dan replikasi PLPBK	-	1 desa	-	1 desa	1 desa	-		
4	Jumlah rehab rumah akibat bencana alam	-	-	-	25 unit	100 unit	-		
5	Persentase penyediaan sarana evakuasi	-	-	-	12,58%	14,39%	-		
6	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100 %		
7	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	33%	33%	39%	44%	61%	39 %		
8	Rasio tempat pemukiman umum per satuan Penduduk	1,667	1,655	1,643	1,648	1,662	1,643		

Keterangan:















<ul style="list-style-type: none"> Status thdp Target RKPD 2014: 		Target 2014 tercapai
		Target 2014 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status thdp Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2014 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Perumahan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RKPD Kudus 2014, dari sejumlah 5 target indikator, sebanyak 5 indikator berstatus telah tercapai, 0 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 8 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 1 target indikator berstatus telah tercapai, 7 sejumlah target indikator berstatus akan tercapai, dan 0 indikator perlu upaya keras.




5. Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaraan urusan Penataan Ruang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 target indikator kinerja dalam RKPD Kudus 2014 dan 8 target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel 2.93.

Tabel 2.93
Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang Terhadap Target RKPD 2014
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah dokumen tata ruang	4 dokumen	-	3 dokumen	5 dokumen	16 dokumen	3 dokumen		
2	Jumlah sosialisasi dan laporan pemanfaatan ruang	-	2 kali	2 kali	2 kali	10 kali	2 kali		
3	Jumlah dokumen data pemanfaatan ruang	-	-	-	1 dokumen	4 dokumen	-		
4	Jumlah dokumen prosedur dan manual pengendalian tata ruang	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5 dokumen	1 dokumen		
5	Jumlah koordinasi pengendalian tata ruang, manual dan laporan pengendalian pemanfaatan ruu	4 kali	12 kali	4 kali	4 kali	20 kali	4 kali		
6	Jumlah rancangan perda tata ruang	6 raperda	6 raperda	6 raperda	2 raperda	10 raperda	6 raperda		
7	Penyebarluasan informasi penataan ruang	-	100%	100%	-	100%	100%		
8	Pelibatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang	100%	100%	-	100%	100%	-		

Keterangan:

• Status thdp Target RKPD 2014:		Target 2014 tercapai
		Target 2014 tidak tercapai
• Status thdp Target Akhir RPJMD:		Capaian Target RPJMD s/d 2014 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 perlu upaya keras













Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Penataan Ruang, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RKPD Kudus 2014, dari sejumlah 6 target indikator, sebanyak 6 indikator berstatus telah tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 8 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 1 target indikator berstatus telah tercapai, 7 target indikator berstatus akan tercapai, dan 0 indikator perlu upaya keras.

6. Perencanaan Pembangunan






Kinerja penyelenggaraan urusan Perencanaan Pembangunan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 17 target indikator kinerja dalam RKPD Kudus 2014 dan 20 target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel 2.94

Tabel 2.94
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Terhadap Target RKPD 2014 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase keterisian data/informasi	60 %	60 %	64 %	68 %	80 %	65 %		
2	Persentase peningkatan obyek sasaran yang Ditangani	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %		
3	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan wilayah perkotaan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	6 dokumen	2 dokumen		
4	Jumlah aparat perencana yang meningkat Kapasitasnya	-	165 orang	145 orang	-	445 orang	145 orang		
5	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	7 dokumen	6 dokumen	11 dokumen	9 dokumen	50 dokumen	10 dokumen		
6	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	6 dokumen	1 dokumen		
7	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	85 %	90 %	91 %	92 %	95 %	99,64 %		
8	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	12 dokumen	2 dokumen		
9	Jumlah klaster yang difasilitasi FEDEP	5 klaster	6 klaster	7 klaster	8 klaster	9 klaster	7 klaster		
10	Jumlah dokumen perencanaan sosbud	3 dokumen	3 dokumen	4 dokumen	5 dokumen	22 dokumen	5 dokumen		
11	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	9 dokumen	2 dokumen		
12	Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola sumber daya air	100%	100%	100%	100%	100%	100 %		
13	Jumlah penelitian iptek dan inovasi			-	2 dokumen	8 dokumen	-		

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	daerah				en	en			
14	jumlah dokumen perencanaan daerah rawan bencana	-	-	1 dok	1 dok	2 dok	-		
15	Jumlah Dokumen data perencanaan dan evaluasi capaian kinerja	-	-	-	2 dok	7 dok	-		
16	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	-	100%	100%	-	100%	1 dokumen		
17	Jumlah Dokumen Review RPIJM	-	-	-	-	1 dokumen	-		
18	Jumlah buku laporan pelaksanaan Kerjasama	30 buku	30 buku	30 buku	30 buku	150 buku	30 buku		
19	Jumlah dokumen kinerja daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	6 dokumen	1 dokumen		
20	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	-	5 dokumen	5 dokumen		

Keterangan:



























<ul style="list-style-type: none"> Status thdp Target RKPD 2014: 		Target 2014 tercapai
		Target 2014 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status thdp Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2014 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 perlu upaya keras







Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Perencanaan Pembangunan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RKPD Kudus 2014, dari sejumlah 17 target indikator, sebanyak 15 indikator berstatus telah tercapai, 2 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 20 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 5 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 13 target indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator perlu upaya keras.

7. Perhubungan





Kinerja penyelenggaraan urusan Perhubungan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 17 target indikator kinerja dalam RKPD Kudus 2014 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel 2.95

Tabel 2.95
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Terhadap Target RKPD 2014 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1,99	1,86	1,74	1,63	1,39	1,65		
2	Jumlah arus penumpang angkutan umum	875.117 orang	875.992 orang	876.868 orang	877.744 orang	4.393.117 orang	876.084 orang		
3	Persentase PKB bagi Kab/Kota yang memiliki populasi minimal 4000 KBWU	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4	Rasio izin trayek	0,000753	0,000733	0,000737	0,000754	0,000775	0,000777		
5	Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Ka	60,14%	60,14%	60,14%	61,19%	62,59%	60,14%		
6	Persentase halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7	Persentase angkutan darat	16,08%	16,08%	16,18%	16,19%	16,27%	16,08%		
8	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	35.600 orang	35.600 orang	35.600 orang	35.600 orang	35.600 orang	35.600 orang		
9	Jumlah Terminal Bis	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	6 lokasi	5 lokasi		
10	Persentase terminal angkutan penumpang pada setiap Kab/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
11	Jumlah orang/barang melalui terminal per Tahun	1.103.225 orang	1.125.289 orang	1.147.354 orang	1.170.301 orang	5.970.876 orang	1.147.354 orang		
12	Persentase fasilitas perlengkapan jalan pada jalan Kab	50,82%	57,14%	64,32%	71,49%	93,01%	64,32%		
13	Pemasangan rambu-rambu	5,63%	2,22%	5,33%	5,33%	28,88%	5,33%		

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Kepemilikan KIR angkutan umum	11,60%	11,04%	10,98%	10,83%	10,21%	10,98 %		
15	Persentase standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kab	100%	100%	100%	100%	100%	100 %		
16	Jumlah uji kir angkutan umum	17.347 unit	17.900 unit	18.000 unit	18.100 unit	18.300 unit	18.000		
17	Lama pengujian kelayakan angkutan umum - KIR	35 menit	35 menit	35 menit	35 menit	35 menit	35 menit		

Keterangan:



<ul style="list-style-type: none"> Status thdp Target RKPD 2014: 		Target 2014 tercapai
		Target 2014 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status thdp Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2014 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Perhubungan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RKPD Kudus 2014, dari sejumlah 17 target indikator, sebanyak 15 indikator berstatus tercapai, 2 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 17 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 9 indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 7 target indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator perlu upaya keras.

8. Lingkungan Hidup

Kinerja penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 12 target indikator kinerja dalam RKPD Kudus 2014 dan 13 target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel 2.96

Tabel 2.96
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Terhadap Target RKPD 2014 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pencegahan pencemaran air	40%	100%	100%	100%	100%	100%		

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	40%	100%	100%	100%	100%	100%		
3	Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa	20%	40%	100%	100%	100%	100%		
4	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	75%	100%	100%	100%	100%	100%		
6	Meningkatnya luas tutupan lahan	0,24%	0,37%	0,44%	0,54%	0,84%	0,44 %		
7	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	0,14%	0,21%	0,25%	0,30%	0,45%	0,22%		
8	Penyediaan akses informasi lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
9	Pencegahan pencemaran udara dari sumber bergerak	40%	100%	-	100%	100%			
10	Meningkatnya kemampuan SDM di bidang LH	0,051	0,075	0,093	0,123	0,506	0,093		
11	Persentase penanganan sampah	82%	84,60%	85%	86%	89%	84%		
12	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,277	0,270	0,308	0,349	0,454	0,308		
13	Proporsi RTH Publik	5%	5%	5,2%	6%	9%	5,2 %		

Keterangan:





<ul style="list-style-type: none"> Status thdp Target RKPD 2014: 		Target 2014 tercapai
		Target 2014 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status thdp Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2014 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RKPD Kudus 2014, dari sejumlah 12 target indikator, sebanyak 10 indikator berstatus telah tercapai, 2 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 13 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 6 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 5 target indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator perlu upaya keras.


9. Pertanahan

Kinerja penyelenggaraan urusan Pertanahan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator kinerja dalam RKPD Kudus 2014 dan 4 target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel 2.97

Tabel 2.97
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Terhadap Target RKPD 2014
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Luas tanah bersertifikat milik Pemerintah Kabupaten	-	-	890.010 m ²	1.075.176 m ²	2.091.621,195 m ²	890.010 m ²		
2	Sistem informasi pertanahan	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	-		
3	persentase luas lahan bersertifikat	-	-	5,60%	5,45%	27,40%	7,2%		
4	Jumlah kasus tanah Pemkab yang tertangani	3 kasus	3 kasus	3 kasus	3 kasus	15 kasus	5 kasus		

Keterangan:




• Status thdp Target RKPD 2014:		Target 2014 tercapai
		Target 2014 tidak tercapai
• Status thdp Target Akhir RPJMD:		Capaian Target RPJMD s/d 2014 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Pertanahan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RKPD Kudus 2014, dari sejumlah 3 target indikator, sebanyak 3 indikator berstatus telah tercapai, 0 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 4 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 0 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 4 target indikator berstatus akan tercapai, dan 0 indikator perlu upaya keras.






10. Kependudukan dan Catatan Sipil

Kinerja penyelenggaran urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 target indikator kinerja dalam RKPD Kudus 2014 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel 2.98.

Tabel 2.98
Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Terhadap Target RKPD 2014 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rasio bayi berakte kelahiran		83%	86%	89%	100%	75%		
2	Rasio pasangan berakte nikah		13%	14%	15%	18%	14%		
3	Kepemilikan e-KTP		93,50%	94,70%	95,50%	100%	98%		
4	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk		687	735	786	950	600		
5	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten		100%	100%	100%	100%	100%		
6	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		100%	100%	100%	100%	100%		
7	Persentase aduan pelayanan kependudukan yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Keterangan:





















<ul style="list-style-type: none"> Status thdp Target RKPD 2014: 		Target 2014 tercapai
		Target 2014 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status thdp Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2014 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RKPD Kudus 2014, dari sejumlah 7 target indikator, sebanyak 5 indikator berstatus telah tercapai, 2 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 7 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 3 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 2 target indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator perlu upaya keras.



11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Kinerja penyelenggaran urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 10 target indikator kinerja dalam RKPD Kudus 2014 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel 2.99.

Tabel 2.99
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak
Terhadap Target RKPD 2014 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%		
2	Persentase perempuan di lembaga legislatif	13,33%	13,33%	13,33%	13,33%	13,33%	13,33%		
3	Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten)	100%	100%	100%	-	100%	100%		
4	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (ormas, orsos)	11,77%	11,77%	11,77%	11,77%	11,77%	11,77%		
5	Cakupan KDRT yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
6	Cakupan kasus kekerasan anak yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7	Partisipasi angkatan kerja perempuan	94,63%	94,63%	94,63%	94,64%	94,65%	94,6%		
8	Rata-rata jumlah kelompok PKK	9 kelompok	9 kelompok	9 kelompok	-	9 kelompok	9 kelompok		
9	Jumlah anggota organisasi perempuan di kecamatan dalam hal kesetaraan gender dan perlindungan anak yang mendapatkan penyuluhan	-	100 orang	110 orang	-	110 orang	110 orang		
10	PKK aktif	9 organisasi	9 organisasi	9 organisasi	-	9 organisasi	9 organisasi		

Keterangan:

<ul style="list-style-type: none"> Status thdp Target RKPD 2014: 		Target 2014 tercapai
		Target 2014 tidak tercapai











<ul style="list-style-type: none"> Status thdp Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2014 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RKPD Kudus 2014, dari sejumlah 10 target indikator, sebanyak 9 indikator berstatus telah tercapai, 1 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 10 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 9 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 0 target indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator perlu upaya keras.


12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Kinerja penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 target indikator kinerja dalam RKPD Kudus 2014 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel 2.100.

Tabel 2.100
Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Terhadap Target Target RKPD 2014 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Cakupan peserta KB aktif	82,35%	82,35%	82,35%	83,4%	83,45%	82,35%		
2	Persentase keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera I	31,31%	31,31%	31,31%	31,30%	31,29%	31,31%		
3	Cakupan PUS yang istrinya di bawah usia 20 Tahun	1,62%	1,62%	1,62%	1,61%	1,60%	2,14%		
4	Cakupan pelayanan kontrasepsi (MOP/MOW)	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5	Jumlah penemuan penderita HIV AIDS	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang		

Keterangan:

• Status thdp Target RKPD 2014:		Target 2014 tercapai
		Target 2014 tidak tercapai
• Status thdp Target Akhir RPJMD:		Capaian Target RPJMD s/d 2014 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 perlu upaya keras


















Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RKPD Kudus 2014, dari sejumlah 5 target indikator, sebanyak 4 indikator berstatus telah tercapai, 1 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 5 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 3 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 1 target indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator perlu upaya keras.

13. Sosial






Kinerja penyelenggaran urusan Sosial ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 11 target indikator kinerja dalam RKPD Kudus 2014 dan 16 target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel 2.101.

Tabel 2.101
Capaian Kinerja Urusan Sosial Terhadap Target RKPD 2014 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan Pelatihan	90 KK	90 KK	90 KK	90 KK	450 KK	90 KK		
2	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelatihan ketrampilan.	150 orang	75 orang	90 orang	90 orang	450 orang	90 orang		
3	Jumlah PMKS yang terdata	15.000 orang	10.000 orang	9000 orang	8000 orang	5000 orang	15.607 orang		
4	Jumlah pusat informasi penyandang cacat dan trauma center			-	-	1 unit	-		
5	Jumlah penyandang cacat dan trauma	0 orang	0 orang	-	25 orang	100 orang	-		
6	Jumlah orang terlantar dan lansia yang Ditampung	2412 orang	2000 orang	-	2000 orang	2000 orang	-		

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Jumlah eks penyandang penyakit sosial	193 orang	355 orang	50 orang	70 orang	100 orang	50 orang		
8	Cakupan orsos, PSM, karangtaruna yang mendapat bantuan ekonomi produktif	377 buah	377 buah	377 buah	-	377 buah	9 orsos		
9	Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang menyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan sosial			-	2 WKSB M	2 WKSB M	-		
10	Jumlah kegiatan upacara hari besar nasional dan fasilitasi resepsi kenegaraan	3 kegiata n	3 kegiata n	4 kegiata n	-	4 kegiata n	4 kegiatan		
11	Jumlah peserta dialog antar umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME	90 orang	90 orang	90 orang	75 orang	445 orang	90 orang		
12	Tingkat intensitas dan peran dalam melaksanakan ibadah agama			60%	70%	90%	60%		
13	pelaksanaan Hisab dan Rukyat, penentuan arah kiblat dan pembuatan jadwal imsakiyah dan sholat fardlu	4 keg.	4 keg.	4 keg.	4 keg.	4 keg.	4 keg		
14	jumlah pengajian selapanan	12 keg.	12 keg.	12 keg.	12 keg.	12 keg.	12 keg		
15	jumlah penyaluran hibah dan Bansos keagamaan	12 keg.	12 keg.	12 keg.	12 keg.	12 keg.	12 keg		
16	Cakupan peserta MTQ Tingkat Kecamatan			-	100%	100%	-		

Keterangan:















<ul style="list-style-type: none"> Status thdp Target RKPD 2014: 		Target 2014 tercapai
		Target 2014 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status thdp Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2014 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Sosial, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RKPD Kudus 2014, dari sejumlah 11 target indikator, sebanyak 9 indikator berstatus telah tercapai, 2 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 16 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 4 target indikator berstatus telah tercapai, 9 sejumlah target indikator berstatus akan tercapai, dan 3 indikator perlu upaya keras.


14. Ketenagakerjaan



Kinerja penyelenggaraan urusan Ketenagakerjaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 target indikator kinerja dalam RKPD Kudus 2014 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel 2.102.

Tabel 2.102
Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Terhadap Target RKPD 2014 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	0,14	0,14	0,16	0,13	0,13	3.924 orang		
2	Jumlah pencari kerja terdaftar	9.253 orang	8.131 orang	15.000 orang	15.000 orang	75.000 orang	5.526 orang		
3	Jumlah pencari kerja ditempatkan	3.693 orang	4.254 orang	4.500 orang	4.500 orang	22.500 orang	2.273 orang		
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,83	60,89	70,01	72,25	78,28	71,92		
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,85	5,75	5,7	5,65	5,55	5,03		
6	Jumlah penganggur yang memperoleh pekerjaan sementara	160 orang	360 orang	900 orang	900 orang	5400 orang	1.980 orang		
7	Jumlah kasus perselisihan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	5 kasus	5 kasus	5 kasus	5 kasus	25 kasus	18 kasus		

Keterangan:

<ul style="list-style-type: none"> Status thdp Target RKPD 2014: 		Target 2014 tercapai
		Target 2014 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status thdp Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2014 telah tercapai

	Capaian Target RPJMD s/d 2014 akan tercapai
	Capaian Target RPJMD s/d 2014 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Ketenagakerjaan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RKPd Kudus 2014, dari sejumlah 7 target indikator, sebanyak 5 indikator berstatus telah tercapai, indikator 2 berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 7 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 1 target indikator berstatus telah tercapai, 4 sejumlah target indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator perlu upaya keras.



15. Koperasi dan UKM

Kinerja penyelenggaraan urusan Koperasi dan UKM ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 target indikator kinerja dalam RKPd Kudus 2014 dan 9 target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel 2.103.

Tabel 2.103
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Terhadap Target RKPd 2014 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPd 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah UMKM	11.596	11.596	11.717	11.833	12.172	11.717 buah		
2	Jumlah Usaha Mikro		11.047	11.159	11.266	11.578	11.047		
3	Jumlah Usaha Kecil		429	434	439	454	429 buah		
4	Jumlah Usaha Menengah		120	124	128	140	120 buah		
5	Cakupan UMKM yang difasilitasi	0,78	1,03	1,02	1,01	4,93	2,2		
6	Jumlah Pameran/ Ekspo produk UMKM	3	2	6	6	53	6 kali		
7	Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran	176	178	178	178	890	72		
8	Cakupan UMKM yang difasilitasi dalam perkreditan			-	0,4	1,6	-		
9	Persentase koperasi aktif	87	87	89	90	94	89		

Keterangan:











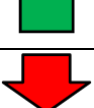
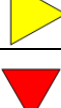




• Status thdp Target RKPD 2014:		Target 2014 tercapai
		Target 2014 tidak tercapai
• Status thdp Target Akhir RPJMD:		Capaian Target RPJMD s/d 2014 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Koperasi dan UMKM, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RKPD Kudus 2014, dari sejumlah 8 target indikator, sebanyak 4 indikator berstatus telah tercapai, indikator 4 berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 9 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 0 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 4 target indikator berstatus akan tercapai, dan 5 indikator perlu upaya keras.


16. Penanaman Modal

Kinerja penyelenggaraan urusan Penanaman Modal ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 target indikator kinerja dalam RKPD Kudus 2014 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel 2.104.

Tabel 2.104
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Terhadap Target RKPD 2014 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah investor		9	11	13	19	11		
2	Jumlah penerbitan ijin investasi		12	24	36	72	24		
3	Jumlah Investor berskala Nasional	11	11	12	13	16	12		
4	Jumlah nilai investasi berskala nasional (dln juta)	159.41 9	167.39 0	175.75 9	184.54	213.63 7	175.7 59		
5	Daya serap tenaga kerja	32.154	33.762	35.450	37.222	43.089	35.45 0		
6	Nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)	12.163	7.511	8.070	8.877	11.815	357,6 08		
7	Jumlah lembaga keuangan bank/non bank		57	69	81	117	69		
8	Lama proses perijinan	10 hari	10 hari	10 hari	10 hari	10 hari	10 hari		

Keterangan:















• Status thdp Target RKPD 2014:		Target 2014 tercapai
		Target 2014 tidak tercapai
• Status thdp Target Akhir RPJMD:		Capaian Target RPJMD s/d 2014 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 perlu upaya keras



Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Penanaman Modal, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RKPD Kudus 2014, dari sejumlah 8 target indikator, sebanyak 7 indikator berstatus telah tercapai, 1 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 8 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 1 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 6 target indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator perlu upaya keras.

17. Kebudayaan






Kinerja penyelenggaraan urusan Kebudayaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 target indikator kinerja dalam RKPD Kudus 2014 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel 2.105.

Tabel 2.105
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Terhadap Target RKPD 2014
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah adat dan tradisi budaya daerah yang Diaktualisasi	30	32	32	34	40	33		
2	Jumlah tradisi desa	-	-	26	26	27	28		
3	Jumlah BCB yang direvitalisasi dan jumlah seni budaya yg dilestarikan	1	1	5	5	5	5		
4	Jumlah BCB	156	156	156	157	160	156		
5	Jumlah pembinaan etika kepada anak sekolah dan generasi muda			160	170	200	160		
6	Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	3	3	7	7	7	3		
7	Jumlah sarana disitus patiyam dan Taman Budaya	2	2	5	5	5	2		

8	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	9 kali	7 kali	12 kali	12 kali	60 kali	9 Kali		
---	---	--------	--------	---------	---------	---------	--------	---	---

Keterangan:

• Status thdp Target RKPD 2014:		Target 2014 tercapai
		Target 2014 tidak tercapai
• Status thdp Target Akhir RPJMD:		Capaian Target RPJMD s/d 2014 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Kebudayaan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RKPd Kudus 2014, dari sejumlah 8 target indikator, sebanyak 5 indikator berstatus telah tercapai, 3 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 8 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 2 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 3 target indikator berstatus akan tercapai, dan 3 indikator perlu upaya keras.

18. Kepemudaan dan Olahraga






Kinerja penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan Olahraga ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 12 target indikator kinerja dalam RKPd Kudus 2014 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel 2.106.

Tabel 2.106
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Terhadap Target RKPd 2014 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPd 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah kegiatan kepemudaan	13	13	13	13	13	15		
2	Jumlah organisasi pemuda	41	44	43	44	44	26		
3	Jumlah kegiatan olahraga	14	14	14	14	14	14		
4	Jumlah organisasi olahraga	32	36	36	36	36	36		
5	Jumlah Klub Olah Raga	132	132	132	132	132	132		
6	Jumlah gedung olahraga	7	7	7	7	7	7		
7	Jumlah Lapangan olahraga	248	248	248	248	248	248		

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Jumlah gelanggang olahraga	1	1	1	1	1	1		
9	Jumlah balai remaja	132	132	132	132	132	1		
10	jumlah kegiatan pembinaan / sosialisasi penyalahgunaan narkoba	9 keg	9 keg	8 keg	-	8 keg	8 keg		
11	Jumlah kegiatan keolahragaan	3 keg	3 keg	2 keg	3 keg	14 keg	2 keg		
12	Persentase pemenuhan kebutuhan sarpras Olahraga	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Keterangan:










































<ul style="list-style-type: none"> Status thdp Target RKPD 2014: 		Target 2014 tercapai
		Target 2014 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status thdp Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2014 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 perlu upaya keras












Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RKPD Kudus 2014, dari sejumlah 12 target indikator, sebanyak 10 indikator berstatus telah tercapai, 2 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 12 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 9 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 1 target indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator perlu upaya keras.

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri






Kinerja penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 30 target indikator kinerja dalam RKPD Kudus 2014 dan 32 target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel 2.107.

Tabel 2.107
Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Terhadap Target
RKPD 2014 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase penurunan konflik di daerah		80%	70%	60%	30%	10%		
2	Rasio linmas per 10.000 penduduk	59 orang	59 orang	59 orang	59 orang	59 orang	57,5		
3	Persentase penanganan gangguan keamanan	75%	75%	75%	75%	75%	100%		
4	Persentase Penurunan tindak kriminalitas di daerah		80%	75%	60%	10%	10%		
5	jumlah aduan masyarakat tiap bulan		18	16	15	15	15		
6	Persentase pelanggaran HO		80%	70%	60%	60%	60%		
7	Persentase pelanggaran Perda		80%	70%	60%	60%	60%		
8	Jumlah pertemuan komunitas Intelegen daerah		12 kali	12 kali	12 kali	60 kali	12 kali		
9	Jumlah demo, angka kriminalitas dan penegakan perda			70 kali	50 kali	10 kali	70 kali		
10	Rasio pol PP per 10.000 penduduk	0,794	0,7948	0,7948	0,7948	0,7948	0,7948		
11	Jumlah operasi dan penegakan hukum terhadap rokok ilegal	-	-	-	6 kali	24 kali	-		
12	Jumlah pembinaan FKUB, FPBI dan pendidikan wawasan kebangsa		5 kali	6 kali	22 kali	105 kali	15 kali		
13	Jumlah pembinaan LSM, Ormas/OKP	75 LSM	75 LSM	45 LSM	47 LSM	52 LSM	45 LSM		
14	Jumlah peserta penyuluhan pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran Narkoba		100 orang	200 orang	550 orang	1950 orang	200 orang		
15	Jumlah peredaran miras dan narkoba di Masyarakat		150	150	120	30	30		
16	Persentase operasi prostitusi		8,3%	8%	7%	7%	7%		
17	Jumlah pengguna miras dan narkoba di Masyarakat		320	300	270	100	100		
18	Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu	65%	70%	75%	77%	85%	81,3%		
19	Jumlah pembinaan politik daerah	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	5 kali	2 kali		
20	Jumlah pendidikan politik masyarakat	1 kali	1 kali	9 kali	4 kali	19 kali	1 kali		
21	Jumlah Desa Tangguh Bencana	0 desa	7 desa	14 desa	21 desa	42 desa	7 desa		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPd 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Jumlah Satgas Siaga Bencana		50 orang	60 orang	70 orang	100 orang			
23	Persentase perbaikan fasilitas publik dan fasilitas penduduk akibat bencana		20%	10%	73,8%	100%			
24	Jumlah kegiatan upacara hari besar nasional			-	3 keg	3 keg	-		
25	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemilihan umum	20 buku	25 buku	25 buku	-	60 buku	30 buku		
26	Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
27	Cakupan patroli petugas Pol PP	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
28	Jumlah peserta kegiatan pengembangan Wasbang	305 orang	305 orang	295 orang	220 orang	1175 orang			
29	Cakupan desa yang terpantau dalam pelaksanaan pemilu	100%	100%	100%	-	100%	100%		
30	jumlah posko bencana	21 posko	20 posko	20 posko	35 posko	35 posko			
31	Angka kriminalitas yang tertangani	12 kasus	12 kasus	12 kasus		12 kasus			
32	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 di kelurahan (diluar perda)	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Keterangan:



















<ul style="list-style-type: none"> Status thdp Target RKPd 2014: 		Target 2014 tercapai
		Target 2014 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status thdp Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2014 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RKPd Kudus 2014, dari sejumlah 30 target indikator, sebanyak 22 indikator berstatus telah tercapai, 3 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 32 target indikator RPJMD Tahun 2013-2018, sebanyak 14 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 10 target indikator berstatus akan tercapai, dan 3 indikator perlu upaya keras.



























20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kinerja penyelenggaran urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 45 target indikator kinerja dalam RKPD Kudus 2014 dan 47 target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel 2.108.

Tabel 2.108
Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawasan dan Persandian Terhadap Target RKPD 2014 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018






No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah rapat koordinasi pimpinan	7 kali	6 kali	6 kali	6 kali	30 kali	6 kali		
2	Jumlah fasilitasi penerimaan kunjungan Kerja	25 kali	25 kali	25 kali	25 kali	125 kali	14 kali		
3	Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kudus	-	1 kali	-	-	1 kali	-		
4	Jumlah kecamatan yang tertib administrasi	9 kec	9 kec	9 kec	9 kec	9 kec	9 kec		
5	Persentase Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah	-	-	-	100%	100%	-		
6	Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	20 kali	3 kali		
7	Jumlah pelaksanaan kegiatan Dialog/Audiensi Bupati di Desa/Kelurahan	40 kali	28 kali	28 kali	33 kali	152 kali	20 kali		
8	Persentase tertib administrasi keuangan desa	45%	45 %	50%	50%	70%	100%		
9	Persentase penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemda	100%	100%	100%	100%	100%	71,4%		
10	Jumlah Produk Hukum yang disusun dan didistribusikan	5 Ranperda, 25 Perbup., 200 Kep. Bupati, 150 buku	5 Ranperda, 25 Perbup., 100 Kep. Bupati, 260 buku	5 Ranperda, 25 Perbup., 100 Kep. Bupati, 260 buku	5 Ranperda, 25 Perbup., 100 Kep. Bupati, 260 buku	25 Ranp., 125 Perbup., 500 Kep.Bup., 1.300 Buku	349 buku		

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPDP 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Jumlah sosialisasi ketentuan cukai	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	25 kali	5 kali		
12	Jumlah tanggapan masyarakat terhadap kebijakan Pemkab	72 kali	84 kali	72 kali	72 kali	360 kali	84 kali		
13	Jumlah Sosialisasi cukai melalui media	1 paket	-	1 paket	1 paket	5 paket	1 paket		
14	Jumlah rapat koordinasi pimpinan	11 kali	11 kali	11 kali	11 kali	55 kali	10 kali		
15	Jumlah dokumen standart satuan harga	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	5 dok	1 dok		
16	Jumlah SKPD yang terevaluasi kelembagaannya		4 SKPD	4 SKPD	5 SKPD	24 SKPD	4 SKPD		
17	Jumlah dokumen pelaksanaan reformasi Birokrasi		1 dok	1 dok	1 dok	5 dok	1 dok		
18	Jumlah SKPD yang sudah di Anjab, ABK	4 SKPD	4 SKPD	6 SKPD	7 SKPD	36 SKPD	28 SKPD		
19	Tersedianya Pedoman IKM	44 SKPD	44 SKPD	44 SKPD	44 SKPD	44 SKPD	44 SKPD		
20	Jumlah unit pelayanan yang sudah di IKM		12 unit pelayan an	14 unit pelayan an	20 unit pelayan an	40 unit pelayan an	14 unit pelayan an		
21	Jumlah Perda yang ditetapkan	18 perda	18 perda	18 perda	18 perda	90 perda	8 perda		
22	Rasio PNS yang mengikuti diklat teknis	0,86	2,74	1,66	1,66	5,8	2,88 %		
23	Rasio S1 terhadap jumlah pegawai	39,28	40,67	40,98	41,29	42,22	49,36 %		
24	Rasio S2/S3 terhadap jumlah pegawai	2,37	2,45	2,50	2,55	2,71	3,33 %		
25	Rasio Pejabat struktural yang mengikuti Diklatpim	6.4	13.6	7.52	9.6	45.92	6,4 %		
26	Jumlah PNS yang mengikuti diklat prajab	-	-	240 orang	239 orang	985 orang	59 orang		
27	Rasio penanganan pelanggaran disiplin	100,00	0,00	0,60	0,65	0,80	66,67 %		
28	Jumlah aparatur yang terbina dikembangkan sesuai kompetensi dan prestasi	12.279	12.603	12.261	12.239	61.029	10.874 orang		
29	Persentase penyelesaian TLHP Reguler	100%	100%	100%	100%	100%	88 %		
30	Persentase penyelesaian penanganan kasus	100%	100%	100%	100%	100%	71,4		

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPDP 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Propinsi	100%	100%	100%	100%	100%	98 %		
32	Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang profesional	38 orang	39 orang	39 orang	39 orang	39 orang	39 orang		
33	Persentase terpenuhinya laporan pajak-pajak pribadi (LP2P)	0%	100%	100%	100%	100%	100 %		
34	Persentase terlaksananya PMPRB	0%	100%	100%	100%	100%	100 %		
35	Persentase tersusunnya SOP	0%	100%	100%	100%	100%	100 %		
36	Persentase terlaksananya penyelenggaraan SPIP	0%	100%	100%	100%	100%	100%		
37	Persentase pengendalian, monev dan pelaporan kegiatan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
38	Persentase sistem informasi jasa konstruksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
39	Fasilitasi proses pengadaan barang / jasa	0%	0%	50%	60%	90%			
40	Lama proses perijinan Usaha Jasa Konstruksi	15 hari	10 hari	10 hari	10 hari	10 hari	10 hari		
41	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	94,49%	100%	100%	100%	100%	100%		
42	Persentase kelancaran pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%		
43	Persentase kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap BUMD	2%		2%	2%	10%			
44	Persentase SKPD yang telah melakukan inventarisasi aset dengan tertib	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%		
45	Opini laporan keuangan (WTP, WDP)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%		

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPd 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Peningkatan PAD (%)	1,67%	19,61%	21,21%	18,21%	17,94%	61,44 %		
47	Persentase Perdes APBdes yang tersusun sesuai regulasi	100%	100%	100%	100%	100%	100 %		

Keterangan:





<ul style="list-style-type: none"> Status thdp Target RKPd 2014: 		Target 2014 tercapai
		Target 2014 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status thdp Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2014 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 perlu upaya keras















Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RKPd Kudus 2014, dari sejumlah 45 target indikator, sebanyak 31 indikator berstatus telah tercapai, 12 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 47 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 20 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 13 target indikator berstatus akan tercapai, dan 12 indikator perlu upaya keras.

21. Ketahanan Pangan






Kinerja penyelenggaran urusan Ketahanan Pangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 9 target indikator kinerja dalam RKPd Kudus 2014 dan RPJMD Kabupaten Kudus tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel 2.109.

Tabel 2.109
Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Terhadap Target RKPd 2014 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPd 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Regulasi Ketahanan Pangan	1					1 dokumen		
2	Ketersediaan Pangan Utama	91	91	100	100	100	162%		

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Ketersediaan energi dan Protein Per Kapita	53	61	75	90	100	167%		
4	Penguatan Cadangan Pangan	63	64	65	67	90	179%		
5	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	86	86	88	90	100	100%		
6	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	70	70	75	90	100	100%		
7	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	87	89	90	90	95	90%		
8	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	77	79	80	80	85	38%		
9	Penanganan Daerah Rawan Pangan	56	67	68	68	75	68%		

Keterangan:

<ul style="list-style-type: none"> Status thdp Target RKPD 2014: 		Target 2014 tercapai
		Target 2014 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status thdp Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2014 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 perlu upaya keras















Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Ketahanan Pangan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RKPD Kudus 2014, dari sejumlah 9 target indikator, sebanyak 8 indikator berstatus telah tercapai, 1 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 9 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 6 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 2 target indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator perlu upaya keras.

22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa






Kinerja penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 17 target indikator kinerja dalam RKPD Kudus 2014 dan 21 target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel 2.110.

Tabel 2.110
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Terhadap
Target RKPD 2014 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada	Desa Swadaya: 85; Desa Swakarya: 47; Desa Swasembada: 0	Desa Swadaya: 85; Desa Swakarya: 47; Desa Swasembada: 0	Desa Swadaya: 85; Desa Swakarya: 47; Desa Swasembada: 0	Desa Swadaya: 85; Desa Swakarya: 47; Desa Swasembada: 0	Desa Swadaya: 85; Desa Swakarya: 47; Desa Swasembada: 0	Desa swadaya: 85 desa; Desa swakarya: 47 desa;		
2	Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat	89	89	89	89	89	89 lembaga		
3	Persentase Posyandu aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	3%	7%	7%	7%	9%	7%		
5	Jumlah desa yang mempunyai profil desa	132 desa/kel	132 desa/kel	132 desa/kel	132 desa/kel	132 desa/kel	132 desa/kel		
6	Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten)			-	100%	100%	-		
7	Persentase BKM berkinerja baik	50%	50%	52%	55%	70%	52%		
8	Persentase peningkatan kapasitas lembaga Kemasyarakatan		100%	100%	100%	100%	100%		
9	Jumlah aparatur Pemdес yang mengikuti pelatihan / bintek	269 Orang	269 Orang	369 orang	369 orang	1476 orang	369 orang		
10	Fasilitasi Pilkades		116 desa	0 desa	5 desa	7 desa	-		
11	Persentase desa dengan administrasi sesuai dengan ketentuan	45%	45%	50%	55%	55%	50%		
12	cakupan RT/RW dan desa terbina	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
13	Jumlah kelompok binaan petani	34 klmpk	34 klmpk	34 klmpk	17 klmpk	102 klmpk	3 kelompok		

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang	80%	80%	80%	80%	80%	80%		
15	Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat	22 keg	21 keg	22 keg	17 keg	90 keg	2 kegiatan		
16	Cakupan aparatur desa terbina	30%	30%	30%	30%	30%	30%		
17	Jumlah PKK Aktif	-	-	-	18 organisasi	18 organisasi	-		
18	Jumlah kegiatan sosial yang terfasilitasi	30 keg	30 keg	30 keg	-	30 keg	30 keg		
19	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	20%	20%	20%	-	20%	20%		
20	Cakupan RT, RW terbina	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
21	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	-	-	-	9 klmpk	9 klmpk	-		

Keterangan:

<ul style="list-style-type: none"> Status thdp Target RKPD 2014: 		Target 2014 tercapai
		Target 2014 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status thdp Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2014 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RKPD Kudus 2014, dari sejumlah 17 target indikator, sebanyak 15 indikator berstatus telah tercapai, 2 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 21 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 11 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 8 target indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator perlu upaya keras.

23. Statistik





Kinerja penyelenggaraan urusan Statistik ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD

Kudus 2014 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel 2.211.

Tabel 2.111
Capaian Kinerja Urusan Statistik Terhadap Target RKPD 2014 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah data/ informasi statistik daerah	5 dokum en	5 dokum en	7 dokum en	7 dokum en	7 dokum en	7 dokum en		

Keterangan:



<ul style="list-style-type: none"> Status thdp Target RKPD 2014: 		Target 2014 tercapai
		Target 2014 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status thdp Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2014 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 perlu upaya keras




Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Statistik, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RKPD Kudus 2014, dari sejumlah 1 target indikator, sebanyak 1 indikator berstatus telah tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 1 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 1 target indikator berstatus telah tercapai.

24. Kearsipan





Kinerja penyelenggaraan urusan Kearsipan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja dalam RKPD Kudus 2014 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel 2.212.

Tabel 2.112
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Terhadap Target RKPD 2014 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengelolaan arsip secara baku	3 SKPD	44 desa/k el	58 desa/ kelurah an/ SKPD	55 desa/ kelurah an/ SKPD	283 desa/ kelurah an/ SKPD	25 desa; 6 kecam atan; dan 9 kelurah an;		

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							18 SKPD		
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan		60 orang	60 orang	60 orang	300 orang	100 orang		
3	Jumlah arsip kependudukan yang terdokumentasi		3,500 dokum en	6,000 dokum en	4,500 dokum en	6000 dokum en	2.000 dokum en		
4	Persentase sarana prasarana kearsipan kependudukan dalam kondisi baik		75%	85%	90%	100%	75%		

Keterangan:























<ul style="list-style-type: none"> Status thdp Target RKPD 2014: 		Target 2014 tercapai
		Target 2014 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status thdp Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2014 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Kearsipan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RKPD Kudus 2014, dari sejumlah 4 target indikator, sebanyak 1 indikator berstatus telah tercapai, 3 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 4 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 0 target indikator berstatus telah tercapai, 1 sejumlah target indikator berstatus akan tercapai, dan 3 indikator perlu upaya keras.

25. Komunikasi dan Informatika






Kinerja penyelenggaran urusan Komunikasi dan Informatika ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 17 target indikator kinerja dalam RKPD Kudus 2014 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel 2.113.

Tabel 2.113
 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Terhadap Target RKPD 2014
 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah yang dapat difasilitasi	7 sistem	11 sistem	11 sistem	12 sistem	13 sistem	11 sistem		
2	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0,240	0,234	0,231	0,229	0,223	0,1570		
3	Jumlah website milik pemerintah daerah	4 web	17 web	17 web	17 web	18 web	17 website		
4	Jumlah surat kabar nasional dan lokal.	11 surat kabar	11 surat kabar	12 surat kabar	12 surat kabar	12 surat kabar	12 surat kabar		
5	Jumlah penyiaran radio/tv yang sesuai standar penyiaran	24 stasiun	24 stasiun	24 stasiun	24 stasiun	24 stasiun	24 stasiun		
6	Jumlah pameran/expo	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali		
7	Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media massa (majalah, radio, TV)	189 kali	275 kali	297 kali	302 kali	1506 kali	297 kali		
8	Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media baru (website, media online)	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari		
9	Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media tradisional (pertunjukan rakyat)	22 kali	23 kali	23 kali	23 kali	23 kali	9 kali		
10	Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media interpersonal (ceramah, diskusi, lokakarya, sarasehan)	5 kali tiap kecamatan	4 kali tiap kecamatan	3 kali tiap kecamatan	4 kali tiap kecamatan	4 kali tiap Kecamatan	3 kali tiap Kecamatan		
11	Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media luar ruang (buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, baliho)	4 kali	2 kali	4 kali	12 kali	12 kali	16 kali		

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Persentase cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	0%	100%	100%	100%	100%	100%		
13	Jumlah penelitian iptek dan inovasi daerah	3 dokum en	3 dokum en	2 dokum en		2 dokum en	2 dokumen		
14	Jumlah publikasi yang diterbitkan melalui media massa	61 kali	178 kali	214 kali	71 kali	498 kali	402 kali		
15	Jumlah sarpras pendukung dokumentasi dan Publikasi	-	2 unit	3 unit	1 unit	7 unit	10 unit		
16	Jumlah publikasi kegiatan dewan	1,500 eks	1,500 eks	1,500 eks	1,500 eks	9,000 eks	1.500 eks		
17	Jumlah sarana media publikasi	2 jenis	2 jenis	2 jenis		2 jenis	2 jenis		

Keterangan:

• Status thdp Target RKPD 2014:		Target 2014 tercapai
		Target 2014 tidak tercapai
• Status thdp Target Akhir RPJMD:		Capaian Target RPJMD s/d 2014 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Komunikasi dan Informatika, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RKPD Kudus 2014, dari sejumlah 17 target indikator, sebanyak 16 indikator berstatus telah tercapai, 1 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 17 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 10 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 6 target indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator perlu upaya keras.





26. Perpustakaan

Kinerja penyelenggaraan urusan Perpustakaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Kudus 2014 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel 2.114.

Tabel 2.114
 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Terhadap Target RKPd 2014
 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPd 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah perpustakaan milik Pemda & Non Pemda (Perpus Pemda, Umum, Sekolah, Desa, dan Perpus Masyarakat)	163 perpus	163 perpus	168 perpus	171 perpus	184 perpus	168 perpus		

Keterangan:

• Status thdp Target RKPd 2014:		Target 2014 tercapai
		Target 2014 tidak tercapai
• Status thdp Target Akhir RPJMD:		Capaian Target RPJMD s/d 2014 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Perpustakaan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RKPd Kudus 2014, dari sejumlah 1 target indikator, berstatus telah tercapai, 0 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 1 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, berstatus akan tercapai.















2.2.2. Urusan Pilihan

1. Pertanian





Kinerja penyelenggaran urusan Pertanian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 target indikator kinerja dalam RKPd Kudus 2014 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel 2.115.

Tabel 2.115
 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Terhadap Target RKPd 2014
 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPd 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Cakupan produk unggulan pertanian yang difasilitasi dalam pameran	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %	80%		

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Cakupan bina kelompok tani	40%	50%	60%	70%	100%	60%		
3	Peningkatan produktifitas tanaman	5,70%	5,75%	5,80%	5,85%	6%	5,80 Ton/Ha		
4	Terpenuhinya sarpras penyuluhan pertanian	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5	Cakupan kelompok tani yang mendapatkan pelayanan kesehatan ternak	40%	50%	60%	70%	100%	60%		
6	peningkatan produksi asal ternak	3.460.367 kg	3.586.454 kg	3.709.989 kg	3.809.914 kg	5.038.904 kg	3.709.989 Kg		
7	Cakupan irigasi	4,9%	9,75%	13,80%	18,85%	31,8%	9,75%		
8	Nilai tukar petani	104,71	105,61	105,91	106,21	107,11	105,91		

Keterangan:









<ul style="list-style-type: none"> Status thdp Target RKPD 2014: 		Target 2014 tercapai
		Target 2014 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status thdp Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2014 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Pertanian, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RKPD Kudus 2014, dari sejumlah 8 target indikator, sebanyak 7 indikator berstatus telah tercapai, 1 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 8 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 1 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 6 target indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator perlu upaya keras.






2. Kehutanan

Kinerja penyelenggaraan urusan Kehutanan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja dalam RKPD Kudus 2014 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel 2.116.

Tabel 2.116
 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Terhadap Target RKPD 2014
 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah pemanfaatan potensi sumber daya hutan (Ha)	25	25	25	25	125	25		
2	Jumlah rehabilitasi hutan dan lahan (Ha)	300	300	450	500	2750	450		
3	Persentase kerusakan kawasan hutan	17,6%	15,5%	13,5%	11,5%	5,5%	13,5%		
4	Terpenuhinya sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%		

Keterangan:






<ul style="list-style-type: none"> • Status thdp Target RKPD 2014: 		Target 2014 tercapai
		Target 2014 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> • Status thdp Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2014 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Kehutanan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RKPD Kudus 2014, dari sejumlah 4 target indikator, sebanyak 4 indikator berstatus telah tercapai. Terlihat pula bahwa dari 4 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 2 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 2 target indikator berstatus akan tercapai, dan 0 indikator perlu upaya keras.






3. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kinerja penyelenggaraan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 target indikator kinerja dalam RKPD Kudus 2014 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel 2.117.

Tabel 2.117
 Capaian Kinerja Urusan ESDM Terhadap Target RKPD 2014
 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0,03%		
2	Jumlah pertambangan berijin	3 lokasi	3 lokasi	4 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	4 lokasi		
3	Pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan	100%	100%	100%	100%	100%	38 kali		
4	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah	100%	100%	100%	100%	100%	63 kali		
5	Berfungsinya LPJU	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
6	Rasio elektrifikasi tingkat desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7	Jumlah daerah rawan bencana alam tanah longsor yang dipantau	5 desa	5 desa	6 desa	6 desa	6 desa	5 desa		

Keterangan:

<ul style="list-style-type: none"> Status thdp Target RKPD 2014: 		Target 2014 tercapai
		Target 2014 tidak tercapai
<ul style="list-style-type: none"> Status thdp Target Akhir RPJMD: 		Capaian Target RPJMD s/d 2014 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RKPD Kudus 2014, dari sejumlah 7 target indikator, 6 indikator berstatus telah tercapai, 1 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 7 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 3 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 4 target indikator berstatus akan tercapai, dan 0 indikator perlu upaya keras.

4. Pariwisata

Kinerja penyelenggaraan urusan Pariwisata ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 target indikator kinerja dalam RKPD Kudus 2014 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel 2.118.

Tabel 2.118
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Terhadap Target RKPD 2014 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kunjungan wisata	1.122.700	1.178.835	1.234.970	1.291.105	1.459.510	1.344.046		
2	% Kenaikan PAD sektor pariwisata	7	7	7	7	7	7		
3	Jenis, kelas dan jumlah rumah Makan /Restoran	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4		
4	Jenis, kelas dan jumlah Penginapan/Hotel	7,1	7,1	11,1	17,2	28,6	11,1		
5	Jenis, kelas dan jumlah Penginapan/Hotel	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6		
6	Terpenuhinya kebutuhan sarpras destinasi pariwisata	24	24	30	36	51	28		
7	Jumlah obyek wisata	10	10	10	10	12	10		
8	Kontribusi sektor pariwisata thd PDRB (dalam ribuan)	2.153.090	2.368.399	2.583.708	2.799.017	3.444.944	2.467.500		
9	Tersedianya sarpras promosi pariwisata	-	-	100%	100%	100%	100%		

Keterangan:

• Status thdp Target RKPD 2014:		Target 2014 tercapai
		Target 2014 tidak tercapai
• Status thdp Target Akhir RPJMD:		Capaian Target RPJMD s/d 2014 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 perlu upaya keras







Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Pariwisata, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RKPD Kudus 2014, dari sejumlah 10 target indikator, sebanyak 8 indikator berstatus telah tercapai, 2 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 10 target indikator

RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 5 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 3 target indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator perlu upaya keras.





5. Kelautan dan Perikanan

Kinerja penyelenggaran urusan Kelautan dan Perikanan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja dalam RKPD Kudus 2014 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel 2.119.

Tabel 2.119
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Terhadap Target RKPD 2014 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Produksi ikan kelompok pembudidaya	1.697 ton	1.770 ton	1.827 ton	1.959 ton	2.157 ton	1.827 Ton		
2	Terpenuhinya sarana dan prasarana perikanan budidaya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%		
3	Terpenuhinya sarana dan prasarana perikanan tangkap	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%		
4	Terpenuhinya sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100%		

Keterangan:

• Status thdp Target RKPD 2014:		Target 2014 tercapai
		Target 2014 tidak tercapai
• Status thdp Target Akhir RPJMD:		Capaian Target RPJMD s/d 2014 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Kelautan dan Perikanan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RKPD Kudus 2014, dari sejumlah 4 target indikator, sebanyak 4 indikator berstatus telah tercapai, 0 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 4 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 3 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 1 target indikator berstatus akan tercapai, dan 0 indikator perlu upaya keras.

6. Perdagangan

Kinerja penyelenggaraan urusan Perdagangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 17 target indikator kinerja dalam RKPD Kudus 2014 dan 19 target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel 2.120.

Tabel 2.120
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Terhadap Target RKPD 2014
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah temuan barang/jasa yang tidak layak edar/jual	16 temuan	-	10 temuan	8 temuan	30 temuan	10 temuan		
2	Jumlah pengaduan konsumen	-	3 aduan	2 aduan	1 aduan	1 aduan	2 aduan		
3	Ekspor bersih perdagangan (Juta Rupiah)	105.21 5.345	(1.432. 954)	120.99 7.647	139.14 7.294	211.62 5.641	120.99 7.647		
4	cakupan bina calon eksportir	-	-	3 org	5 org	43 org	3 orang		
5	Jumlah peserta pameran UMKM skala Regional	12 unit	12 unit	10 unit	15 unit	70 unit	10 unit		
6	kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (Juta Rupiah)	9.245.0 94	-	9.624.5 47	10.105. 774	53.181. 696	9.624.5 47		
7	Cakupan pembinaan pasar tradisional	930	-	940	945	950	940 pedaga ng		
8	Persentase peningkatan PAD dari retribusi Pasar	-	-4,27	5,35	2,38	15,38	5,35 %		
9	cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal (jumlah pedagang di pasar tradisional)	10.501 pedaga ng kios dan los	10.501 pedaga ng kios dan los	10.501 pedaga ng kios dan los	10.501 pedaga ng kios dan los	10.501 pedaga ng kios dan los	10.501 pedaga ng kios dan los		
10	Jumlah pasar daerah dan pasar desa	23 unit	23 unit	23 unit	23 unit	23 unit	23 pasar		
11	terpenuhinya kebutuhan sarpras perdagangan	100%	100%	100%	100%	100%	100 %		
12	partisipasi dalam pasar lelang	6 kali	-	4 kali	-	4 kali	4 kali		
13	tersedianya data perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat	96 kali	96 kali	96 kali	96 kali	480 kali	96 kali		

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	terlaksananya sosialisasi penggunaan produk dalam negeri	-	-	-	25 org	115 org	-		
15	terlaksananya pengawasan distribusi dan harga barang strategis	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali		
16	terlaksananya temu usaha	-	-	-	10 unit	55 unit	-		
17	Jumlah PKL dan Asongan	800 PKL	975 PKL	1.100 PKL	1.200 PKL	1.500 PKL	1.100 PKL		
18	Jumlah Rakor Ekuinda	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali		
19	Operasional Raskin	43.626 RTS		36,332 RTS	36,332 RTS	36,332 RTS	36.332 RTS		

Keterangan:
















• Status thdp Target RKPD 2014:		Target 2014 tercapai
		Target 2014 tidak tercapai
• Status thdp Target Akhir RPJMD:		Capaian Target RPJMD s/d 2014 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Perdagangan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RKPD Kudus 2014, dari sejumlah 17 target indikator, sebanyak 17 indikator berstatus telah tercapai, 0 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 19 target indikator RPJMD Tahun 2013-2018, sebanyak 8 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 11 target indikator berstatus akan tercapai, dan 0 indikator perlu upaya keras.


7. Industri

Kinerja penyelenggaraan urusan Industri ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 target indikator kinerja dalam RKPD Kudus 2014 dan 9 target indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel 2.121.

Tabel 2.121
 Capaian Kinerja Urusan Industri Terhadap Target RKPd 2014
 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPd 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Cakupan IKM yang mendapatkan pelatihan dan stimulan sarana usaha	0,41	1,15	2	2	11	2		
2	Jumlah bina KUB	-	-	50	50	250	50		
3	Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	0,99		
4	Jumlah IKM yang difasilitasi dalam aksesibilitas permodalan	-	-	-	20	80	23 IKM		
5	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	62,75	62,41	62,5	62,5	62,6	63%		
6	Jumlah IKM yang difasilitasi teknologi dalam proses produksi	-	-	-	5	80	-		
7	Jumlah Industri rokok yang telah mengujikan tar dan nikotin	-	-	-	5	10	-		
8	Jumlah kluster yang memiliki tempat Pameran	-	-	-	1	3	-		
9	Jumlah IKM yang difasilitasi dalam pameran	4	4	10	10	50	23		

Keterangan:

• Status thdp Target RKPd 2014:		Target 2014 tercapai
		Target 2014 tidak tercapai
• Status thdp Target Akhir RPJMD:		Capaian Target RPJMD s/d 2014 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Industri, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RKPd Kudus 2014, dari sejumlah 6 target indikator, sebanyak 6 indikator berstatus telah tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 9 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 2 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 5 target indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator perlu upaya keras.


8. Ketransmigrasian

Kinerja penyelenggaraan urusan Ketransmigrasian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Kudus 2014 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel 2.122.

Tabel 2.122
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Terhadap Target RKPD 2014
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal		Target Tahun		Target Akhir RPJMD	Capaian 2014	Status thdp Target RKPD 2014	Status thdp Target Akhir RPJMD
		2012	2013	2014	2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah calon transmigran terlayani	10 KK	10 KK	20 KK	30 KK	140 KK	3 KK		

Keterangan:

• Status thdp Target RKPD 2014:		Target 2014 tercapai
		Target 2014 tidak tercapai
• Status thdp Target Akhir RPJMD:		Capaian Target RPJMD s/d 2014 telah tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 akan tercapai
		Capaian Target RPJMD s/d 2014 perlu upaya keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Ketransmigrasian, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RKPD Kudus 2014, dari sejumlah 1 target indikator, berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 1 target indikator RPJMD Tahun 2013-2018, perlu upaya keras.

2.3. Penelaahan Pokok – pokok Pikiran DPRD

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan rumusan usulan program dan kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil reses dan rangkuman dengar pendapat dewan dengan SKPD dalam agenda kerja DPRD tahun 2014.

Adapun pokok-pokok pikiran DPRD masing-masing komisi, dijabarkan dalam Tabel 2.123, Tabel 2.124, Tabel 2.125, dan Tabel 2.126 berikut ini.

Tabel 2.123
Usulan Program/ Kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kudus
Bidang Tugas Komisi A

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Pagu Indikatif	SKPD	Keterangan
1.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan/ Pengendalian Keamanan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk menjaga ketertiban sosial dan menjunjung tinggi aspek moral - Untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan 	1 paket	Jalan di sepanjang Desa Rahtawu, Hutan Kota, Jalan-jalan protokol, Cafe-cafe/ tempat karaoke	100.000.000	Satpol PP	<ul style="list-style-type: none"> - Alih fungsi badan jalan menjadi lokasi mangkal pasangan muda-mudi yang bukan muhrim - Penertiban PKL yang melanggar Perda - Penertiban Cafe-cafe dan karaoke
2.	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan/ Seminar, Talkshow, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Untuk meningkatkan ideologi kebangsaan	1 paket	Kabupaten Kudus	100.000.000	Kesbangpol	Agar melibatkan Takmir Masjid se Kabupaten Kudus
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur/ Pendidikan dan Pelatihan Formal	Untuk meningkatkan SDM Aparatur Pemerintah Desa (perangkat desa)	1 paket	Kabupaten Kudus	500.000.000	Bagian Pemerintahan Desa/ BKD/ Kecamatan-kecamatan	Implementasi Adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya
4.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur/ Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Untuk meningkatkan kedisiplinan aparatur	1 paket	Kabupaten Kudus	500.000.000	Bagian Pemerintahan Desa/ BKD/ Kecamatan-kecamatan	Pemberlakuan 5 hari kerja agar diikuti dengan pelayanan yang tertib waktu kerja oleh Pemerintah Desa
5.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan/ Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Fasilitasi Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundang- undangan	Untuk memberikan kejelasan/ kepastian hukum dengan adanya Perda	1 paket	Kabupaten Kudus	300.000.000	Bagian Hukum	Implementasi Adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Pagu Indikatif	SKPD	Keterangan
6.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/ Evaluasi Rancangan Peraturan Desa	Untuk meningkatkan tertib administrasi keuangan desa dan peraturan desa	1 paket	Kabupaten Kudus	100.000.000	Bagian Pemdes/ Kecamatan-kecamatan	Agar dalam evaluasi disertakan juga hasil risalah rapat dengan BPD
7.	Program Sarana Prasarana Aparatur/ Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Ruang Fraksi	1 paket	Kantor Sekretariat DPRD	3.500.000.000	Sekretariat DPRD	

Tabel 2.124
Usulan Program/ Kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kudus
Bidang Tugas Komisi B

NO	Program/kegiatan	Indikator kinerja	volume	Lokasi	Pagu Indikatif	SKPD	Keterangan
1	Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	peningkatan sosialisasi sampai ke tingkat RW/RT	2 org per desa/ kelurahan	Wilayah Kabupaten Kudus		Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM	
2	Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan industri berbasis teknologi (DBHCHT)	terbantunya sarpras industri kecil menengah	42 set	Wilayah Kabupaten Kudus		Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM	
			Peralatan percetakan	Purwosari Ruko Jember No.6			
			Peralatan konveksi	Kedungdowo RT 01/07			
			Peralatan konveksi	Gribig RT 01/01			
			Alat pembuat roti dan kue kering	Getasrabi RT 01/02			
			Peralatan konveksi	Loram Kulon RT 02/02			
			Peralatan perbengkelan	Bulungcangkring RT 03/15			
			Peralatan pertukangan	Sadang RT 06/03 Jekulo			
			Peralatan pertukangan	Tanjungkarang RT 01/01			
			Alat perbengkelan dan las	Mejobo RT 06/01			

NO	Program/kegiatan	Indikator kinerja	volume	Lokasi	Pagu Indikatif	SKPD	Keterangan
			Mesin Pembuat krupuk	Mejobo RT 06/04			
			Mesin Pembuat krupuk	Mejobo RT 05/04			
			mesin perajin besi	Mejobo RT 06/01			
			Peralatan konveksi	Golantepus RT 01/03			
			Peralatan bengkel las dan cat	Gulang RT 06/01			
			Alat-alat pembuat roti	Hadiwarno RT 03/04			
			Alat-alat pembuat roti	Hadiwarno RT 03/03			
			Tata Boga	Mejobo RT 06/01 Mejobo			
			alat pertukangan kayu	Mejobo RT 07/02			
			Alat pembuat roti	Undaan Tengah RT 02/01, Undaan			
			Alat pembuat roti	Mlati Lor RT 04/03			
			Percetakan	Wergu Wetan RT 01/02			
			Alat pertukangan	Wergu Wetan RT 05/04			
			Alat konveksi	Wergu Wetan RT 05/04			
			Alat konveksi	Wergu Wetan RT 03/03			
			Mesin jahit	Purwosari RT 05/06			
			Catering	Mejobo RT 05/02 Mejobo			
			Percetakan dan Offset	Wergu Wetan			
			Produksi Kerupuk	Desa Mejobo RT. 05/4 Mejobo			

NO	Program/kegiatan	Indikator kinerja	volume	Lokasi	Pagu Indikatif	SKPD	Keterangan
			Konveksi	Kandangmas			
			Bengkel Las dan Cat	Jepang Pakis			
			Mesin Isi Ulang Air Mineral	Pasuruan Lor			
			Alat perbengkelan system injeksi	Gondoharum			
			Mesin Isi Ulang Air Mineral	Jepang Pakis			
			Catering	Karang Rowo			
			Mesin pres kertas hidrolis	Jati Wetan RT 05/02			
			Mesin konveksi	Gondosari RW IV Gebog			
			Mesin jaht highspeed	Padurenan			
			satu set mesin jahit	kedungsari rt2/10			
			Alat-alat pembuat roti	Mejobo RT 03/04			
			alat pertukangan	Kramat no 484 RT 06/04			
			satu set alat las	kedungsari rt01/02			
			pengadaan mesin juki	getassrabi			
3	sosialisasi penggunaan dana pemerintah bagi UMKM	peningkatan sosialisasi sampai ke tingkat RW/RT	100-150 orang	Wilayah Kabupaten Kudus		Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM	
4	Pembangunan gedung pelatihan industri	tersedianya tempat pelatihan bagi industri kecil	1 gedung	Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM		Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM	
5	Peningkatan pengadaan alsintan	meningkatkan hasil pertanian	12 jenis alsintan	Wilayah Kabupaten Kudus		Dinas Pertanian, Perikanan dan	

NO	Program/kegiatan	Indikator kinerja	volume	Lokasi	Pagu Indikatif	SKPD	Keterangan
						Kehutanan	
			Pompa air Diesel	Sidorekso			
			Traktor	Sidorekso			
			Thresher	Blok Palwadak, Desa Ngemplak			
			Genset	Ngemplak			
			Pompa air Diesel	Ngemplak			
			Alsintan	Bulungcangkring RT 03/15			
			Poser theser	Padurenan			
			Handtraktor	Padurenan			
			Pompa Air	Blok Dangi Dk. Kaliyoso Ds. Karangrowo			
			Pompa Air	Dk. Ngelo Ds. Karangrowo			
			Traktor	Sunten desa Loram Wetan			
			Alsintan	getassrabi			
6	Rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT)	meningkatkan hasil pertanian	110 proposal	Lokasi		Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	
				Blok Cangkringrejo, Ds. Kalirejo Undaan			
				Blok sawah sidomakmur, Kalirejo			
				Blok Poros watu rejo II Barat Desa, Lambangan Undaan			
				Blok Si Bajo dan si Bejat Garung Lor, Kaliwungu			
				Blok Si Ampel, Si Asem dan Ploso			

NO	Program/kegiatan	Indikator kinerja	volume	Lokasi	Pagu Indikatif	SKPD	Keterangan
				Blimbing Kidul, Kaliwungu			
				Blok Jlan Samping SWD II RW II Gamong, Kaliwungu			
				Blok Nglayar RW I Gamong			
				Blok Pancing Kodok Ijo RW II Gamong			
				Blok Mengkang RW II Gamong			
				Blok Tambak Siwelut RW 2 Gamong			
				Blok Johar Dro Bunder RW 2 Gamong			
				Blok Ngambon RW I Gamong			
				Blok Pelem Keong Dk. Lau Krajan Desa Lau			
				Blok Tutup Dk. Lau Krajan Desa Lau			
				Dukuh Dawe Desa Cendono Dawe			
				Dk. Sekandang Blok Sendang Desa Kandangmas			
				Blok Sigelap Desa Sidorekso			
				Blok Semutan Desa Sidorekso			
				Blok Kaiman Desa Ngemplak Undaan			

NO	Program/kegiatan	Indikator kinerja	volume	Lokasi	Pagu Indikatif	SKPD	Keterangan
				Blok Kaiman Embung sebelah selatan, Desa Ngemplak Undaan			
				Blok Gedangrejo Desa Ngemplak			
				Blok Srigono, Desa Ngemplak			
				Blok Srigono embung sebelah selatan, Desa Ngemplak			
				Blok Palwadak Kalimati gang 10, Desa Ngemplak			
				Blok Wonorejo II, Desa Karangrowo			
				Terangmas			
				Terangmas, Undaan			
				Terangmas, Undaan			
				Terangmas, Undaan			
				Blok Kalihadi Desa Lambangan			
				Blok Kalihadi Desa Lambangan			
				Blok Cinde Gg 13 Lambangan			
				Blok Kebo, Desa Jetiskapuan			
				Peganjuran RT 06/03			
				Blok Kauman (Ngetus ke utara), Desa Undaan Kidul			

NO	Program/kegiatan	Indikator kinerja	volume	Lokasi	Pagu Indikatif	SKPD	Keterangan
				Blok Gempolrejo, Undaan Kidul			
				Blok Sri Raharjo I, Desa Kutuk			
				Blok Sri Raharjo II, Desa Kutuk			
				Blok Sri Mulyo I, Desa Kutuk			
				Blok Sri Rahayu, Desa Kutuk			
				Blok Joyo Mulyo (Rik Mudinan) Desa Undaan Kidul			
				Areal Sri Mukti Desa Kutuk			
				Areal Sri Tani Desa Kutuk			
				Areal Sri Bangun, Desa Kutuk			
				Jalan lingkar-Blok Bandangan Desa Jepang			
				kedungsari rw 07			
				kedungsari rw06			
				kedungsari rw 06			
				gondosari			
				gondosari			
				gondosari			
				lau rw 07			
				lau rw 04			
				getassrabi rw 02			
				mijen			
				mijen			
				lau			
				hadipolo			

NO	Program/kegiatan	Indikator kinerja	volume	Lokasi	Pagu Indikatif	SKPD	Keterangan
				ds tanjung rejo			
				ds tanjung rejo			
				ds lau			
				ds soco			
				ds soco			
				ds soco			
				ds soco			
				ds soco			
				Blok Ngampon Ds. hadipolo			
				Blok Pelem Keong, Ds. Lau			
				Puyoh RT 07/03			
				Blok Makam Sekoteh, Kandangmas			
				Blok Kepoh, Blok Sekandang-Poh Dengkol, blok sendang, blok wetan tempel Desa Kandangmas Dawe			
				Blok Gandek, Blok Proliman, Blok Punden Desa Kandangmas			
				Blok tahunan desa Loram Wetan			
				Blok sawah Gandongan kidul desa mejobo			
				Blok sentro mulyo desa Undaan Tengah			
				Blok guntur desa Undaan Tengah			

NO	Program/kegiatan	Indikator kinerja	volume	Lokasi	Pagu Indikatif	SKPD	Keterangan
				Blok sigaran Jepang Pakis			
				Blok sunten desa Loram Wetan			
				Blok Belik Gede - setapen desa Cranggang			
				Blok karangwetan-sekepu Cranggang			
				Blok wonorejo1 desa karangrowo			
				Blok wonorejo2 desa karangrowo			
				Blok Srimulyo desa karangrowo			
				Blok dangi dk. Kaliyoso desa karangrowo			
				Blok kudu manis desa Karangrowo			
				Blok bagun sari desa Karangrowo			
				Blok cangkring rejo desa Larikrejo			
				Blok karang baru desa Larikrejo			
				Blok mino utomo desa Larikrejo			
				Blok sari widodo desa Larikrejo			
				Blok Sawah Penthung, Ds Mejobo			
				Jalan lingkar-blok sipayung Desa Jepang			

NO	Program/kegiatan	Indikator kinerja	volume	Lokasi	Pagu Indikatif	SKPD	Keterangan
				Blok Wetan Grenggeng Ds Gondosari			
				Blok Watu kebo Ds Gondosari			
				Dukuh Tawangharjo, Desa Ternadi Dawe			
				Blok Semar Ds. Krajan Desa Glagahkulon			
				Blok Randunan Ds Krajan, Desa Glagahkulon Dawe			
				Dk. Masin Desa Kandangmas			
				Antara Desa Rejosari dengan Kandangmas Dawe			
				Terusan Blok Pagak Ds. Bulung Kulon			
7	Optimalisasi Lahan Sawah	meningkatkan hasil pertanian		Wilayah Kabupaten Kudus		Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	
8	Pengembangan Jaringan Irigasi Desa dan Tingkat Usaha Tani	meningkatkan hasil pertanian	20 proposal	lokasi		Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	
				Blok Si Ampel, Si Asem dan Ploso Blimbing Kidul, Kaliwungu			
				Blok Cangkring dan Si Asem Blimbing Kidul, Kaliwungu			

NO	Program/kegiatan	Indikator kinerja	volume	Lokasi	Pagu Indikatif	SKPD	Keterangan
				Blok Lo Istijab, Desa Karngrowo			
				Blok Siombo Wetan Desa Sadang			
				Blok Pace Desa Sadang			
				Blok Boro Tengah, Desa Sadang			
				lau rw 07			
				Blok Nopalan ds Madu Desa cendono			
				blok bale cinde ds Dawe Desa cendono			
				cendono			
				ds mijen			
				Ds Kawa'an Desa Cendono			
				Blok genggon desa Magawon			
				Rehab dinding penahan blok sentro mulyo, Ds Undaan Tengah			
				Rehab dinding penahan blok Balong Rejo Undaan Tengah			
				Gribig RT 04/07			
				Gribig RT 02/05			
				Kalen Sukun Ds Tengger, Desa Glagahulon Dawe			
				Kalen Kakas Ds Krajan, Desa Glagahkulon			
				P3A Sri Tani, Desa			

NO	Program/kegiatan	Indikator kinerja	volume	Lokasi	Pagu Indikatif	SKPD	Keterangan
				Kutuk			
				P3A Sri Mukti, Desa Kutuk			
				P3A Sri Bangun, Desa Kutuk			
9	Peningkatan Pengelolaan Balai Benih Pertanian	meningkatkan hasil pertanian	1 lokasi	Colo		Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	
10	Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan usaha perikanan (DBHCHT)	meningkatkan program gemar makan ikan	40 proposal	Wilayah Kabupaten Kudus		Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	
				Kalirejo Undaan			
				Ploso RT 03/02			
				Jati Kulon RT 04/02			
				Ngembalrejo 02/06 Bae			
				kedungsari rw 09			
11	Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat	meningkatkan produktivitas daging	2 orang per kelompok	Wilayah Kabupaten Kudus		Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	
12	Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan bibit ternak (DBHCHT)	swasembada daging		Wilayah Kabupaten Kudus		Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	
			23 paket ternak kambing/domba	Lokasi			

NO	Program/kegiatan	Indikator kinerja	volume	Lokasi	Pagu Indikatif	SKPD	Keterangan
				Kalirejo RT 02/03 Gang 4 Undaan			
				Karangrowo RT 01/03			
				Karangrowo RT 05/03			
				Purwosari RT 06/08			
				Wergu Wetan RT 01/03			
				Gondangmanis Dk. Kayuapu Kulon RT 06/04			
				Loram Kulon RT 05/01			
				KandangMas 5/6			
				Sidomulyo			
				Payaman RT. 01/03 Mejobo			
				karangmalangrt 02/06			
				kendungsari rt 05/01			
				kendungsari rt 01/08			
				kendungsari rt 01/01			
				kendungsari rw 03			
				kendungsari rw 10			
				gondosari rt02/10			
				gondosari rt01/11			
				kedungsari rw 04			
				gondosari rw 04			
				Kedungsari RT 01/08			

NO	Program/kegiatan	Indikator kinerja	volume	Lokasi	Pagu Indikatif	SKPD	Keterangan
				kedungsari rw 03			
				Sidorekso RT 01/02			
			15 paket ternak sapi/kerbau				
				Papringan RT 04/02			
				Undaan Tengah gg 2			
				Megawon			
				Payaman RT. 01/VII Mejobo			
				Getas Pejaten 8/1 Jati			
				Loram Wetan 4/5 Jati			
				lahar puyoh			
				setro kalangan			
				Lau RT 03/02, Dawe			
				Margorejo RT 04/06			
				Lau RT 02/04			
				Payaman RT 03/03			
				Golantepus RT 02/06			
				Loram Wetan RT 01/02, Jati			
				Loram Wetan RT 05/01			
13	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	terpeliharanya pasar tradisional	1 pasar	Desa Karangampel RT 02/03 Kaliwungu		Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar	
14	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	terciptanya obyek wisata yang memadahi		Desa wisata di Kabupaten Kudus		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
15	Pengembangan kesenian	mensiarkan islam	4 paket alat rebana	Ponpes Yanabiul Ulum Warramah,		Dinas Kebudayaan	

NO	Program/kegiatan	Indikator kinerja	volume	Lokasi	Pagu Indikatif	SKPD	Keterangan
				Jl. KHM Arwani Amin Krandon		dan Pariwisata	
				kedungsari rw 07			
				menawan rt 03/04			
				Pasuruhan Lor RT 02/07			
16	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan (DBHCHT)		6 paket	Mejobo rt 05/01		Kantor Ketahanan Pangan	
				kedungsari rt01/10			
				kedungsari rt03/07			
				kedungsari RT 05/04			
				kedungsari rt03/09			
				Loram Wetan			

Tabel 2.125
Usulan Program/ Kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kudus
Bidang Tugas Komisi C

NO	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Pagu Indikatif	SKPD	Keterangan
1.	Normalisasi Sungai Dawe Ds. Mejobo			Ds. Mejobo		BPESDM	
2.	Normalisasi Sungai Tumpang Ds. Megawon RW.04			Ds. Megawon RW.04		BPESDM	
3.	Rehabilitasi Jalan Desa Peganjaran			Desa Peganjaran		CIPKATARU	
4.	Pembangunan Talud Desa Peganjaran			Desa Peganjaran		BPESDM	
5.	Pembangunan Jembatan, Ds. Karangampel 04/I			Ds. Karangampel 04/I		CIPKATARU	
6.	Pembangunan Jembatan, Ds. Karangampel 05/I			Ds. Karangampel 05/I		CIPKATARU	
7.	Pembangunan Jembatan, Ds. Karangampel 04/IV			Karangampel 04/IV		CIPKATARU	
8.	Pembangunan Saluran Pembuangan Air Bahu Jalan Desa Jojo			Desa Jojo		BPESDM	
9.	Pembangunan Rehab Jembatan Beton Desa Jojo			Desa Jojo		BPESDM	
10.	Betonisasi Jalan Desa Sadang			Desa Sadang		CIPKATARU	
11.	Normalisasi Sungai Irigasi Lama, Getasrabi			Getasrabi		BPESDM	
12.	Betonisasi Jalan Lingkungan RT 2, RW.I, Loram Wetan			RT 2, RW.I, Loram Wetan		CIPKATARU	
13.	Betonisasi Jalan Lingkungan RT 1, RW.I, Loram Wetan			RT 1, RW.I, Loram Wetan		CIPKATARU	
14.	Peningkatan Jl. Lingkungan, Jl. Lingkar-Bondo deso Ds. Jepang			02-05/X, 01-03/XI, Ds. Jepang		CIPKATARU	
15.	Pengaspalan Jl Lingkungan Ds. Bacin			08/III Bacin		CIPKATARU	

NO	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Pagu Indikatif	SKPD	Keterangan
16.	Perbaikan jalan pasar Doro – SMA Mejobo			Ds. Jepang		CIPKATARU	
17.	Perbaikan Jl Jepangakis – Jepang – Jl Lingkar, Ds. Jepang			Ds. Jepang		BPESDM	
18.	Pembangunan Talud Sungai Gelis Jati Kulon 03/II			Jati Kulon 03/II		BPESDM	
19.	Pembangunan Drainase Ds. Ploso			RW.II Ds Ploso		CIPKATARU	
20.	Pembangunan Jalan Dk Baran Samirejo			RT 02/III Samirejo			
21.	Pembangunan Jembatan & Talud Ds.Samirejo			RT 02/III Samirejo		CIPKATARU	
22.	Pembangunan Talud Jalan Ds. Puyoh			RW.II Ds. Puyoh		CIPKATARU	
23.	Pembangunan Talud Jalan Ds. Puyoh			RW.VII Ds. Puyoh		CIPKATARU	
24.	Pembangunan Talud Jalan Ds. Ternadi			RW.III Ds. Ternadi		CIPKATARU	
25.	Pembangunan Talud Jalan Ds. Ternadi			RW.IV Ds. Ternadi		CIPKATARU	
26.	Pembangunan Jalan Ds. Puyoh			RW.I Ds. Puyoh		CIPKATARU	
27.	Pembangunan Jalan Dk Keben Soco			RT 03, RW.I, Soco		CIPKATARU	
28.	Pembangunan Jalan Dk Sikrangkang Soco			RT 01, RW.II, Soco		CIPKATARU	
29.	Pembangunan Jalan Dk Sikrangkang Soco			RT 04 s/d 08, RW.II, Soco		CIPKATARU	
30.	Pembangunan Jalan Dk Kuang Kedoan Soco			RW.II, Soco		CIPKATARU	
31.	Betonisasi Jalan Lingkungan Dk Kaliyoso Karangrowo			RW V, RW.IV Dk Kaliyoso		CIPKATARU	
32.	Betonisasi Jalan Lingkungan Dk Kaliyoso Karangrowo			RT 05, RW.V Dk Kaliyoso		CIPKATARU	
33.	Betonisasi Jalan Lingkungan Dk Kaliyoso Karangrowo			RT 4, RW.VI Dk Kaliyoso		CIPKATARU	

NO	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Pagu Indikatif	SKPD	Keterangan
34.	Pembangunan Jembatan, Jl Getasrabi - Kaliwungu			dukuh srabi kidul		CIPKATARU	
35.	Pengaspalan Jalan Desa Gamong			RW. 01		CIPKATARU	
36.	Normalisai Sungai Gamong					CIPKATARU	
37.	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum			Prambatan Lor Sampai Perbatasan Jepara		CIPKATARU	
38.	Pembangunan jembatan penghubung Ds. Bakalan Krapyak dengan Ds. Gribig			Ds. Bakalan Krapyak dengan Ds. Gribig		CIPKATARU	
39.	Pembangunan talut di Bakalan Krapyak			Rt. 2 Rw. 1 dan Rt. 4 Rw. 3		CIPKATARU	
40.	Betonisasi Jalan desa wilayah jurang gebog			jurang gebog menuju jurang sungging		CIPKATARU	
41.	Pengaspalan jalan utara Desa Gamong			Rw. 01 Desa Gamong		CIPKATARU	
42.	Normalisasi Kali Banggang			Kali Banggang		CIPKATARU	
43.	Lampu penerangan jalan Kudus-jepara			Kaliwungu		CIPKATARU	
44.	Pembangunan gorong-gorong			Prambatan Lor sampai perbatasan Jepara		CIPKATARU	
45.	Pembangunan Jembatan Getassrabi			Rw 05 Getassrabi		CIPKATARU	
46.	Senderan serabi kidul Getassrabi			Rt. 05/05 Getassrabi		CIPKATARU	
47.	Betonisasi Jalan wilayah rw 06 Getassrabi			RW.06 Getassrabi		CIPKATARU	
48.	Betonisasi Jalan wilayah rw. 05 Getassrabi			RW.05 Getassrabi		CIPKATARU	
49.	Betonisasi Jalan wilayah rw. 01 Getassrabi			rw. 01 Getassrabi		CIPKATARU	
50.	Senderan jalan Rw. 05 Ds. Getassrabi			Rw. 05 Ds. Getassrabi		CIPKATARU	
51.	Betonisasi Jalan wilayah rw.			rw. 04 Getassrabi		CIPKATARU	

NO	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Pagu Indikatif	SKPD	Keterangan
	04 Getassrabi						
52.	Pembangunan Jembatan Rw. 03 Getassrabi			Rw. 03 Getassrabi		CIPKATARU	
53.	Pembangunan Jembatan Rw. 02 Getassrabi			Rw. 02 Getassrabi		CIPKATARU	
54.	Pembangunan Jembatan Rw. 01 Getassrabi			Rw. 01 Getassrabi		CIPKATARU	
55.	Betonisasi Jalan Rw. 01 Getassrabi			Rt. 4,5,6 Rw. 01 Getassrabi		CIPKATARU	
56.	Betonisasi Jalan Rw. 06 Getassrabi			Rt. 5,6,7,8,9,10 Rw. 06 Getassrabi		CIPKATARU	
57.	Betonisasi Jalan Rw. 02 Getassrabi			Rt. 3,4,5 Rw. 02 Getassrabi		CIPKATARU	
58.	Betonisasi Jalan Rw. 06 Getassrabi			Rt. 1,2,3, Rw. 06 Getassrabi		CIPKATARU	
59.	Betonisasi Jalan Rw. 04 Getassrabi			Rt. 7,8 Rw. 04 Getassrabi		CIPKATARU	
60.	Pembangunan Senderan jalan			Rw. 01 Getassrabi		CIPKATARU	
61.	Pembangunan Senderan jalan			Rw. 06 Getassrabi		CIPKATARU	
62.	Pembangunan Senderan jalan			Rw. 03 Getassrabi		CIPKATARU	
63.	Pembangunan Senderan jalan			Rw. 07 Getassrabi		CIPKATARU	
64.	Pembangunan Senderan makam			Rw. 02 Getassrabi		CIPKATARU	
65.	Pembangunan Talud di desa Getassrabi.			Ds. Getassrabi		CIPKATARU	
66.	Penerangan jalan Kebangsaan Jepan.			Ds. Getassrabi		BPESDM	
67.	Peningkatan status jalan poros desa tugu winong-getassrabi.			Ds. Getassrabi		BPESDM	
68.	Betonisasi jalan desa kaliwungu.			Ds. Kaliwungu		CIPKATARU	
69.	Pembangunan saluran air jalan desa Rw. 6 desa kaliwungu			Rw. 6 Ds. Kaliwungu		CIPKATARU	
70.	Pembangunan saluran air bendung petir dan penataan tanggul desa kaliwungu.			Ds. Kaliwungu		CIPKATARU	

NO	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Pagu Indikatif	SKPD	Keterangan
71.	Peningkatan status jalan poros			Ds. Kaliwungu		BEPSDM	
72.	Peningkatan status jalan poros desa			Dukuh winong-desa Papringan		CIPKATARU	
73.	Pembangunan saluran air jalan desa Rw. 7 Desa kaliwungu.			Rw. 7 Desa kaliwungu.		CIPKATARU	
74.	Pembangunan pagar makam desa gamong			Desa gamong		CIPKATARU	
75.	Pengaspalan jalan desa gamong.			Desa gamong		CIPKATARU	
76.	Pembangunan Pintu Air desa gamong			Desa gamong		CIPKATARU	
77.	Pembangunan jembatan ruas jalan klumpit-getassrabi.			dukuh grobog dan dukuh santren Klumpit.		BEPSDM	
78.	Pembangunan ruas jalan desa klumpit-getassrabi.			Getassrabi.		BEPSDM	
79.	Pembangunan jalan lingkungan dukuh pedak klumpit.			Dk Pedak Klumpit.		CIPKATARU	
80.	Pembangunan jalan lingkungan Ds. Bae			RT.02-03/III Ds. Bae	150.000.000	CIPKATARU	
81.	Pembangunan jalan lingkungan Ds. Bae			RT.01/III Ds. Bae	150.000.000	CIPKATARU	
82.	Pembangunan jalan dan Jembatan Dk. Ngelo Ds. Karangrowo			Dk. Ngelo Rt.05/IV	200.000.000	CIPKATARU	
83.	Pembangunan Pagar Makam Ds. Larikrejo			Ds. Larikrejo	200.000.000	CIPKATARU	
84.	Pembangunan Pagar Makam Ds. Ngembalrejo			Ds. Ngembalrejo	200.000.000	CIPKATARU	
85.	Pembangunan jalan lingkungan Ds. Ngembalrejo			Rt.01/V, Ds. Ngembalrejo	200.000.000	CIPKATARU	
86.	Jembatan Ds. Temulus			RW.IV dan V Ds. Temulus	200.000.000	CIPKATARU	
87.	Pembangunan Drainase Ds. Hadipolo			Rt.08/V Ds. Hadipolo	150.000.000	CIPKATARU	

NO	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Pagu Indikatif	SKPD	Keterangan
88.	Pembangunan Drainase Ds. Ngembalrejo			Rt.03/VI, Ds. Ngembalrejo	150.000.000	CIPKATARU	
89.	Pembangunan Drainase Ds. Ngembalrejo			Rt.01/IV, Ds. Ngembalrejo	150.000.000	CIPKATARU	
90.	Pembangunan Drainase Ds. Ngembalrejo			Rt.02/VI, Ds. Ngembalrejo	150.000.000	CIPKATARU	
91.	Pembangunan jalan lingkungan Ds. Ngembalrejo			Rt.10/I, Ds. Ngembalrejo	150.000.000	CIPKATARU	
92.	Pembangunan jalan lingkungan Ds. Jepangakis			Rw II dan III, Jepangakis	150.000.000	CIPKATARU	
93.	Pembangunan saluran air Ds. Jepangakis			Rt 03 & 04 Rw.V Jepangakis	200.000.000	CIPKATARU	
94.	Pembangunan jalan lingkungan Ds. Karangrowo			Rt 01 Rw.V Ds. Karangrowo	200.000.000	CIPKATARU	
95.	Pembangunan jalan lingkungan Ngembalkulon			Rt.05/I, Ds. Ngembal Kulon	150.000.000	CIPKATARU	
96.	Pembangunan talud Ds. Undaan Lor			Undaan Lor Gg.24	200.000.000	CIPKATARU	
97.	Pembangunan jalan lingkungan Ds. Pasuruhan Kidul			Rt.03/I, Pasuruhan Kidul	150.000.000	CIPKATARU	
98.	Pembangunan jalan lingkungan Ds.Ngemplak			Rt.03/IV, Ds.Ngemplak	150.000.000	CIPKATARU	
99.	Pembangunan jalan Ds. Karangrowo			Rt 05 Rw.V Karangrowo	200.000.000	CIPKATARU	
100.	Pembangunan saluran air Ds. Karangrowo			Rt 02 Rw.VI Karangrowo	200.000.000	CIPKATARU	
101.	Pembangunan jalan lingkungan Ds. Larikrejo			Rt.1/I, Ds. Larikrejo	150.000.000	CIPKATARU	
102.	Pembangunan jalan lingkungan Ds. Karangrowo			Rt.03/V s/d 01/VI Karangrowo	200.000.000	CIPKATARU	
103.	Pembangunan jalan lingkungan Ds. Pladen			Rt.02/I Pladen	200.000.000	CIPKATARU	
104.	Pembangunan jalan lingkungan Dk. Ngelo Karangbener			Rt.08/V Dk. Ngelo Karangbener	150.000.000	CIPKATARU	
105.	Pembangunan jalan			Rt.01/VI Ds Undaan	200.000.000	CIPKATARU	

NO	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Pagu Indikatif	SKPD	Keterangan
	lingkungan Undaan Kidul			Kidul			
106.	Pembangunan jalan lingkungan Ds Undaan Lor			Gg.31, Ds Undaan Lor	150.000.000	CIPKATARU	
107.	Pembangunan saluran & Drainase Ds. Panjang		P=500m, L= 1m	RT.02/RW.II Ds. Panjang		CIPKATARU	
108.	Pembangunan saluran & Gorong-2 Jepangakis		400 m	RW.II, Jepangakis	200.000.000	CIPKATARU	
109.	Pembangunan Pagar Makam		450 m	RW.I, Jepangakis	200.000.000	CIPKATARU	
110.	Pembangunan Pagar Makam		500 m	RW.II, Jepangakis	225.000.000	CIPKATARU	
111.	Pembangunan Pagar Makam		425 m	RW.III, Jepangakis	215.000.000	CIPKATARU	
112.	Pembangunan saluran & Drainase Jepangakis		600 m	RW.IV, Jepangakis	500.000.000	CIPKATARU	
113.	Pembangunan saluran & Drainase Jepangakis		700 m	RW.I, Jepangakis	500.000.000	CIPKATARU	
114.	Pengecoran Jalan		900 m	RT. 06 dan 05 Jepangakis	600.000.000	CIPKATARU	
115.	Pengecoran jln lingkungan		600 m	RT. 06 Jepangakis (3 gang)	400.000.000	CIPKATARU	
116.	Pengecoran Jalan Ds Megawon		1.650 m	RW.II, Ds Megawon		CIPKATARU	
117.	Pengecoran Jalan Ds Megawon		1.500 m	RW.I, Ds Megawon		CIPKATARU	
118.	Pembangunan jembatan Ds Megawon		24 m 2	RW.III, Ds Megawon		CIPKATARU	
119.	Pembangunan talud jalan Ds. Megawon		700 m	RW.III, Ds Megawon		CIPKATARU	
120.	Pembangunan talud jalan Ds. Megawon		300 m	RW.I, Ds Megawon		CIPKATARU	
121.	Pembangunan jalan lingkungan Ds. Megawon		1.200 m	RT.05 & 06 RW.II, Ds Megawon		CIPKATARU	
122.	Pembangunan Sanitasi Ds Megawon		3 titik	RW.I dan RW.II, Ds Megawon		CIPKATARU	
123.	Pembangunan Jembatan Dk Watuputih Rahtawu			02/II Dk Watuputih Rahtawu		CIPKATARU	
124.	Pengecoran jln lingkungan Ds Bulungcangkring		P. 400 m L. 2,75 Tebal 15 cm	Rt. 4 Rw X Bulungcangkring		CIPKATARU	
125.	Pengaspalan jln lingkungan Ds Bulungcangkring		P. 650 m x L. 3,5 m T. 15 cm	Rw. XI - Rw. XII (Lanjutan Pasar Puri		CIPKATARU	

NO	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Pagu Indikatif	SKPD	Keterangan
				ke Selatan)			
126.	Pengecoran jln lingkungan Ds Bulungcangkring		P. 400 m L. 3 M T. 15 cm	Rt. 03 Rw. IV.		CIPKATARU	
127.	Pemasangan Talud Desa Bulungcangkring Sungai Kalidoro			Belakang Masjid Baitul Mu'minin ke Selatan - Lanjutan		CIPKATARU	
128.	Pengecoran jln lingkungan Ds Bulungcangkring		P. 180 M L. 2,75 Tebal 15 Cm	Desa Bulungcangkring Rt. 03 Rw. XIII. Kec. Jekulo Kab. Kudus		CIPKATARU	
129.	Pemasangan Pintu Air			Desa Bulungkulon di Sungai yang menuju saluran di Rt. 03 Rw. III		CIPKATARU	
130.	Pemasangan LPJU			Perbatasan Desa Bulungkulon ke Sidomulyo		BPESDM	
131.	Pengecoran jalan lingkungan Desa Gribig			05/II Desa Gribig		CIPKATARU	
132.	Pengecoran jalan lingkungan Ds Bakalan Krapyak			01/II Ds Bakalan Krapyak		CIPKATARU	
133.	Pembangunan Pagar Makam Mlati Baru Mlatinorowito			RW.III, Mlatinorowito	400.000.000	CIPKATARU	
134.	Jalan Beton Mlati - Megawon			RW.V, Mlatinorowito	800.000.000	CIPKATARU	
135.	Senderan Jalan Makam			RW.V, Mlatinorowito	400.000.000	CIPKATARU	
136.	Saluran Air Jalan Samsat			RW.VII, Mlatinorowito	500.000.000	CIPKATARU	
137.	Saluran Air			RT.05/VII, Mlatinorowito	106.000.000	CIPKATARU	
138.	Betonisasi Jalan Rendeng - Samsat			Rendeng - Mlatinorowito	1.500.000.000	BPESDM	
139.	Jalan Beton Mlatinorowito			RW.IX, Mlatinorowito	150.000.000	CIPKATARU	
140.	Jembatan Gang 8			RW.VII, Mlatinorowito	150.000.000	CIPKATARU	
141.	Jembatan Gang 7			RW.IV, Mlatinorowito	150.000.000	CIPKATARU	

NO	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Pagu Indikatif	SKPD	Keterangan
142.	Pembangunan Jembatan Gang 4 *)			RW.III, Mlatinorowito	172.240.000	CIPKATARU	
143.	Pembangunan Jembatan Gang 1 *)			RW.I, Mlatinorowito	171.220.000	CIPKATARU	
144.	Pembangunan Pagar Mlatinorowito *)			RW.VII, Mlatinorowito	356.150.000	CIPKATARU	
145.	Pembangunan Saluran Air *)		200 m	RW.III, Mlatinorowito	300.000.000	CIPKATARU	
146.	Pagar Gapura Makam Mbah Kendil Jati Kulon			Rt.01/III Jati Kulon	150.000.000	CIPKATARU	
147.	Drainase Lingkungan Jati Wetan			Rt.05/I Jati Wetan	150.000.000	CIPKATARU	
148.	Jalan Beton Jati Kulon			Rt.04/IV Jati Kulon	200.000.000	CIPKATARU	
149.	Jalan Beton Jati Kulon			Rt.04/VI Jati Kulon	200.000.000	CIPKATARU	
150.	Drainase Lingkungan Pasuruhan Lor			Rt.02/IV Pasuruhan Lor	200.000.000	CIPKATARU	
151.	LPJU Jl. Jati Kulon – Pasuruhan Lor			Jl. Jati Kulon – Pasuruhan Lor	100.000.000	BPESDM	
152.	Normalisasi Sungai di Ploso			Ds. Jati Kulon	400.000.000	BPESDM	
153.	Jalan Beton Getas Pejaten			Rt.11/III Getas Peaten	150.000.000	CIPKATARU	
154.	Jalan Beton Getas Pejaten			Rt. 2/I Getas Peaten	150.000.000	CIPKATARU	
155.	Drainase Jalan Getas Pejaten			Jalan Getas Pejaten	500.000.000	BPESDM	
156.	Pengecoran jln lingkungan Desa Hadipolo		P. 450 M. L. 2,7 M T. 15 Cm	Rt. 07 Rw. I	150.000.000	CIPKATARU	
157.	Pengecoran jln lingkungan Desa Hadipolo		P. 400 M. L. 2,7 M T. 15 Cm	Rt. 08 Rw. I	150.000.000	CIPKATARU	
158.	Pengecoran jln lingkungan Ds Bulungcangkring		P. 1 KM L. 3 M L. 15 Cm	RW. 13, 14, 15.	150.000.000	CIPKATARU	
159.	Pengaspalan jln lingkungan Ds Bulungcangkring			Gg. Srikandi Rt. 02 Rw. XII Kec.	150.000.000	CIPKATARU	
160.	Pembangunan Talud Desa Undaan Lor		P. ± 400 m	Rt. 03 Rw. 03 Gang 15	150.000.000	CIPKATARU	
161.	Pengecoran jalan lingkungan Desa Temulus		P. ± 300 m	Dkh. Karang Gayam	150.000.000	CIPKATARU	
162.	Pengecoran jalan lingkungan		P. 78 M L. 1,20	Rt. 01 Rw. 09	150.000.000	CIPKATARU	

NO	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Pagu Indikatif	SKPD	Keterangan
	Desa Gondangmanis		Tebal. 0,12	Dusun Kadilangon			
163.	Pengecoran jalan lingkungan Desa Singocandi		528 m L. 3 m T. 15 cm	Jalan Kauman Rt. 03 Rw. II	150.000.000	CIPKATARU	
164.	Pengecoran jalan lingkungan Desa Mijen			Rt. 08 Rw XI Dk Demangan	150.000.000	CIPKATARU	
165.	Pembangunan Jembatan Desa Bulungcangkring			Rt. 03 Rw. XV	150.000.000	CIPKATARU	
166.	Pembangunan Jembatan Bulungcangkring			Bulungcangkring Rw. 14 ke Bulungkulon Rw.06	150.000.000	CIPKATARU	
167.	Pembangunan Talud Sungai Tengah			Perbatasan Sadang - Jojo (Jembatan ke Selatan)	150.000.000	BMPESDM	
168.	Pengecoran jalan lingkungan Ds Gondoharum			Dukuh Tompe ke Dukuh Jajar Rw. I & Rw. III (lanjutan)	150.000.000	CIPKATARU	
169.	Betonisasi Jl Lingkungan Ds. Temulus		300 m2	RT.02 RW.I Ds. Temulus		CIPKATARU	
170.	Betonisasi Jl Lingkungan Ds. Temulus		300 m2	RT.04-05 RW.I Ds. Temulus		CIPKATARU	
171.	Betonisasi Jl Lingkungan Desa Golantepus			RT. 02,05,06/IV	150.000.000	CIPKATARU	
172.	Betonisasi Jl Lingkungan Ds. Temulus			RT.03-04 RW.II	150.000.000	CIPKATARU	
173.	Renovasi Jembatan Ds. Temulus			RT.05 RW.VI	750.000.000	CIPKATARU	
174.	Bantuan Dana Pengaspalan Jalan, Tenggeles			03/III Ds Tenggeles	200.000.000	BPESDM	
175.	Saluran, Gorong-2 Ds. Kutuk			01/I - 08/II Ds. Kutuk	200.000.000	BPESDM	
176.	Pagar Makam Islam Ds. Berugenjang			03/I Ds. Berugenjang	185.895.000	CIPKATARU	
177.	Dinding Penahan Jl./Talud, Jl Ds Berugenjang			RW I Ds Berugenjang	200.000.000	CIPKATARU	
178.	Betonisasi Jl Poros Ds Kutuk-Batas Pati			Ds Kutuk	200.000.000	BPESDM	
179.	Senderan dan Pengurugan Jl			Ds Kutuk	2.750.000.000	BPESDM	

NO	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Pagu Indikatif	SKPD	Keterangan
	Poros Ds Kutuk-Batas Pati						
180.	Jalan Benthung dan gorong-2 Ds. Kutuk			Ds Kutuk	3.937.500.000		
181.	Betonisasi Jl Lingkungan Ds Kutuk			RW III, IV, V Ds Kutuk	3.500.000.000	CIPKATARU	
182.	Drainase Ds Kutuk			04/III Ds Kutuk	351.500.000	BPESDM	
183.	Drainase Ds Kutuk			05-08/V Ds Kutuk	2.187.500.000	BPESDM	
184.	Rehabilitasi Jl Beton Ds Tanjungkarang			02/III Ds Tanjungkarang		CIPKATARU	
185.	Saluran Air Desa Tanjungkarang			02 / RW.III-I Ds Tanjungkarang		CIPKATARU	
186.	Saluran Air Desa Tanjungkarang			01/I Ds Tanjungkarang		CIPKATARU	
187.	Betonisasi Jl Lingkungan Desa Tanjungkarang			02/ V Ds Tanjungkarang		CIPKATARU	
188.	Saluran Air Desa Tanjungkarang			05/VI Ds Tanjungkarang		CIPKATARU	
189.	Saluran Air Desa Tanjungkarang			02/II Ds Tanjungkarang		CIPKATARU	
190.	Saluran Air U-30 Desa Tanjungkarang			03-04/V, 01-04/VI, 06/V		CIPKATARU	
191.	Saluran Air Desa Tanjungkarang			02-04/III Ds Tanjungkarang		CIPKATARU	
192.	Saluran Air Desa Tanjungkarang			02/V Ds Tanjungkarang		CIPKATARU	
193.	Rehabilitasi Jl Beton Desa Tanjungkarang			RW.IV Ds Tanjungkarang		CIPKATARU	
194.	Saluran Air Desa Tanjungkarang			RW VII Ds Tanjungkarang		CIPKATARU	
195.	Betonisasi Jl Ds. Tanjungkarang			RW.II Ds Tanjungkarang		CIPKATARU	
196.	Pembangunan Talud Jl Ds Tanjungkarang			04/VI Ds Tanjungkarang		CIPKATARU	
197.	Saluran Air Desa Tanjungkarang 04/VI			04/VI Ds Tanjungkarang		CIPKATARU	
198.	Pembangunan Talud Jl			05/II Jati Wetan		CIPKATARU	

NO	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Pagu Indikatif	SKPD	Keterangan
	Sengkuyung Jati Wetan						
199.	Saluran Air Desa Jati Wetan			05/I Jati Wetan		CIPKATARU	
200.	Drainase Jl Kampung Ds Ngemplak			02/I Ds Ngemplak	200.000.000	CIPKATARU	
201.	Drainase Jl Kampung Ds Ngemplak			02/II Ds Ngemplak	200.000.000	CIPKATARU	
202.	Pembangunan Talud Ds Nemplak			Gg 7 s/d 13 Ds Ngemplak	525.000.000	CIPKATARU	
203.	Pembangunan Talud Ds Nemplak			Gg 1 s/d 6 Ds Ngemplak	525.000.000	CIPKATARU	
204.	Pengecoran jalan lingkungan Desa Karangrowo			02/II Desa Karangrowo	200.000.000	CIPKATARU	
205.	Pembangunan Jembatan Desa Karangrowo			02/II Desa Karangrowo	210.000.000	CIPKATARU	
206.	Saluran Air Desa Pasuruhan Lor			RW.I Pasuruhan Lor	292.650.000	CIPKATARU	
207.	Saluran Air Desa Pasuruhan Lor			02/RW.VI Pasuruhan Lor	200.000.000	CIPKATARU	
208.	Saluran Air Desa Pasuruhan Lor			03/RW.IV Pasuruhan Lor	197.710.000	CIPKATARU	
209.	Saluran Air Desa Pasuruhan Lor			01/RW.IV Pasuruhan Lor	197.710.000	CIPKATARU	
210.	Saluran Air Desa Pasuruhan Lor			RW.VIII S/D XI Pasuruhan Lor	149.805.000	CIPKATARU	
211.	Pengaspalan jalan Ds Ploso			02/RW.V Ds Ploso	85.490.000	CIPKATARU	
212.	Betonisasi Jalan Ds. Jati Wetan			08/RW.II Jati Wetan	346.560.000	CIPKATARU	
213.	Betonisasi Jalan Ds. Jati Wetan			RW.II Jati Wetan	200.000.000	CIPKATARU	
214.	Pembangunan Talud/bronjong Jati Kulon			02/RW.II Jati Kulon	650.000.000	CIPKATARU	
215.	Pembangunan Jembatan Cendono-Piji			Cendono	745.811.137	CIPKATARU	
216.	Betonisasi Jalan Dk. Madu Ds. Cendono			RW.I & II Ds. Cendono	296.828.980	CIPKATARU	
217.	Betonisasi Jalan Ds. Cendono			RW.IX Ds. Cendono		CIPKATARU	

NO	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Pagu Indikatif	SKPD	Keterangan
218.	Pengaspalan Jalan Dk. Kututan Ds. Lau			RW.VI & VII Ds. Lau	46.625.000	CIPKATARU	
219.	Betonisasi Jalan Ds. Kandangmas			RT.03/IV Ds. Kandangmas	170.000.000	CIPKATARU	
220.	Pembangunan Jalan Ds. Kandangmas			Ds. Kandangmas	145.000.000	CIPKATARU	
221.	Betonisasi Jalan Dk. Sudo Ds. Kandangmas			Ds. Kandangmas	500.000.000	CIPKATARU	
222.	Betonisasi Jalan Ds. Kandangmas			RT.03/XIV Ds. Kandangmas		CIPKATARU	
223.	Betonisasi Jalan Ds. Terban		200 x 3 m	Ds. Terban		CIPKATARU	
224.	Renovasi Jembatan Ds. Sidorekso			RT.02/V Ds. Sidorekso	200.000.000	CIPKATARU	
225.	Betonisasi Jalan Ds. Sidorekso			RT.05/II Ds. Sidorekso	175.000.000	CIPKATARU	
226.	Betonisasi Jalan Ds. Sidorekso			RT.03/II Ds. Sidorekso	175.000.000	CIPKATARU	
227.	Saluran Air Ds. Sidorekso			RW.I s/d III Ds. Sidorekso	600.000.000	CIPKATARU	
228.	Pembangunan Jembatan Ds. Karangampel			RT.04/I Ds. Karangampel		CIPKATARU	
229.	Pembangunan Jembatan Ds. Karangampel			RT.05/I Ds. Karangampel		CIPKATARU	
230.	Betonisasi Jalan Ds. Karangampel			RT.05/II Ds. Karangampel		CIPKATARU	
231.	Betonisasi Jalan Ds. Karangampel			RT.03/III Ds. Karangampel		CIPKATARU	
232.	Betonisasi Jalan Ds. Karangampel			RW.IV & V Ds. Karangampel		CIPKATARU	
233.	Betonisasi Jalan Ds. Karangampel			RW.I & V Ds. Karangampel		CIPKATARU	
234.	Betonisasi Jalan Ds. Karangampel			RT.06/V Ds. Karangampel		CIPKATARU	
235.	Pembangunan Jembatan Ds. Karangampel			RT.04/IV Ds. Karangampel		CIPKATARU	
236.	Normalisasi Sungai Pesantren			Ds. Karangampel		CIPKATARU	

NO	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Pagu Indikatif	SKPD	Keterangan
	& Pembangunan Talud						
237.	Bantuan Motor Roda 3 (Gerobag Sampah)			Ds.Karangmalang		CIPKATARU	
238.	Pembangunan Jalan Dsn Kaldilangon Gondangmanis			RT.04/VIII Ds Gondangmanis		CIPKATARU	
239.	Pembuatan Gorong-2 Dsn Kaldilangon Gondangmanis			Dsn Kaldilangon Gondangmanis		CIPKATARU	
240.	Pengaspalan Jalan Ds. Bacin			RT.08/III Bacin		CIPKATARU	
241.	Betonisasi Jalan Ds. Kedungsari			Rt 01/I Kedungsari		CIPKATARU	
242.	Betonisasi Jalan Ds. Kedungsari			R t 01/II Kedungsari		CIPKATARU	
243.	Betonisasi Jalan Ds. Kedungsari			Rt 04/IX Kedungsari		CIPKATARU	
244.	Betonisasi Jalan Ds. Kedungsari			Rt 03/IX Kedungsari		CIPKATARU	
245.	Betonisasi Jalan Ds. Kedungsari			Rt 03/III Kedungsari		CIPKATARU	
246.	Betonisasi Jalan Ds. Kedungsari			Rt 04/X Kedungsari		CIPKATARU	
247.	Betonisasi Jalan Ds. Kedungsari			Rt 03/X Kedungsari		CIPKATARU	
248.	Betonisasi Jalan Ds. Kedungsari			Rt 03/IV Kedungsari		CIPKATARU	
249.	Betonisasi Jalan Ds. Hadipolo			Rt 07/VII Ds. Hadipolo		CIPKATARU	
250.	Betonisasi Jalan Ds. Hadipolo			Rt.08/VIII Ds. Hadipolo		CIPKATARU	
251.	Betonisasi Jalan Ds. Hadipolo			Rt. 04/IV Ds. Hadipolo		CIPKATARU	
252.	Betonisasi Jalan Ds. Hadipolo			Rt.08/V Ds. Hadipolo		CIPKATARU	
253.	Betonisasi Jalan Ds. Hadipolo			Rt 07/V Ds. Hadipolo		CIPKATARU	
254.	Betonisasi Jalan Ds. Hadipolo			Rt 04/V Ds. Hadipolo		CIPKATARU	

NO	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Pagu Indikatif	SKPD	Keterangan
255.	Betonisasi Jalan Ds. Getasrabi			Rw.III Ds. Getasrabi		CIPKATARU	
256.	Betonisasi Jalan Ds. Getasrabi			Rw.II Ds. Getasrabi		CIPKATARU	
257.	Pengaspalan Jalan Ds. Kedungsari			RW.III Kedungsari		CIPKATARU	
258.	Pengaspalan Jalan Ds. Kedungsari			RW.IV Kedungsari		CIPKATARU	
259.	Pengaspalan Jalan Ds. Kedungsari			RW.V Kedungsari		CIPKATARU	
260.	Pengaspalan Jalan Ds. Kedungsari			RW.VI Kedungsari		CIPKATARU	
261.	Rehab jalan lingkungan 08/V Hadipolo			RW 08/V Hadipolo		CIPKATARU	
262.	Rehab jalan lingkungan 08/IV Hadipolo			RW 08/IV Hadipolo		CIPKATARU	
263.	Drainase Jalan Lingkungan Rt 08/V Hadipolo			Rt 08/V Ds. Hadipolo		CIPKATARU	
264.	Drainase Jalan Lingkungan Rt 08/IV Hadipolo			Rt 08/IV Ds. Hadipolo		CIPKATARU	
265.	Drainase Jalan Ds. Hadipolo			Ds. Hadipolo		CIPKATARU	
266.	Drainase Jalan Ds. Hadipolo			Ds. Hadipolo		CIPKATARU	
267.	Pembangunan Drainase Jalan Ds. Tanjungrejo			RW.IV Ds. Tanjungrejo		CIPKATARU	
268.	Pembangunan Drainase Jalan Ds. Jekulo			RW.XI Ds. Jekulo		CIPKATARU	
269.	Pembangunan Drainase Jalan Ds. Jekulo			RW.IX Ds. Jekulo		CIPKATARU	
270.	Pembangunan Drainase Jalan Ds. Jekulo			RW.VI Ds. Jekulo		CIPKATARU	
271.	Pembangunan Drainase Jalan Bulungcangkring			RW.XIII Ds. Bulungcangkring		CIPKATARU	
272.	Betonisasi Jalan dan saluran Ds Gondangmanis		3.000 m	Rt.09/II Ds Gondangmanis	450.070.000	CIPKATARU	
273.	Pembuatan Kamplah Sungai Ds. Kirig		800 m	Rt.01/I Ds. Kirig	410.000.000	CIPKATARU	
274.	Pembuatan Kamplah Sungai Ds. Kirig		450 m	Rt.01/III Ds. Kirig	247.500.000	CIPKATARU	

NO	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Pagu Indikatif	SKPD	Keterangan
275.	Jalan Lingkungan 06/I Wergu Wetan			06/I Wergu Wetan		CIPKATARU	
276.	Jalan Rabat Lingkungan RW.III Ngembal Kulon		1.050 m	Ngembal Kulon RT 03/III	250.000.000	CIPKATARU	
277.	Jalan Rabat Lingkungan RW.III Ngembal Kulon		1.500 m	Ngembal Kulon RT 02,05/III Pom bensin ke timur	300.000.000	CIPKATARU	
278.	Drainase 01/II Pasuruhan Lor			RT 01/II Pasuruhan Lor	200.000.000	CIPKATARU	
279.	Pengaspalan Jalan Ds Kedungsari ke Kambangan		2 km	Ds Kedungsari		BPESDM	
280.	Pengaspalan Jalan Ds Rahtawu ke Sempliro		1,5 km	Ds. Rahtawu		BPESDM	
281.	Pengecoran Jalan		400 m	RT 04,06,07 RW III Kaliwungu		CIPKATARU	
282.	Betonisasi jalan desa Getasrabi dk Modinan		4.250m ²	Getasrabi RT 1/IV s/d RT 6/I	200.000.000	CIPKATARU	
283.	Drainase Jalan RW.IV, V dan RW VII Getasrabi		1.510m	RW.IV, V dan RW VII Getasrabi	200.000.000	CIPKATARU	
284.	Senderan Makam Toro Getasrabi		1.000	RT.01/VII Getasrabi	200.000.000	CIPKATARU	
285.	Betonisasi jalan desa Getasrabi RT.07/IV		440m	Getasrabi RT.07/IV	200.000.000	CIPKATARU	
286.	Senderan saluran air Getasrabi RT 10/IV		1.000m ²	Getasrabi RT 10/IV	200.000.000	CIPKATARU	
287.	Betonisasi jalan desa Getasrabi RT.07/V		440m	Getasrabi RT.07/V	200.000.000	CIPKATARU	
288.	Drainase Jalan Getasrabi RT 01-02/II		750m	Getasrabi RT 01-02/II	122.000.000	CIPKATARU	
289.	Jalan Lingkungan Getasrabi RT.01-03/I		1.450m	Getasrabi RT.01-03/I	200.000.000	CIPKATARU	
290.	Senderan Jalan Getasrabi RT 10/IV		500m	Getasrabi RT 10/IV	250.000.000	CIPKATARU	
291.	Pembangunan Jembatan Getasrabi RT 5/IV		15 m	Getasrabi RT 5/IV	750.000.000	BPESDM	
292.	Jalan Lingkungan Getasrabi RT.01-03/I		1.450m	Getasrabi RT.01-03/I	200.000.000	CIPKATARU	

NO	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Pagu Indikatif	SKPD	Keterangan
293.	Betonisasi jalan desa Getasrabi RT.6/V		1.450m	Getasrabi RT.6/V	200.000.000	CIPKATARU	
294.	Betonisasi jalan desa Getasrabi RT.7/V		440m	Getasrabi RT.7/V	200.000.000	CIPKATARU	
295.	Senderan Jalan Getasrabi RT 01/V		1.000m	Getasrabi RT 01/V	250.000.000	CIPKATARU	
296.	Jl. Lingkungan Gondosari RW.IX		1.800m	Gondosari RW.IX		CIPKATARU	
297.	Senderan Jalan Kandangmas RW XII			Kandangmas RW XII		CIPKATARU	
298.	Sumur Air Bersih Kandangmas RW III			Kandangmas RW III		BPESDM	
299.	Sumur Air Bersih Kandangmas RW XIII			Kandangmas RW XIII		BPESDM	
300.	Rehabilitasi Jalan Kandangmas RW V			Kandangmas RW V		CIPKATARU	
301.	Penataan Pemukiman Kandangmas RT.05/II			Kandangmas RT.05/II		CIPKATARU	
302.	Penataan Pemukiman Kandangmas RT.06/II			Kandangmas RT.06/II		CIPKATARU	
303.	Penataan Pemukiman Kandangmas RW III			Kandangmas Kandangmas RW III		CIPKATARU	
304.	Sumur Pompa (Pamsimas) Desa Margorejo			Desa Margorejo		CIPKATARU	
305.	Pengadaan Tiang Listrik dan Jaringan, Hadipolo			Jl. Argopuro II Hadipolo-Kudus		BPESDM	
306.	Bantuan Pengaspalan Jalan Cendono RT 02/VI			Cendono RT 02/VI	82.350.000		
307.	Pembangunan Jl Lingkungan Gondoharum 08/II			Gondoharum 08/II	200.000.000		
308.	Pembangunan Pondasi Senderan Kutuk RT01/V			Kutuk RT.01/V			
309.	Betonisasi Jalan Ds. Kutuk RT.09/IV			Kutuk RT.09/IV			
310.	Pembangunan Jalan Rabat Beton Kutuk RT.06/IV			Kutuk RT.06/IV	202.626.500		

NO	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Pagu Indikatif	SKPD	Keterangan
311.	Betonisasi Jalan Loram Wetan RT 02/I			Loram Wetan RT 02/I	600.000.000	CIPKATARU	
312.	Pengecoran Jalan Lingkungan Loram Wetan RT 05/V			Loram Wetan RT 05/V	300.000.000	CIPKATARU	
313.	Betonisasi Jalan Loram Wetan RT 02/IV			Loram Wetan RT 02/IV	600.000.000	CIPKATARU	
314.	Betonisasi Jalan Loram Wetan RT 05/IV			Loram Wetan RT 02/IV	600.000.000	CIPKATARU	
315.	Gorong-2 di bawah Jl Raya antara Mlati Lor dengan Mlati Kidul		25 m	Jl Raya / Pramuka (Mlati Lor)	500.000.000	CIPKATARU	
316.	Rehab Lambiran Sungai belakang SMA 1 Mlati Lor 02/III		600 m	Mlati Lor 02/III	200.000.000	BPESDM	
317.	Saluran Jalan Menur SMP 2 Kudus			Jalan Menur			
318.	Perbaikan Saluran dan Pengerukan Drainase Jl Menur Nganguk RW.V		700 m	Nganguk RW.V			
319.	Normalisasi sungai & Pagar Pengaman			Depan BD Nganguk			
320.	Perbaikan Talud Sungai, Nganguk RT 04/V			Nganguk RT 04/V			
321.	Perbaikan Drainase, Nganguk RW.V			Nganguk RW.V			
322.	Pengaspalan Jalan Paron, Nganguk RW.V			Nganguk RW.V			
323.	Senderan & Pengamplahan Kali Sili		1.000 m	Kajeksan	950.000.000	BPESDM	
324.	Pembangunan Penutupan Saluran air		600 m	Per empatan Sucen-Jembatan Kali Sili	250.000.000	BPESDM	
325.	Pembangunan Saluran/Trotoar		425 m	Jl. Vteran, Glantengan	500.000.000	BPESDM	
326.	Pembuatan Senderan/Talud Kali Gelis		75 m	Glantengan RT 03/I	450.000.000	BPESDM	
327.	Pengadaan Pipa Air Meteran		200 batang	Panjunan RT 03-	60.000.000	BPESDM	

NO	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Pagu Indikatif	SKPD	Keterangan
	Air			06/II			
328.	Pengaspalan Jl. KH. Busiri		2.330 M2	Panjunan RT 01-07/I	500.000.000	BPESDM	
329.	Pembangunan Drainase Singocandi		L.1,5, P.500,T.1,5 m	Singocandi RT.05/I	300.000.000	CIPKATARU	
330.	Pengaspalan Jalan Verbal Wergu Wetan			Wergu Wetan	250.000.000	CIPKATARU	
331.	Pembangunan Saluran Air Panti Asuhan		500 m	Wergu Wetan RT 06/I	150.000.000	CIPKATARU	
332.	Saluran Sekunder			Jalan Verbal Wergu Wetan	200.000.000	CIPKATARU	
333.	Pembuatan Gorong-gorong dan Trotoar		300 m	Jl. KH. Agus Salim Wergu Kulon	225.000.000	CIPKATARU	
334.	Pembuatan Gorong-gorong dan Trotoar		400 m	Jl. Letkol Tit Sudono Wergu Kulon	300.000.000	CIPKATARU	
335.	Pembuatan Gorong-gorong dan Trotoar		300 m	Jl. Kenari/Gg.II Wergu Kulon	225.000.000	CIPKATARU	
336.	Pengerukan Saluran Air, Purwosari			Jl HM Subkhan Purwosari	25.000.000	CIPKATARU	
337.	Renovasi Saluran Purwosari RT 01-02/IV			Purwosari RT 01-02/IV	30.000.000	CIPKATARU	
338.	Perbaikan Gorong-gorong			Purwosari RT 01/V	10.000.000	CIPKATARU	
339.	Rehab Pembangunan Jembatan Krandon		6 x 8	Jl. KH. Arwani	1.200.000.000	BPESDM	
340.	Pembangunan Drainase Krandon		80 x 90 x 900	Jl. KH. Arwani	1.300.000.000	BPESDM	
341.	Pembangunan Talud, longsor 2014		P.100 x T.7	Tumpangkrasak 02/I	700.000.000	BPESDM	
342.	Pembangunan Rabat Beton & Jembatan Jl Emplasmen		P.100 x L.4,5	Tumpangkrasak 02/V	700.000.000	BPESDM	
343.	Pembangunan Jalan & Jembatan		300 m	Tanjungkarang RT.02/III	200.000.000	CIPKATARU	
344.	Pembangunan Talud Saluran air		450 m	Tanjungkarang RT.02/IV	200.000.000	CIPKATARU	
345.	Pembangunan Talud / bronjong Sungai Gelis		300 m	Jati Kulon RT.03/II	450.000.000	BPESDM	

NO	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Pagu Indikatif	SKPD	Keterangan
346.	Pemagaran Makam Ploso RT.02/IV		750 m	Ploso RT.02/IV	700.000.000	CIPKATARU	
347.	Pembangunan Talud / bronjong		400 m	Ploso RT.01/II	250.000.000	BPESDM	
348.	Pembangunan Talud / bronjong		700 m	Ploso RT.02/III	2.800.000.000	BPESDM	
349.	Pembuatan Gorong-gorong kiri kanan jalan Ngembal Kulon		P.383 x L.60	Ngembal Kulon, SMA 1 Bae ke selatan	300.000.000	BPESDM	
350.	Nurmalisasi Sungai Si Kebo		P.1.957 x T.2,5	Ngembal Kulon RT.05/I	270.000.000	BPESDM	
351.	Kamplah Sungai Si Kebo		P.350 x T.2,5	Ngembal Kulon Belakang Masjid Nurul Anwar	350.000.000	BPESDM	
352.	Kamplah Sungai Dawe		P.350 x T.3	Ngembal Kulon RT.04-05/IV	100.000.000	BPESDM	
353.	Nurmalisasi Sungai Gondang		P.383 x L.60	Loram Kulon	500.000.000	CIPKATARU	
354.	Betonisasi Jalan Poros Desa		1,5 Km	Loram Kulon RW.IV	1.000.000.000	CIPKATARU	
355.	Pembangunan Gorong-2 Jl.Patimura		1 Km	Loram Kulon	1.000.000.000	CIPKATARU	
356.	Pembangunan Jalan & Jembatan			Timur BD.Loram Wetan	1.000.000.000	BPESDM	
357.	Pemanfaatan Tata Ruang Taman bermain			Dk.Dosaran Loram Wetan	500.000.000	CIPKATARU	
358.	Nurmalisasi Sungai			Pasuruhan Kidul	500.000.000	CIPKATARU	
359.	Pemeliharaan Jalan Pemda & Jembatan			Pasuruhan Kidul RW.II & III	450.000.000	CIPKATARU	
360.	Pembangunan Drainase			Pasuruhan Kidul RW.III & IV	650.000.000	CIPKATARU	
361.	Pembangunan Talud			Pasuruhan Kidul RW.I & IV	500.000.000	CIPKATARU	
362.	Pengecoran Jalan Mlatinorowito RT.05/VII		200 m	Mlatinorowito RT.05/VII	200.000.000	CIPKATARU	
363.	Pembangunan Jalan Beton dan Talud		200 m	Karangbener RT.01 & 03/III	250.494.000	CIPKATARU	
364.	Jembatan Ds. Garung Kidul			Garung Kidul RW.XI	500.000.000	CIPKATARU	

NO	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Pagu Indikatif	SKPD	Keterangan
	RW.XI						
365.	Pembangunan Talud Ds Garung Kidul RW I dan II			Garung Kidul RW I dan II	500.000.000	CIPKATARU	
366.	Jembatan Ds. Garung Kidul RT.06/RW.II			Garung Kidul RT.06/RW.II	500.000.000	CIPKATARU	
367.	Pagar Makam Ds. Karangrowo Payaman			Karangrowo Payaman	200.000.000	CIPKATARU	
368.	Pagar Makam Ds. Karangrowo Krajan			Karangrowo Krajan	200.000.000	CIPKATARU	
369.	Pagar Makam Ds. Bulungcangkring Dkh. Karang Panjang			Bulungcangkring Dkh. Karang Panjang	200.000.000	CIPKATARU	
370.	Pagar Makam Ds. Puyoh RW.III			Puyoh RW.III	200.000.000	CIPKATARU	
371.	Betonisasi Jalan Menuju Makam Ngemplak RT.01/RW.IV			Ngemplak RT.01/RW.IV		CIPKATARU	
372.	Betonisasi Jalan Utama Ngemplak RT.03/RW.IV			Ngemplak RT.03/RW.IV		CIPKATARU	
373.	Betonisasi 2 Gang Ngemplak RT.02/RW.IV			RT.02/RW.IV		CIPKATARU	
374.	Pembuatan Drainase saluran air Ngemplak RT.03/RW.IV			Ngemplak RT.03/RW.IV		CIPKATARU	
375.	Pembuatan gorong-2, Ngemplak RT.03/RW.IV			Ngemplak RT.03/RW.IV		CIPKATARU	
376.	Pembuatan saluran air Ngemplak RT.01,03/RW.IV			Ngemplak RT.01,03/RW.IV		CIPKATARU	
377.	Talud Sungai Gelis di Ds. Kaliputu			Ds. Kaliputu	750.000.000	BPESDM	
378.	Saluran air Jl Sadang-Bulungcangkring			Sadang	500.000.000	BPESDM	
379.	Saluran air Jl Jekulo-Sadang			Sadang	500.000.000	BPESDM	
380.	Talud Jalan Sadang-Bulungcangkring			Sadang	500.000.000	BPESDM	
381.	Talud Jalan Bulungcangkring-Batas Pati			Bulungcangkring	500.000.000	BPESDM	
382.	Normalisasi dan Senderan			Megawon		BPESDM	

NO	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Pagu Indikatif	SKPD	Keterangan
	Sungai Tumpangkrasak Megawon						
383.	Peningkatan Jalan Kelapa Gading I, Megawon RT.01/IV			Megawon RT.01/IV		CIPKATARU	
384.	Peningkatan Jalan Kelapa Gading II, Megawon RT.01/.IV			Megawon RT.01/.IV		CIPKATARU	
385.	Peningkatan Jalan Kelapa Gading III, Megawon RT.01/IV			Megawon RT.01/.IV		CIPKATARU	
386.	Peningkatan Jalan Kapas Raya 4 & 5, Megawon RT.04/ IV			Megawon RT.04/ IV		CIPKATARU	
387.	Rehabilitasi Jalan Kapas Raya 1,2,3 Megawon RT.03/ IV			Megawon RT.03/ IV		CIPKATARU	
388.	Rehabilitasi Jalan Kelapa Sawit 4, Megawon RT.02/ IV			Megawon RT.02/ IV		CIPKATARU	
389.	Pembangunan Jl Lingkungan Ds.Pegunungan RT.04/RW.I			Pegunungan RT.04/RW.I	150.000.000	CIPKATARU	
390.	Pembangunan Jl Lingkungan Ds.Mijen RT.01/RW.VII			Mijen RT.01/RW.VII	150.000.000	CIPKATARU	
391.	Pembangunan Jl Lingkungan Relokasi Ds.Rahtawu			Relokasi Ds.Rahtawu	200.000.000	CIPKATARU	
392.	Pembanguna Drainase, Ds.Gribig RT.02 s/d 04 RW.V			Gribig RT.02 s/d 04 RW.V	200.000.000	CIPKATARU	
393.	Pembanguna Drainase, Ds.Mijen RT.01 s/d 05 RW.V			Mijen RT.01 s/d 05 RW.V	200.000.000	CIPKATARU	
394.	Pembangunan Makam Pentung, Ds.Mejobo RT.06/III			Mejobo RT.06/III	200.000.000	CIPKATARU	
395.	Pembangunan Gorong2 dan Pengecoran Jalan Loram Kulon RT.04/I			Loram Kulon RT.04/I	443.050.000	CIPKATARU	
396.	Pembangunan Drainase/Gorong2 , Klaling RT.01/I			Klaling RT.01/I	200.000.000	CIPKATARU	
397.	Pembangunan Drainase/Gorong2 , Klaling RT.02/I			Klaling RT.02/I	200.000.000	CIPKATARU	
398.	Jalan Lingkungan Ds. Besito RW.VI			Besito RW.VI		CIPKATARU	

NO	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	Pagu Indikatif	SKPD	Keterangan
399.	Peningkatan Jl Tembus Besito-Karang Sambung RT.06/IV			Sambung RT.06/IV	200.000.000	CIPKATARU	
400.	Jalan Lingkungan Ds. Besito RT.03/ RW.VI			Besito RT.03/ RW.VI		CIPKATARU	
401.	Pembangunan Drainase/Gorong2 , Besito RT.01/I			Besito RT.01/I	200.000.000	CIPKATARU	
402.	Betonisasi Jalan Lingkungan Ds. Mijen RT.01/RW.VI			Mijen RT.01/RW.VI	200.000.000	CIPKATARU	
403.	Pembangunan Jembatan Ds. Getasrabi Dk Srabi RT.05/RW.V		180m2	Getasrabi Dk Srabi RT.05/RW.V	750.000.000	BPESDM	
404.	Pembangunan saluran jalan, Padurenan RW.I dan RW.II			Padurenan RW.I dan RW.II	1.890.000.000	CIPKATARU	
405.	Pembangunan jembatan, Garungkidul RW.I dan RW.II			Garungkidul RW.I dan RW.II		CIPKATARU	

Tabel 2.126
Usulan Program/ Kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kudus
Bidang Tugas Komisi D

No	Program/kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Pagu indikator	SKPD	Keterangan
1.	Pembangunan Gedung Sekolah PAUD dan TK	Terbantu nya sarpras PAUD dan TK	± 10 proposal	PAUD dan TK di Wilayah Kabupaten Kudus		Disdikpora	
2.	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah PAUD dan TK	Terbantu nya sarpras PAUD dan TK	± 10 proposal	PAUD dan TK di Wilayah Kabupaten Kudus		Disdikpora	
3.	Sosialisasi kepada penerima bantuan pengadaan Sarpras PAUD dan TK	Tertib administrasidan lancar dalam pengadaan	2 orang pengurus per proposal	Disdikpora		Disdikpora	
4.	Pengadaan Mebeleur Sekolah	Memberikan kenyamanan dalam Belajar mengajar	± 10 proposal	SD dan SMP di Wilayah Kabupaten Kudus		Disdikpora	
5.	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah SD dan SMP	Terbantu nya sarpras SD dan SMP	± 15 proposal	SD dan SMP di Wilayah Kabupaten Kudus		Disdikpora	
6.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD dan SMP	Terbantu nya sarpras SD dan SMP	± 10 proposal	SD dan SMP di Wilayah Kabupaten Kudus		Disdikpora	
7.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah SD dan SMP	Terbantu nya sarpras SD dan SMP	± 10 proposal	SD dan SMP di Wilayah Kabupaten Kudus		Disdikpora	
8.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah SD dan SMP	Terbantu nya sarpras SD dan SMP	± 10 proposal	SD dan SMP di Wilayah Kabupaten Kudus		Disdikpora	
9.	Sosialisasi kepada penerima bantuan pengadaan Sarpras SD dan SMP	Tertib administrasi dan lancar dalam pengadaan	2 orang pengurus per proposal	Disdikpora		Disdikpora	
10.	Pembangunan Gedung Sekolah SMA/SMK	Terbantu nya sarpras SMA/SMK	± 5 proposal	SMA/SMK di Wilayah Kabupaten Kudus		Disdikpora	

No	Program/kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Pagu indikator	SKPD	Keterangan
11.	Sosialisasi kepada penerima bantuan pengadaan Sarpras SMA/SMK	Tertib administrasi dan lancar dalam pengadaan	2 orang pengurus per proposal	Disdikpora		Disdikpora	
12.	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Memberikan motivasi kepada tenaga pengajar	Tenaga Pengajar se Kab. Kudus	Wilayah Kabupaten Kudus		Disdikpora	
13.	Pembinaan Olah Raga yang berkembang di masyarakat	Terbantunya sarpras OR di Masyarakat	± 50 proposal	Wilayah Kabupaten Kudus		Disdikpora	
14.	Sosialisasi kepada penerima bantuan pengadaan Sarpras Olah Raga	Tertib administrasi dan lancar dalam pengadaan	2 orang pengurus per proposal	Disdikpora		Disdikpora	
15.	Hibah Rehab Ruang Kelas PAUD/TK	Terbantunya sarpras SD, SMP dan SMA/SMK Swasta	± 10 proposal	PAUD/TK di Wilayah Kabupaten Kudus		Disdikpora	
16.	Hibah Rehab Sarpras SD, SMP dan SMA/SMK Swasta	Terbantunya sarpras SD, SMP dan SMA/SMK Swasta	± 10 proposal	SD, SMP dan SMA/SMK Swasta di Wilayah Kabupaten Kudus		Disdikpora	
17.	Sosialisasi kepada penerima bantuan pengadaan Sarpras SD, SMP dan SMA/SMK Swasta	Tertib administrasi dan lancar dalam pengadaan	2 orang pengurus per proposal	Disdikpora		Disdikpora	
18.	Penanganan Anjal dan Gepeng			Wilayah Kabupaten Kudus		Dinsosnakert rans	
19.	Sosialisasi dan Penyuluhan kepada Anjal dan Gepeng			Wilayah Kabupaten Kudus		Dinsosnakert rans	
20.	Pendidikan dan Pelatihan Perburuhan			Wilayah Kabupaten Kudus		Dinsosnakert rans	
21.	Sosialisasi kepada peserta Pendidikan dan Pelatihan Perburuhan			Wilayah Kabupaten Kudus		Dinsosnakert rans	
22.	Hibah Bantuan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh	Membantu dan meringankan Biaya perbaikan rumah	± 100 proposal	Wilayah Kabupaten Kudus		Dinsosnakert rans	

No	Program/kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Pagu indikator	SKPD	Keterangan
23.	Sosialisasi kepada penerima Bantuan Bedah Rumah	Tertib administrasi dan lancar dalam pengadaan	2 orang pengurus per proposal	Dinsosnakertrans		Dinsosnakertans	
24.	Pelatihan Pemberdayaan Perempuan			Wilayah Kabupaten Kudus		BPMPKB	
25.	Sosialisasi dan Penyuluhan kepada peserta Pelatihan Pemberdayaan Perempuan			Wilayah Kabupaten Kudus		BPMPKB	
26.	Hibah Sarpras Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan	Membantu dan meringankan Biaya perbaikan	± 150 proposal	Wilayah Kabupaten Kudus		Bagian Kesra Setda	
27.	Sosialisasi kepada penerima Bantuan Sarpras Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan	Tertib administrasi dan lancar dalam pengadaan	2 orang pengurus per proposal	Bagian Kesra Setda		Bagian Kesra Setda	
28.	Hibah Rehab Sarpras RA, BA, MI, MTs dan MA Swasta	Membantu dan meringankan Biaya perbaikan	± 100 proposal	Wilayah Kabupaten Kudus		Bagian Kesra Setda	
29.	Sosialisasi kepada penerima Bantuan Sarpras RA, BA, MI, MTs dan MA Swasta	Tertib administrasi dan lancar dalam pengadaan	2 orang pengurus per proposal	Bagian Kesra Setda		Bagian Kesra Setda	
30.	Hibah kepada Organisasi Sosial Masyarakat	Membantu dalam pelaksanaan kegiatan	± 10 proposal	Wilayah Kabupaten Kudus		Bagian Kesra Setda	
31	Sosialisasi kepada penerima Bantuan Orsosmas	Tertib administrasi dan lancar dalam pengadaan	2 orang pengurus per proposal	Bagian Kesra Setda		Bagian Kesra Setda	

2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Kudus yang teridentifikasi berdasarkan urusan pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan
 - Belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, kepastian layanan pendidikan dasar, pendidikan menengah yang berkualitas, dan berkesetaraan;
 - Belum optimalnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang berkualitas;
 - Belum optimalnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan non formal yang berkualitas;
 - Masih rendahnya kualitas manajemen penyelenggaraan pelayanan pendidikan
- b. Kesehatan
 - Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang kesehatan ibu hamil resiko tinggi.
 - Adanya kecenderungan peningkatan Angka Kematian Ibu dan Balita;
 - Sarana dan prasarana masih belum sesuai dengan standar pelayanan kesehatan terutama yang ada di Puskesmas PONE (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) yang merupakan pelayanan untuk menggulangi kasus-kasus kegawatdaruratan obstetric neonatal (pelayanan kesehatan ibu dan anak);
 - Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Kesehatan yang berkompetensi terhadap pelaksanaan tugas.
- c. Pekerjaan Umum
 - Masih adanya jalan kabupaten dan jalan lingkungan yang dalam kondisi rusak.
 - Kondisi jaringan irigasi kewenangan kabupaten sebagian mengalami kerusakan.
 - Masih terjadinya banjir.
 - Belum tertatanya pedestrian untuk mendukung kenyamanan pejalan kaki dan tata kota yang lebih baik
- d. Perumahan
 - Masih adanya rumah tidak layak.
 - Adanya permukiman rusak akibat bencana alam.
- e. Penataan Ruang
 - Rendahnya pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.
 - Belum terpenuhinya dokumen perencanaan tata ruang pada kawasan-kawasan strategis.

- f. Perencanaan Pembangunan
 - Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah, dan pemanfaatan hasil pengendalian dan evaluasi;
 - Terbatasnya informasi masyarakat terhadap perencanaan kegiatan dari berbagai sumber dana.
- g. Perhubungan
 - Kemacetan pada jam-jam sibuk di wilayah perkotaan akibat penambahan jumlah kendaraan;
 - Ketersediaan sarpras dan kelaikan sarpras pengaman lalu lintas yang kurang memadai.
- h. Lingkungan Hidup
 - Kurangnya disiplin dan kesadaran masyarakat dalam usaha / kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan.
 - Belum optimalnya cakupan pelayanan persampahan di wilayah perkotaan.
 - Kurangnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk mengantisipasi peningkatan pencemaran udara.
- i. Pertanahan
 - Belum optimalnya penyelesaian pengadaan tanah untuk Waduk Logung, dan penyelesaian pengadaan tanah untuk Jalan Lingkar Klumpit.
 - Pensertifikatan tanah milik Pemkab di Kelurahan Mlati Norowito sebanyak 5 bidang tidak terealisasi dikarenakan data pelepasan tanah belum selesai;
 - Penanganan kasus tanah milik Pemkab di Kecamatan Dawe (tanah yang digunakan untuk Kantor Kecamatan Dawe) dan tanah Pemkab di desa Conge tidak terealisasi (masih dalam tahap penelusuran data tanah);
 - Masih adanya tanah-tanah Ex Departemen (Instansi Vertikal) dan dari Pemerintah Provinsi yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kudus, namun status kepemilikannya masih atas nama Ex Departemen dan Pemerintah Provinsi sekitar 55 bidang.
- j. Kependudukan dan Catatan Sipil
 - Belum memadainya pelayanan administrasi kependudukan;
 - Masih adanya penduduk yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil seperti e-KTP dan akte kelahiran disebabkan pengadaan kartu dari pusat.
- k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 serta konsep kesetaraan gender sehingga masih ditemukannya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan pada anak maupun pelanggaran hak anak;
 - Belum cukup optimalnya kinerja Pusat Pelayanan Terpadu

- Perempuan dan Anak dalam menangani aneka kasus kekerasan berbasis gender dan pelanggaran hak anak;
- Masih minimnya tenaga terlatih untuk fasilitasi kesehatan, rohani, dan rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan berbasis gender dan pelanggaran hak anak;
 - Masih minimnya perhatian dan fasilitasi terhadap aneka usaha ekonomi yang dikelola perempuan;
 - Masih minimnya partisipasi perempuan pada organisasi atau institusi publik di masyarakat.
 - Masih minimnya tenaga terlatih untuk fasilitasi kesehatan, rohani, dan rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan berbasis gender dan pelanggaran hak anak;
 - Belum terlembaganya Pengarusutamaan Gender (PUG) di tengah masyarakat;
 - Belum cukup sinkronnya koordinasi antar institusi pemerintah dalam mendukung kebijakan dan anggaran responsif gender dan perlindungan anak;
1. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - Kurangnya personil Penyuluh Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapang Keluarga Berencana (PKB/PLKB) sehingga belum mencapai angka ideal jika dibandingkan dengan beban kerja jumlah desa/kelurahan yang ada;
 - Semakin sulitnya mencari SDM sukarelawan untuk mendukung program KB di tingkat desa/kelurahan;
 - Sebagian besar pendanaan operasional dan pemenuhan alat kontrasepsi masih menggantungkan pada pemerintah pusat/BKKBN dan peran APBD Pemerintah Kabupaten masih minim.
 - m. Sosial
 - Kecenderungan meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya di tempat tujuan wisata religi.
 - Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - Belum adanya panti singgah.
 - n. Ketenagakerjaan
 - Masih tingginya angka pengangguran.
 - Peningkatan penyerapan tenaga kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan calon tenaga kerja.
 - Belum terpenuhinya kualitas sumber daya manusia guna mendukung kebutuhan pasar kerja.
 - o. Koperasi dan UKM
 - Masih banyaknya koperasi-koperasi yang tidak aktif karena manajemen pengelolaan yang kurang baik;
 - Ketersediaan data yang kurang valid terkait dengan jumlah UMKM yang masih harus dibantu pemerintah.
 - Rendahnya daya saing UMKM baik dalam hal teknik produksi,

- kemampuan manajemen, maupun pemasaran produk.
- p. Penanaman Modal
 - Belum optimalnya informasi potensi dan peluang investasi.
 - q. Kebudayaan

Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pelestarian benda cagar budaya dan pengembangan seni budaya daerah.
 - r. Pemuda dan Olahraga
 - Belum optimalnya kelembagaan dan kegiatan kepemudaan;
 - Belum optimalnya kelembagaan, kegiatan dan sarana prasarana olahraga;
 - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 - Belum optimalnya pemahaman masyarakat dalam berpolitik dan berdemokrasi;
 - Kurangnya kualitas dan kuantitas aparat pendukung kamtibmas.
 - Belum optimalnya penegakan perda, terutama perda yang mengatur tentang keamanan dan ketertiban lingkungan.
 - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Persandian
 - Belum mantapnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan daerah, keseimbangan aparatur teknis dan administrasi, pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah.
 - u. Urusan Ketahanan Pangan
 - Belum optimalnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) disebabkan masih tingginya ketergantungan pada beras sebagai bahan pangan.
 - v. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Pada kegiatan fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri masih terdapat kendala masih adanya kemacetan pengembalian pinjaman tanggung renteng;
 - Ketidakpastian kelanjutan program PNPM;
 - Masih cukup rendahnya partisipasi kelompok-kelompok masyarakat dalam mengembangkan teknologi tepat guna;
 - Kurang tertibnya administrasi kelompok-kelompok masyarakat yang menerima atau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - w. Statistik

Belum optimalnya ketersediaan data statistik yang up to date. Adanya kebijakan BPS pusat dalam pembiayaan kegiatan sehingga kemungkinan tumpang tindih atau tidak teranggarkan.
 - x. Kearsipan
 - Belum tersedianya sistem otomasi kearsipan;
 - Penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip dan pemeliharaan sarpras kearsipan belum efektif dan efisien.

- Belum optimalnya pengelolaan arsip di tingkat desa/kelurahan dan SKPD.
- y. Komunikasi dan informatika
 - Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- z. Perpustakaan
 - SDM belum memadai baik secara kualitas maupun kuantitas;
 - Minat dan budaya baca masyarakat masih rendah;
 - Keterbatasan literatur, jurnal dan koleksi buku/bahan pustaka.
- aa. Urusan Pertanian

Areal sawah yang mengalami gagal panen (puso) cukup luas.
- ab. Kehutanan
 - Masih adanya lahan kritis yang memerlukan penanganan.
 - Belum optimalnya pemanfaatan potensi hutan dan lahan.
- ac. Energi Dan Sumber Daya Mineral
 - Masih rendahnya pemahaman dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
 - Masih adanya kegiatan penambangan tanpa ijin.
- ad. Pariwisata

Belum optimalnya promosi pariwisata.
- ae. Kelautan dan Perikanan

Belum optimalnya pengembangan budidaya perikanan.
- af. Perdagangan
 - Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam intervensi kebijakan atas ekspansi pasar modern, dan perlindungan pasar tradisional.
 - Menurunnya ekspor beberapa komoditas, seperti rokok, furniture stainless, handycraft, dan jenang.
- ag. Industri
 - Terbatasnya kapasitas SDM terkait dengan perubahan teknologi industri;
- ah. Ketransmigrasian
 - Kuota yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi sangat terbatas, tidak sebanding dengan animo masyarakat yang mendaftar sebagai calon transmigran
 - Belum adanya kepastian lokasi daerah calon penerima transmigran karena penentuan lokasi dilaksanakan oleh Pemerintah.

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Kudus yang berubungan Prioritas dan Sasaran Pembangunan sebagai berikut:

1. Daya saing perekonomian daerah masih rendah;
2. Belum optimalnya mutu pendidikan;
3. Ketersediaan SDM pelayanan fasilitas kesehatan kurang memadai;
4. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran;
5. Pembangunan infrastruktur yang ego sektoral dan ketimpangan antar wilayah; dan
6. Belum optimalnya pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah.

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

Perekonomian daerah merupakan sub sistem dari perekonomian nasional dan dunia. Sebelum diuraikan kondisi ekonomi Kabupaten Kudus, akan diuraikan mengenai kondisi perekonomian dunia dan nasional.

1. Kondisi Perekonomian Dunia

Dana Moneter Internasional (IMF) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2015 dan 2016. Dalam laporan *World Economic Outlook*, IMF memproyeksikan ekonomi global hanya akan tumbuh 3,5% di tahun 2015, sedangkan di tahun 2016 ekonomi dunia diprediksi tumbuh 3,7%. Anjloknya harga minyak dunia merupakan faktor yang mampu mendukung pertumbuhan. Namun, faktor positif tersebut juga diimbangi oleh sentimen negatif, seperti depresiasi mata uang euro dan yen.

Perekonomian Amerika Serikat (AS) paling bagus diantara ekonomi utama lainnya. Pertumbuhan ekonomi AS diproyeksikan sebesar 3,6% pada tahun 2015. Di kawasan Eropa, meski harga minyak dunia turun, tapi rendahnya nilai investasi membuat ekonomi kawasan ini terancam deflasi. Langkah Bank Sentral Eropa memperluas stimulus moneter dengan pembelian obligasi pemerintah mensinyalir Eropa tengah berjuang dari krisis. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di 19 negara Eropa tumbuh sebesar 1,2% pada tahun 2015 dan sebesar 1,4% pada tahun 2016.

Sementara, ekonomi Tiongkok pada tahun 2015 akan melambat karena pihak berwenang di Beijing akan lebih peduli dengan risiko kredit ketimbang pertumbuhan investasi. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok diproyeksikan sebesar 6,3%. Dampak pertumbuhan Tiongkok yang lebih lambat akan berpengaruh terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia lainnya termasuk Indonesia. Negara berkembang harus menghadapi risiko pelarian modal jika Bank Sentral AS memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang di sepanjang tahun 2015 bakal turun menjadi 4,3%.

2. Kondisi Perekonomian Nasional

Berdasarkan analisis Kamar Dagang Indonesia (KADIN), kondisi makro ekonomi Indonesia sampai akhir tahun 2014 secara relatif belum kritis walau pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang

rendah. Namun tidak dapat dikatakan bahwa perekonomian sudah sepenuhnya terkendali, karena masih diwarnai oleh permasalahan defisit anggaran belanja dan defisit neraca perdagangan dan neraca berjalan. Perekonomian belum didukung oleh sisi pasokan yang kuat, karena lebih bertumpu kepada sisi permintaan. Perekonomian Indonesia ditopang oleh arus modal portofolio yang “*vulnerable*” dan dikhawatirkan terjadinya arus modal balik yang menyebabkan ekonomi tidak terkendali, kecuali adanya kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Perekonomian Indonesia juga menghadapi masalah defisit neraca perdagangan dan defisit neraca berjalan, karena lemahnya struktur ekonomi serta lemahnya kemandirian ekonomi bangsa.

Setelah empat tahun Indonesia menikmati kebijakan “*quantitative easing*” (QE) serta suku bunga rendah di Amerika, Pemerintah Amerika telah mengakhiri kebijakan QE nya pada bulan Oktober 2014, karena dikhawatirkan berdampak serius terhadap disparitas pendapatan di Amerika Serikat. Perbaikan ekonomi di Amerika Serikat akhir-akhir ini akan berdampak negatif terhadap negara-negara dengan sistem ekonomi yang terbuka, karena Amerika setiap saat dapat menarik kembali dana yang diinvestasikan kenegara-negara tersebut sebagai stimulan terhadap ekonomi Amerika. Pemerintah Indonesia harus siap menghadapi kemungkinan “*arus balik*” atau “*capital flight*” yang akan berdampak negatif terhadap nilai tukar rupiah dan defisit neraca pembayaran dan neraca berjalan.

Prediksi kedepan perekonomian Indonesia belum sepenuhnya menggembirakan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Inflasi diperkirakan mencapai 5,0 persen. Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia melalui sinergi kebijakan serta koordinasi pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah senantiasa berupaya mengendalikan laju inflasi pada tahun 2015 agar tetap pada rentang sasaran inflasi tahun 2015 sebesar $4,0 \pm 1,0$ persen. Rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS diperkirakan berada pada kisaran Rp12.200 per USD. Relatif ketatnya likuiditas global sebagai dampak peningkatan suku bunga acuan oleh the Fed diperkirakan berpotensi memberikan tekanan terhadap perkembangan nilai tukar rupiah ke depan. Suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan akan turut mengalami tekanan dan sedikit lebih tinggi yaitu sebesar 6,2 persen.

Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berada pada kisaran rata-rata USD70 per barel. Rendahnya harga minyak dunia diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2015 mengingat pasokan minyak yang masih berlebih, terutama dengan adanya potensi pemanfaatan *shale oil* dan gas. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia kedepan relatif stabil walaupun belum bebas dari risiko terjadinya ketidak-stabilan ekonomi. *Lifting* minyak diperkirakan akan terealisasi sebesar 849 ribu barel per hari.

Lifting gas bumi diperkirakan mencapai 1.177 ribu barel setara minyak per hari.

Tantangan eksternal yang dihadapi oleh perekonomian domestik nasional pada tahun 2015 adalah belum stabilnya perekonomian dunia, termasuk negara-negara mitra dagang utama Indonesia seperti Tiongkok yang diperkirakan akan kembali mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut yang disertai dengan penurunan harga komoditas global terutama harga minyak mentah dunia berpotensi memberikan tekanan pada perekonomian Indonesia. Dalam merespon kondisi eksternal tersebut, Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia telah menempuh berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas perekonomian domestik terutama stabilitas nilai tukar dan pengendalian inflasi. Pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah strategis di bidang fiskal terutama dalam menjaga kesinambungan fiskal dan upaya mendukung perbaikan defisit neraca berjalan.

3. Kondisi Perekonomian Provinsi Jawa Tengah

Kondisi perekonomian Jawa Tengah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan selama kurun waktu 2011 – 2012 ditunjukkan dengan angka pertumbuhan ekonomi yang selalu meningkat dari sebesar 6,01% pada tahun 2011 menjadi 6,34% pada tahun 2012, namun mengalami perlambatan pada Tahun 2013 dan tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi tahun 2014 sebesar 5,47 persen, sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 5,81 persen. Angka inflasi di Jawa Tengah pada tahun 2014 sebesar 8,22% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan inflasi tahun 2013 (7,99%). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai indikator pemicu inflasi baik yang bersifat eksternal maupun internal, antara lain disebabkan oleh kenaikan harga beberapa komoditas barang dan jasa, terutama bensin, tarif listrik, cabai merah, beras, bahan bakar rumah tangga, tukang bukan mandor, cabai rawit, kontrak rumah, angkutan dalam kota, serta akademi/perguruan tinggi.

Perkembangan ekonomi makro Jawa Tengah masih lebih banyak didorong oleh peningkatan konsumsi, terutama konsumsi pemerintah (realisasi belanja APBD) dan rumah tangga. Apabila dilihat dari sisi pengeluaran/penggunaan PDRB Jawa Tengah tahun 2014, diketahui bahwa komponen penggunaan konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang tertinggi yaitu sebesar 63,69%, diikuti dengan ekspor barang dan jasa sebesar 48,82% dan Impor barang dan jasa sebesar 46,82%. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2013, diketahui bahwa distribusi PDRB tahun 2014 pada komponen pengeluaran rumah tangga mengalami penurunan dari 63,96% menjadi 63,69%, sedangkan untuk komponen ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan dari 47,69% menjadi

48,82%. Untuk kontribusi PMTB pada tahun 2014 sebesar 20,77% dan konsumsi pemerintah sebesar 10,99%

Dilihat dari lapangan usaha, kinerja sektor utama masih didominasi oleh sektor industri pengolahan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; serta sektor pertanian. Perlambatan ekonomi daerah dipengaruhi oleh melambatnya investasi daerah baik pada investasi bangunan maupun non bangunan. Adanya hambatan dalam melakukan investasi di Jateng disebabkan antara lain oleh keterbatasan infrastruktur, pelayanan investasi dan ketersediaan SDM. Infrastruktur daerah dirasakan belum memadai terutama mengenai sarana prasarana energi, air, jalan, jembatan, pelabuhan maupun bandara.

4. Kondisi Perekonomian Kabupaten Kudus

Perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Kudus dapat dilihat dari beberapa indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, Laju inflasi, dan realisasi investasi. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2012 mencapai Rp.13.754.585,17 juta, tahun 2013 sebesar Rp. 14.398.651,02 juta, dan pada tahun 2014 diproyeksikan meningkat menjadi Rp.15.137.301,80 juta. Adapun PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2012 mencapai Rp. 36.959.414,03 juta, tahun 2013 sebesar Rp. 41.192.663,77 juta, dan pada tahun 2014 diproyeksikan meningkat menjadi Rp. 44.906.550,52 juta. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus tahun 2014 diproyeksikan sebesar 5,13%, lebih tinggi dari tahun 2013 sebesar 4,68%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 masih diproyeksikan sebesar 5,37%, sedangkan tahun 2016 ditargetkan sebesar 5,64%. Perkuatan infrastruktur ekonomi terus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan pemerataan kekuatan ekonomi pada semua wilayah dan sektor usaha.

Perkembangan ekonomi Kabupaten Kudus didorong oleh peningkatan sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan Hotel dan Restoran, masing-masing memiliki kontribusi terhadap PDRB sebesar 61,47% dan 26,92% pada tahun 2013. Sektor-sektor lain yang berkembang adalah sektor bangunan, sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan, dan sektor komunikasi. Kontribusi sektor pertanian pada tahun 2013 sebesar 2,69%. Hal ini patut menjadi perhatian mengingat sektor ini mempunyai kedudukan strategis, karena untuk mendukung ketahanan pangan, dan menjadi penyerap tenaga kerja di pedesaan. Penguatan sektor moneter melalui pengendalian suku bunga SBI, diikuti penurunan bunga pinjaman dan *yield* obligasi, namun terjadi tekanan pada rupiah terhadap dollar dan volatilitas yang tinggi dalam bursa saham, mengakibatkan keuntungan sektor keuangan dan perbankan tetap bahkan cenderung berkurang.

Laju inflasi Kabupaten Kudus tahun 2014 (*year on year*) sebesar 8,59%, sedikit lebih tinggi dari tahun 2013 sebesar 8,31%. Meningkatnya angka inflasi disebabkan oleh peningkatan harga pada komoditas *volatile foods* antara lain beras, daging, bawang merah, bawang putih, telur, dan cabe. Kelompok komoditas yang memberikan andil/sumbangan inflasi yaitu kelompok Bahan Makanan, kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan, dan Kelompok Kesehatan. Pada tahun 2015 laju inflasi diproyeksikan berada pada kisaran 5±1%.

Perkembangan kondisi perekonomian daerah Kabupaten Kudus secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Perkembangan dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Kudus Tahun 2012-2016

No.	Indikator Makro	Realisasi		Proyeksi		
		Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	PDRB					
	ADH Konstan (juta Rp)	13.754.585,17	14.398.651,02	15.137.301,80	15.950.174,91	16.850.041,42
	ADH Berlaku (juta Rp)	36.959.414,03	41.192.663,77	44.906.550,52	49.082.859,72	53.500.317,09
2.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Harga Konstan tahun tertentu	4,33 %	4,68 %	5,13 %	5,37%	5,64%
3.	Tingkat Inflasi	4,77%	8,31 %	8,59%	5±1%	5±1%
4.	Jumlah Penduduk Miskin	68.100	70.100	67.091	66.731	66.537
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,85	5,75	5,03	5,03	5,03
6.	PDRB Perkapita (juta Rupiah)	47,826	52,912	54,311	59,578	64,325
7.	Investasi Riil (Juta Rupiah)	12.163.499	11.579.827	8.825.278	8.440.186	9.688.956
8.	ICOR	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
9.	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	73,69	74,2	74,2	74,5	74,7

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2014

Investasi swasta dipengaruhi kondisi ekonomi, infrastruktur lokasi, peraturan yang mendukung investasi. Semakin baik kondisi sarana prasarana daerah penunjang investasi dan kebijakan pemerintah yang pro investasi maka akan menjadi daya tarik investasi. Kabupaten Kudus merupakan lokasi yang menarik untuk berinvestasi terutama pada sektor industri, perdagangan dan restoran, perumahan, jasa keuangan, transportasi, dan komunikasi. Nilai realisasi investasi Kabupaten Kudus tahun 2013 sebesar Rp.11.579.827.503.311. Realisasi investasi ini tidak lepas dari upaya pemerintah dalam penyediaan infrastruktur dan iklim investasi yang kondusif. Peningkatan pelayanan perijinan dan penyebaran peluang investasi semakin mendorong calon wirausaha dan investor untuk mengembangkan usahanya di Kabupaten Kudus.

Kebutuhan investasi *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)* merupakan suatu angka yang menunjukkan besarnya investasi yang dibutuhkan apabila ingin mencapai pertumbuhan tertentu. Berdasarkan hasil penelitian diketahui, bahwa ICOR Kabupaten Kudus 3,5% artinya untuk menaikkan PDRB Rp. 1,- dibutuhkan investasi sebesar Rp. 3,5,-. Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,64% dibutuhkan investasi sebesar Rp. 9.688.956.508.000,-. Mengingat kemampuan pemerintah sebesar Rp. 1.756.287.525.000,- maka dibutuhkan investasi swasta sebesar Rp. 7.932.668.983.000,-. Semakin baik kondisi sarana prasarana pendukung investasi, maka angka ICOR menurun, artinya semakin kecil investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Ekonomi Tahun 2016

Kondisi perekonomian di Kabupaten Kudus sangat dipengaruhi potensi dan kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Tengah. Salah satu kebijakan pemerintah yang menjadi tantangan daerah adalah *ASEAN Economic Community (AEC)* mulai tahun 2015. Pasar bebas ASEAN dapat menyebabkan terjadinya neraca defisit perdagangan (ekspor < impor). Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), disepakati adanya 12 sektor usaha yang diliberalisasi yaitu 7 perdagangan ekspor impor yang berbasis pertanian, elektronik, perikanan, karet, tekstil, otomotif, kayu, dan lima 5 produk jasa bidang transportasi udara, pelayanan kesehatan, turisme, e-ASEAN, dan jasa logistik.

Implementasi AEC juga menjadi peluang bila kita dapat memanfaatkannya dengan baik untuk meningkatkan ekspor, antara lain dengan meningkatkan kualitas dan produktivitas barang dan jasa secara bertahap mengacu standar yang ditentukan, khususnya produk-produk unggulan daerah hingga mampu bersaing di luar negeri. Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menghadapi AEC antara lain sebagai berikut:

1. Penyesuaian, persiapan dan perbaikan regulasi baik secara kolektif maupun individual (reformasi regulasi);
2. Peningkatan kualitas SDM baik dalam birokrasi maupun dunia usaha;
3. Penguatan posisi usaha skala menengah, kecil dan mikro;
4. Penguatan kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta;
5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mengurangi ekonomi biaya tinggi;
6. Pengembangan sektor-sektor prioritas yang berdampak luas dan komoditas unggulan;
7. Penyediaan permodalan yang mudah diakses pelaku usaha dari berbagai skala usaha;

8. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur fisik, seperti prasarana dan sarana transportasi, telekomunikasi, revitalisasi pasar, dan lain-lain.

Beberapa tantangan perekonomian daerah lainnya dapat dirinci sebagai berikut :

1. Pengaruh eksternal perekonomian dunia yang cenderung melambat yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Nasional Regional dan Kabupaten Kudus.
2. Fluktuasi harga BBM dunia mengakibatkan ketidakpastian ekonomi Indonesia.
3. Kondisi infrastruktur yang kurang memadai untuk mendukung peningkatan investasi yang lebih besar menuntut pemerintah untuk menyediakannya.
4. Tingginya permintaan produk yang berkualitas menuntut peningkatan standarisasi kualitas produk.
5. Adanya tuntutan buruh tentang jaminan pensiun, kesehatan dan komponen acuan survei kehidupan hidup layak.
6. Penerapan dan penguasaan teknologi yang masih sangat terbatas menyebabkan ongkos produksi untuk menghasilkan suatu produk menjadi mahal dan kualitas barang/produk yang rendah.
7. Adanya pergeseran pola hidup (*life style*) masyarakat yang cenderung mengkonsumsi barang impor.
8. Masih tingginya risiko bencana alam, terutama banjir.

Beberapa peluang dalam peningkatan kemajuan perekonomian Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

1. Letak geografis yang strategis menjadi peluang Kabupaten Kudus sebagai jalur distribusi/perdagangan aneka barang dan jasa.
2. Meningkatnya pelayanan perizinan, kondusifitas daerah, dan upah tenaga kerja di Kabupaten Kudus yang masih kompetitif mendorong peningkatan investasi berskala nasional.
3. Banyaknya potensi unggulan daerah Kabupaten Kudus yang dapat dikembangkan, antara lain furniture, gebyog, bordir, konveksi dan makanan khas Kudus.
4. Meningkatnya dukungan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pembangunan daerah.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dalam RKPD dimaksudkan untuk mengarahkan perencanaan pembangunan menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Arah dan kebijakan keuangan daerah tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam proses penyusunan APBD.

Penentuan arah kebijakan keuangan daerah perlu memperhatikan target RPJMD dan situasi dan kondisi saat ini, mengingat banyak hal yang mempengaruhi prediksi/asumsi yang telah ditetapkan dalam RPJMD pada tahun 2016. Kondisi yang mempengaruhi antara lain kondisi perekonomian daerah dan regulasi, yang berdampak pada kebijakan pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

Perkembangan pendapatan daerah menjadi satu dasar dalam perhitungan kapasitas fiskal daerah. Rata-rata pertumbuhan pendapatan Kabupaten Kudus tahun 2013 – 2015 mencapai sebesar 11,25%, yang terdiri dari Dana perimbangan rata-rata meningkat sebesar 4,45%, PAD rata-rata meningkat 33,00% dan Lain-lain pendapatan yang sah rata-rata meningkat 22,09%, seperti terlihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Kudus

No.	Uraian	(n-3)**	(n-2)**	(n-1)**	Rata-rata Pertumb
		Realisasi 2013 (Rp)	Realisasi 2014 (Rp)	Anggaran 2015 (Rp)	(%)
1	PENDAPATAN	1.386.183.084.659	1.610.237.157.941	1.754.169.149.000	11,25
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	144.995.092.035	234.073.380.352	244.741.959.000	33,00
1.1.1.	Pajak Daerah	58.194.212.419	63.085.731.660	64.925.668.000	5,66
1.1.2.	Retribusi Daerah	15.588.523.244	21.083.379.548	24.490.215.000	25,70
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	4.318.220.147	5.077.402.066	8.611.400.000	43,59
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah	66.894.136.225	144.826.867.078	146.714.676.000	58,90
1.2.	Dana Perimbangan	954.512.784.776	1.012.351.534.176	1.041.015.351.000	4,45
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	182.896.969.776	175.108.008.176	179.549.844.000	(0,86)
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	719.406.935.000	795.851.851.000	784.919.177.000	4,63
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	52.208.880.000	41.391.675.000	76.546.330.000	32,11
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	286.675.207.848	363.812.243.413	426.658.612.000	22,09
1.3.1	Hibah	1.076.193.701	5.755.762.636	10.427.090.000	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	74.958.695.147	95.320.988.497	90.081.583.000	10,83
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	146.439.054.000	169.337.757.000	264.680.001.000	35,97
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	64.201.265.000	93.397.735.280	61.469.938.000	5,65

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Kudus pada tahun 2016, pendapatan daerah Kabupaten Kudus tahun 2016 diproyeksikan lebih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak, dan Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat, serta Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

Pemerintah Daerah Lainnya. DAU dan DAK yang diperoleh Kabupaten Kudus tahun 2016 diproyeksikan sama dengan APBD tahun 2015, yaitu DAU sebesar Rp. 784.919.177.000,-, dan DAK sebesar Rp.76.546.330.000,-. Sementara itu Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya pada tahun 2016 diproyeksikan meningkat 19,39% menjadi Rp. 214.366.616.000,-. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus diproyeksikan sama dengan APBD tahun 2015 sebesar Rp. 264.680.001.000,-. Begitu pula dengan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp.61.469.938.000,-. Sementara itu Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya meningkat sebesar 6,91% menjadi Rp 96.307.857.575,-. Perbandingan proyeksi RPJMD dengan proyeksi RKPD Tahun 2016 Kabupaten Kudus tercantum pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Evaluasi/Catatan Atas Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah
RKPD Tahun 2015 Kabupaten Kudus

No	Uraian	Proyeksi RPJMD Tahun Rencana (2016) (Rp)	Proyeksi RKPD 2016
1	2	3	4
1	PENDAPATAN	1.864.868.992.000	1.754.169.149.000
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	231.208.045.000	255.197.777.000
	Pajak Daerah	91.567.848.000	70.118.283.000
	Retribusi Daerah	42.659.860.000	24.556.075.000
	Hasil pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.619.009.000	5.706.050.000
	Lain-Lain PAD yang sah	89.361.328.000	154.817.369.000
1.2.	Dana Perimbangan	1.176.267.217.000	1.075.832.123.000
	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	196.947.077.000	214.366.616.000
	Dana Alokasi Umum	924.131.240.000	784.919.177.000
	Dana Alokasi Khusus	55.188.900.000	76.546.330.000
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	457.393.730.000	423.139.249.000
	Hibah	8.498.914.000	681.453.000
	Dana Darurat	-	-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	112.825.404.000	96.307.857.575
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	259.511.675.000	264.680.001.000
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	76.557.737.000	61.469.938.000
	Total Pendapatan (a)	1.864.868.992.000	1.754.169.149.000
2	Pencairan Dana Cadangan (b)	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran		
	Saldo kas neraca daerah	-	-
	Dikurangi:		
	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan	-	-
	Kegiatan lanjutan	-	-
	Jumlah (c)	-	-
	Jumlah proyeksi penerimaan riil (a+b+c)	1.864.868.992.000	1.754.169.149.000

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015

Kebutuhan Fiskal dapat dilihat dari alokasi belanja yang terbagi dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Perkembangan belanja tidak langsung selama tahun 2013-2015 terangkum dalam Tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Kabupaten Kudus

No	Uraian	Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014	Anggaran pada Tahun 2015	Rata-rata Pertumb
		Rp	Rp	Rp	
A	Belanja Tidak Langsung	738.734.501.503	848.624.442.304	1.033.618.951.000	19,96
1	Belanja Pegawai	647.389.397.621	716.652.790.837	832.057.954.000	14,26
2	Belanja Bunga	44.378.263	30.359.278	70.802.000	29,77
3	Belanja Hibah	25.607.571.733	48.794.986.000	29.169.675.000	6,96
4	Belanja Bansos	24.098.658.500	32.133.595.000	26.229.757.000	4,57
5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa	4.319.038.625	6.280.724.375	8.697.695.000	50,69
6	Belanja Bantuan Kepada Provinsi/Kabupaten /Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	37.271.465.261	43.212.266.814	134.323.068.000	130,20
7	Belanja Tidak Terduga	3.991.500	1.519.720.000	3.000.000.000	37.529,86

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas, belanja tidak langsung tahun 2013 – 2015 rata-rata meningkat 19,96%, dimana dominasi belanja pegawai rata-rata meningkat 14,26%. Belanja bunga dianggarkan sesuai kebutuhan sehingga fluktuatif. Begitu pula dengan Belanja hibah dengan realisasi sesuai dengan proposal. Kebijakan keuangan untuk hibah dan bansos telah diatur melalui Permendagri 32 tahun 2011, yang memberi pedoman lebih rinci sejak KUA, sehingga lebih transparan. Hal ini akan menjadi pertimbangan dalam menghitung belanja wajib mengikat yang terakumulasi dalam belanja tidak langsung.

Neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Informasi yang dapat disajikan di neraca antara lain posisi sumber kekayaan entitas dan sumber pembiayaan untuk memperoleh kekayaan entitas tersebut dalam suatu periode akuntansi.

Posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus tahun 2013–2014 sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.5. Dari tabel neraca dapat diperoleh rasio likuiditas, dan *solvabilitas*. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas diukur

dengan Rasio Lancar, capaian tahun 2013 sebesar 70,07, dan tahun 2014 sebesar 50,04. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan kas Pemerintah daerah cukup kuat untuk membackup kewajiban jangka pendek.

Rasio solvabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Rasio total hutang terhadap total asset pada tahun 2013 sebesar 0,0024, dan tahun 2014 sebesar 0,0021. Rasio hutang terhadap modal sebesar tahun 2013 sebesar 0,0024, dan tahun 2014 sebesar 0,002. Kondisi ini menunjukkan bahwa hutang yang dimiliki pemerintah daerah masih kategori aman, artinya pemerintah daerah masih mampu membayar kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang dengan menggunakan asset yang dimilikinya.

Pada tahun 2014 total asset meningkat 24,44%, untuk aset tetap mengalami peningkatan sebesar 37,43%. Adapun aset lainnya mengalami penurunan sebesar 1,15%. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan hutang yang cukup signifikan sebesar 8,10%, meskipun demikian masih dalam posisi aman. Kewajiban jangka panjang meningkat 216,8%, dan kewajiban jangka pendek meningkat 6,12%. Selisih antara aset dengan kewajiban diperoleh jumlah ekuitas, yang meningkat sebesar 24,48%. Ekuitas yang terbesar berbentuk aset dana investasi yang berbentuk tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan dan irigasi.

Tabel 3.5
Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus
Per 31 Desember 2014 dan 2013

No	Uraian	2014	2013
		(Rp)	(Rp)
1	ASET		
a	ASET LANCAR		
	Kas di Kas Daerah	404.473.859.584,00	321.447.058.324,00
	Kas DI Bendahara Penerimaan	13.113.601,60	1.266.902.237,32
	Kas DI Bendahara Pengeluaran	27.383.400,00	4.358.000,00
	Kas DI Badan Layanan Umum Daerah	16.027.246.263,00	2.410.718.560,00
	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
	Piutang Pajak	4.115.934.194,45	4.070.493.183,00
	Piutang Retribusi	164.847.827,75	1.560.900,00
	Piutang Dana Bagi Hasil	0,00	0,00
	Piutang Dana Alokasi Umum	0,00	0,00
	Piutang Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00
	Piutang Lain-Lain	10.122.858.363,75	9.244.099.798,00
	Persediaan	29.203.051.750,90	13.433.587.176,04
	Biaya Dibayar Dimuka	427.351.188,99	501.146.337,00
	JUMLAH ASET LANCAR	464.575.646.174,44	352.379.924.515,36
b	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Non Permanen		
	Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
	Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
	Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	0,00	0,00

No	Uraian	2014	2013
		(Rp)	(Rp)
	Investasi Dalam Surat Utang Negara	0,00	0,00
	Dana Bergulir	958.945.225,50	1.597.275.773,50
	Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	958.945.225,50	1.597.275.773,50
	Investasi Permanen		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	63.594.247.234,04	57.865.293.036,31
	Penyertaan Modal Dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
	Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	0,00	0,00
	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	63.594.247.234,04	57.865.293.036,31
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	64.553.192.459,54	59.462.568.809,81
c	ASET TETAP		
	Tanah	885.516.756.530,00	860.876.339.330,00
	Peralatan dan Mesin	436.242.635.537,00	380.233.365.426,00
	Gedung dan Bangunan	910.344.170.519,61	854.070.543.915,78
	Jalan, Jaringan dan Investasi	1.005.630.490.356,76	759.338.106.361,76
	Aset Tetap Lainnya	52.798.592.105,00	46.921.809.081,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.923.396.070,00	1.660.575.242,00
	Akumulasi Penyusutan	(1.188.012.801.998,00)	0,00
	JUMLAH ASET TETAP	2.112.443.239.120,37	2.903.100.739.356,54
d	DANA CADANGAN		
	Dana Cadangan	0,00	0,00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
e	ASET LAINNYA		
	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	7.700.000,00	7.700.000,00
	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	18.708.009.235,00	17.425.643.800,00
	Aset Tidak Berwujud	5.175.358.856,00	4.795.525.276,00
	Aset Lain-Lain	84.420.140.740,00	84.839.040.969,78
	JUMLAH ASET LAINNYA	108.311.208.831,00	107.067.910.045,78
	JUMLAH ASET	2.749.883.286.585,35	3.422.011.142.727,49
2	KEWAJIBAN		
a	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	19.830.026,00	0,00
	Utang Bunga	0,00	0,00
	Utang Pajak	0,00	0,00
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Utang Bank	0,00	0,00
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Utang Obligasi	0,00	0,00
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Pusat	130.036.311,32	143.517.012,31
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Provinsi	0,00	0,00
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.480.214.036,00	6.898.467.017,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6.630.080.373,32	7.041.984.029,31

No	Uraian	2014	2013
		(Rp)	(Rp)
b	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan	0,00	0,00
	Utang Dalam Negeri-Obligasi	0,00	0,00
	Utang Pemerintah Pusat	59.976.742,82	190.013.054,14
	Utang Pemerintah Provinsi	0,00	0,00
	Utang Pemerintah Kabupaten/kota	0,00	0,00
	Utang Luar Negeri - Sektor Perbankan	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	59.976.742,82	190.013.054,14
	JUMLAH KEWAJIBAN	6.690.057.116,14	7.231.997.083,45
3	EKUITAS DANA		
a	EKUITAS DANA LANCAR		
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	420.502.501.121,00	323.862.134.884,00
	Cadangan Untuk Piutang	14.403.640.385,95	13.316.153.881,00
	Cadangan Untuk Persediaan	29.203.051.750,90	13.433.587.176,04
	Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(6.610.250.347,32)	(7.041.984.029,31)
	Pendapatan yang Ditangguhkan	19.271.701,60	1.266.902.237,32
	Cadangan Untuk Biaya Dibayar Dimuka	427.351.188,99	501.146.337,00
	Penerimaan Dana Talangan Pengadaan Pangan Dari Propinsi Jawa Tengah	0,00	0,00
	Penerimaan Kembali Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan Dari Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan	0,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	457.945.565.801,12	345.337.940.486,05
b	EKUITAS DANA INVESTASI		
	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	64.553.192.459,54	59.462.568.809,81
	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	2.112.443.239.120,37	2.903.100.739.356,54
	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan)	108.311.208.831,00	107.067.910.045,78
	Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	(59.976.742,82)	(190.013.054,14)
	Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan Kepada Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan	0,00	0,00
	Pembayaran Atas Penerimaan Dana Talangan Pengadaan Pangan Kepada Propinsi Jawa Tengah	0,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	2.285.247.663.668,09	3.069.441.205.157,99
c	EKUITAS DANA CADANGAN		
	Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan	0,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN	0,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS DANA	2.743.193.229.469,21	3.414.779.145.644,04
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.749.883.286.585,35	3.422.011.142.727,49

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari perkembangan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah. Dengan melihat realisasi pendapatan tahun sebelumnya, dan perkembangan kondisi perekonomian daerah, pendapatan daerah Kabupaten Kudus pada tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp. 1.754.169.149.000,-, atau tumbuh sebesar 2,44% dari tahun sebelumnya, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Secara umum, PAD dipengaruhi oleh tarif, obyek pajak dan retribusi, biaya operasional, dan kondisi perekonomian daerah. Pajak daerah yang paling dominan di Kabupaten Kudus adalah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sementara itu retribusi yang paling dominan adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas), Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dan Retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016 diprediksikan sebesar Rp. 255.197.777.000,- meningkat 4,27% dari tahun 2015. Potensi pendapatan tahun 2016 yaitu adanya peningkatan penyeteroran baik yang berasal wajib pajak lama dan penambahan dari beberapa wajib pajak baru baik pajak daerah maupun retribusi daerah.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana perimbangan diprediksikan meningkat sebesar 3,34% dari tahun 2015 menjadi sebesar Rp. 1.075.832.123.000,- pada tahun 2016. Unsur yang mengalami peningkatan yaitu Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak, sedangkan DAU dan DAK diprediksikan sama dengan tahun 2015.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan yang sah tahun 2016 diprediksikan sebesar Rp. 423.139.249.000,- atau mengalami penurunan sebesar 0,82% dibandingkan dengan tahun 2015. Penurunan angka ini bersumber dari Pendapatan Hibah Dari Pemerintah. Sementara itu Dana penyesuaian dan otonomi khusus yang diperuntukan bagi sertifikasi guru, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya diproyeksikan tetap. Adapun Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya diproyeksikan mengalami peningkatan.

Secara rinci perkembangan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah disajikan pada Tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2016

No.	Uraian	Realisasi 2013 (Rp)	Realisasi 2014 (Rp)	Anggaran 2015 (Rp)	RKPD 2016	Pertumb Tahun 2016 (%)
1	PENDAPATAN	1.386.183.084.659	1.610.237.157.941	1.712.415.149.000	1.754.169.149.000	2,44
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	144.995.092.035	234.073.380.352	244.741.959.000	255.197.777.000	4,27
1.1.1.	Pajak Daerah	58.194.212.419	63.085.731.660	64.925.668.000	70.118.283.000	8,00
1.1.2.	Retribusi Daerah	15.588.523.244	21.083.379.548	24.490.215.000	24.556.075.000	0,27
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	4.318.220.147	5.077.402.066	8.611.400.000	5.706.050.000	(33,74)
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah	66.894.136.225	144.826.867.078	146.714.676.000	154.817.369.000	5,52
1.2.	Dana Perimbangan	954.512.784.776	1.012.351.534.176	1.041.015.351.000	1.075.832.123.000	3,34
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	182.896.969.776	175.108.008.176	179.549.844.000	214.366.616.000	19,39
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	719.406.935.000	795.851.851.000	784.919.177.000	784.919.177.000	-
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	52.208.880.000	41.391.675.000	76.546.330.000	76.546.330.000	-
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	286.675.207.848	363.812.243.413	426.658.612.000	423.139.249.000	(0,82)
1.3.1	Hibah	1.076.193.701	5.755.762.636	10.427.090.000	681.453.000	(93,46)
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	74.958.695.147	95.320.988.497	90.081.583.000	96.307.857.000	6,91
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	146.439.054.000	169.337.757.000	264.680.001.000	264.680.001.000	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	64.201.265.000	93.397.735.280	61.469.938.000	61.469.938.000	-

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan peningkatan pendapatan daerah dan kebijakan belanja daerah. Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekwensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Pengelolaan pendapatan daerah telah dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga telah dijadikan acuan untuk menggali potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan realisasi dan proyeksi pendapatan serta pertimbangan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, perlu ditekankan arah kebijakan keuangan daerah. Arah kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan tahun 2016 yaitu :

1. Dalam merencanakan target pendapatan asli daerah (PAD) mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah;
2. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
3. Membandingkan secara rasional hasil pengelolaan kekayaan daerah dengan nilai kekayaan daerah yang disertakan.

Disamping itu dilakukan upaya peningkatan dana perimbangan DAU, bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, pemanfaatan sarana prasarana serta SDM guna meningkatkan pendapatan daerah, serta meningkatkan kerjasama Pemerintah dan swasta.

Upaya pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan dilakukan melalui :

1. Peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui intensifikasi sumber-sumber pendapatan;
2. Melakukan kajian terhadap potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
3. Melakukan komunikasi dan koordinasi yang terkait dengan dana perimbangan;
4. Peningkatan pengelolaan dan pengawasan terhadap perusahaan daerah;
5. Peningkatan pengelolaan pelayanan pajak daerah;
6. Efisiensi dan efektifitas pelayanan perijinan;

7. Koordinasi dengan SKPD pengelola pendapatan;
8. Evaluasi, revisi dan reformulasi regulasi kebijakan daerah yang berpotensi menghambat efisiensi dan efektifitas sumber-sumber pendapatan daerah;
9. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah;
10. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
11. Mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
12. Pendataan Wajib Pajak baru, baik pajak daerah maupun retribusi daerah.

Kinerja pendapatan daerah merupakan tolok ukur keberhasilan pengelolaan pendapatan. Diasumsikan bahwa sumber pendapatan yang dominan akan mempengaruhi kinerja pendapatan. Untuk mengetahui kinerja sumber-sumber pendapatan perlu dilihat proporsinya sebagaimana tercantum pada tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.7
Persentase Sumber Pendapatan Kabupaten Kudus

No.	Uraian	Realisasi 2013 (%)	Realisasi 2014 (%)	Anggaran 2015 (%)	RKPD 2016	Tahun 2016 (%)
1	PENDAPATAN	100,00	100,00	100,00	1.754.169.149.000	100,00
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	10,46	14,54	14,29	255.197.777.000	14,55
1.1.1.	Pajak Daerah	4,20	3,92	3,79	70.118.283.000	4,00
1.1.2.	Retribusi Daerah	1,12	1,31	1,43	24.556.075.000	1,40
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	0,31	0,32	0,50	5.706.050.000	0,33
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah	4,83	8,99	8,57	154.817.369.000	8,33
1.2.	Dana Perimbangan	68,86	62,87	60,79	1.075.832.123.000	61,33
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	13,19	10,87	10,49	214.366.616.000	12,22
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	51,90	49,42	45,84	784.919.177.000	44,75
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	3,77	2,57	4,47	76.546.330.000	4,36
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	20,68	22,59	24,92	423.139.249.000	24,12
1.3.1	Hibah	0,08	0,36	0,61	681.453.000	0,04
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	-	0
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	5,41	5,92	5,26	96.307.857.000	5,49
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	10,56	10,52	15,46	264.680.001.000	15,09

No.	Uraian	Realisasi 2013 (%)	Realisasi 2014 (%)	Anggaran 2015 (%)	RKPD 2016	Tahun 2016 (%)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4,63	5,80	3,59	61.469.938.000	3,50

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015

Kinerja pengelolaan pendapatan tercermin pada realisasi pendapatan terhadap target pendapatan. Secara umum kinerja pendapatan meningkat, terlihat dari realisasi yang sebelumnya tidak tercapai menjadi tercapai. Bila dilihat rinciannya, terlihat bahwa kinerja retribusi daerah menurun sedangkan pajak daerah mengalami peningkatan. Jadi, pendapatan yang terkait pelayanan publik cenderung sulit realisasinya karena terdapat kebijakan pembebasan biaya retribusi.

Tabel 3.8
Kinerja realisasi Pendapatan Daerah

No	Uraian	Kinerja *) (%)		
		2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)
1	PENDAPATAN	2,92	1,55	-
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	4,38	13,32	-
1.1.1.	Pajak Daerah	15,48	4,37	-
1.1.2.	Retribusi Daerah	(24,36)	(4,57)	-
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	(4,15)	0,00	-
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah	5,50	21,76	-
1.2.	Dana Perimbangan	2,53	(1,42)	-
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	14,76	(0,44)	-
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	-	-	-
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	-	(25,00)	-
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	3,53	3,28	-
1.3.1	Hibah	(83,62)	(10,44)	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	26,57	20,86	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	(1,38)	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	(0,74)	(1,94)	-

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015

Keterangan : *) Angka Sementara

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Keuangan daerah diupayakan dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang bersinambungan dari program-program yang akan dilaksanakan dapat dibaca kemana arah pembangunan di Kabupaten Kudus. Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja, sehingga membawa implikasi kepada struktur belanja daerah.

Belanja daerah meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan program/kegiatan. Sementara itu belanja langsung merupakan belanja yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penghitungan alokasi belanja langsung untuk pembangunan memperhitungkan kebutuhan pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat, baik pada unsur belanja daerah maupun pengeluaran pembiayaan daerah.

Arah pengelolaan belanja daerah Kabupaten Kudus tahun 2016 sebagai berikut :

a. Belanja tidak langsung

- 1) Kebijakan belanja tidak langsung diprioritaskan belanja yang wajib dikeluarkan antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, serta belanja barang dan jasa administrasi perkantoran. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung bagi SKPD.

- 2) Belanja pegawai diarahkan untuk :
 - a) Gaji dan Tunjangan Pegawai termasuk uang representasi anggota DPRD; gaji pegawai diasumsikan mengalami kenaikan sebesar 8%, akses 2,5% dan pemberian gaji bulan ke-13.
 - b) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD berupa Tunjangan Komunikasi Intensif;
 - c) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
 - d) Tunjangan kinerja PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD;
 - e) Belanja Penerimaan Lainnya untuk Bupati/Wakil Bupati berupa Penunjang operasional.
- 3) Belanja hibah digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2016 yang diharapkan tetap dari tahun sebelumnya.
- 4) Belanja bantuan sosial dialokasikan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, pada tahun 2016 diproyeksikan tetap dari tahun sebelumnya.
- 5) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk pemenuhan kewajiban bagi hasil atas realisasi pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa. Pada tahun 2016 diproyeksikan meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 8,85%.
- 6) Belanja Bantuan Keuangan dialokasikan kepada Pemerintahan Desa baik yang bersifat umum maupun khusus dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dimana pada tahun 2016 diproyeksikan meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 18,98 %. Sedangkan bantuan kepada Partai Politik diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk belanja kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

b. Belanja langsung

Belanja langsung diarahkan pada pelaksanaan program dan kegiatan yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Kudus dan memberikan manfaat secara luas bagi masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip :

- 1) Efisiensi, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Efektivitas, yang diprioritaskan pada program/kegiatan untuk mendorong program/kegiatan yang mempunyai daya ungkit (*leverage*) atau pengaruh ganda (*multiplier effect*) yang lebih besar misalnya peningkatan infrastruktur, perluasan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan akses pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan pemerintahan, serta pencapaian visi dan misi Kabupaten Kudus.
- 3) Akuntabilitas, kejelasan tolok ukur dan targetnya, yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kudus.
- 4) Transparansi, dimaksudkan bahwa setiap pengeluaran dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan belanja diprioritaskan belanja yang wajib dikeluarkan antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja bagi hasil, dan belanja bantuan keuangan kepada desa. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung bagi SKPD. Belanja tidak langsung untuk hibah, bantuan sosial, dan belanja bantuan kepada pemerintah desa serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana.

Dalam RPJMD Kabupaten Kudus telah tercantum prediksi belanja dan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Kudus tahun 2016, namun dengan melihat kondisi perekonomian saat ini maka dilakukan koreksi. Rincian belanja yang mengalami peninjauan, selengkapnya tercantum pada tabel 3.9 di bawah ini.

Tabel 3.9
Perhitungan Kebutuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Kabupaten Kudus

NO	URAIAN	PROYEKSI RPJMD TAHUN 2016	PROYEKSI RKPD TAHUN 2016	SELISIH
		Rp.	Rp.	Rp.
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.093.992.166.000	1.087.769.599.000	(6.222.567.000)
1	Gaji dan Tunjangan	744.851.358.000	621.860.338.000	(122.991.020.000)
2	Belanja Tambahan Penghasilan	22.817.256.000	27.038.643.000	4.221.387.000
3	Belanja Penerimaan Lainnya, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.326.832.000	4.002.000.000	(324.832.000)
4	Penghasilan Lainnya	196.228.110.000	230.191.691.000	33.963.581.000
5	Insentif Pemungut Pajak	4.578.392.000	3.505.914.000	(1.072.478.000)
6	Insentif Pemungut Retribusi	2.132.993.000	1.230.303.000	(902.690.000)
7	Belanja Bunga	70.802.000	3.398.000	(67.404.000)
8	Belanja Hibah	35.527.040.000	26.052.945.000	(9.474.095.000)
9	Belanja Bansos	23.474.000.000	23.590.757.000	116.757.000
10	Belanja Bagi Hasil	7.479.696.000	9.467.435.000	1.992.739.000
11	Belanja Bantuan Kepada Desa	48.560.687.000	136.747.189.000	88.186.502.000
12	Belanja Bantuan Partai Politik	945.000.000	1.078.986.000	133.986.000
13	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	3.000.000.000	-
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.375.920.000	7.056.579.000	3.680.659.000
1	Pembentukan Dana Cadangan	-		-
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.260.920.000	7.000.000.000	3.739.080.000
3	Pembayaran Pokok Utang	115.000.000	56.579.000	(58.421.000)
Total Pengeluaran Wajib dan Mengikat		1.097.368.086.000	1.094.826.178.000	(2.541.908.000)

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa prediksi belanja tidak langsung dalam RPJMD tahun 2016 sebesar Rp.1.093.992.166.000,- sedangkan proyeksi RKPD sebesar Rp. 1.087.769.599.000,- sehingga terdapat selisih kurang Rp. 6.222.567.000,- atau berkurang sebesar 0,57%. Pengeluaran pembiayaan prediksi dalam RPJMD tahun 2016 sebesar Rp. 3.375.920.000,- sedangkan proyeksi RKPD sebesar Rp.7.056.579.000,- sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp.3.680.659.000,- atau bertambah sebesar 109,03%. Pengeluaran untuk investasi diperuntukan bagi BPR BKK Jati Kab. Kudus sebesar Rp.2.000.000.000,- Bank Pasar sebesar Rp.1.000.000.000,- PDAM sebesar Rp. 2.000.000.000,- Bank Jateng sebesar Rp.2.000.000.000,- dan membayar pokok hutang sebesar Rp.56.579.000,-.

Kebutuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Yang Wajib dan Mengikat pada RKPD tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp.1.094.826.178.000,-. Kebutuhan belanja tidak langsung pada tahun 2016 diproyeksikan

sebesar Rp. 1.087.769.599.000,-. Belanja tidak langsung terutama untuk belanja Pegawai yang mencapai Rp.621.860.338.000,-, penghasilan lainnya sebesar Rp.230.191.691.000,- dan Belanja Bantuan Kepada Desa sebesar Rp.136.747.189.000,-. Kebutuhan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Yang Wajib dan Mengikat pada RKPD tahun 2016 sebesar Rp.7.056.579.000,- yaitu untuk penyertaan modal sebesar Rp.7.000.000.000,- dan pembayaran pokok utang sebesar Rp.56.579.000,-.

Secara rinci Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Yang Wajib dan Mengikat Kabupaten Kudus Tahun 2013 s.d Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10
Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Yang Wajib dan Mengikat Kabupaten Kudus Tahun 2013 s.d Tahun 2016

No	Uraian	Realisasi Tahun 2013	Target Tahun 2014	Proyeksi pada Tahun 2015	Proyeksi RPJMD Tahun 2016	Proyeksi RKPD Tahun 2016	Selisih
		Rp	Rp	Rp	Rp.	Rp.	Rp.
A	Belanja Tidak Langsung	738.734.501.503	947.813.401.000	967.975.092.000	1.093.992.166.000	1.087.769.599.000	(6.222.567.000)
1	Gaji dan Tunjangan	647.389.397.621	815.347.426.000	852.051.916.000	744.851.358.000	621.860.338.000	(122.991.020.000)
2	Belanja Tambahan Penghasilan				22.817.256.000	27.038.643.000	4.221.387.000
3	Belanja Penerimaan Lainnya, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH				4.326.832.000	4.002.000.000	(324.832.000)
4	Penghasilan Lainnya				196.228.110.000	230.191.691.000	33.963.581.000
5	Insentif Pemungut Pajak				4.578.392.000	3.505.914.000	(1.072.478.000)
6	Insentif Pemungut Retribusi				2.132.993.000	1.230.303.000	(902.690.000)
7	Belanja Bunga	44.378.263	70.802.000	70.802.000	70.802.000	3.398.000	(67.404.000)
8	Belanja Hibah	25.607.571.733	46.029.515.000	32.813.422.000	35.527.040.000	26.052.945.000	(9.474.095.000)
9	Belanja Bansos	24.098.658.500	32.371.987.000	26.187.618.000	23.474.000.000	23.590.757.000	116.757.000
10	Belanja Bagi Hasil	4.319.038.625	6.181.567.000	6.799.724.000	7.479.696.000	9.472.435.000	1.987.739.000
11	Belanja Bantuan Kepada Desa	37.271.465.261	44.812.104.000	47.051.610.000	48.560.687.000	136.747.189.000	88.186.502.000
12	Belanja Bantuan Partai Politik				945.000.000	1.078.986.000	133.986.000
13	Belanja Tidak Terduga	3.991.500	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	-
B	Pengeluaran Pembiayaan	6.632.657.736	51.595.743.736	2.915.000.000	3.375.920.000	7.056.579.000	3.680.659.000
1	Pembentukan Dana Cadangan						-
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.519.500.000	51.482.586.000	2.800.000.000	3.260.920.000	7.000.000.000	3.739.080.000
3	Pembayaran Pokok Utang	113.157.736	113.157.736	115.000.000	115.000.000	56.579.000	(58.421.000)
	Total Pengeluaran Wajib dan Mengikat				1.097.368.086.000	1.094.826.178.000	(2.541.908.000)

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015

Pada tahun 2016, dalam dokumen RPJMD belanja langsung diproyeksikan sebesar Rp. 798.427.448.000,-. Berdasarkan hasil forum SKPD, usulan belanja langsung kabupaten mencapai Rp. 748.597.346.000,- dan setelah sinkronisasi melalui musrenbang dan mengakomodir usulan dewan maka total usulan mencapai Rp. 1.516.054.142.000,-. Berdasarkan perhitungan total pendapatan dikurangi dengan total pengeluaran wajib dan mengikat, maka kemampuan belanja langsung pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 659.342.971.000,-. Sedangkan pada RKPD tahun 2016 pagu belanja langsung yang dapat dialokasikan adalah sebesar Rp.979.492.327.000,-. Mengingat keterbatasan dan kemampuan anggaran dibanding usulan, maka masih perlu diadakan penajaman atas kelayakan usulan kegiatan dan rasionalisasi lebih lanjut, yang akan dilaksanakan pada saat menyusun KUA/PPAS tahun 2016.

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan pada penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, yaitu pada BPR BKK Jati sebesar Rp.2.000.000.000,-, Bank Pasar sebesar Rp.1.000.000.000,-, PDAM sebesar Rp. 2.000.000.000,- Bank Jateng sebesar Rp.2.000.000.000,- dan pembayaran pokok hutang yang jatuh tempo sebesar Rp.56.579.000,-.

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2016

4.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

Terwujudnya Kudus Yang Semakin Sejahtera

Visi tersebut mengandung kata kunci yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Semakin sejahtera mengandung makna lebih tercukupinya kebutuhan secara utuh dan menyeluruh/merata dalam arti adil, baik secara lahir maupun batin, fisik dan non fisik, serta mengandung arti cukup sandang, pangan dan papan (kebutuhan dasar manusia), aman tentram dan damai. Aman mengandung makna bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan, baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Tentram mengandung makna tidak ada rasa takut dan khawatir. Damai mengandung makna tidak terjadi konflik, tidak ada kerusuhan, keadaan tidak bermusuhan, rukun dalam sistem negara hukum.
- Selain itu, sejahtera lahir dan batin juga dapat dijabarkan mengandung unsur-unsur religius, maju dan adil. Religius mengandung makna bahwa masyarakat diharapkan memiliki ketaatan beribadah sesuai agamanya dan melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada kemajuan dan keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, religius dipakai sebagai dasar filosofi yang menjiwai pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan dalam segala bidang. Maju mengandung makna bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju tercermin dari terbentuknya daerah yang mandiri dengan segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergitas. Adil mengandung makna tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, kelompok, gender maupun wilayah. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus obyek pembangunan, rakyat mempunyai hak baik dalam melaksanakan maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di daerah harus mendasarkan pada rasa keadilan. Keadilan harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua orang mempunyai kesempatan yang sama dalam

meningkatkan taraf hidup dalam memperoleh lapangan pekerjaan, pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak politik, mengamankan daerah serta perlindungan dan memiliki rasa aman.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Bupati terpilih memperlihatkan pilar penting yang perlu diprioritaskan dalam proses pembangunan di Kabupaten Kudus, yang dikenal dengan Empat Pilar. Empat Pilar tersebut, merupakan misi pertama sampai dengan misi ke empat yang merupakan 4 (empat) pilar pembangunan yaitu :

1. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,
2. Mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang terjangkau dan berkualitas,
3. Tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau, dan
4. Perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh.

Adapun misi yang dirumuskan untuk mewujudkan visi pembangunan di Kabupaten Kudus tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang terjangkau dan berkualitas
3. Tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau.
4. Perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh.
5. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing.
6. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
7. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
8. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya dan berkeadilan sosial.

Guna mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut, maka pembangunan jangka menengah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 memiliki tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang di jabarkan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: Pengembangan peran UMKM dalam rangka penguatan ekonomi berbasis kerakyatan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, permodalan dan SDM UMKM; dan
- b. Meningkatnya akses pasar produk UMKM.

Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajemen koperasi dan UMKM; dan
- b. Peningkatan akses permodalan UMKM dan perluasan jaringan pemasaran produk UMKM.

Arah kebijakan sebagai pedoman strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pemberdayaan koperasi dan UMKM; dan
- b. Meningkatkan kemandirian dan pangsa pasar produk UMKM.

2. Mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang terjangkau dan berkualitas.

Tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kepastian, kualitas dan kesetaraan layanan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, kepastian layanan pendidikan dasar, pendidikan menengah yang berkualitas, dan berkesetaraan;
- b. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang berkualitas;
- c. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan non formal yang berkualitas; dan
- d. Tertatanya sistem pendidikan yang efektif dan efisien.

Strategi yang akan ditempuh adalah :

- a. Perbaiki ketersediaan, keterjangkauan, kepastian layanan pendidikan dasar, pendidikan menengah yang berkualitas, dan berkesetaraan;
- b. Perbaiki ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang berkualitas;
- c. Perbaiki ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan non formal yang berkualitas; dan
- d. Perbaiki kualitas manajemen pendidikan.

Arah kebijakan sebagai pedoman strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Menuntaskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan tetap mempertahankan tuntas wajib belajar 9 (sembilan) tahun serta memperhatikan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 - b. Mengupayakan ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang berkualitas;
 - c. Mengupayakan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan non formal yang berkualitas; dan
 - d. Mengoptimalkan pelayanan pendidikan.
3. Tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau.
- Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
- a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat; dan
 - b. Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;
- b. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat; dan
- c. Meningkatnya keluarga kecil sejahtera dan berkualitas.

Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat;
- b. Pemenuhan alat-alat kesehatan di BLUD RSUD;
- c. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang kesehatan;
- d. Penurunan angka kesakitan;
- e. Peningkatan mutu sumber daya kesehatan;
- f. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan serta mutu pelayanan;
- g. Pencegahan penyebaran penyakit HIV AIDS dan PMS (Penyakit Menular Seksual);
- h. Peningkatan gizi masyarakat;
- i. Peningkatan pengawasan industri makanan rumah tangga;
- j. Peningkatan pengetahuan kesehatan ibu hamil;
- k. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang air bersih; dan
- l. Pengendalian pertumbuhan penduduk.

Arah kebijakan sebagai pedoman strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan;
- b. Meningkatkan pelayanan kesehatan di BLUD RSUD;

- c. Meningkatkan promosi pelayanan dan advokasi kesehatan;
 - d. Menurunkan angka kejadian penyakit menular dan tidak menular;
 - e. Meningkatkan kapasitas sumber daya kesehatan;
 - f. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan;
 - g. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit HIV AIDS dan PMS (Penyakit Menular Seksual);
 - h. Meningkatkan cakupan pengetahuan gizi;
 - i. Meningkatkan pengetahuan industri rumah tangga tentang syarat kesehatan makanan;
 - j. Meningkatkan cakupan pengetahuan kesehatan ibu hamil;
 - k. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat; dan
 - l. Meningkatkan promosi, pelayanan dan advokasi keluarga berencana.
4. Perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh.

Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Pengembangan kesempatan kerja/berusaha, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, serta kualitas tenaga kerja

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pertumbuhan sektor industri;
- b. Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja; dan
- c. Meningkatnya investasi dalam rangka perluasan lapangan kerja.

Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kinerja sektor industri;
- b. Peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja; dan
- c. Pengembangan kebijakan dan pelayanan investasi.

Arah kebijakan sebagai pedoman strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan aksesibilitas sumber daya produktif bagi pelaku usaha;
- b. Meningkatkan jejaring pemasaran;
- c. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja;
- d. Mengoptimalkan perlindungan tenaga kerja; dan
- e. Menyederhanakan prosedur dan birokrasi daerah, kepastian biaya perijinan serta standarisasi pelayanan perijinan.

5. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing

Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan peran sektor jasa dan perdagangan sebagai pendukung peningkatan perekonomian Daerah; dan
- b. Peningkatan peran sektor pertanian.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kinerja sektor pariwisata;
- b. Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan; dan
- c. Meningkatnya pemanfaatan potensi pertanian.

Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kinerja sektor pariwisata;
- b. Peningkatan iklim perdagangan yang kondusif;
- c. Peningkatan pengawasan barang bersubsidi ;
- d. Peningkatan pengetahuan tentang prosedur ekspor; dan
- e. Revitalisasi pertanian.

Arah kebijakan sebagai pedoman strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan promosi dan pengelolaan pariwisata serta potensi pariwisata;
- b. Meningkatkan iklim perdagangan yang kondusif;
- c. Meningkatkan pengawasan barang bersubsidi;
- d. Meningkatkan SDM Usaha Kecil Menengah potensi ekspor; dan
- e. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya pertanian yang berwawasan lingkungan.

6. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah;
- b. Perwujudan pembangunan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan;
- c. Peningkatan penataan ruang wilayah dan pengembangan kawasan strategis; dan
- d. Perwujudan tertib pertanahan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya infrastruktur yang mendukung aktifitas ekonomi kerakyatan;
- b. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- c. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian kerusakan SDA dan pencemaran lingkungan hidup;

- d. Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan persampahan;
- e. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan;
- f. Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang serta pengembangan kawasan strategis; dan
- g. Meningkatkan pengelolaan pertanahan.

Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan infrastruktur prasarana wilayah yang terarah;
- b. Penerapan manajemen rekayasa lalu lintas;
- c. Pemanfaatan energi terbarukan;
- d. Peningkatan ketersediaan permukiman dan rumah layak huni;
- e. Peningkatan pencegahan dan pengendalian kerusakan SDA serta pencemaran lingkungan hidup;
- f. Peningkatan kualitas dan kuantitas manajemen persampahan;
- g. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- h. Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian;
- i. Pendayagunaan rencana tata ruang; dan
- j. Peningkatan kepastian hukum atas tanah.

Arah kebijakan sebagai pedoman strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah;
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana sistem sumber daya air;
- c. Meningkatkan manajemen transportasi;
- d. Melakukan penghematan energi tidak terbarukan;
- e. Melakukan penataan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. Meningkatkan tutupan lahan;
- g. Meningkatkan kebersihan dan pengembangan upaya pelestarian lingkungan dan pengendalian dampak lingkungan;
- h. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan bencana;
- i. Meningkatkan pengendalian pertambangan;
- j. Meningkatkan pengelolaan sampah terpadu;
- k. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup;
- l. Menyelenggarakan penataan ruang; dan
- m. Meningkatkan penatagunaan tanah.

7. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
- d. Perwujudan ketertiban sosial masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
- b. Meningkatkan kualitas SDM aparatur;
- c. Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Meningkatkan kinerja SDM legislatif;
- e. Meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah;
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan bidang informasi dan komunikasi;
- h. Meningkatkan pelayanan bidang ketransmigrasian;
- i. Meningkatkan pelayanan pimpinan daerah;
- j. Meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah;
- k. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- l. Terwujudnya supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- m. Meningkatkan kualitas penanganan bencana.

Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan sistem dan iklim yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel dalam proses perencanaan pembangunan;
- b. Peningkatan pemenuhan data statistik;
- c. Penerapan birokrasi pemerintahan yang profesional dan bersih;
- d. Penerapan dan peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) dalam peningkatan pengawasan dan pengendalian;
- e. Peningkatan pengendalian pembangunan;
- f. Penyelesaian kasus pengaduan di lingkungan pemda;
- g. Peningkatan pendidikan SDM legislatif;
- h. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;
- i. Peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa;
- j. Pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- k. Penataan dan pengembangan layanan informasi dan komunikasi;
- l. Peningkatan kesempatan kerja antar daerah;
- m. Peningkatan kinerja pemerintahan;
- n. Peningkatan koordinasi kerjasama antar daerah;
- o. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- p. Optimalisasi penataan peraturan perundang-undangan;
- q. Evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
- r. Percepatan penanganan bencana.

Arah kebijakan sebagai pedoman strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Meningkatkan koordinasi penyusunan data statistik;
 - c. Melakukan penataan sistem pengelolaan SDM aparatur;
 - d. Meningkatkan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
 - e. Meningkatkan pengendalian pembangunan;
 - f. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum dan HAM;
 - g. Meningkatkan kapasitas SDM legislatif;
 - h. Melakukan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah;
 - i. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa;
 - j. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan;
 - k. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan;
 - l. Memperluas kesempatan kerja antar daerah;
 - m. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien;
 - n. Meningkatkan koordinasi kerjasama antar daerah;
 - o. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam kehidupan demokrasi;
 - p. Melakukan penataan peraturan perundang-undangan;
 - q. Melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah; dan
 - r. Meningkatkan koordinasi pencegahan dan penanggulangan bencana.
8. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya dan berkeadilan sosial.

Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Perwujudan nilai-nilai kehidupan beragama di masyarakat;
- b. Peningkatan pelestarian seni dan budaya daerah;
- c. Pengembangan potensi pemuda dalam pembangunan;
- d. Pewujudan pembangunan yang berkeadilan sosial; dan
- e. Peningkatan pembangunan yang berkeadilan dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan sosial.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya nilai-nilai kehidupan beragama;
- b. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah;

- c. Meningkatnya kualitas bangunan bersejarah dan cagar budaya;
- d. Meningkatnya peran generasi muda dalam pembangunan
- e. Menurunnya jumlah pemuda yang terlibat narkoba;
- f. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat;
- g. Meningkatkan kualitas kehidupan Perempuan dan perlindungan anak;
- h. Meningkatnya percepatan pertumbuhan pembangunan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa; dan
- i. Meningkatnya kinerja organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa.

Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan nilai-nilai kehidupan beragama;
- b. Penguatan jati diri dan karakter daerah berbasis pada nilai budaya dan kearifan lokal;
- c. Optimalisasi pembinaan dan pengembangan kesenian tradisional;
- d. Peningkatan pelestarian benda cagar budaya;
- e. Peningkatan prestasi olahraga dan generasi muda ;
- f. Penguatan moral pemuda;
- g. Penurunan jumlah keluarga miskin ;
- h. Penurunan jumlah anak terlantar, anak jalanan, dan anak nakal;
- i. Penyediaan advokasi bagi penyandang cacat dan trauma;
- j. Penyediaan sarpras panti singgah;
- k. Peningkatan ketrampilan eks penyandang penyakit sosial;
- l. Peningkatan peran serta organisasi sosial dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- m. Percepatan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak dalam pembangunan;
- n. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM pada kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
- o. Penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan anak;
- p. Peningkatan jumlah perempuan yang mempunyai kemandirian ekonomi;
- q. Peningkatan percepatan pertumbuhan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa;
- r. Peningkatan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat; peningkatan pengetahuan aparat pemerintah desa; dan
- s. Peningkatan kapasitas organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa.

Arah kebijakan sebagai pedoman strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan fasilitasi kegiatan keagamaan;

- b. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan;
- c. Meningkatkan sarpras kesenian dan budaya daerah;
- d. Meningkatkan perlindungan dan pengembangan benda cagar budaya;
- e. Meningkatkan pembinaan prestasi olahraga dan pemuda;
- f. Meningkatkan perlindungan pemuda terhadap bahaya narkoba
- g. Meningkatkan pemberdayaan keluarga miskin;
- h. Meningkatkan pemberdayaan anak terlantar, anak jalanan, dan anak nakal;
- i. Meningkatkan perlindungan terhadap penyandang cacat dan trauma meningkatkan perlindungan terhadap orang terlantar dan lansia;
- j. Meningkatkan pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial;
- k. Meningkatkan pemberdayaan organisasi sosial;
- l. Meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak;
- m. Meningkatkan kinerja kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
- n. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
- o. Meningkatkan pemberdayaan perempuan;
- p. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- q. Meningkatkan peran lembaga pemberdayaan masyarakat;
- r. Meningkatkan kapasitas aparat pemerintah desa; dan
- s. Meningkatkan peran organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa.

Keselarasan misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian
Misi RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018

Misi (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Strategi (4)	Arah Kebijakan (5)
1. Pemberdayaan UMKM bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pengembangan peran UMKM dalam rangka penguatan ekonomi berbasis kerakyatan	a. Meningkatnya kapasitas kelembagaan, permodalan dan SDM UMKM	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajemen koperasi dan UMKM	Meningkatkan pemberdayaan koperasi dan UMKM
		b. Meningkatnya akses pasar produk UMKM	Peningkatan akses permodalan UMKM dan perluasan jaringan pemasaran produk UMKM	Meningkatkan kemandirian dan pangsa pasar produk UMKM
2. Mewujudkan wajib belajar 12 tahun yang terjangkau dan berkualitas	Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kepastian, kualitas dan kesetaraan layanan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal	a. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, kepastian layanan pendidikan dasar, pendidikan menengah yang berkualitas, dan berkesetaraan	Perbaikan ketersediaan, keterjangkauan, kepastian layanan pendidikan dasar, pendidikan menengah yang berkualitas, dan berkesetaraan	Menuntaskan wajib belajar 12 tahun dengan tetap mempertahankan tuntas wajib belajar 9 tahun serta memperhatikan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar, pendidikan menengah
		b. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang berkualitas	Perbaikan ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang berkualitas	Mengupayakan ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang berkualitas
		c. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan non formal yang berkualitas	Perbaikan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan non formal yang berkualitas	Mengupayakan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan non formal yang berkualitas
		d. Tertatanya sistem pendidikan yang efektif dan efisien	Perbaikan kualitas manajemen pendidikan	Mengoptimalkan pelayanan pendidikan

Misi (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Strategi (4)	Arah Kebijakan (5)
3. Tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau	1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	a. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	- Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat	- Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan
			- Pemenuhan alat-alat kesehatan di BLUD RSUD	- Meningkatkan pelayanan kesehatan di BLUD RSUD
			- Peningkatan pemahaman masyarakat tentang kesehatan	- Meningkatkan promosi pelayanan dan advokasi kesehatan
			- Penurunan angka kesakitan	- Menurunkan angka kejadian penyakit menular dan tidak menular
			- Peningkatan mutu sumber daya kesehatan	- Meningkatkan kapasitas sumber daya kesehatan
			- Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan serta mutu pelayanan	- Meningkatkan ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan
			- Pencegahan penyebaran penyakit HIV AIDS dan PMS	- Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit HIV AID dan PMS
			b. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	- Peningkatan gizi masyarakat
	- Peningkatan pengawasan industri makanan rumah tangga	- Meningkatkan pengetahuan industri rumah tangga tentang syarat kesehatan makanan		
	- Peningkatan pengetahuan kesehatan ibu hamil	- Meningkatkan cakupan pengetahuan kesehatan ibu hamil		
- Peningkatan pemahaman masyarakat tentang air bersih	- Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat			
	2. Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk	Meningkatnya keluarga kecil sejahtera dan berkualitas	Pengendalian pertumbuhan penduduk	Meningkatkan promosi, pelayanan dan advokasi keluarga berencana

Misi (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Strategi (4)	Arah Kebijakan (5)
4. Perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan menyeluruh	Pengembangan kesempatan kerja/ berusaha, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, serta kualitas tenaga kerja	a. Meningkatkan pertumbuhan sektor industri	Peningkatan kinerja sektor industri	- Meningkatkan aksesibilitas sumber daya produktif bagi pelaku usaha Meningkatkan jejaring pemasaran
		b. Meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja	Peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja	- Meningkatkan Perluasan kesempatan kerja - Mengoptimalkan perlindungan tenaga kerja
		c. Meningkatkan investasi dalam rangka perluasan lapangan kerja	Pengembangan kebijakan dan pelayanan investasi	Menyederhanakan prosedur dan birokrasi daerah, kepastian biaya perijinan serta standarisasi pelayanan perijinan
5. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing	1. Peningkatan peran sektor jasa dan perdagangan sebagai pendukung peningkatan perekonomian daerah	a. Meningkatkan kinerja sektor pariwisata	Peningkatan kinerja sektor pariwisata	Meningkatkan promosi dan pengelolaan pariwisata serta potensi pariwisata
		b. Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan	- Peningkatan iklim perdagangan yang kondusif	- Meningkatkan iklim perdagangan yang kondusif
			- Peningkatan pengawasan barang bersubsidi - Peningkatan pengetahuan tentang prosedur ekspor	- Meningkatkan pengawasan barang bersubsidi - Meningkatkan SDM Usaha Kecil Menengah potensi ekspor
	2. Peningkatan peran sektor pertanian	Meningkatnya pemanfaatan potensi pertanian	Revitalisasi pertanian	Meningkatkan pemanfaatan sumber daya pertanian yang berwawasan lingkungan
6. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah	a. Terwujudnya infrastruktur yang mendukung aktifitas ekonomi kerakyatan	- Pengembangan infrastruktur prasarana wilayah yang terarah	- Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah - Meningkatkan sarana dan prasarana sistem sumber daya air
			- Penerapan manajemen rekayasa lalu lintas	Meningkatkan manajemen transportasi
			- Pemanfaatan energi Terbarukan	Melakukan penghematan energi tidak terbarukan
		b. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	Peningkatan ketersediaan permukiman dan rumah layak huni	Melakukan penataan perumahan dan kawasan permukiman

Misi (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Strategi (4)	Arah Kebijakan (5)
	2. Perwujudan pembangunan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan	a. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian kerusakan SDA dan pencemaran lingkungan hidup	Peningkatan pencegahan dan pengendalian kerusakan SDA serta pencemaran lingkungan hidup	- Meningkatkan tutupan lahan - Meningkatkan kebersihan dan pengembangan upaya pelestarian lingkungan dan pengendalian dampak lingkungan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan bencana - Meningkatkan pengendalian pertambangan
		b. Meningkatnya kualitas sistem pengelolaan persampahan	Peningkatan kualitas dan kuantitas manajemen persampahan	Meningkatkan pengelolaan sampah terpadu
		c. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup
	3. Peningkatan penataan ruang wilayah dan pengembangan kawasan strategis	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang serta pengembangan kawasan strategis	Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pendayagunaan rencana tata ruang	Menyelenggarakan penataan ruang
	4. Perwujudan tertib pertanahan	Meningkatnya pengelolaan pertanahan	Peningkatan kepastian hukum atas tanah	Meningkatkan penatagunaan tanah
7. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)	1. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	- Pengembangan sistem dan iklim yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel dalam proses perencanaan pembangunan	- Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
			- Peningkatan pemenuhan data statistik	- Meningkatkan koordinasi penyusunan data statistik
		b. Meningkatnya kualitas SDM aparatur	Penerapan birokrasi pemerintahan yang profesional dan bersih	Melakukan penataan sistem pengelolaan SDM aparatur

Misi (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Strategi (4)	Arah Kebijakan (5)
		c. Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	- Penerapan dan peningkatan Sistem Pengawasan Internal pemerintah (SPIP) dalam peningkatan pengawasan dan pengendalian - Peningkatan pengendalian pembangunan - Penyelesaian kasus pengaduan di lingkungan pemma	- Meningkatkan penerapan SPIP - Meningkatkan pengendalian pembangunan - Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum dan HAM
		d. Meningkatnya kinerja SDM legislatif	Peningkatan pendidikan SDM legislatif	Meningkatkan kapasitas SDM legislatif
	2. Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah	- Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel - Peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa	- Melakukan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah - Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa
	3. Peningkatan kualitas pelayanan publik	a. Meningkatnya kualitas pelayanan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil	Pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan dan catatan sipil	Meningkatkan tertib administrasi kependudukan
		b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan bidang informasi dan komunikasi	Penataan dan pengembangan layanan informasi dan komunikasi	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan
		c. Meningkatnya pelayanan bidang ketransmigrasian	Peningkatan kesempatan kerja antar daerah	Memperluas kesempatan kerja antar daerah
		d. Meningkatnya pelayanan pimpinan daerah	Peningkatan kinerja pemerintahan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien

Misi (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Strategi (4)	Arah Kebijakan (5)
		e. Meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah	Peningkatan koordinasi kerjasama antar daerah	Meningkatkan koordinasi kerjasama antar daerah
	4. Perwujudan ketertiban sosial masyarakat	a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam kehidupan demokrasi
		b. Terwujudnya supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat	- Optimalisasi penataan peraturan perundang-undangan	- Melakukan penataan peraturan perundang-undangan
			- Evaluasi kelembagaan perangkat daerah	- Melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah
		c. Meningkatkan kualitas penanganan bencana	Percepatan penanganan bencana	Meningkatkan koordinasi pencegahan dan penanggulangan bencana
8. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya dan berkeadilan sosial	1. Perwujudan nilai-nilai kehidupan beragama di masyarakat	Meningkatnya nilai-nilai kehidupan beragama	Peningkatan nilai-nilai kehidupan beragama	Meningkatkan fasilitasi kegiatan keagamaan
	2. Peningkatan pelestarian seni dan budaya daerah	a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah	Penguatan jati diri dan karakter daerah berbasis pada nilai budaya dan kearifan lokal	Meningkatkan pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan
		b. Meningkatkan kualitas bangunan bersejarah dan cagar budaya	- Optimalisasi pembinaan dan pengembangan kesenian tradisional	- Meningkatkan sarpras kesenian dan budaya daerah
			- Peningkatan pelestarian benda cagar budaya	- Meningkatkan perlindungan dan pengembangan benda cagar budaya
	3. Pengembangan potensi pemuda dalam pembangunan	a. Meningkatkan peran generasi muda dalam pembangunan	Peningkatan prestasi olahraga dan generasi muda	Meningkatkan pembinaan prestasi olahraga dan pemuda
		b. Menurunnya jumlah pemuda yang terlibat narkoba	Penguatan moral pemuda	Meningkatkan perlindungan pemuda terhadap bahaya narkoba

Misi (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Strategi (4)	Arah Kebijakan (5)
	4. Pewujudan pembangunan yang berkeadilan sosial	a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sosial	- Penurunan jumlah keluarga miskin ,	- Meningkatkan pemberdayaan keluarga miskin
			- Penurunan jumlah anak terlantar, anak jalanan, dan anak nakal	- Meningkatkan pemberdayaan anak terlantar, anak jalanan, dan anak nakal
			- Penyediaan advokasi bagi penyandang cacat dan trauma	- Meningkatkan perlindungan terhadap penyandang cacat dan trauma
			- Penyediaan sarpras panti singgah	- Meningkatkan perlindungan terhadap orang terlantar dan lansia
			- Peningkatan ketrampilan eks penyandang penyakit sosial	- Meningkatkan pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
			- Peningkatan peran serta organisasi sosial dalam penanganan PMKS	- Meningkatkan pemberdayaan organisasi sosial
		b. Meningkatkan kualitas kehidupan Perempuan dan perlindungan anak	- Percepatan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak dalam pembangunan	- Meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
			- Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM pada kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	- Meningkatkan kinerja kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
			- Penyelesaian kasus KDRT dan kekerasan anak	- Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
			- Peningkatan jumlah perempuan yang mempunyai kemandirian ekonomi	- Meningkatkan pemberdayaan perempuan

Misi (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Strategi (4)	Arah Kebijakan (5)
	5. Peningkatan pembangunan yang berkeadilan dalam rangka mengurangi tingkat kesenjangan sosial	a. Meningkatnya percepatan pertumbuhan pembangunan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa	- Peningkatan percepatan pertumbuhan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa	- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
- Peningkatan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat			- Meningkatkan peran lembaga pemberdayaan masyarakat	
- Peningkatan pengetahuan aparaturn pemerintahan desa			- Meningkatkan kapasitas aparaturn pemerintahan desa	
b. Meningkatnya kinerja organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa		Peningkatan kapasitas organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa	Meningkatkan peran organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa	

Sumber : RPJMD Kabupaten Kudus

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan RPJMD Kudus tahun 2013-2018, RKPD tahun 2016 merupakan tahapan tahun ketiga dan keempat, dengan uraian sebagai berikut:

1. Tahun ketiga (2015 – 2016)

Pembangunan pada tahun ketiga diarahkan untuk melanjutkan tahapan pembangunan tahun sebelumnya yang belum selesai. Pada tahun ketiga, arah kebijakan pembangunan difokuskan untuk pengembangan fasilitasi permodalan UMKM dan perluasan pemasaran produk UMKM, peningkatan mutu pendidikan, perluasan pelayanan kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kerja, pengembangan infrastruktur dan sarpras penunjang, penguatan birokrasi pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik serta pelestarian budaya daerah. Di samping itu dalam peningkatan infrastruktur telah diupayakan pendekatan kewilayahan, dimana tahun 2016 diprioritaskan pada Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Mejobo dan Kecamatan Bae. Fokus pembangunan tahun ketiga diarahkan untuk percepatan pencapaian target dan prioritas sasaran pembangunan pada 4 (empat) pilar pembangunan. Sebagaimana tahun kedua yang berada pada tahap ketiga RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005 – 2025, maka kebijakan pembangunan lebih diarahkan pada penguatan pembangunan dalam rangka percepatan pencapaian indikator kinerja sasaran untuk mencapai tujuan pada misi pembangunan.

2. Tahun keempat (2016 – 2017)

Pada tahun keempat, fokus pembangunan mulai diarahkan pada perwujudan visi yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kudus yang Semakin Sejahtera”. Proses percepatan pencapaian target dan prioritas sasaran tetap diarahkan sejalan dengan penguatan 4 (empat) pilar pembangunan dengan didukung tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi. Percepatan penurunan kesenjangan antar wilayah ditempuh melalui kebijakan percepatan pembangunan prasarana wilayah lebih terarah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya ungkit sektor-sektor unggulan daerah dalam pembangunan yang menyeluruh. Selain itu pembangunan juga difokuskan pada peningkatan kualitas SDM yang religius dan berbudaya serta memiliki kompetensi dan daya saing global.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,64%
2. Laju inflasi sebesar 5±1%
3. PDRB Perkapita Rp 58,89 juta rupiah
4. Indeks williamson sebesar 0,79.
5. Persentase penduduk miskin sebesar 8%.
6. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,03%

Dengan mendasarkan pada tahapan RPJMD dan sasaran pembangunan tahun 2016, maka dapat dirumuskan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kudus tahun 2016 sebagai berikut:

1. Peningkatan perekonomian daerah berbasis penguatan UMKM dan daya saing.
2. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan sosial dasar (pendidikan dan kesehatan).
3. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan.
4. Optimalisasi pembangunan infrastruktur yang berkeadilan.
5. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah.

Penjabaran keterkaitan fokus pada masing-masing prioritas pembangunan, indikator dan target kinerja, serta program prioritas pembangunan daerah tahun 2016 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Keterkaitan Prioritas dan Fokus Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2016 dengan Prioritas Provinsi dan Nasional

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan Tahun 2016 Kabupaten Kudus	Prioritas RKPD 2016 Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional (Nawacita)
1.	Peningkatan perekonomian daerah berbasis penguatan UMKM & daya saing, dengan fokus pada:	Prioritas 2. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah	Prioritas 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional
	a) Peningkatan pelatihan kewirausahaan, kapasitas kelembagaan dan fasilitasi permodalan UMKM.		
	b) Fasilitasi pemasaran produk UMKM		
2.	Peningkatan cakupan & kualitas pelayanan sosial dasar (pendidikan & kesehatan), dengan fokus pada:	• Prioritas 3: Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perluasan cakupan layanan sosial dasar.	Prioritas 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
	a) Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang berkualitas		

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan Tahun 2016 Kabupaten Kudus	Prioritas RKPD 2016 Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional (Nawacita)
	b) Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kepastian layanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas.		
	c) Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan non formal yang berkualitas		
	d) Peningkatan ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat		
	e) Peningkatan pengendalian penduduk melalui pelayanan Keluarga Berencana (KB)		
3.	Percepatan pengurangan kemiskinan & pengangguran berdimensi kewilayahan, dengan fokus pada:	<ul style="list-style-type: none"> • Prioritas 1: Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan, 	Prioritas 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
	a) Peningkatan pelatihan tenaga kerja sesuai dengan kompetensinya dan perlindungan tenaga kerja.		
	b) Peningkatan realisasi investasi dengan pelayanan perijinan dan iklim investasi yang kondusif.		
	c) Peningkatan kualitas destinasi dan pemasaran pariwisata		
	d) Pengembangan industri kecil dan menengah		
	e) Peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan		
	f) Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.		
	g) Peningkatan Ketahanan Pangan masyarakat.		
	h) Peningkatan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)		
	i) Peningkatan pemberdayaan		

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan Tahun 2016 Kabupaten Kudus	Prioritas RKPD 2016 Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional (Nawacita)
	masyarakat dan pengembangan desa dalam penanggulangan kemiskinan		
4.	Optimalisasi pembangun infrastruktur yang berkeadilan, dengan fokus pada:	Prioritas 4: Optimalisasi pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi guna meningkatkan daya saing daerah.	Prioritas 3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
	a) Peningkatan kualitas jaringan transportasi secara merata	Prioritas 5 : Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi ancaman bencana	
	b) Pemenuhan sarana drainase untuk pencegahan banjir.		
	c) Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman		
	d) Peningkatan pencegahan pencemaran lingkungan hidup		
	e) Peningkatan sistem pengelolaan persampahan		
	f) Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang.		
	g) Peningkatan pengelolaan pertanahan		
5.	Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah, dengan fokus pada:	Prioritas 6: Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah.	Prioritas 1: menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
	a) Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah		Prioritas 2: Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
	b) Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM aparatur.		Prioritas 4: Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
	c) Peningkatan pengawasan dalam Penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.		Prioritas 8: melakukan revolusi karakter bangsa.
	d) Meningkatnya kinerja SDM legislatif		
	e) Peningkatan pengelolaan keuangan daerah		
	f) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil		
	g) Peningkatan pelayanan arsip dan perpustakaan		

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan Tahun 2016 Kabupaten Kudus	Prioritas RKPD 2016 Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional (Nawacita)
	h) Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika		Prioritas 9. mempertahankan kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
	i) Peningkatan kualitas pelayanan dalam pemberangkatan transmigran		
	j) Peningkatan pelayanan kepada pimpinan daerah		
	k) Peningkatan kerjasama antar daerah dalam percepatan pembangunan		
	l) Peningkatan kesadaran politik, keamanan dan ketertiban masyarakat		
	m) Peningkatan supremasi hukum di daerah.		
	n) Peningkatan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana		
	a) Peningkatan kerukunan antar umat beragama.		
	b) Peningkatan pelestarian nilai-nilai, adat dan budaya daerah, serta benda cagar budaya.		
	c) Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan		

Penjabaran keterkaitan fokus pada masing-masing prioritas pembangunan, indikator dan target kinerja, serta program prioritas pembangunan daerah tahun 2016 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Keterkaitan Prioritas dan Fokus Pembangunan, Indikator dan Target Kinerja
Kabupaten Kudus Tahun 2016

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan Tahun 2016	Indikator Kinerja	Target Tahun 2016	SKPD Penanggung Jawab
1.	Peningkatan perekonomian daerah berbasis penguatan UMKM & daya saing, dengan fokus pada:			
	a) Peningkatan pelatihan kewirausahaan, kapasitas kelembagaan dan fasilitasi permodalan UMKM.	Jumlah UMKM (unit)	11.947	Dinperindagkop dan UMKM
	b) Fasilitasi pemasaran produk UMKM	Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran (unit)	178	Dinperindagkop dan UMKM
2.	Peningkatan cakupan & kualitas pelayanan sosial dasar (pendidikan & kesehatan), dengan fokus pada:			
	a) Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang berkualitas	APK PAUD (%)	56	Dindikpora
	b) Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kepastian layanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas.	APK SD/ MI/ Paket A (%)	100	Dindikpora
		APK SMP/ MTs/Paket B (%)	100	
		Bangunan SD dalam kondisi baik (%)	97,80	
		Bangunan SMP dalam kondisi baik (%)	91,70	
		Angka Putus Sekolah SD/ MI (%)	0,02	
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0,11	
		APK SMA/ MA /SMK/ Paket C (%)	87,5	
		Bangunan SMA dalam kondisi baik (%)	95,86	
	Angka Putus Sekolah SMA/ MA/ SMK (%)	0,12		

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan Tahun 2016	Indikator Kinerja	Target Tahun 2016	SKPD Penanggung Jawab
		Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	60,5	
		Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	93,95	
		Guru SMA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV(%)	94,81	
		Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	95,24	
	c) Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan non formal yang berkualitas	Angka melek huruf (%)	100	
	d) Peningkatan ketersediaan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Cakupan puskesmas (%)	211,10	<ul style="list-style-type: none"> • DKK • BLUD RSUD
		Cakupan puskesmas terakreditasi (unit)	4	
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	100	
		Cakupan pelayanan BLUD RSUD (%)	100	
		Cakupan desa siaga aktif (%)	50	
	e) Peningkatan pengendalian penduduk melalui pelayanan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan peserta KB aktif (%)	80	BPMPKB
3.	Percepatan pengurangan kemiskinan & pengangguran berdimensi kewilayahan, dengan fokus pada:			
	a) Peningkatan pelatihan tenaga kerja sesuai dengan kompetensinya dan perlindungan tenaga kerja.	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,6	Dinsosnakertrans
	b) Peningkatan realisasi investasi dengan pelayanan perijinan dan iklim	Nilai realisasi PMDN (milyar)	9.765	KPPT

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan Tahun 2016	Indikator Kinerja	Target Tahun 2016	SKPD Penanggung Jawab
	investasi yang kondusif.			
	c) Peningkatan kualitas destinasi dan pemasaran pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	1.347.240	Dinbudpar
	d) Pengembangan industri kecil dan menengah	Cakupan IKM yang mendapatkan pelatihan dan stimulan sarana usaha (%)	2	Dinperindagkop dan UMKM
		Pertumbuhan IKM (%)	0,03	
	e) Peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan	Jumlah pedagang di pasar tradisional	10.501	Dinperindagkop dan UMKM
	f) Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.	Nilai Tukar Petani	106,51	Distanhut
		Peningkatan produktivitas tanaman (%)	5,90	
	g) Peningkatan Ketahanan Pangan masyarakat.	Ketersediaan Pangan Utama (%)	100	Kantor Ket Pangan
	h) Peningkatan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan pelatihan (KK)	90	Dinsosnakertrans
		Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelatihan (orang)	90	
	i) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan desa dalam penanggulangan kemiskinan	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (ormas, orsos) (%)	11,77	BPMPKB
		Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat	89	BPMPKB
		Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada (%)	Desa Swadaya: 85; Desa Swakarya : 47; Desa Swasembada: 0	BPMPKB Bag Pemdes Setda

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan Tahun 2016	Indikator Kinerja	Target Tahun 2016	SKPD Penanggung Jawab
4.	Optimalisasi pemb infrastruktur yang berkeadilan, dengan fokus pada:			
	a) Peningkatan kualitas jaringan transportasi secara merata	Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik/ sedang (%)	68,87	Dinas BPESDM
		Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1,59	Dinhubkominfo
	b) Pemenuhan sarana drainase untuk pencegahan banjir.	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	62,94	Dinas BPESDM
	c) Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	Persentase rumah layak huni	89,19	Dinas Ciptakaru
	d) Peningkatan pencegahan pencemaran lingkungan hidup	Proporsi RTH publik (%)	7	Dinas Ciptakaru
	e) Peningkatan sistem pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah	87	Dinas Ciptakaru
	f) Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang.	Jumlah dokumen tata ruang	5	Bappeda Dinas Ciptakaru
	g) Peningkatan pengelolaan pertanahan	Luas lahan bersertifikat (%)	5,4	Bag pengelolaan Aset Daerah
5.	Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah, dengan fokus pada:			
	a) Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD (%)	93	Bappeda
	b) Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM aparatur.	Jumlah aparatur yang terbina dikembangkan sesuai kompetensi dan	12.143	BKD

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan Tahun 2016	Indikator Kinerja	Target Tahun 2016	SKPD Penanggung Jawab
		prestasi		
	c) Peningkatan pengawasan dalam Penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.	Persentase penyelesaian TLHP reguler	100	Inspektorat
	d) Meningkatnya kinerja SDM legislatif	Jumlah Perda yang ditetapkan	18	Set DPRD
	e) Peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan PAD (%)	16,16	DPPKAD
	f) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Kepemilikan e-KTP (%)	96,7	Dindukcapil
	g) Peningkatan pelayanan arsip dan perpustakaan	Pengelolaan arsip secara Baku (desa/kelurahan/SKPD)	55	Kantor Perpus & Arsip
		Jumlah perpustakaan milik Pemda & Non Pemda (Perpus Pemda, Umum, Sekolah, Desa, dan Perpus Masyarakat) (perpus)	175	Kantor Perpus & Arsip
	h) Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika	Jumlah Website milik Pemkab	18	Dinhubkominfo Bagian Humas Setda
	i) Peningkatan kualitas pelayanan dalam pemberangkatan transmigran	Jumlah calon transmigran yang terlayani (KK)	30	Dinsosnakertrans
	j) Peningkatan pelayanan kepada pimpinan daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan Dialog/ Audiensi Bupati di Desa / Kelurahan (kali)	33	Bag. Umum
	k) Peningkatan kerjasama antar daerah dalam percepatan pembangunan	Persentase fasilitasi Kerjasama Antar Daerah	100	Bag Tapem
	l) Peningkatan kesadaran politik, keamanan dan ketertiban masyarakat	Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu (%)	80	Kesbangpol
		Penurunan tindak kriminalitas di daerah(%)	40	Kesbangpol

No	Prioritas dan Fokus Pembangunan Tahun 2016	Indikator Kinerja	Target Tahun 2016	SKPD Penanggung Jawab
				Kesbangpol Satpol PP
	m) Peningkatan supremasi hukum di daerah.	Jumlah Produk Hukum yang disusun dan didistribusikan	5 Ranperda, 25 Perbup., 100 Kep. Bupati, 260 buku	Bag Hukum Setda
	n) Peningkatan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana	Jumlah desa tangguh bencana	28	BPBD
	d) Peningkatan kerukunan antar umat beragama.	Jumlah peserta Dialog Antar umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME (Orang)	80	Bag.Kesra
	e) Peningkatan pelestarian nilai-nilai, adat dan budaya daerah, serta benda cagar budaya.	Jumlah adat dan tradisi budaya daerah yang diaktualisasi (jenis)	36	Disbudpar
		Jumlah sarana di situs pati ayam dan Taman Budaya	5	
		Jumlah Benda Cagar Budaha (BCB) yang direvitalisasi	5	
	f) Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan	Jumlah organisasi pemuda	26	Dindikpora
		Jumlah kegiatan kepemudaan	15	

Tabel 4.3.
Perhitungan Pagu, Program Prioritas
Kabupaten Kudus

Tahun: 2016 - Murni

Program Prioritas	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
Prioritas I				
Pendidikan				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	7.090.000	1.400.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	558.851.000		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	20.800.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	514.862.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	43.420.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	48.219.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25.843.000		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	10.392.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30.842.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	73.135.000		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	66.546.000			
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pembangunan gedung kantor	400.000.000	2.175.250.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	40.500.000		
	Pengadaan peralatan gedung kantor	238.000.000		
	Pengadaan mebeleur	70.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	113.850.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	132.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	22.000.000		
	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	900.000.000		
Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung	258.900.000			
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	37.928.000	37.928.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	50.000.000	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pembangunan gedung sekolah	2.000.000.000	5.330.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	Penambahan ruang kelas sekolah	600.000.000		
	Pembangunan sarana dan prasarana bermain	200.000.000		
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	125.000.000		
	Pengadaan mebeluer sekolah	400.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	200.000.000		
	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	750.000.000		
	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	100.000.000		
	Perencanaan dan penyusunan program anak usia dini	10.000.000		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	20.000.000		
Pembangunan Gedung Sekolah (Bangub)	800.000.000			
Pengembangan Sarana dan Prasarana PAUD (Bangub)	125.000.000			
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan gedung sekolah	1.400.000.000	32.163.006.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	Penambahan ruang kelas sekolah	400.000.000		
	Penambahan ruang guru sekolah	200.000.000		
	Pembangunan laboratorium dan ruang Praktikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS, dll)	600.000.000		
	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	1.700.000.000		
	Pembangunan ruang serba guna/aula	300.000.000		
	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	800.000.000		
	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	300.000.000		
	Pembangunan ruang ibadah	1.000.000.000		
	Pembangunan perpustakaan sekolah	800.000.000		
	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	160.000.000		
	Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa	150.000.000		
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	300.000.000		
	Pengadaan mebeluer sekolah	550.000.000		
	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	250.000.000		
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	400.000.000		
Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	250.000.000			

Program Prioritas	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	300.000.000		
	Rehabilitasi sedang/berat unit kesehatan sekolah	225.000.000		
	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	110.000.000		
	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	146.300.000		
	Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	250.000.000		
	Pelatihan penyusunan kurikulum	110.000.000		
	Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP	8.941.346.000		
	Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS	200.000.000		
	Penyelenggaraan paket A setara SD	0		
	Penyelenggaraan paket B setara SMP	0		
	Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar	11.000.000		
	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	50.000.000		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	10.000.000		
	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (DAK)	1.744.083.000		
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK)	3.500.000.000		
	Pembangunan perpustakaan sekolah (DAK)	4.500.000.000		
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (DAK)	330.000.000		
	Pengadaan Buku - Buku dan Alat Tulis Siswa (DAK)	765.204.000		
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Bangub)	833.085.000		
	Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah (Bangub)	283.866.000		
	Pengadaan Mebeluer Sekolah (Bangub)	24.684.000		
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah (Bangub)	148.104.000		
	Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi (Bangub)	120.334.000		
Program Pendidikan Menengah	Pembangunan gedung sekolah	3.492.000.000	45.132.815.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	Penambahan ruang kelas sekolah	6.007.000.000		
	Penambahan ruang guru sekolah	355.000.000		
	Pembangunan laboratorium dan ruang Praktikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS, dll)	700.000.000		
	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	1.530.000.000		
	Pembangunan ruang serba guna/aula	2.000.000.000		
	Pembangunan perpustakaan sekolah	1.050.000.000		
	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	200.000.000		
	Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa	0		
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	2.865.500.000		
	Pengadaan mebeluer sekolah	393.500.000		
	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	4.480.400.000		
	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	60.000.000		
	Pelatihan penyusunan kurikulum	900.000.000		
	Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)	400.000.000		
	Penyelenggraan paket C setara SMU	250.000.000		
	Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen n sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)	165.000.000		
	Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri	165.000.000		
	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	150.000.000		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	10.000.000		
	Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Bangub)	880.000.000		
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Bangub)	198.000.000		
	Pengadaan Buku - Buku dan Alat Tulis Siswa (Bangub)	703.457.000		
	Pembangunan ruang Perpustakaan Sekolah (Bangub)	174.482.000		
	Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah (Bangub)	774.270.000		
	Pengadaan Buku - Buku dan Alat Tulis Siswa (DAK)	1.200.000.000		
	Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK)	1.274.573.000		
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK)	330.000.000		
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah (DAK)	330.000.000		
	Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi (Bangub)	18.513.000		

Program Prioritas	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (DAK)	440.000.000		
	Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMA/MA/SMALB dan SMK serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SMA dan SMK	13.636.120.000		
Program Pendidikan Non Formal	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	0	331.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	Pengembangan pendidikan keaksaraan	25.000.000		
	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	150.000.000		
	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	150.000.000		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	6.000.000		
Program Pendidikan Luar Biasa	Penambahan ruang kelas sekolah	165.000.000	319.440.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siwa	11.000.000		
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	11.000.000		
	Pengadaan mebeluer sekolah	11.000.000		
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	66.000.000		
	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	33.000.000		
	Pelatihan penyusunan kurikulum	22.440.000		
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	55.000.000	970.500.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	44.000.000		
	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)	71.500.000		
	Peningkatan Profesionalisme Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	800.000.000		
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	481.307.000	1.762.161.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	391.000.000		
	Fasilitasi Ujian Nasional dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional	444.554.000		
	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	374.000.000		
	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah	36.300.000		
	Fasilitasi Operasional Bantuan Pendidikan (Bangub)	35.000.000		

Program Prioritas	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
Kesehatan				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	2.100.000	1.238.868.000	DINAS KESEHATAN
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	219.768.000		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	13.000.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	47.700.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	540.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	40.000.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	107.000.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.800.000		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	13.500.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.000.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	150.000.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	82.000.000		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pembangunan gedung kantor	1.100.000.000	1.837.100.000	DINAS KESEHATAN
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	25.000.000		
	Pengadaan peralatan gedung kantor	39.000.000		
	Pengadaan mebeleur	70.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	81.600.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	119.500.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	6.000.000		
	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	86.000.000		
	Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung	310.000.000		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	200.000.000	200.000.000	DINAS KESEHATAN
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20.000.000	75.000.000	DINAS KESEHATAN
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	40.000.000		
	Inventarisasi Sarana dan Prasarana	15.000.000		
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	400.000.000	435.000.000	DINAS KESEHATAN
	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	20.000.000		
	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	15.000.000		
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya	9.000.000.000	35.897.606.000	DINAS KESEHATAN
	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	53.219.000		
	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	4.914.953.000		
	revitalisasi sitem kesehatan	200.000.000		
	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	147.897.000		
	penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	200.000.000		
	Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas dan Jaringannya	13.000.000.000		
	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK)	600.000.000		
	Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan Termasuk Obat Generik Esensial (DAK)	1.000.000.000		
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Pajak Rokok)	4.005.590.000		
	Operasional pelayanan di laboratorium kesehatan daerah (Labkesda)	754.144.000		
	Pembangunan Rumah Sakit Umum	200.000.000		
	Operasional pelayanan kesehatan di Puskesmas	1.821.803.000		
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	120.000.000	710.000.000	DINAS KESEHATAN
	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	100.000.000		
	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	90.000.000		
	Pemasyarakatan/Iklan Layanan Masyarakat Bahaya Merokok (Pajak Rokok)	400.000.000		
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	8.000.000	407.000.000	DINAS KESEHATAN
	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	328.000.000		
	Peanggulan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	45.000.000		
	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	20.000.000		
	Penanggulangan gizi lebih	6.000.000		

Program Prioritas	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	408.000.000	1.000.000.000	DINAS KESEHATAN
	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	40.000.000		
	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	17.000.000		
	Peningkatan sanitasi dasar	535.000.000		
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	150.000.000	1.025.000.000	DINAS KESEHATAN
	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	150.000.000		
	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	120.000.000		
	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	100.000.000		
	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	125.000.000		
	Peningkatan imunisasi	100.000.000		
	Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah	220.000.000		
	Pengendalian penyakit tidak menular	60.000.000		
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Penyusunan standar kesehatan	40.000.000	1.110.000.000	DINAS KESEHATAN
	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	900.000.000		
	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	120.000.000		
	Peningkatan mutu tenaga kesehatan	50.000.000		
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Pelatihan dan pendidikan perawat anak balita	145.000.000	145.000.000	DINAS KESEHATAN
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	55.000.000	55.000.000	DINAS KESEHATAN
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri	55.000.000	55.000.000	DINAS KESEHATAN
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	100.000.000	100.000.000	DINAS KESEHATAN
Program Pelayanan Kesehatan BLUD	Pelayanan Kesehatan BLUD	25.709.426.000	25.709.426.000	DINAS KESEHATAN
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok	45.000.000.000	45.000.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	7.500.000.000	7.500.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI
Program Pelayanan Kesehatan BLUD	Pelayanan Kesehatan BLUD	114.513.000.000	114.513.000.000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI
Pekerjaan Umum				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000	741.000.000	DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	150.000.000		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	9.000.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	27.000.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	230.000.000		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	20.000.000		
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	35.000.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	35.000.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	75.000.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.000.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	60.000.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	65.000.000		
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan peralatan gedung kantor		
Pengadaan mebeleur		200.000.000		
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		75.000.000		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		430.000.000		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		243.000.000		
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		40.000.000		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		30.000.000		
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	50.000.000			
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	181.000.000	181.000.000	DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15.000.000	15.000.000	DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jalan (Bangub)	21.650.000.000	47.650.000.000	DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Pembangunan Jembatan (Bangub)	26.000.000.000		
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	2.000.000.000	2.000.000.000	DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Program Prioritas	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	5.000.000.000	6.000.000.000	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	1.000.000.000		
Program Pembangunan turap/talud/bronjong	Pembangunan turap/talud/bronjong	2.000.000.000	2.000.000.000	DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Program Pembangunan turap/talud/bronjong	Pembangunan turap/talud/bronjong	3.000.000.000	3.000.000.000	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	40.738.030.000	66.128.767.000	DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	15.000.000.000		
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK)	8.190.737.000		
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (BanGub)	2.200.000.000		
Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	4.000.000.000	4.000.000.000	DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	1.000.000.000	1.000.000.000	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Penyusunan sistem informasi/data base jalan	50.000.000	100.000.000	DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Penyusunan sistem informasi/data base jembatan	50.000.000		
Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Penyusunan sistem informasi/data base jalan	200.000.000	200.000.000	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Pembangunan gedung workshop	3.110.000.000	12.380.000.000	DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Pengadaan alat-alat berat	8.090.000.000		
	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	430.000.000		
	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	750.000.000		
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	250.000.000	250.000.000	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	60.000.000	17.601.233.000	DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	6.000.000.000		
	Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air	400.000.000		
	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	2.000.000.000		
	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun	500.000.000		
	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun (DAK)	3.424.233.000		
	Pembangunan sumber daya air dan irigasi (WISMP)	817.000.000		
	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (Bangub)	4.400.000.000		
Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya	1.000.000.000	1.000.000.000	DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Pengembangan distribusi air minum	900.000.000	2.200.000.000	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum	1.200.000.000		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	100.000.000		
Program pengendalian banjir	Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir pengendali banjir	500.000.000	13.500.000.000	DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	4.000.000.000		
	Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir pengendali banjir (Bangub)	9.000.000.000		
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	6.910.000.000	10.700.442.000	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	700.442.000		
	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur (Bangub)	3.090.000.000		
Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan	1.243.270.000	23.587.744.000	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	10.000.000.000		
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan	5.000.000.000		
	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	500.000.000		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK)	2.050.656.000		
	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan (DAK)	1.496.500.000		
	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (DAK)	3.297.318.000		
Perhubungan				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000	2.437.953.000	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.830.000.000		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	5.000.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	11.560.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	292.752.000		
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	4.840.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	23.777.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	149.024.000		

Program Prioritas	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	5.000.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.000.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	25.000.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	77.000.000		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pembangunan gedung kantor	3.000.000.000	4.185.000.000	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	700.000.000		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	20.000.000		
	Pengadaan peralatan gedung kantor	20.000.000		
	Pengadaan mebeleur	20.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	125.000.000		
	Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung	250.000.000		
Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	60.000.000	60.000.000	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	40.000.000	40.000.000	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25.000.000	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	50.000.000	1.760.000.000	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan	290.000.000		
	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	100.000.000		
	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	20.000.000		
	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	400.000.000		
	Peningkatan Pengelolaan Perparkiran	900.000.000		
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	50.000.000	650.000.000	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	100.000.000		
	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	500.000.000		
Program peningkatan pelayanan angkutan	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	20.000.000	225.000.000	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamatan penumpang	15.000.000		
	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	100.000.000		
	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	25.000.000		
	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	50.000.000		
	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	15.000.000		
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Pembangunan gedung terminal	2.000.000.000	2.600.000.000	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pembangunan terminal wisata	100.000.000		
	Pembangunan Jalan Akses Terminal	500.000.000		

Program Prioritas	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	800.000.000	2.139.337.000	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pengadaan marka jalan	500.000.000		
	Pengadaan pagar pengaman jalan	200.000.000		
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas/Marka Jalan/Pagar Pengaman Jalan	100.000.000		
	Pengadaan marka jalan (DAK)	367.261.000		
	Pengadaan pagar pengaman jalan (DAK)	172.076.000		
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	20.000.000	265.000.000	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	245.000.000		
Kependudukan dan Catatan Sipil				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000	511.967.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	192.000.000		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	25.178.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	15.500.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	65.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	35.789.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.000.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.000.000		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	4.000.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	52.500.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100.000.000		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000.000	10.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0	548.125.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	77.525.000		
	Pengadaan mebeleur	36.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	29.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	255.600.000		
	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	150.000.000		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	60.000.000	60.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	780.300.000	2.745.300.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	15.000.000		
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	1.580.000.000		
	Sosialisasi kebijakan kependudukan	180.000.000		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	40.000.000		
	Fasilitasi Pelayanan Pencatatan Sipil	150.000.000		
Ketenagakerjaan				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	5.500.000	617.500.000	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	150.000.000		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12.000.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	40.000.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	90.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	35.000.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.000.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.000.000		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	15.000.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.000.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	100.000.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100.000.000		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pembangunan gedung kantor	300.000.000	1.100.000.000	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Pengadaan peralatan gedung kantor	350.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	200.000.000		
	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	200.000.000		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	25.000.000	25.000.000	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Program Prioritas	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	100.000.000	8.860.000.000	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	700.000.000		
	Peningkatan Produktivitas Sektor Formal dan Informal	60.000.000		
	Penguatan Ekonomi Masyarakat Di Lingkungan IHT Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Wirausaha dan Padat Karya	8.000.000.000		
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	75.000.000	230.000.000	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	60.000.000		
	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	20.000.000		
	Pembinaan Lembaga Ketenagakerjaan	75.000.000		
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Penyusunan data base tenaga kerja daerah	400.000.000	33.700.000.000	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT	8.000.000.000		
	Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan Bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau Melalui Pengadaan Peralatan Ketrampilan	5.000.000.000		
	Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan Bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau Melalui Pengadaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	300.000.000		
	Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan Bagi Tenaga Kerja IHT Melalui Rehabilitasi Sedang/Berat Sarpras BLK	10.000.000.000		
	Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan Bagi Tenaga Kerja IHT Melalui Perluasan Lahan BLK	10.000.000.000		
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	3.500.000	589.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	175.000.000		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	15.000.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	20.000.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	170.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	35.500.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.000.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	35.000.000		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	12.500.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.000.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	18.000.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	80.000.000		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0	278.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	Pengadaan peralatan gedung kantor	45.000.000		
	Pengadaan mebeleur	80.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	80.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	8.000.000		
	Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung	40.000.000		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000.000	10.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	15.000.000	15.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	50.000.000	70.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah	20.000.000		
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	0	325.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	25.000.000		
	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT	300.000.000		
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	15.000.000	15.000.000	KECAMATAN BAE
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	15.000.000	15.000.000	KECAMATAN DAWA

Program Prioritas	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	15.000.000	15.000.000	KECAMATAN GEBOG
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	17.500.000	17.500.000	KECAMATAN JATI
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	15.000.000	15.000.000	KECAMATAN JEKULO
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	15.000.000	15.000.000	KECAMATAN KALIWUNGU
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	15.000.000	15.000.000	KECAMATAN KOTA
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	15.000.000	15.000.000	KECAMATAN MEJOBBO
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	15.000.000	15.000.000	KECAMATAN UNDAAN
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	0	1.760.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	10.000.000		
	Penguatan Ekonomi Masyarakat Di Lingkungan IHT Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	1.750.000.000		
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	50.000.000	610.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	200.000.000		
	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	350.000.000		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	10.000.000		
Penanaman Modal				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	3.500.000	804.500.000	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	42.500.000		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	40.000.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	55.000.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	150.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	65.500.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	300.000.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.000.000		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	3.000.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9.000.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	45.000.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	90.000.000		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan peralatan gedung kantor	155.000.000	305.000.000	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
	Pengadaan mebeleur	50.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100.000.000		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	15.000.000	15.000.000	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	100.000.000	875.000.000	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
	Pengembangan potensi unggulan daerah	275.000.000		
	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	175.000.000		
	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	25.000.000		
	Penyelenggaraan pameran investasi	300.000.000		
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	30.000.000	580.000.000	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	150.000.000		
	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	200.000.000		
	Kajian Kebijakan penanaman modal	100.000.000		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	100.000.000		
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	193.000.000	7.081.135.000	SEKRETARIAT DAERAH
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	2.750.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	2.100.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	540.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	4.500.000		

Program Prioritas	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.700.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	2.250.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.017.500.000		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7.200.000		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	20.000.000		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	24.500.000		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	5.500.000		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	6.000.000		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4.000.000		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	10.000.000		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12.000.000		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	7.200.000		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2.000.000		
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	940.000.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	15.000.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8.000.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5.000.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4.000.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	9.500.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.300.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.200.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.000.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	537.500.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	57.000.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	19.980.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	41.000.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	9.000.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	27.000.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	30.000.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	40.200.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	15.642.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	15.353.000		
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15.000.000		
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	5.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	105.500.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	19.500.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	17.500.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	9.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	12.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	10.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	13.500.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	22.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	12.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	11.500.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	375.000.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.000.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	28.360.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9.000.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.000.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.000.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	26.000.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.000.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.000.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.500.000		

Program Prioritas	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	73.500.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13.000.000		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	296.000.000		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	2.500.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	63.500.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.750.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.500.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	16.000.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60.000.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.400.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.750.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	555.000.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	110.000.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	26.855.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	7.000.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	9.000.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	11.000.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	25.000.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	20.500.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	10.000.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	15.000.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	380.500.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50.000.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	58.705.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	65.000.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	30.000.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	30.000.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40.000.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	49.000.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	94.900.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25.000.000		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pembangunan gedung kantor	0	17.676.855.000	SEKRETARIAT DAERAH
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	11.671.500.000		
	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	631.250.000		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	511.250.000		
	Pengadaan peralatan gedung kantor	353.250.000		
	Pengadaan peralatan gedung kantor	150.000.000		
	Pengadaan peralatan gedung kantor	20.000.000		
	Pengadaan mebeleur	126.400.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	1.061.250.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.085.250.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	200.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.205.250.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	15.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	19.500.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	26.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	29.955.000		

Program Prioritas	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	18.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	27.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	45.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	45.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	23.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	179.250.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.500.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	221.250.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	2.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	25.000.000	150.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	50.000.000		
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	75.000.000		
Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	460.000.000	460.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	50.000.000	57.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7.500.000		
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	430.000.000	2.470.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	1.500.000.000		
	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	20.000.000		
	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	30.000.000		
	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	100.000.000		
	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	30.000.000		
	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	360.000.000		
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	penyusunan standar satuan harga	100.000.000	500.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	100.000.000		
	sensus baran milik daerah	300.000.000		
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	40.000.000	40.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah di bidang hukum	260.000.000	260.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	265.000.000	1.331.960.000	SEKRETARIAT DAERAH
	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	300.000.000		
	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	40.960.000		
	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	60.000.000		
	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	199.000.000		
	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	75.000.000		
	Publikasi peraturan perundang-undangan	92.000.000		
	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	300.000.000		
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	200.000.000	700.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	350.000.000		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	150.000.000		
Program Pengembangan Pembiayaan Koperasi dan Peningkatan BUMD	Monitoring dan Evaluasi Perusda	30.000.000	30.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	100.000.000	1.778.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	203.000.000		
	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	50.000.000		
	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	125.000.000		

Program Prioritas	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
	Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000.000		
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	85.000.000	585.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	Penyampaian Ketentuan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat Yang Bertujuan Agar Masyarakat Mengetahui, Memahami, dan Mematuhi Ketentuan di Bidang Cukai	500.000.000		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	SEKRETARIAT DPRD
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Pembahasan rancangan peraturan daerah	1.110.360.000	10.847.200.000	SEKRETARIAT DPRD
	Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama	105.525.000		
	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	206.330.000		
	Rapat-rapat paripurna	294.493.000		
	Kegiatan Reses	643.350.000		
	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	102.220.000		
	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	8.384.922.000		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000	584.388.000	DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	16.000.000		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	60.000.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	30.000.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	127.888.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	70.000.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.000.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	5.000.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.500.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	70.000.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	150.000.000		
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		
Pengadaan peralatan gedung kantor		105.464.000		
Pengadaan mebeleur		5.500.000		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		135.000.000		
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur		3.000.000		
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	45.000.000	2.211.429.000	DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	211.374.000		
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	80.383.000		
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	109.753.000		
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	35.919.000		
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	207.000.000		
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	63.000.000		
	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	45.000.000		
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah	1.096.000.000		
	Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan APBD	50.000.000		
Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah	75.000.000			
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	20.000.000	20.000.000	DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	4.000.000	439.000.000	INSPEKTORAT
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	61.000.000		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	17.000.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12.000.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	82.708.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	50.000.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.000.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000		

Program Prioritas	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
	Penyediaan peralatan rumah tangga	20.000.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.500.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	50.000.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100.792.000		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	35.000.000	435.000.000	INSPEKTORAT
	Pengadaan peralatan gedung kantor	165.000.000		
	Pengadaan mebeleur	35.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	40.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	160.000.000		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	INSPEKTORAT
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	700.000.000	1.105.000.000	INSPEKTORAT
	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	175.000.000		
	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	90.000.000		
	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	140.000.000		
Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	135.000.000	135.000.000	INSPEKTORAT
Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	335.000.000	335.000.000	INSPEKTORAT
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	90.000.000	90.000.000	INSPEKTORAT
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	61.500.000	541.355.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	25.000.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5.000.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	105.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	52.000.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	92.855.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	125.000.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	70.000.000		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pembangunan gedung kantor	0	500.675.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	Pengadaan peralatan gedung kantor	46.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	45.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	150.000.000		
	Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung	11.000.000		
	Pembangunan bangunan pelengkap Gedung Kantor	200.000.000		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	55.000.000	115.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	60.000.000		
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	138.625.000	888.625.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	750.000.000		
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	1.249.560.000	1.758.760.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	Seleksi penerimaan calon PNS	100.000.000		
	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	160.000.000		
	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	150.000.000		
	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	24.200.000		
	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	50.000.000		
	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	25.000.000		
Program Pendidikan Kedinasan	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	1.400.000.000	1.400.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Pemulangan pegawai yang pensiun	125.000.000	302.470.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	Pemindahan tugas PNS	8.470.000		
	Pemberian penghargaan PHD yang Purna Tugas	169.000.000		
Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan mesin/kartu absensi	210.000.000	3.865.560.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	3.655.560.000		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	21.000.000	1.718.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	300.000.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	115.700.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	220.000.000		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	230.000.000		

Program Prioritas	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	75.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	87.500.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	98.000.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.800.000		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	50.000.000		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	70.000.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	50.000.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	180.000.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	200.000.000		
Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	250.000.000	250.000.000	SEKRETARIAT DPRD
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pembangunan gedung kantor	3.500.000.000	5.787.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	60.000.000		
	Pengadaan peralatan gedung kantor	86.000.000		
	Pengadaan mebeleur	15.000.000		
	Pembangunan bangunan pelengkap gedung kantor	1.500.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	95.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	320.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	6.500.000		
	Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung	17.500.000		
	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	187.000.000		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	20.000.000	175.000.000	SEKRETARIAT DPRD
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	155.000.000		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000	156.400.000	KECAMATAN BAE
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	35.000.000		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	5.000.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.000.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	40.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	10.000.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.000.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.500.000		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	8.200.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.200.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	22.000.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	9.000.000		

Program Prioritas	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	47.850.000	346.640.000	KECAMATAN BAE
	Pengadaan peralatan gedung kantor	58.150.000		
	Pengadaan mebeleur	52.700.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	7.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	57.000.000		
	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	100.000.000		
	Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung	3.940.000		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	5.000.000	5.000.000	KECAMATAN BAE
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.000.000	3.000.000	KECAMATAN BAE
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	10.000.000	10.000.000	KECAMATAN BAE
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	2.130.000	167.226.000	KECAMATAN DAWE
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	55.000.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	21.980.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	40.512.000		
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	5.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	6.000.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.559.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.988.000		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	4.685.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	7.124.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	14.248.000		
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		
Pengadaan peralatan gedung kantor		95.800.000		
Pengadaan mebeleur		78.900.000		
Pembangunan bangunan pelengkap gedung kantor		12.300.000		
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		27.000.000		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		44.235.000		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		55.000.000		
Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung		1.440.000		
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor		195.000.000		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	5.000.000	5.000.000	KECAMATAN DAWE
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.000.000	3.000.000	KECAMATAN DAWE
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	9.000.000	9.000.000	KECAMATAN DAWE
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000	189.338.000	KECAMATAN GEBOG
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	30.000.000		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	5.500.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5.000.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	67.838.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	12.000.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.000.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.500.000		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	6.000.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.500.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	28.000.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20.000.000		
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pembangunan gedung kantor		
Pengadaan perlengkapan gedung kantor		51.963.600		
Pengadaan peralatan gedung kantor		166.614.000		
Pengadaan mebeleur		15.922.400		
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		13.000.000		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		26.000.000		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		35.000.000		

Program Prioritas	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	50.000.000		
	Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung	5.440.000		
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	7.500.000	7.500.000	KECAMATAN GEBOG
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.000.000	3.000.000	KECAMATAN GEBOG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	1.060.000	110.060.000	KECAMATAN JATI
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	26.500.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8.000.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	25.000.000		
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	4.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	7.000.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.000.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.000.000		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	3.000.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.500.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	16.000.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	8.000.000		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	25.500.000	495.380.000	KECAMATAN JATI
	Pengadaan peralatan gedung kantor	110.150.000		
	Pengadaan mebeleur	48.350.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	29.940.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	75.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.000.000		
	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	200.000.000		
	Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung	1.440.000		
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	8.000.000	8.000.000	KECAMATAN JATI
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.000.000	3.000.000	KECAMATAN JATI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	3.800.000	205.709.000	KECAMATAN JEKULO
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36.493.000		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4.000.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	11.000.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	60.000.000		
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	9.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	15.320.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.250.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	7.000.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.308.000		
	Penyediaan bahan logistik kantor	2.000.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	21.538.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	13.000.000		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	11.100.000	365.251.000	KECAMATAN JEKULO
	Pengadaan peralatan gedung kantor	102.000.000		
	Pengadaan mebeleur	118.400.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	13.782.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	29.600.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	38.569.000		
	Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung	1.800.000		
	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	50.000.000		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.000.000	3.000.000	KECAMATAN JEKULO
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	11.250.000	11.250.000	KECAMATAN JEKULO
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	4.000.000	135.690.000	KECAMATAN KALIWUNGU
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	27.000.000		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	5.000.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5.000.000		

Program Prioritas	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	52.690.000		
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	5.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	8.500.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.000.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.000.000		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	3.000.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	9.800.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	4.700.000		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	60.000.000	394.000.000	KECAMATAN KALIWUNGU
	Pengadaan peralatan gedung kantor	77.500.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	5.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	6.500.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	27.500.000		
	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	200.000.000		
	Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung	3.000.000		
	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	14.500.000		
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	2.400.000	2.400.000	KECAMATAN KALIWUNGU
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.000.000	3.000.000	KECAMATAN KALIWUNGU
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000	198.660.000	KECAMATAN KOTA
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	42.150.000		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	8.000.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8.000.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	60.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.010.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.000.000		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	9.500.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	20.000.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	4.000.000		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	83.000.000	516.940.000	KECAMATAN KOTA
	Pengadaan peralatan gedung kantor	63.900.000		
	Pengadaan mebeleur	36.600.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	50.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	62.000.000		
	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	190.000.000		
	Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung	1.440.000		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	5.000.000	5.000.000	KECAMATAN KOTA
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.000.000	3.000.000	KECAMATAN KOTA
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	10.000.000	10.000.000	KECAMATAN KOTA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000	219.000.000	KECAMATAN MEJOBLO
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	22.000.000		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	9.000.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4.000.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	65.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	14.000.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.000.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.000.000		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	4.000.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.000.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	37.000.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	48.000.000		

Program Prioritas	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	50.000.000	402.000.000	KECAMATAN MEJOBO
	Pengadaan peralatan gedung kantor	35.000.000		
	Pengadaan mebeleur	26.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	20.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	31.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	55.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	8.000.000		
	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	30.000.000		
	Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung	2.000.000		
	Pembangunan bangunan pelengkap Gedung Kantor	145.000.000		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.000.000	3.000.000	KECAMATAN MEJOBO
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	10.000.000	10.000.000	KECAMATAN MEJOBO
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	2.200.000	199.000.000	KECAMATAN UNDAAN
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	35.000.000		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4.400.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8.500.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	38.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	10.000.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13.500.000		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	7.500.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.700.000		
	Penyediaan bahan logistik kantor	2.200.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	31.500.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	27.500.000		
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		
Pengadaan peralatan gedung kantor		119.250.000		
Pengadaan mebeleur		13.000.000		
Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung		2.750.000		
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		13.500.000		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		16.500.000		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		24.200.000		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.000.000	3.000.000
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	13.200.000	13.200.000	KECAMATAN UNDAAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	520.000	126.565.000	KELURAHAN KAJEKSAN
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8.800.000		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2.500.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.170.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	88.875.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	5.000.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.600.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.700.000		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	1.400.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.500.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	8.500.000		
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pembangunan gedung kantor		
Pengadaan peralatan gedung kantor		32.000.000		
Pengadaan mebeleur		3.600.000		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		12.000.000		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		5.420.000		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.000.000	2.000.000	KELURAHAN KAJEKSAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	240.000	72.910.000	KELURAHAN KERJASAN
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.600.000		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2.500.000		

Program Prioritas	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	600.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	43.080.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	5.320.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.150.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.000.000		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	750.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.380.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	7.290.000		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pembangunan gedung kantor	100.000.000	131.300.000	KELURAHAN KERJASAN
	Pengadaan peralatan gedung kantor	4.500.000		
	Pengadaan mebeleur	5.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	11.800.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	6.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.000.000		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.000.000	2.000.000	KELURAHAN KERJASAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000	89.350.000	KELURAHAN MLATI KIDUL
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7.500.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	800.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	52.750.000		
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	1.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	7.300.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.000.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.500.000		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	2.000.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.500.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	9.500.000		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pembangunan gedung kantor	100.000.000	154.000.000	KELURAHAN MLATI KIDUL
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0		
	Pengadaan peralatan gedung kantor	29.500.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12.500.000		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.000.000	2.000.000	KELURAHAN MLATI KIDUL
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000	117.000.000	KELURAHAN MLATI NOROWITO
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	9.498.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	1.720.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	54.712.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	16.000.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.000.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.750.000		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	2.000.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.320.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	15.500.000		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pembangunan gedung kantor	100.000.000	151.000.000	KELURAHAN MLATI NOROWITO
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	27.000.000		
	Pengadaan peralatan gedung kantor	5.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	6.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	8.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.000.000		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.000.000	2.000.000	KELURAHAN MLATI NOROWITO
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	552.000	87.500.000	KELURAHAN PANJUNAN
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	11.000.000		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	7.000.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.880.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	31.475.000		

Program Prioritas	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
	Penyediaan alat tulis kantor	14.700.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.083.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.750.000		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	2.750.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.160.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	7.150.000		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pembangunan gedung kantor	100.000.000	158.000.000	KELURAHAN PANJUNAN
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	33.150.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	14.850.000		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.000.000	2.000.000	KELURAHAN PANJUNAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	500.000	79.340.000	KELURAHAN PURWOSARI
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	9.000.000		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	6.000.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.750.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	40.840.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	6.500.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.000.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.000.000		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	1.000.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.750.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	6.000.000		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pembangunan gedung kantor	100.000.000	175.372.000	KELURAHAN PURWOSARI
	Pengadaan peralatan gedung kantor	28.487.000		
	Pengadaan mebeleur	18.325.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.560.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	8.000.000		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.000.000	2.000.000	KELURAHAN PURWOSARI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	1.500.000	76.080.000	KELURAHAN SUNGGINGAN
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	22.000.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.000.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	17.580.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	6.500.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.000.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	3.500.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	9.000.000		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	7.000.000	60.900.000	KELURAHAN SUNGGINGAN
	Pengadaan peralatan gedung kantor	3.000.000		
	Pengadaan mebeleur	25.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	11.900.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	10.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.000.000		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.000.000	2.000.000	KELURAHAN SUNGGINGAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	770.000	37.909.000	KELURAHAN WERGU KULON
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8.900.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	700.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	11.989.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	4.000.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.200.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.000.000		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	850.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.500.000		

Program Prioritas	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
	Penyediaan makanan dan minuman	6.000.000		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pembangunan gedung kantor	100.000.000	212.010.000	KELURAHAN WERGU KULON
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	11.800.000		
	Pengadaan peralatan gedung kantor	11.565.000		
	Pengadaan mebeleur	9.700.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	72.945.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	4.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2.000.000		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.000.000	2.000.000	KELURAHAN WERGU KULON
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8.000.000	93.300.000	KELURAHAN WERGU WETAN
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2.500.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.000.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	40.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	5.500.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.500.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.000.000		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	8.800.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.000.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	19.000.000		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pembangunan gedung kantor	100.000.000	129.500.000	KELURAHAN WERGU WETAN
	Pengadaan mebeleur	11.500.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	10.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3.000.000		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.000.000	2.000.000	KELURAHAN WERGU WETAN
Industri				
Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Penguatan Ekonomi Masyarakat Di Lingkungan IHT Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Industri Berbasis Teknologi	10.000.000.000	10.000.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	75.000.000	450.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	125.000.000		
	Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan Kadar TAR dan Nikotin Rendah Melalui Penerapan Good Manufacturing Practises (GMP)	150.000.000		
	penyediaan sarana informasi komoditi unggulan	100.000.000		
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	0	350.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	Pengembangan Sarana Laboratorium Uji dan Pengembangan Metode Pengujian	350.000.000		
Program Penataan Struktur Industri	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri	73.000.000	1.073.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	Penguatan Ekonomi Masyarakat di lingkungan industri Hasil Tembakau Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembinaan keterampilan industri hulu hilir (DBH-CHT)	1.000.000.000		
Prioritas II				
Perumahan				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	6.050.000	1.714.982.000	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	138.957.000		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	8.712.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	42.350.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.197.900.000		
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	39.930.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	48.400.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	23.958.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	16.335.000		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	48.400.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	13.310.000		

Program Prioritas	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
	Penyediaan makanan dan minuman	58.080.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	72.600.000		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1.168.000.000	4.869.965.000	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	43.560.000		
	Pengadaan peralatan gedung kantor	118.470.000		
	Pengadaan mebeleur	37.026.000		
	Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung	18.150.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60.500.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2.995.677.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	9.680.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	9.680.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	15.972.000		
	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	242.000.000		
	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	151.250.000		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	42.350.000	42.350.000	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan pakaian kerja lapangan	121.000.000	121.000.000	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	30.250.000	30.250.000	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Program Pengembangan Perumahan	Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM)	50.000.000	4.296.814.000	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan	50.000.000		
	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	150.000.000		
	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	1.060.000.000		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	50.000.000		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman (DAK)	2.936.814.000		
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	400.000.000	400.000.000	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat	40.000.000	40.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam	30.000.000	30.000.000	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran	50.000.000	2.000.000.000	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	10.500.000		
	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	1.284.500.000		
	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	370.000.000		
	Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	40.000.000		
	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	100.000.000		
	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	135.000.000		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	10.000.000		
Program pengelolaan areal pemakaman	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	2.226.936.000	2.321.936.000	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	95.000.000		
Penataan Ruang				
Program Perencanaan Tata Ruang	Penyusunan rencana teknis ruang kawasan	300.000.000	1.000.000.000	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	700.000.000		
Program Perencanaan Tata Ruang	Penetapan kebijakan tentang RDRTR, RTRK, dan RTBL	100.000.000	530.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	50.000.000		
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW	300.000.000		
	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	80.000.000		
Program Pemanfaatan Ruang	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	50.000.000	100.000.000	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	50.000.000		
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang	300.000.000	350.000.000	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	Pengawasan pemanfaatan ruang	50.000.000		
Perencanaan Pembangunan				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36.000.000	421.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	15.000.000		

Program Prioritas	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	35.000.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	75.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	35.000.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.000.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.000.000		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	3.500.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.000.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	35.000.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	140.000.000		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	75.000.000	335.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Pengadaan peralatan gedung kantor	85.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	175.000.000		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	50.000.000	50.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program Kerjasama Pembangunan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	75.000.000	75.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	100.000.000	100.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	200.000.000	200.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan rancangan RKPD	200.000.000	785.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	150.000.000		
	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	140.000.000		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	125.000.000		
	Penyusunan KUA/PPAS dan perubahan KUA/PPAS	170.000.000		
Program perencanaan pembangunan ekonomi	Penyusunan indikator ekonomi daerah	75.000.000	400.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	250.000.000		
	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	75.000.000		
Program perencanaan sosial budaya	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	140.000.000	295.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Koordinasi penanggulangan kemiskinan kabupaten (Bangub)	75.000.000		
	Fasilitasi pasca Pendidikan Untuk Semua (Bangub)	35.000.000		
	Bantuan pengawasan peredaran garam tidak beryodium dalam rangka penanggulangan GAKY di kabupaten/kota (Bangub)	45.000.000		
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air WISMP	60.000.000	145.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	85.000.000		
Program pengembangan penelitian daerah	Pengkajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan	150.000.000	725.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Pengembangan kreatifitas dan inovasi teknologi	200.000.000		
	Penguatan sistem inovasi daerah (SIDa)	100.000.000		
	Penyusunan dan pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	275.000.000		
Program Pengembangan data/informasi	Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	140.000.000	220.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Penyusunan profile daerah	80.000.000		
Program Pengembangan data/informasi	Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	50.000.000	150.000.000	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	100.000.000		
Program perencanaan pembangunan daerah	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	50.000.000	50.000.000	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Koordinasi perencanaan penanganan perumahan	300.000.000	300.000.000	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Program perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	200.000.000	200.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Program Kerjasama Pembangunan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	15.000.000	45.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	Koordinasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	30.000.000		
Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana	100.000.000	100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Lingkungan Hidup				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	4.000.000	289.100.000	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	70.000.000		

Program Prioritas	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	5.000.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	40.000.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	47.100.000		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.000.000		
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	7.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	10.000.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.000.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.000.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	11.000.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	70.000.000		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	1.322.500.000	1.625.900.000	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
	Pengadaan peralatan gedung kantor	50.000.000		
	Pengadaan mebeleur	40.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	96.400.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.000.000		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20.000.000	20.000.000	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan pakaian kerja lapangan	20.000.000	20.000.000	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	505.259.000	2.111.880.000	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
	Pengkajian dampak lingkungan	611.000.000		
	Koordinasi penyusunan AMDAL	20.000.000		
	Koordinasi Penilaian Kota Sehat (DAK)	387.805.000		
	Penerapan Manajemen Limbah Industri Hasil Tembakau yang mengacu kepada Analisis Dampak Lingkungan (DBHCHT)	200.000.000		
	Pemantauan kualitas lingkungan (DAK)	387.816.000		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	20.000.000	20.000.000	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	583.500.000	2.812.229.000	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	810.913.000		
	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber Sumber Air (Bangub)	1.030.000.000		
	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan (DAK)	387.816.000		
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Rehabilitasi hutan dan lahan	141.896.000	141.896.000	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	175.000.000	275.000.000	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
	Pengembangan data dan informasi lingkungan	100.000.000		
Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Pengujian emisi kendaraan bermotor	17.000.000	117.000.000	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
	Pengujian emisi akibat aktivitas industri	0		
	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	0		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	100.000.000		
Program Peningkatan Kemampuan Kelembagaan dan SDM di Bidang LH	Peningkatan SDM Pengelola Lingkungan Hidup	168.995.000	168.995.000	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	4.093.520.000	23.511.682.000	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	600.000.000		
	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	5.738.245.000		
	Kerjasama pengelolaan persampahan	3.067.797.000		
	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	204.800.000		
	Pembangunan sarana dan prasarana persampahan	9.807.320.000		

Program Prioritas	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Penataan RTH	8.661.570.000	11.884.847.000	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	Pemeliharaan RTH	3.148.277.000		
	Pengawasan dan pengendalian RTH	75.000.000		
Pertanahan				
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	110.000.000	110.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	20.000.000	20.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	12.200.000	12.200.000	KELURAHAN WERGU KULON
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1.940.000.000	1.940.000.000	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	6.275.000.000	6.275.000.000	DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah	691.220.000	4.837.988.000	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah	604.325.000		
	Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah	3.059.775.000		
	Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	482.668.000		
Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal	50.000.000	50.000.000	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	440.000.000	440.000.000	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	240.000.000	290.000.000	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	25.000.000		
	Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak	25.000.000		
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	95.000.000	95.000.000	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan usaha bagi perempuan (DBHCHT)	3.000.000.000	3.000.000.000	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Program Pemberdayaan Perempuan di Pedesaan	Pembinaan Organisasi Perempuan	10.652.000	10.652.000	KELURAHAN SUNGGINGAN
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	160.000.000	682.500.000	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	22.000.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	110.000.000		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	150.000.000		
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	25.500.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	50.000.000		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	130.000.000			
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	165.000.000	1.477.500.000	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
	Pengadaan peralatan gedung kantor	40.000.000		
	Pengadaan mebeleur	15.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	90.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	400.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	7.500.000		
Pembangunan bangunan pelengkap Gedung Kantor	760.000.000			
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	100.000.000	100.000.000	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15.000.000	15.000.000	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Program Keluarga Berencana	Pelayanan KIE	1.700.000.000	2.100.000.000	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
	Pembinaan Keluarga Berencana	300.000.000		
	Pembinaan Kelompok Tribina dan UPPKS	100.000.000		
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	175.000.000	175.000.000	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Program Pelayanan Kontrasepsi	Pengadaan alat kontrasepsi	100.000.000	250.000.000	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
	Pelayanan KB medis operasi	150.000.000		
Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	100.000.000	100.000.000	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Sosial				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000	353.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

Program Prioritas	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	30.000.000		DAERAH
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	30.000.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	35.000.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	40.000.000		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	45.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24.000.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.000.000		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	2.500.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.000.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	20.000.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	75.000.000		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	20.000.000	20.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0	220.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	35.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	25.000.000		
	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	100.000.000		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000.000	10.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	60.000.000	60.000.000	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	60.000.000	560.000.000	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	50.000.000		
	Pendataan PMKS	400.000.000		
	Operasional Hibah Bansos	50.000.000		
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	135.000.000	135.000.000	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	60.000.000	60.000.000	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	60.000.000	365.000.000	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	185.000.000		
	Operasional Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	20.000.000		
	Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)	100.000.000		
Program Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama *	Konsultasi dan Penyaluran tokoh-tokoh beragama	123.500.000	350.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	Fasilitasi Pelaksanaan Hisab dan Rukyat	100.000.000		
	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	126.500.000		
Program Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama	Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran	10.000.000	10.000.000	KECAMATAN BAE
Program Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama	Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran	25.810.000	25.810.000	KECAMATAN DAWE
Program Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama	Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran	20.000.000	20.000.000	KECAMATAN GEBOG
Program Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama	Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran	15.000.000	15.000.000	KECAMATAN JATI
Program Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama	Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran	19.000.000	19.000.000	KECAMATAN JEKULO
Program Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama	Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran	10.000.000	10.000.000	KECAMATAN KALIWUNGU
Program Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama	Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran	21.000.000	21.000.000	KECAMATAN KOTA
Program Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama	Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran	25.000.000	25.000.000	KECAMATAN MEJOBBO
Program Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama	Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran	15.000.000	15.000.000	KECAMATAN UNDAAN
Kebudayaan				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	4.000.000	890.671.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	150.000.000		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	35.000.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	35.000.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	235.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	40.000.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	191.771.000		

Program Prioritas	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	55.000.000		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	15.000.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9.900.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	30.000.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	90.000.000		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	27.999.000	293.329.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Pengadaan peralatan gedung kantor	30.000.000		
	Pengadaan mebeleur	30.130.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	80.200.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	125.000.000		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	30.000.000	30.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000.000	10.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Program Pengembangan Nilai Budaya	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	500.000.000	575.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	75.000.000		
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	50.000.000	1.095.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	80.000.000		
	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	300.000.000		
	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	80.000.000		
	Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	80.000.000		
	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	55.000.000		
	Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala	50.000.000		
	Peningkatan Pengelolaan Museum Kretek	400.000.000		
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	250.000.000	300.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	50.000.000		
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	50.000.000	825.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Pengembangan Sarana Prasarana Situs Patiyam	600.000.000		
	Pengembangan Taman Budaya	175.000.000		
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	15.000.000	15.000.000	KECAMATAN BAE
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	20.000.000	20.000.000	KECAMATAN GEBOG
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	10.000.000	10.000.000	KECAMATAN JATI
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	26.133.000	26.133.000	KECAMATAN DAWU
	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	0		
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	17.000.000	17.000.000	KECAMATAN JEKULO
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	2.000.000	2.000.000	KECAMATAN KALIWUNGU
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	20.000.000	20.000.000	KECAMATAN KOTA
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	25.000.000	25.000.000	KECAMATAN MEJOBLO
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	42.350.000	42.350.000	KECAMATAN UNDAAN
Kepemudaan dan Olah Raga				
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Pendataan potensi kepemudaan	40.000.000	133.500.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan	22.000.000		
	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	27.500.000		
	Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat	16.500.000		
	Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda	27.500.000		
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	88.000.000	335.950.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda	163.350.000		
	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	27.500.000		
	Pameran prestasi hasil karya pemuda	57.100.000		
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	36.300.000	72.600.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	Pelatihan keterampilan bagi pemuda	36.300.000		

Program Prioritas	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	55.000.000	157.300.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	Sosialisasi Bahaya Merokok	102.300.000		
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	131.142.000	1.216.050.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	46.200.000		
	Peningkatan kebugaran jasmani dan rekreasi	50.116.000		
	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	820.622.000		
	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	56.870.000		
	Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga	100.100.000		
	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	11.000.000		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga	17.441.000.000	17.950.000.000	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	509.000.000		
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pembinaan Organisasi kepemudaan	17.000.000	17.000.000	KECAMATAN BAE
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pembinaan Organisasi kepemudaan	4.000.000	4.000.000	KECAMATAN DAWE
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pembinaan Organisasi kepemudaan	15.000.000	15.000.000	KECAMATAN GEBOG
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pembinaan Organisasi kepemudaan	17.000.000	17.000.000	KECAMATAN JATI
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pembinaan Organisasi kepemudaan	17.000.000	17.000.000	KECAMATAN JEKULO
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pembinaan Organisasi kepemudaan	14.000.000	14.000.000	KECAMATAN KALIWUNGU
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pembinaan Organisasi kepemudaan	22.000.000	22.000.000	KECAMATAN KOTA
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	15.000.000	15.000.000	KECAMATAN KOTA
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pembinaan Organisasi kepemudaan	27.000.000	27.000.000	KECAMATAN MEJOBLO
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pembinaan Organisasi kepemudaan	15.000.000	15.000.000	KECAMATAN UNDAAN
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pembinaan Organisasi kepemudaan	7.000.000	7.000.000	KELURAHAN KAJEKSAN
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pembinaan Organisasi kepemudaan	5.000.000	5.000.000	KELURAHAN KERJASAN
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pembinaan Organisasi kepemudaan	2.500.000	2.500.000	KELURAHAN MLATI KIDUL
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pembinaan Organisasi kepemudaan	6.000.000	6.000.000	KELURAHAN MLATI NOROWITO
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pembinaan Organisasi kepemudaan	8.000.000	8.000.000	KELURAHAN PANJUNAN
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pembinaan Organisasi kepemudaan	3.000.000	3.000.000	KELURAHAN PURWOSARI
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pembinaan Organisasi kepemudaan	4.000.000	4.000.000	KELURAHAN SUNGGINGAN
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pembinaan Organisasi kepemudaan	2.000.000	2.000.000	KELURAHAN WERGU KULON
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pembinaan Organisasi kepemudaan	3.750.000	3.750.000	KELURAHAN WERGU WETAN
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	1.000.000	1.000.000	KELURAHAN WERGU WETAN
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	340.000	83.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA, DAN POLITIK
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	13.000.000		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2.000.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5.000.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	28.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	7.000.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.000.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	700.000		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	200.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.760.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	6.000.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	15.000.000		
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan peralatan gedung kantor		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		50.000.000		
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur		6.000.000		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	3.000.000	3.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA, DAN POLITIK
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8.000.000	8.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA, DAN POLITIK
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	0	200.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA, DAN POLITIK
	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	0		
	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	200.000.000		

Program Prioritas	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	100.000.000	730.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA, DAN POLITIK
	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	630.000.000		
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	200.000.000	250.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA, DAN POLITIK
	Pembinaan Ormas/LSM	50.000.000		
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	130.000.000	130.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA, DAN POLITIK
Program pengembangan wawasan kebangsaan	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	200.000.000	550.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA, DAN POLITIK
	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	250.000.000		
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	100.000.000		
Program pendidikan politik masyarakat	Penyuluhan kepada masyarakat	75.000.000	125.000.000	KANTOR KESATUAN BANGSA, DAN POLITIK
	koordinasi forum-forum diskusi politik	50.000.000		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000	490.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	20.000.000		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	10.000.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	50.000.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	70.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	25.000.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9.000.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.500.000		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	125.000.000		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	10.000.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000		
	Penyediaan bahan logistik kantor	5.000.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	40.000.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	120.000.000		
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pembangunan gedung kantor		
Pengadaan peralatan gedung kantor		50.000.000		
Pengadaan mebeleur		35.000.000		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		35.000.000		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		240.000.000		
Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100.000.000	220.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Pengadaan pakaian kerja lapangan	120.000.000		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	150.000.000	200.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	25.000.000		
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	25.000.000		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000.000	10.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	650.000.000	1.985.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	85.000.000		
	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	250.000.000		
	pengendalian keamanan lingkungan	1.000.000.000		
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan	250.000.000	450.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Pemberantasan barang kena cukai ilegal	200.000.000		
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	25.000.000	50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	25.000.000		
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	100.000.000	1.750.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam	300.000.000		
	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam	550.000.000		
	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	300.000.000		
	Penyiapan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana	400.000.000		
	Fasilitasi Pendampingan mental korban bencana	50.000.000		
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	50.000.000		

Program Prioritas	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana	Perbaikan Fasilitas Publik Akibat Bencana	300.000.000	680.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Perbaikan Fasilitas Penduduk Akibat Bencana	300.000.000		
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	30.000.000		
	Pelatihan teknis penilaian kerusakan, kerugian dan kajian kebutuhan pasca bencana	50.000.000		
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	200.000.000	200.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	130.000.000	130.000.000	KECAMATAN BAE
Program pengembangan wawasan kebangsaan	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	5.000.000	5.000.000	KECAMATAN BAE
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	120.000.000	120.000.000	KECAMATAN DAWE
Program pengembangan wawasan kebangsaan	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	3.500.000	3.500.000	KECAMATAN DAWE
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	6.500.000	6.500.000	KECAMATAN DAWE
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	123.000.000	123.000.000	KECAMATAN GEBOG
Program pengembangan wawasan kebangsaan	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	5.000.000	5.000.000	KECAMATAN GEBOG
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	7.000.000	7.000.000	KECAMATAN GEBOG
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	130.000.000	130.000.000	KECAMATAN JATI
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	14.000.000	14.000.000	KECAMATAN JATI
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	118.568.000	118.568.000	KECAMATAN JEKULO
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	10.000.000	10.000.000	KECAMATAN JEKULO
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	127.000.000	127.000.000	KECAMATAN KALIWUNGU
Program pengembangan wawasan kebangsaan	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	5.000.000	5.000.000	KECAMATAN KALIWUNGU
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	31.200.000	31.200.000	KECAMATAN KALIWUNGU
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	230.000.000	230.000.000	KECAMATAN KOTA
Program pengembangan wawasan kebangsaan	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	15.000.000	15.000.000	KECAMATAN KOTA
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	98.000.000	98.000.000	KECAMATAN MEJOBBO
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	40.000.000	40.000.000	KECAMATAN MEJOBBO
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	123.200.000	123.200.000	KECAMATAN UNDAAN
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	69.300.000	69.300.000	KECAMATAN UNDAAN
Program pengembangan wawasan kebangsaan	Fasilitasi Peningkatan Pengembangan Nasionalisme Kebangsaan	170.000.000	170.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	pengendalian keamanan lingkungan	18.625.000	18.625.000	KELURAHAN KAJEKSAN
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	pengendalian keamanan lingkungan	17.000.000	17.000.000	KELURAHAN KERJASAN
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	pengendalian keamanan lingkungan	19.950.000	19.950.000	KELURAHAN MLATI KIDUL
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	pengendalian keamanan lingkungan	12.500.000	12.500.000	KELURAHAN MLATI NOROWITO
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	pengendalian keamanan lingkungan	8.750.000	8.750.000	KELURAHAN PANJUNAN
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	pengendalian keamanan lingkungan	19.600.000	19.600.000	KELURAHAN PURWOSARI
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	pengendalian keamanan lingkungan	18.400.000	18.400.000	KELURAHAN SUNGGINGAN
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	pengendalian keamanan lingkungan	11.700.000	11.700.000	KELURAHAN WERGU KULON
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	pengendalian keamanan lingkungan	12.650.000	12.650.000	KELURAHAN WERGU WETAN
Ketahanan Pangan				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000	380.000.000	KANTOR KETAHANAN PANGAN
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	22.000.000		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	22.000.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5.000.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	85.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	14.000.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.000.000		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	85.000.000		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	5.000.000		

Program Prioritas	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	35.000.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	80.000.000		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan mebeleur	80.000.000	320.000.000	KANTOR KETAHANAN PANGAN
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	80.000.000		
	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	150.000.000		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000.000	10.000.000	KANTOR KETAHANAN PANGAN
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	15.000.000	30.000.000	KANTOR KETAHANAN PANGAN
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	15.000.000		
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan	225.000.000	1.210.000.000	KANTOR KETAHANAN PANGAN
	Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan	35.000.000		
	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	60.000.000		
	Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan	60.000.000		
	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	100.000.000		
	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	150.000.000		
	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	50.000.000		
	Pengembang Lumbung Pangan Desa	130.000.000		
	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	120.000.000		
	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	100.000.000		
	Pembinaan Gabungan Kelompok Tani	125.000.000		
	Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian	40.000.000		
	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pasca Panen	15.000.000		
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	60.000.000	370.000.000	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	25.000.000		
	Fasilitasi Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	285.000.000		
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri	165.000.000	215.000.000	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
	Fasilitasi Desa Berkembang	50.000.000		
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri	280.000.000	280.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	350.000.000	1.025.000.000	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
	Pemberian stimulan pembangunan desa	300.000.000		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	35.000.000		
	Pengembangan dan Promosi Pengenalan Alat Teknologi Tepat Guna	150.000.000		
	Revitalisasi Posyandu	90.000.000		
	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	100.000.000		
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Pengklasifikasian Data	115.000.000	115.000.000	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	650.000.000	650.000.000	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	250.000.000	250.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	435.000.000	695.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	260.000.000		
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	35.000.000	35.000.000	KECAMATAN BAE
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	15.000.000	25.000.000	KECAMATAN BAE
	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	10.000.000		
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	7.000.000	92.000.000	KECAMATAN BAE
	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	12.000.000		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	73.000.000		
Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Pembinaan Organisasi Perempuan	37.000.000	37.000.000	KECAMATAN BAE
Program Fasilitasi Kegiatan Sosial	Fasilitasi Kegiatan Sosial	3.000.000	3.000.000	KECAMATAN BAE
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	41.190.000	41.190.000	KECAMATAN DAWA
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	10.476.000	10.476.000	KECAMATAN DAWA

Program Prioritas	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	25.000.000	93.500.000	KECAMATAN DAWE
	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	13.500.000		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	55.000.000		
Program Fasilitasi Kegiatan Sosial	Fasilitasi Kegiatan Sosial	3.000.000	3.000.000	KECAMATAN DAWE
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Pembinaan Organisasi Perempuan	7.500.000	7.500.000	KECAMATAN DAWE
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	30.000.000	30.000.000	KECAMATAN GEBOG
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	6.000.000	15.000.000	KECAMATAN GEBOG
	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	9.000.000		
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	15.000.000	80.000.000	KECAMATAN GEBOG
	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	25.000.000		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	40.000.000		
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Pembinaan Organisasi Perempuan	15.000.000	15.000.000	KECAMATAN GEBOG
Program Fasilitasi Kegiatan Sosial	Fasilitasi Kegiatan Sosial	3.000.000	3.000.000	KECAMATAN GEBOG
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	47.500.000	47.500.000	KECAMATAN JATI
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	5.000.000	15.800.000	KECAMATAN JATI
	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	10.800.000		
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	15.000.000	15.000.000	KECAMATAN JATI
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	7.000.000	64.000.000	KECAMATAN JATI
	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	7.000.000		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	50.000.000		
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Pembinaan Organisasi Perempuan	25.000.000	25.000.000	KECAMATAN JATI
Program Fasilitasi Kegiatan Sosial	Fasilitasi Kegiatan Sosial	6.000.000	6.000.000	KECAMATAN JATI
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	48.108.000	48.108.000	KECAMATAN JEKULO
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	8.400.000	20.900.000	KECAMATAN JEKULO
	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	12.500.000		
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	12.000.000	87.600.000	KECAMATAN JEKULO
	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	12.000.000		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	63.600.000		
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Pembinaan Organisasi Perempuan	29.000.000	29.000.000	KECAMATAN JEKULO
Program Fasilitasi Kegiatan Sosial	Fasilitasi Kegiatan Sosial	3.000.000	3.000.000	KECAMATAN JEKULO
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	20.000.000	20.000.000	KECAMATAN KALIWUNGU
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	10.000.000	10.000.000	KECAMATAN KALIWUNGU
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	6.000.000	6.000.000	KECAMATAN KALIWUNGU
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	4.500.000	29.500.000	KECAMATAN KALIWUNGU
	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	5.000.000		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	20.000.000		
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Pembinaan Organisasi Perempuan	10.000.000	10.000.000	KECAMATAN KALIWUNGU
Program Fasilitasi Kegiatan Sosial	Fasilitasi Kegiatan Sosial	3.000.000	3.000.000	KECAMATAN KALIWUNGU
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	18.000.000	38.000.000	KECAMATAN KOTA
	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	20.000.000		
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	15.000.000	115.000.000	KECAMATAN KOTA
	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	30.000.000		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	70.000.000		
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Pembinaan Organisasi Perempuan	38.000.000	38.000.000	KECAMATAN KOTA
Program Fasilitasi Kegiatan Sosial	Fasilitasi Kegiatan Sosial	3.000.000	3.000.000	KECAMATAN KOTA
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	35.000.000	35.000.000	KECAMATAN KOTA
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	17.000.000	32.000.000	KECAMATAN MEJOBLO
	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	15.000.000		
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	15.000.000	85.000.000	KECAMATAN MEJOBLO

Program Prioritas	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	20.000.000		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	50.000.000		
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Pembinaan Organisasi Perempuan	40.000.000	40.000.000	KECAMATAN MEJOBO
Program Fasilitasi Kegiatan Sosial	Fasilitasi Kegiatan Sosial	3.000.000	3.000.000	KECAMATAN MEJOBO
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	35.000.000	35.000.000	KECAMATAN MEJOBO
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	13.200.000	26.400.000	KECAMATAN UNDAAN
	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	13.200.000		
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	10.000.000	85.500.000	KECAMATAN UNDAAN
	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	10.000.000		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	65.500.000		
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Pembinaan Organisasi Perempuan	30.000.000	30.000.000	KECAMATAN UNDAAN
Program Fasilitasi Kegiatan Sosial	Fasilitasi Kegiatan Sosial	3.000.000	3.000.000	KECAMATAN UNDAAN
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	40.000.000	40.000.000	KECAMATAN UNDAAN
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	20.000.000	20.000.000	KELURAHAN KAJEKSAN
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	2.000.000	44.000.000	KELURAHAN KAJEKSAN
	Pemberian stimulan pembangunan desa	40.000.000		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	2.000.000		
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Pembinaan Organisasi Perempuan	7.000.000	7.000.000	KELURAHAN KAJEKSAN
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	19.010.000	19.010.000	KELURAHAN KERJASAN
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	2.000.000	54.500.000	KELURAHAN KERJASAN
	Pemberian stimulan pembangunan desa	50.000.000		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	2.500.000		
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Pembinaan Organisasi Perempuan	8.000.000	8.000.000	KELURAHAN KERJASAN
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	30.000.000	30.000.000	KELURAHAN MLATI KIDUL
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	3.000.000	30.000.000	KELURAHAN MLATI KIDUL
	Pemberian stimulan pembangunan desa	24.000.000		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	3.000.000		
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Pembinaan Organisasi Perempuan	8.000.000	8.000.000	KELURAHAN MLATI KIDUL
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	30.000.000	30.000.000	KELURAHAN PANJUNAN

Program Prioritas	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	2.000.000	62.000.000	KELURAHAN PANJUNAN
	Pemberian stimulan pembangunan desa	60.000.000		
Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Pembinaan Organisasi Perempuan	10.000.000	10.000.000	KELURAHAN PANJUNAN
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	57.000.000	57.000.000	KELURAHAN PURWOSARI
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	1.500.000	38.000.000	KELURAHAN PURWOSARI
	Pemberian stimulan pembangunan desa	35.000.000		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1.500.000		
Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Pembinaan Organisasi Perempuan	11.000.000	11.000.000	KELURAHAN PURWOSARI
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	56.800.000	56.800.000	KELURAHAN SUNGGINGAN
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	4.000.000	46.500.000	KELURAHAN SUNGGINGAN
	Pemberian stimulan pembangunan desa	40.000.000		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	2.500.000		
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	46.461.000	46.461.000	KELURAHAN WERGU KULON
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	3.000.000	22.500.000	KELURAHAN WERGU KULON
	Pemberian stimulan pembangunan desa	19.000.000		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	500.000		
Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Pembinaan Organisasi Perempuan	10.000.000	10.000.000	KELURAHAN WERGU KULON
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	30.000.000	30.000.000	KELURAHAN WERGU WETAN
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	3.000.000	43.000.000	KELURAHAN WERGU WETAN
	Pemberian stimulan pembangunan desa	40.000.000		
Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Pembinaan Organisasi Perempuan	10.000.000	10.000.000	KELURAHAN WERGU WETAN
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	50.000.000	50.000.000	KELURAHAN MLATI NOROWITO
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	3.000.000	40.500.000	KELURAHAN MLATI NOROWITO
	Pemberian stimulan pembangunan desa	36.000.000		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1.500.000		
Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Pembinaan Organisasi Perempuan	9.500.000	9.500.000	KELURAHAN MLATI NOROWITO
Statistik				
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	350.000.000	350.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kearsipan				
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Pembangunan data base informasi kearsipan	90.000.000	573.700.000	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	Pengadaan sarana penyimpanan	50.000.000		
	Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan	27.500.000		
	Penyelamatan dokumen arsip penting pada SKPD	406.200.000		
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	33.000.000	71.500.000	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	38.500.000		
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	47.000.000	197.000.000	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	150.000.000		
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	110.000.000	110.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	30.000.000	30.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Komunikasi dan Informatika				
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	1.000.000.000	1.938.000.000	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Pengadaan alat studio dan komunikasi	538.000.000		
	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	100.000.000		
	Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informasi	300.000.000		
Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	121.060.000	121.060.000	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	30.000.000	30.000.000	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program kerjasama informasi dan media massa	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	300.000.000	470.000.000	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	120.000.000		
	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	50.000.000		
Program kerjasama informasi dan media massa	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	50.000.000	50.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	50.000.000	142.373.000	SEKRETARIAT DAERAH
	Pengadaan alat studio dan komunikasi	92.373.000		

Program Prioritas	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
Program kerjasama informasi dan media massa	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Program kerjasama informasi dan media massa	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	175.000.000	175.000.000	SEKRETARIAT DPRD
Perpustakaan				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000	315.500.000	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	50.000.000		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	45.000.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	15.000.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	47.000.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	23.500.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17.000.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25.000.000		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	9.000.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.000.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	34.000.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	35.000.000		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pembangunan gedung kantor	0	316.000.000	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	25.000.000		
	Pengadaan peralatan gedung kantor	35.000.000		
	Pengadaan mebeleur	25.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	116.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	92.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.000.000		
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	8.000.000			
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	20.000.000	20.000.000	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	35.000.000	210.000.000	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	75.000.000		
	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan	100.000.000		
Pertanian				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000	590.798.000	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	160.000.000		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	20.000.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	60.000.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	71.910.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	18.808.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19.080.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	10.000.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.000.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	118.000.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	90.000.000		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pembangunan gedung kantor	50.000.000	361.146.000	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	45.000.000		
	Pengadaan peralatan gedung kantor	25.000.000		
	Pengadaan mebeleur	30.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	121.146.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10.000.000		
	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	50.000.000		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	107.000.000	107.000.000	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000.000	10.000.000	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	100.000.000	1.825.000.000	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Program Prioritas	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
	Primatani	125.000.000		KEHUTANAN
	Rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT)	400.000.000		
	Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman Pangan	495.000.000		
	Pembinaan Gapoktan Penerima PUAP	50.000.000		
	Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	280.000.000		
	Optimalisasi Lahan	200.000.000		
	Penyusunan Nilai Tukar Petani	175.000.000		
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	51.256.000	4.148.256.000	DINAS PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN
	Pembangunan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani	3.189.000.000		
	Pembangunan/rehabilitasi Jalan Produksi	908.000.000		
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	100.000.000	165.000.000	DINAS PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN
	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	25.000.000		
	Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam	40.000.000		
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	50.000.000	1.433.850.000	DINAS PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN
	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	120.000.000		
	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	100.000.000		
	Peningkatan pengelolaan balai benih pertanian	50.000.000		
	Pemberdayaan P3A (WISMP)	113.850.000		
	Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan alat/mesin pertanian	1.000.000.000		
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	150.000.000	566.600.000	DINAS PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN
	Penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	416.600.000		
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Pendataan masalah peternakan	25.000.000	65.000.000	DINAS PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN
	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	20.000.000		
	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	10.000.000		
	Peningkatan Pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan	10.000.000		
Program peningkatan produksi hasil peternakan	Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat	15.000.000	5.140.000.000	DINAS PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN
	Pengembangan agribisnis peternakan	15.000.000		
	Peningkatan pengelolaan rumah potong hewan	50.000.000		
	Peningkatan Pengelolaan IB	60.000.000		
	Penguatan Ekonomi Masyarakat Di Lingkungan IHT Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Bibit Ternak	5.000.000.000		
Program pengembangan jaringan irigasi pertanian	Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi tanah dangkal (DAK)	4.063.000.000	14.214.500.000	DINAS PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN
	Pompanisasi untuk pertanian (DAK)	250.000.000		
	Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi permukaan (DAK)	1.383.500.000		
	Rehabilitasi jaringan irigasi tersier (DAK)	5.384.000.000		
	Pengembangan jaringan irigasi tersier (DAK)	3.134.000.000		
Kehutanan				
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pengembangan hutan tanaman	100.000.000	400.000.000	DINAS PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN
	Pengembangan hasil hutan non-kayu	300.000.000		
Program rehabilitasi hutan dan lahan	Peningkatan pecan serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	100.000.000	1.473.444.000	DINAS PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN
	One Billion Indonesian Trees (OBIT)	25.000.000		
	Pengembangan Hutan Rakyat dan Pengkayaan Vegetatif	710.790.000		
	Pembangunan Konservasi Tanah (KTA) berupa Dam Pengendali jurang/embung air/teras Rehabilitasi dan konservasi kawasan muria	387.654.000 250.000.000		
Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan	50.000.000	50.000.000	DINAS PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan	194.736.000	194.736.000	DINAS PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Energi dan Sumberdaya Mineral				
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Pengawasan dan pengendalian air tanah	150.000.000	950.000.000	DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Pembangunan sumur dalam	800.000.000		
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan/KWh Meter	5.000.000.000	35.000.000.000	DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Program Prioritas	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
	Pembayaran Langganan Lampu Penerangan	30.000.000.000		
Mitigasi Bencana Alam Tanah Longsor	Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian Bencana Alam Tanah Longsor	150.000.000	150.000.000	DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Pariwisata				
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	25.000.000	775.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	50.000.000		
	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	200.000.000		
	Peningkatan Pengelolaan UPTD Obyek Wisata Colo	500.000.000		
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengembangan objek pariwisata unggulan	600.000.000	7.211.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	6.400.000.000		
	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	175.000.000		
	Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi	36.000.000		
Program Pengembangan Kemitraan	Pengembangan dan penguatan,informasi dan database	50.000.000	495.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	125.000.000		
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	300.000.000		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	20.000.000		
Kelautan dan Perikanan				
Program pengembangan budidaya perikanan	Pembinaan dan pengembangan perikanan	50.000.000	2.050.000.000	DINAS PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN
	Penguatan Ekonomi Masyarakat Di Lingkungan IHT Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Usaha Perikanan	2.000.000.000		
Program peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	47.100.000	47.100.000	DINAS PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Program peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	273.000.000	273.000.000	DINAS PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Program peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya	1.884.570.000	1.884.570.000	DINAS PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Perdagangan				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	2.692.000	2.511.282.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	592.328.000		
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	16.154.000		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	14.808.000		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	877.032.000		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	393.090.000		
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	9.476.000		
	Penyediaan alat tulis kantor	24.985.000		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	320.902.000		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.461.000		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	26.924.000		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.654.000		
	Penyediaan makanan dan minuman	123.850.000		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	96.926.000		
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	125.000.000	964.502.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR
	Pengadaan peralatan gedung kantor	50.000.000		
	Pengadaan mebeleur	15.141.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	95.000.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60.361.000		
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	4.000.000		
	Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung	615.000.000		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	30.000.000	30.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000.000	10.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Rakor Ekuinda	35.000.000	504.994.000	SEKRETARIAT DAERAH
	Operasional Raskin	469.994.000		
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	100.000.000	300.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR
	operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah	50.000.000		
	Penyelenggaraan Pasar Murah	150.000.000		

Program Prioritas	Outcome	Standar Belanja	Pagu Program	SKPD
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Pengenbangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	0	915.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR
	Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor	30.000.000		
	Pembangunan promosi perdagangan internasional	680.000.000		
	Promosi Perdagangan Regional	175.000.000		
	Pembinaan SDM Usaha Perdagangan	30.000.000		
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional	230.000.000	49.025.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR
	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	48.500.000.000		
	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	190.000.000		
	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negri	30.000.000		
	Monitoring Perkembangan Harga	50.000.000		
	Pendampingan Pemanfaatan Resi Gudang	25.000.000		
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan	50.000.000	9.000.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR
	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	450.000.000		
	Penguatan Ekonomi Masyarakat Di Lingkungan IHT Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pengelolaan Pedagang Kaki Lima	8.500.000.000		
Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Penguatan Ekonomi masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	525.000.000	525.000.000	DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR
Ketransmigrasian				
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	100.000.000	100.000.000	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TOTAL			979.492.327.000	

Tabel 4.4
Penetapan Alokasi Dana Pagu Indikatif
Kabupaten Kudus

Tahun: 2016 - Murni

Nomor	Prioritas Pembangunan Daerah	Pagu Indikatif RPJMD (Rp)	Pagu Indikatif RKPD (Rp)	Selisih (Rp)	%	Ket.
1	Prioritas I	459.857.112.000	697.716.119.000	237.859.007.000	51,72	
2	Prioritas II	193.718.690.000	281.776.208.000	88.057.518.000	45,46	
T O T A L		653.575.802.000	979.492.327.000	325.916.525.000	49,87	

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Program prioritas daerah disusun dengan mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta target RPJMD Kabupaten Kudus pada tahun 2016. Program Prioritas merupakan program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Suatu program prioritas pada prinsipnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu : Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah; dan Program prioritas yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD.

Penyajian Program prioritas dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten. Berikut ini diuraikan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2016.

5.1 Urusan Wajib

1. Pendidikan

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator Angka Partisipasi Kasar sebesar 56%.

b. Program Wajib Belanja Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program Wajib Belanja Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator APK SD/MI/Paket A sebesar 100%; APK SMP/MTs/Paket B sebesar 100%; APM SD/MI/Paket A sebesar > 95%; APM SMP/MTs/Paket B sebesar 100%; Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun sebesar > 95%; Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun sebesar > 95%; Bangunan SD dalam kondisi baik sebesar 97,80%; Bangunan SMP kondisi baik sebesar 91,70%; Angka Putus Sekolah SD/MI sebesar 0,02%; Angka Putus Sekolah SMP/MTs sebesar 0,11%; Rata-rata Kelulusan SD/MI sebesar 99%; Rata-rata Kelulusan SMP/MTs sebesar 99%; Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs sebesar 100%; Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA sebesar 91,5%; Angka rata-rata lama sekolah SD/MI sebesar 6 tahun; Angka rata-rata lama sekolah SMP/MTs sebesar 3 tahun; rasio ketersediaan sekolah (SD/MI) terhadap penduduk usia sekolah sebesar 76,65%; rasio ketersediaan sekolah (SMP/MTs) terhadap penduduk usia sekolah sebesar 27,91%; persentase SD/MI yang mempunyai perpustakaan 88,81%; dan persentase SMP/MTs yang mempunyai perpustakaan sebesar 65,56%;

- c. Program Pendidikan Menengah
Program Pendidikan Menengah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator APK SMA/MA/SMK/Paket C sebesar 87,50%; APM SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 78%; Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 tahun sebesar 83%; Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA sebesar 0,12%; rata-rata Kelulusan SMA/SMK/MA sebesar 99,00%; Bangunan SMA/SMK kondisi baik sebesar 95,86%; Angka Rata-Rata Lama Sekolah SMA/MA sebesar 3 tahun; Angka Rata-Rata Lama Sekolah SMK sebesar 3 tahun; dan persentase SMA/MA/SMK yang mempunyai 297 perpustakaan sebesar 61,02%.
- d. Program Pendidikan Non Formal
Program Pendidikan Non Formal dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator Angka Melek Huruf sebesar 100%; dan Jumlah Desa Vokasi yang Dikembangkan sebanyak 1 desa.
- e. Program Pendidikan Luar Biasa
Program Pendidikan Luar Biasa dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator APK SD/MI/Paket A sebesar 100%; APK SMP/MTs/Paket B sebesar 100%; APM SD/MI/Paket A sebesar > 95%; APM SMP/MTs/Paket B sebesar > 95%; Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun sebesar > 95%; Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun sebesar > 95%; APK SMA/MA/SMK/Paket C sebesar 87,50%; APM SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 78%; Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 tahun sebesar 83%.
- f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator Rasio Guru/Murid SD/MI sebesar 829,68; Rasio Guru/Murid SMP/MTs sebesar 759,91; rasio Guru/Murid SMA sebesar 792,75; Guru SD yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV sebesar 60,50%; Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar 93,95%; Guru SMA yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV sebesar 94,81%; Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar 95,24%; jumlah guru TK tersertifikasi sebesar 433; jumlah guru SD tersertifikasi sebesar 2.849; jumlah guru SMP tersertifikasi sebesar 996; dan jumlah guru SMA/SMK tersertifikasi sebanyak 973 orang.
- g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator Jumlah Kegiatan Penunjang Program Pendidikan Dan Dokumen Perencanaan Pendidikan sebesar 100%; Rata-rata Nilai UN SD/MI sebesar 7,23; Rata-rata Nilai UN SMP/MTs sebesar 7,3; Rata-Rata Nilai UN SMA/MA/SMK sebesar 7,59; persentase SD/MI yang terakreditasi sebesar 100%; persentase SMP/MTs yang

terakreditasi sebesar 100%; dan persentase SMA/MA/SMK yang terakreditasi sebesar 100%.

2. Kesehatan

a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan sebesar 100%.

b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Upaya Kesehatan Masyarakat dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator Cakupan Puskesmas sebesar 211,10%; Cakupan Puskesmas Pembantu (Pustu) sebesar 28,79%; Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin sebesar 100%; Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin sebesar 100%; Cakupan Ketersediaan Alat-alat Kesehatan sebesar 100%; Rasio Puskesmas Per 100.000 Penduduk sebesar 2,40; Rasio Pustu Per 100.000 Penduduk sebesar 5,05; Angka Usia Harapan Hidup (AHH) sebesar 69,69; dan Cakupan Ketersediaan Alat-alat Kesehatan sebesar 100%.

c. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator Cakupan Desa Siaga Aktif sebesar 50%; Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat sebesar 100%; dan Rasio Posyandu Per Satuan Balita sebesar 48.

d. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan sebesar 100%, Cakupan Pemberian MP-ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin sebesar 100%, Prevalensi Balita Gizi Buruk sebesar 0,72; dan Prevalensi Balita Gizi Kurang sebesar 5,70.

e. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator Cakupan Penduduk Menggunakan Air Bersih sebesar 87%; Cakupan Penduduk yang Menggunakan Jamban Sehat sebesar 78%; Cakupan Tempat Umum yang Memenuhi Syarat Kesehatan sebesar 78%; Cakupan Rumah Sehat sebesar 79%; dan Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan yang Memenuhi Syarat Kesehatan sebesar 77%.

f. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program Pengembangan Lingkungan Sehat dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) sebesar 100%; Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TB BTA (+) sebesar >70%; Cakupan Penemuan dan

Penanganan Penderita Penyakit DBD sebesar 100%; Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit : 1) *Acute Flacid Paralysis* (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun sebesar ≥ 2 ; 2) penemuan penderita pneumonia balita sebesar 100%; 3) penemuan penderita diare sebesar 100%; Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam sebesar 100%; angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk sebesar < 20; persentase penderita HIV AIDS yang tertangani sebesar 100%; prevalensi HIV sebesar < 9/100.000 penduduk; dan Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Tidak Menular sebesar 52%.

g. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Pengembangan Lingkungan Sehat dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator Pelayanan Perijinan Bidang Kesehatan yaitu 12 bulan; Cakupan Puskesmas yang Telah Terakreditasi sebesar 4 puskesmas; Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100.000 jumlah penduduk) sebesar 1,26; dan rasio BP/RB (klinik) per 100.000 penduduk sebesar 3,45.

h. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator Terpenuhinya Kebutuhan Sarpras Puskesmas/Pustu dan Jaringannya sebesar 100%.

i. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator Cakupan Ketersediaan Alat-alat Kesehatan sebesar 100%.

j. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator Cakupan Kunjungan Bayi sebesar 100%; dan Cakupan Pelayanan Anak Balita sebesar 85%.

k. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra Usila dan Usia Lanjut sebesar 80%.

l. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun

2016 dari indikator Persentase Industri Pengolahan Makanan yang memenuhi Syarat Kesehatan sebesar 7,92%.

- m. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup sebesar 96; cakupan kunjungan ibu hamil K4 sebesar 95,7%; cakupan pelayanan nifas sebesar 95,5%; cakupan peserta KB aktif 80%; cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 100%; cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani 100%; cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 95,5%; Cakupan kunjungan neonatal pertama sebesar 100%; dan angka kematian bayi per 1000 KH sebesar 6,7.
- n. Program Pelayanan Kesehatan BLUD
Program Pelayanan Kesehatan BLUD dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator cakupan pelayanan BLUD sebesar 100,0%.

3. Pekerjaan Umum

- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator panjang jalan kabupaten yang dibangun sepanjang 3.400 m; jumlah jembatan kabupaten yang dibangun sebanyak 1 unit; peningkatan jalan kabupaten; dan penggantian jembatan kabupaten.
- b. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator Panjang Saluran Drainase yang Dibangun sepanjang 1500m.
- c. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator panjang talud jalan kabupaten yang dibangun sepanjang 200m.
- d. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik/ sedang sebesar 68,87%; dan proporsi jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 84,02%.
- e. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator panjang talud/bronjong yang dipelihara sepanjang 1500m.

- f. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator cakupan perbaikan jalan dan jembatan akibat bencana.
- g. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator sistem informasi/database jalan dan jembatan sebesar 100%; sistem informasi data base jalan lingkungan, dan sistem informasi data base jembatan desa.
- h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator persentase alat-alat berat dalam kondisi baik sebesar 68%.
- i. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator persentase panjang saluran irigasi dalam kondisi baik sebesar 63,50%; sistem informasi/database jaringan irigasi sebesar 100%; dan luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik sebesar 65,76%.
- j. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator berfungsinya embung dan bangunan penampung air lainnya sebesar 100%; embung dan bangunan penampung air lainnya dalam kondisi baik sebesar 100%.
- k. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator cakupan pelayanan perpipaan air minum sebesar 84,61%.
- l. Program Pengendalian Banjir
Program Pengendalian Banjir dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator berfungsinya reservoir pengendali banjir sebesar 100%.
- m. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator panjang jalan yang memiliki trotoar dan

drainase/saluran pembuangan air sepanjang 17 km; dan penyediaan gedung kantor terpadu sebesar 60%.

n. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator persentase rumah tinggal bersanitasi sebesar 94,58%; panjang jalan perdesaaan yang dibangun sepanjang 171 km; jumlah jembatan perdesaaan yang dibangun sebanyak 11 unit; cakupan pelayanan jaringan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan sebesar 85%.

4. Perumahan

a. Program Pengembangan Perumahan

Program Pengembangan Perumahan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator persentase rumah layak huni sebesar 89,19%.

b. Program Lingkungan Sehat Perumahan

Program Lingkungan Sehat Perumahan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator persentase rumah tangga bersanitasi sebesar 94,58%.

c. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator fasilitasi dan replikasi PLPBK sebanyak 1 desa.

d. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah rehab rumah akibat bencana alam sebanyak 25 unit; dan persentase penyediaan sarana evakuasi sebesar 13,64%.

e. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten sebesar 100%; dan persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi sebesar 50%.

f. Program Pengelolaan Areal Pemakaman.

Program Pengelolaan Areal Pemakaman dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk sebesar 1,652.

5. Penataan Ruang

a. Program Perencanaan Tata Ruang

Program Perencanaan Tata Ruang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator

jumlah dokumen tata ruang sebanyak 3 dokumen; Jumlah dokumen tata ruang sebanyak 2 dokumen; dan Jumlah rancangan perda tata ruang sebanyak 2 buah ranperda.

b. Program Pemanfaatan Ruang

Program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah sosialisasi dan laporan pemanfaatan ruang sebanyak 2 kali; dan jumlah dokumen data pemanfaatan ruang sebanyak 1 dokumen.

c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah dokumen prosedur dan manual pengendalian tata ruang sebanyak 1 dokumen; dan jumlah koordinasi pengendalian tata ruang, manual dan laporan pengendalian pemanfaatan ruang sebanyak 4 kali.

6. Perencanaan Pembangunan

a. Program Pengembangan Data/Informasi

Program Pengembangan Data/Informasi dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator persentase keterisian data/informasi sebesar 72%.

b. Program Kerjasama Pembangunan

Program Kerjasama Pembangunan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator persentase peningkatan obyek sasaran yang ditangani sebesar 80%; dan jumlah buku laporan pelaksanaan kerjasama sebanyak 30 buah.

c. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah dokumen perencanaan pembangunan wilayah perkotaan sebanyak 1 dokumen; jumlah dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar.

d. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah aparat perencana yang meningkat kapasitasnya sebanyak 150 orang.

e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebanyak 9 dokumen; jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah sebanyak 1 dokumen; penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD sebesar 93%; jumlah dokumen Review

RPIJM sebanyak 1 dokumen; dan jumlah dokumen kinerja daerah sebanyak 1 dokumen.

- f. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi sebanyak 2 dokumen; dan jumlah klaster yang difasilitasi FEDEP sebanyak 8 klaster.
 - g. Program Perencanaan Sosial Budaya
Program Perencanaan Sosial Budaya dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah dokumen perencanaan sosial budaya sebanyak 5 dokumen.
 - h. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah sebanyak 1 dokumen; dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola sumber daya air sebesar 100%.
 - i. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah dokumen perencanaan daerah rawan bencana.
 - j. Program Pengembangan Penelitian Daerah.
Program Pengembangan Penelitian Daerah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah penelitian iptek dan inovasi daerah sebanyak 2 dokumen.
7. Perhubungan
- a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan sebesar 1,59.
 - b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah arus penumpang angkutan umum sebanyak 878.623 orang; dan persentase PKB bagi Kab/Kota yang memiliki populasi minimal 4000 KBWU sebesar 100%.
 - c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator rasio izin trayek sebesar 0,000756; persentase angkutan umum

yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten sebesar 61,19%; persentase halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek sebesar 100%; persentase angkutan darat, sebesar 16,23%; dan jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum sebanyak 35.600 orang.

- d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah terminal bus sebanyak 5 lokasi; persentase terminal angkutan penumpang pada setiap Kab/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek sebesar 100%; jumlah orang/barang melalui terminal per tahun sebanyak 1.193.707 orang.
- e. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator persentase fasilitas perlengkapan jalan pada jalan Kabupaten sebesar 78,66%; dan pemasangan rambu-rambu sebesar 5,33%.
- f. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator kepemilikan KIR angkutan umum sebesar 10,64%; persentase standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten sebesar 100%; jumlah uji KIR angkutan umum sebanyak 18.200 unit; dan lama pengujian kelayakan angkutan umum – KIR selama 35 menit.

8. Lingkungan Hidup

- a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator persentase penanganan sampah sebesar 87%; dan rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk sebesar 0,390.
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator pencegahan pencemaran air sebesar 100%; pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak sebesar 100%; pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, sebesar 100%; dan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL sebesar 100%.

- c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator meningkatnya luas tutupan lahan sebesar 0,64%; dan pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa sebesar 100%.
 - d. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air sebesar 0,35%.
 - e. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator penyediaan akses informasi lingkungan sebesar 100%.
 - f. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Program Peningkatan Pengendalian Polusi dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator pencegahan pencemaran udara dari sumber bergerak sebesar 100%.
 - g. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator proporsi RTH Publik sebesar 7%.
 - h. Program Peningkatan Kemampuan Kelembagaan dan SDM di Bidang LH.
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator meningkatnya kemampuan SDM di bidang LH sebesar 0,121.
9. Pertanahan
- a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator luas tanah bersertifikat milik Pemerintah Kabupaten seluas 1.935,195 m²; dan persentase luas lahan bersertifikat sebesar 5,45%.
 - b. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah kasus tanah Pemkab yang tertangani sebanyak 3 kasus.

- c. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator sistem informasi pertanahan sebanyak 1 dokumen.
10. Kependudukan dan Catatan Sipil
- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Program Penataan Administrasi Kependudukan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator kepemilikan e-KTP sebesar 96,70%; rasio bayi berakte kelahiran sebesar 92%; rasio pasangan berakte nikah sebesar 16%; kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 841; ketersediaan database kependudukan skala kabupaten sebesar 100%; penerapan KTP Nasional berbasis NIK sebesar 100%.
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Program Penataan Administrasi Kependudukan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 5,04%; persentase perempuan di lembaga legislative sebesar 13,33%; persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten), jumlah anggota organisasi perempuan di kecamatan yang mendapatkan penyuluhan dalam hal kesetaraan gender dan perlindungan anak dan PKK aktif.
 - b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator partisipasi perempuan di lembaga swasta (ormas, orsos) sebesar 11,77%.
 - c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator cakupan KDRT yang tertangani sebesar 100%; dan cakupan kasus kekerasan anak yang tertangani sebesar 100%.
 - d. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 94,64%.

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Program Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana dalam Pembangunan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator cakupan peserta KB aktif sebesar 83,4%; dan persentase keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera I sebesar 31,30%.

b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Program Kesehatan Reproduksi Remaja dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator cakupan PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun sebesar 1,61%.

c. Program Pelayanan Kontrasepsi

Program Pelayanan Kontrasepsi dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator cakupan pelayanan kontrasepsi (MOP/MOW) sebesar 100%.

d. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS.

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah penemuan penderita HIV AIDS sebanyak 40 orang.

13. Sosial

a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah fakir miskin yang mendapatkan pelatihan sebanyak 90 KK.

b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelatihan ketrampilan sebanyak 90 orang; jumlah PMKS yang terdata sebanyak 7000 orang.

c. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah penyandang cacat dan trauma sebanyak 25 orang.

d. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah orang terlantar dan lansia yang ditampung sebanyak 2000 orang.

- e. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah eks penyandang penyakit sosial sebanyak 80 orang.
 - f. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang menyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan sosial sebanyak 2 unit.
 - g. Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama.
Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah peserta dialog antar umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebanyak 80 orang; pelaksanaan Hisab dan Rukyat penentuan arah kiblat dan pembuatan jadwal imsakiyah dan sholat fardlu sebanyak 4 kegiatan; jumlah pengajian selapanan sebanyak 12 kegiatan; jumlah penyaluran hibah dan bansos keagamaan sebanyak 12 kegiatan; dan cakupan peserta MTQ Tingkat Kecamatan sebesar 100%.
14. Ketenagakerjaan
- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan sebesar 0,30%; dan rasio ketergantungan penduduk sebesar 45,33.
 - b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah pencari kerja terdaftar sebanyak 15.000 orang; jumlah pencari kerja ditempatkan sebanyak 4.500 orang; tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 74,42%; tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,60%; jumlah penganggur yang memperoleh pekerjaan sementara sebanyak 900 orang.
 - c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator kasus perselisihan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama sebanyak 5 kasus.

15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah UMKM sebanyak 11.947 unit; jumlah usaha mikro sebanyak 11.371 unit; jumlah usaha kecil sebanyak 444 unit; dan jumlah usaha menengah sebanyak 132 unit.
 - b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator cakupan UMKM yang difasilitasi sebesar 1,00%.
 - c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah pameran/ekspo produk UMKM sebanyak 6 kegiatan; dan jumlah UKM yang terfasilitasi dalam pameran sebanyak 72 UKM.
 - d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator persentase koperasi aktif sebesar 92%.

16. Penanaman Modal
 - a. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Program Promosi dan Kerjasama Investasi dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah investor sebanyak 15 investor; dan jumlah penerbitan ijin investasi sebanyak 48 buah.
 - b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Program Promosi dan Kerjasama Investasi dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah investor berskala nasional sebanyak 14 investor; jumlah nilai investasi berskala nasional sebesar Rp 193.775 juta; daya serap tenaga kerja sebanyak 39.083 orang; nilai realisasi PMDN Rp 9.765; dan jumlah lembaga keuangan bank/non bank sebanyak 93 buah; dan lama proses perijinan yaitu 10 hari.

17. Kebudayaan
 - a. Program Pengembangan Nilai Budaya
Program Pengembangan Nilai Budaya dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah adat dan tradisi budaya daerah yang diaktualisasi sebanyak 36 buah dan jumlah tradisi desa sebanyak 26 buah.

- b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah BCB yang direvitalisasi sebanyak 5 buah; dan jumlah seni budaya yang dilestarikan sebanyak 5 jenis; dan jumlah BCB sebanyak 158.
 - c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Program Pengelolaan Keragaman Budaya dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah pembinaan etika kepada anak sekolah dan generasi muda sebanyak 180 kegiatan; dan jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya.
 - d. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya sebanyak 7 buah; dan jumlah sarana di situs Patiayam dan Taman Budaya sebanyak 5 buah.
18. Kepemudaan dan Olahraga
- a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah kegiatan kepemudaan sebanyak 16 kegiatan.
 - b. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah organisasi pemuda sebanyak 26 buah.
 - c. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah organisasi pemuda sebanyak 26 buah.
 - d. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator kegiatan kepemudaan sebanyak 15 kegiatan.
 - e. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator kegiatan olahraga sebanyak 14 kegiatan; jumlah organisasi olahraga sebanyak 36 buah; dan jumlah klub olahraga sebanyak 132 buah.

- f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah gedung olahraga sebanyak 7 gedung; jumlah lapangan olahraga sebanyak 248 buah; jumlah gelanggang olahraga sebanyak 1 buah; jumlah balai remaja sebanyak 132 buah.
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
- a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator persentase penurunan konflik di daerah sebanyak 50%; rasio linmas per 10.000 penduduk, sebesar 50/10.000 penduduk; persentase penanganan gangguan keamanan, sebesar 75%; persentase penurunan tindak kriminalitas di daerah sebesar 75%; jumlah aduan masyarakat tiap bulan sebanyak 15 kasus; persentase pelanggaran HO, sebesar 60%; persentase pelanggaran Perda sebesar 60%; dan persentase penyelesaian pelanggaran K3 di kelurahan (di luar perda) sebesar 100%.
 - b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah pertemuan komunitas Intelejen daerah sebanyak 12 kali; jumlah demo, angka kriminalitas dan penegakan perda sebanyak 40 kali; Rasio Pol PP per 10.000 penduduk sebesar 0,7948; penurunan kasus pelanggaran perda dan kriminalitas sebesar 100%; dan cakupan patroli petugas Pol PP sebesar 100%.
 - c. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah pembinaan FKUB, FPBI dan pendidikan wawasan kebangsaan, jumlah kegiatan upacara hari besar nasional, jumlah peserta kegiatan pengembangan wasbang
 - d. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah pembinaan LSM, Ormas/OKP sebanyak 48 LSM.
 - e. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator angka kriminalitas yang tertangani.

- f. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah peserta penyuluhan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, jumlah peredaran miras dan narkoba di masyarakat sebanyak 90; persentase operasi prostitusi sebesar 5%; jumlah pengguna miras dan narkoba di masyarakat sebanyak 220 orang; dan persentase penurunan pemakai / kasus miras dan narkoba.
- g. Program Pendidikan Politik Masyarakat
 Program Pendidikan Politik Masyarakat dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu sebesar 80%; jumlah pembinaan politik daerah sebanyak 1 kali; jumlah pendidikan politik masyarakat sebanyak 3 kali; jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemilihan umum sebanyak 0; dan cakupan desa yang terpantau dalam pelaksanaan pemilu sebesar 0%.
- h. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah desa tangguh bencana sebanyak 28 desa; jumlah satgas siaga bencana sebanyak 80 orang; dan jumlah posko bencana.
- i. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana.
 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator persentase perbaikan fasilitas publik dan fasilitas penduduk akibat bencana sebesar 83,8%.
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
- a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah Perda yang ditetapkan sebanyak 18 perda.
- b. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah rapat koordinasi pimpinan, jumlah fasilitasi penerimaan kunjungan kerja, jumlah pelaksanaan kegiatan Dialog/Audiensi Bupati di Desa/Kelurahan dan persentase kelancaran pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

- c. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah dokumen standar satuan harga sebanyak 1 dokumen; persentase SKPD yang telah melakukan inventarisasi aset dengan tertib sebesar 100%; opini laporan keuangan (WTP, WDP) sebesar 100%; dan peningkatan PAD sebesar 16,16%.
- d. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator persentase tertib administrasi keuangan desa sebesar 100%; dan persentase Perdes APBDes yang tersusun sesuai regulasi sebesar 100%.
- e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah kecamatan yang tertib administrasi, persentase penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemda, persentase penyelesaian TLHP Reguler, persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Propinsi, persentase pengendalian, monev dan pelaporan kegiatan SKPD, persentase sistem informasi jasa konstruksi, fasilitasi proses pengadaan barang / jasa, lama proses perijinan Usaha Jasa Konstruksi.
- f. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang professional
- g. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator persentase terpenuhinya Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) sebesar 100%; persentase terlaksananya PMPRB persentase sebesar 100%; tersusunnya SOP sebesar 100%; persentase terlaksananya penyelenggaraan SPIP sebesar 100%;
- h. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah tanggapan masyarakat terhadap kebijakan pemkab, jumlah sosialisasi cukai melalui media

- i. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator persentase fasilitasi kerjasama antar daerah.
 - j. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan, jumlah produk hukum yang disusun dan didistribusikan, jumlah sosialisasi ketentuan cukai, jumlah SKPD yang terevaluasi kelembagaannya, dan jumlah dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi.
 - k. Program Pendidikan Kedinasan
Program Pendidikan Kedinasan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator rasio PNS yang mengikuti diklat teknis sebesar 0,83; rasio S1 terhadap jumlah pegawai sebesar 41,60; dan rasio S2/S3 terhadap jumlah pegawai sebesar 2,55.
 - l. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator rasio pejabat struktural yang mengikuti Diklatpim sebesar 9,6; dan jumlah PNS yang mengikuti diklat prajab sebanyak 226 orang.
 - m. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah SKPD yang sudah di Anjab, ABK, tersedianya Pedoman Standar Kompetensi Jabatan, jumlah SKPD yang sudah di SKM, rasio penanganan pelanggaran disiplin, dan jumlah aparatur yang terbina dikembangkan sesuai kompetensi dan prestasi.
 - n. Program Pengembangan Pembiayaan Koperasi dan Peningkatan BUMD
Program Pengembangan Pembiayaan Koperasi dan Peningkatan BUMD dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator persentase kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap BUMD sebesar 2%.
21. Ketahanan Pangan
- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator regulasi ketahanan pangan, ketersediaan pangan utama sebesar 100%; ketersediaan energi dan protein per kapita sebesar 92%; penguatan cadangan pangan sebesar 70%; ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah sebesar 95%; stabilitas harga dan pasokan pangan

sebesar 95%; skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 91; pengawasan dan pembinaan keamanan pangan sebesar 82%; dan penanganan daerah rawan pangan sebesar 69%.

22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada yaitu Desa Swadaya: sebanyak 85; Desa Swakarya sebanyak 47; Dan Desa Swasembada sebanyak 0; persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan sebesar 100%; dan cakupan RT/RW dan desa terbina sebesar 100%.

b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat sebanyak 89 buah; persentase BKM berkinerja baik sebesar 60%; jumlah kelompok binaan petani sebanyak 3 kelompok; dan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat.

c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator persentase Posyandu aktif, persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat, persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang, dan jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat.

d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah desa yang mempunyai profil desa, jumlah aparatur Pemdes yang mengikuti pelatihan / bintek, fasilitasi Pilkades, persentase desa dengan administrasi sesuai dengan ketentuan, dan cakupan aparatur desa terbina

e. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten), jumlah PKK aktif, dan rata-rata jumlah kelompok binaan PKK.

f. Program Fasilitasi Kegiatan Sosial

Program Fasilitasi Kegiatan Sosial dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah kegiatan sosial yang terfasilitasi

23. Statistik

- a. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah
Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah data/informasi statistik daerah sebanyak 7 dokumen.

24. Kearsipan

- a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator pengelolaan arsip secara baku di 17 desa.
- b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator pengelolaan arsip secara baku dan jumlah arsip kependudukan yang terdokumentasi sebanyak 5000 dokumen.
- c. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator pengelolaan arsip secara baku di 38 desa/kelurahan/SKPD; dan persentase sarana prasarana kearsipan kependudukan dalam kondisi baik sebesar 95%.
- d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator peningkatan SDM pengelola kearsipan sebanyak 60 orang.

25. Komunikasi dan Informatika

- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah yang dapat difasilitasi sebanyak 12 sistem; jumlah penelitian iptek dan inovasi daerah, jumlah sarpras pendukung dokumentasi dan publikasi sebanyak 1 unit.
- b. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator rasio wartel/warnet terhadap penduduk sebesar 0,227.

c. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah yang dapat difasilitasi sebanyak 12 sistem.

d. Program Kerjasama Informasi dan Mas Media.

Program Kerjasama Informasi dan Mas Media. dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah website milik pemerintah daerah sebanyak 18 web; jumlah surat kabar nasional dan lokal sebanyak 12 surat kabar; jumlah penyiaran radio/tv yang sesuai standar penyiaran sebanyak 24 stasiun; jumlah pameran/expo sebanyak 1 kali; diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media massa (majalah, radio, TV) sebanyak 302 kali; diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media baru (website, media online) dilakukan setiap hari; diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media tradisional (pertunjukan rakyat) sebanyak 23 kali; diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media interpersonal (ceramah, diskusi, lokakarya, sarasehan) sebanyak 4 kali di tiap kecamatan; diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media luar ruang (buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, baliho) sebanyak 12 kali; persentase cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan sebesar 100%; jumlah publikasi yang diterbitkan melalui media massa sebanyak 1 kali; jumlah publikasi kegiatan dewan sebanyak 1,500 eks; jumlah sarana media publikasi

26. Perpustakaan

a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah perpustakaan milik Pemda & Non Pemda (Perpustakaan Pemda, Umum, Sekolah, Desa, dan Perpustakaan Masyarakat) sebanyak 175 perpustakaan.

5.2 Urusan Pilihan

1. Pertanian

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator peningkatan Nilai Tukar Petani sebesar 106,51.
- b. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator cakupan produk unggulan pertanian yang difasilitasi dalam pameran sebesar 100%.
- c. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator persentase cakupan bina kelompok tani sebesar 80%.
- d. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator peningkatan produktivitas tanaman sebesar 5,90%.
- e. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator terpenuhinya sarpras penyuluhan pertanian sebesar 100%.
- f. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator cakupan kelompok tani yang mendapatkan pelayanan kesehatan ternak sebesar 80%.
- g. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator peningkatan produksi asal ternak sebanyak 4.172.484 kg.
- h. Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian
Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator cakupan irigasi sebesar 2,90%.

2. Kehutanan

- a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari

indikator jumlah pemanfaatan potensi sumber daya hutan seluas 25 ha.

- b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah rehabilitasi hutan dan lahan seluas 550 ha.
 - c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator persentase kerusakan kawasan hutan sebesar 9,5%.
 - d. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator terpenuhinya sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan sebesar 100%.
3. Energi dan Sumber Daya Mineral
- a. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB sebesar 0,03%; jumlah pertambangan berijin sebanyak 5 lokasi; dan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah sebesar 100%.
 - b. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator berfungsinya LPJU sebesar 100%; dan rasio elektrifikasi tingkat desa sebesar 100%.
 - c. Program Mitigasi Bencana Alam Tanah Longsor
Program Mitigasi Bencana Alam Tanah Longsor dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah daerah rawan bencana alam tanah longsor yang dipantau sebanyak 6 desa.
4. Pariwisata
- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator kunjungan wisata sebanyak 1.347.240 orang; perentase kenaikan PAD sektor pariwisata sebesar 7 %; jenis, kelas dan jumlah rumah makan /restoran sebesar 20,4%; dan jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel sebanyak 41%.
 - b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator

terpenuhinya kebutuhan sarpras destinasi pariwisata sebesar 100%; jumlah obyek wisata sebanyak 11 obyek; dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sebesar Rp 3.014.326 ribu.

c. Program Pengembangan Kemitraan.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator tersedianya sarpras promosi pariwisata sebesar 100%.

5. Kelautan dan Perikanan

a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program Pengembangan Budidaya Perikanan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator produksi ikan kelompok pembudidaya sebanyak 2.018 ton.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator terpenuhinya sarana dan prasarana perikanan budidaya sebesar 100%.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator terpenuhinya sarana dan prasarana perikanan tangkap sebesar 100%.

d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator terpenuhinya sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran sebesar 100%.

6. Perdagangan

a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah temuan barang/jasa yang tidak layak edar/jual sebanyak 6 temuan; jumlah pengaduan konsumen sebanyak 1 aduan; rakor Ekuinda sebanyak 2 kali; dan jumlah penerima raskin sebanyak 36.332 RTS

b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator ekspor bersih perdagangan Rp 160.019.388 juta; cakupan bina calon eksportir sebanyak 8 orang; dan jumlah peserta pameran UMKM skala regional sebanyak 15 unit.

c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap

PDRB sebanyak Rp 10.611.06 juta; cakupan pembinaan pasar tradisional sebanyak 930 pasar; persentase peningkatan PAD dari retribusi pasar sebesar 2,33%; cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal (jumlah pedagang di pasar tradisional) sebanyak 10.501 pedagang kios dan los; Jumlah pasar daerah dan pasar desa sebanyak 23 unit; dan terpenuhinya kebutuhan sarpras perdagangan sebesar 100%.

- d. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal sebanyak 1.300 PKL.
- e. Program Penguatan Ekonomi Masyarakat dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Program Penguatan Ekonomi Masyarakat dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah pedagang pasar tradisional sebanyak 10.501 pedagang kios dan los; jumlah PKL dan asongan sebanyak 1.300 PKL.

7. Industri

- a. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator cakupan IKM yang mendapatkan pelatihan dan stimulan sarana usaha sebanyak 2 IKM dan jumlah bina KUB sebanyak 50 KUB.
- b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) sebesar 0,03%; jumlah IKM yang difasilitasi dalam aksesibilitas permodalan sebanyak 20 IKM; dan kontribusi sektor industri terhadap PDRB sebesar 63%.
- c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah IKM yang difasilitasi teknologi dalam proses produksi sebanyak 5 IKM; dan jumlah Industri rokok yang telah mengujikan tar dan nikotin sebanyak 7 buah.
- d. Program Penataan Struktur Industri
Program Penataan Struktur Industri dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah kluster yang memiliki tempat pameran, dan jumlah IKM yang difasilitasi dalam pameran sebanyak 10 IKM.

8. Ketransmigrasian

a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2016 dari indikator jumlah calon transmigran terlayani sebanyak 30 KK.